



PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN

2025-2045





BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bandung adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bandung.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Bandung mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJP Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJPD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

Sistematika RPJPD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2024



BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (9/162/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, yang merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045. Substansi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 meliputi gambaran umum kondisi daerah, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok yang memuat setidaknya kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

RPJPD Kabupaten Bandung merupakan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Bandung hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045 telah selesai disusun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Melalui proses konsultasi publik yang luas, serta analisis mendalam terhadap berbagai aspek pembangunan, penulis berupaya untuk menyajikan rencana yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bandung untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Adapun Visi yang di usung pada dokumen RPJPD Kabupaten Bandung ini adalah menciptakan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan. dengan demikian, RPJPD ini diharapkan menjadi landasan bagi upaya bersama dalam membangun Kabupaten Bandung yang lebih baik, dimana setiap warga dapat menikmati kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan secara merata dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, partisipasi, dan dukungan dari semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan dokumen RPJPD ini. Semoga RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Bandung menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.

Bandung, Agustus 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	1-4
1.5 Sistematika Penulisan	1-5
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI	2-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	2-1
2.1.1.1 Posisi Strategis Kabupaten Bandung.....	2-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng	2-3
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi.....	2-5
2.1.1.4 Kondisi Geologi	2-6
2.1.1.5 Kondisi Hidrogeologi	2-9
2.1.1.6 Kondisi Cekungan Air Tanah	2-9
2.1.1.7 Kondisi Sistem Akuifer	2-12
2.1.1.8 Wilayah Resapan Air Tanah	2-14
2.1.1.9 Kondisi Pendayagunaan Air Tanah	2-15
2.1.1.10 Kondisi Air Permukaan	2-17
2.1.1.11 Kondisi Jenis Tanah	2-23
2.1.1.12 Kondisi Perubahan Iklim.....	2-24
2.1.1.13 Penggunaan Lahan.....	2-28
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah /Potensi Sumber Daya.....	2-28
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	2-46
2.1.4 Potensi Bencana di Kabupaten Bandung.....	2-48
2.1.4.1 Bencana Gempa Bumi	2-49
2.1.4.2 Bencana Banjir	2-49
2.1.4.3 Bencana Banjir Bandang.....	2-50
2.1.4.4 Bencana Tanah Longsor.....	2-50



2.1.4.5	Bencana Kekeringan.....	2-51
2.1.4.6	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	2-52
2.1.4.7	Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung).....	2-53
2.1.4.8	Bencana Letusan Gunung Api.....	2-53
2.1.4.9	Bencana Pandemi Covid-19.....	2-53
2.1.5	Demografi Wilayah.....	2-54
2.1.6	Masyarakat Adat Kabupaten Bandung.....	2-58
2.1.7	Daya Dukung Dan Daya Tampung.....	2-60
2.1.7.1	Daya Dukung Pangan.....	2-60
2.1.7.2	Daya Dukung Air.....	2-65
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	2-68
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi.....	2-68
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	2-68
2.2.1.2	Kemiskinan.....	2-70
2.2.1.3	Ketimpangan Pendapatan.....	2-71
2.2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	2-72
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	2-73
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	2-75
2.2.2.1	Pemberdayaan Perempuan.....	2-75
2.2.2.2	Kesehatan.....	2-78
2.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	2-79
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	2-79
2.3.1.1	Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial.....	2-79
2.3.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2-82
2.3.1.3	PDRB Per Kapita.....	2-85
2.3.1.4	Pengeluaran Per Kapita.....	2-86
2.3.1.5	UMKM, Koperasi, Kewirausahaan, dan Ekonomi Kreatif.....	2-86
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	2-89
2.3.2.1	Pendidikan.....	2-89
2.3.2.2	Karakteristik Pendidikan Penduduk yang Bekerja.....	2-90
2.3.2.3	Literasi/Numerasi.....	2-91
2.3.2.4	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	2-91
2.3.2.5	Tingkat Ketergantungan.....	2-91
2.3.3	Daya Saing Fasilitas /Infrastruktur Wilayah.....	2-92
2.3.3.1	Kualitas Infrastruktur.....	2-92
2.3.3.2	Kemantapan Jalan Kabupaten Bandung.....	2-93
2.3.3.3	Level of Service (LOS).....	2-93
2.3.4	Daya Saing Iklim Berinvestasi.....	2-95



2.3.4.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	2-95
2.3.4.2	Penanaman Modal.....	2-96
2.3.4.3	Proses Perizinan.....	2-98
2.3.4.4	Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dan retribusi.....	2-99
2.3.4.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	2-99
2.3.4.6	Kerukunan Umat Beragama.....	2-100
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	2-101
2.4.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	2-101
2.4.2	Reformasi Birokrasi (RB).....	2-102
2.4.3	Inovasi Daerah.....	2-102
2.4.4	Penerapan Sistem Merit.....	2-103
2.5	EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2045.....	2-103
2.5.1	Perkembangan Ekonomi Kabupaten Bandung Relatif Stabil.....	2-104
2.5.2	Struktur Ketenagakerjaan.....	2-105
2.5.3	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Membaik.....	2-106
2.5.4	Kemiskinan Dan Ketimpangan Menurun.....	2-107
2.5.5	Ketahanan Pangan Semakin Menguat.....	2-108
2.6	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	2-111
2.6.1	Proyeksi Demografi (Penduduk).....	2-111
2.6.1.1	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	2-111
2.6.1.3	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2-113
2.6.1.4	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	2-115
2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana.....	2-116
2.6.2.1	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal.....	2-116
2.6.2.2	Proyeksi Kebutuhan Air Minum.....	2-118
2.6.2.3	Proyeksi Persampahan.....	2-120
2.6.2.4	Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	2-121
2.6.2.5	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....	2-124
2.6.2.6	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.....	2-127
2.7	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN.....	2-128
2.7.1	Pusat Pertumbuhan Wilayah RTRW.....	2-128
2.7.1.1	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi.....	2-128
2.7.1.2	Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Kabupaten.....	2-135
2.7.2	Arah Kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045.....	2-142
2.7.2.1	Arah Kebijakan RPJPN.....	2-142
2.7.2.2	Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat.....	2-149
2.7.2.3	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung.....	2-150
BAB 3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	3-1



3.1	PERMASALAHAN	3-1
3.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	3-1
3.1.2	Aspek Daya Saing Ekonomi dan Investasi.....	3-1
3.1.3	Aspek Daya Saing SDM.....	3-5
3.1.4	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	3-6
3.1.5	Aspek Pelayanan Umum	3-7
3.2	ISU STRATEGIS SESUAI KONTEKS	3-7
3.2.1	Isu Global	3-7
3.2.2	Isu Strategis Nasional	3-8
3.2.3	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.....	3-10
3.2.4	Isu Strategis Kabupaten Bandung	3-12
BAB 4	VISI DAN MISI DAERAH	4-1
4.1	VISI.....	4-1
4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045	4-1
4.1.2	Visi Jawa Barat 2045.....	4-4
4.1.3	Visi Kabupaten Bandung	4-6
4.2	MISI.....	4-11
4.2.1	Misi Indonesia Emas 2045	4-11
4.2.2	Misi Provinsi Jawa Barat	4-12
4.2.3	Misi Pembangunan Kabupaten Bandung.....	4-14
BAB 5	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	5-1
5.1	ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1.1	Arah Kebijakan Pembangunan.....	5-1
5.2	SASARAN POKOK.....	5-1
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah	5-28
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	5-33
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan	5-36
BAB 6	PENUTUP	6-1
6.1	PELAKSANAAN.....	6-1
6.2	PEMBIAYAAN	6-2
6.3	PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RESIKO.....	6-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan tahun 2023	2-1
Tabel 2.2 Luas Topografi di Kabupaten Bandung.....	2-3
Tabel 2.3 Kondisi Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun Bandung tahun 2023.....	2-6
Tabel 2.4 Luas Satuan Litologi/Formasi Geologi Kabupaten Bandung	2-6
Tabel 2.5 Daftar Cekungan Air Tanah di Daerah Cekungan Bandung.....	2-9
Tabel 2.6 Luas Hidrogeologi (Tingkat Kelulusan) Kabupaten Bandung.....	2-13
Tabel 2.7 Luas Kondisi Hidrogeologi (Produktivitas Akuifer) Kabupaten Bandung	2-13
Tabel 2.8 Wilayah Resapan Air Tanah Kabupaten Bandung	2-14
Tabel 2.9 Wilayah Pendayagunaan Air Tanah Kabupaten Bandung	2-17
Tabel 2.10 Kondisi Situ dan Embung di Kabupaten Bandung	2-17
Tabel 2.11 Kondisi Danau	2-18
Tabel 2.12 Properti Waduk.....	2-19
Tabel 2.13 Kondisi Oxbow.....	2-19
Tabel 2.14 Kondisi Kolam.....	2-20
Tabel 2.15 Kondisi genangan	2-22
Tabel 2.16 Jenis Tanah di Kabupaten Bandung	2-23
Tabel 2.17 Emisi Gas Rumah Kaca.....	2-25
Tabel 2.18 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.....	2-26
Tabel 2.19 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian	2-27
Tabel 2.20 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	2-27
Tabel 2.21 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Bandung tahun 2019.....	2-28
Tabel 2.22 Luas Lahan Sawah Kabupaten Bandung Tahun 2023.....	2-29
Tabel 2.23 Perkembangan Lahan Sawah Tadah Hujan di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2023	2-30
Tabel 2.24 Perkembangan Luas lahan sawah di Kabupaten Bandung tahun 2014-2023	2-31
Tabel 2.25 Perkembangan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2022.....	2-32
Tabel 2.26 Luas Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Bandung Tahun 2022.....	2-33
Tabel 2.27 Luas Panen serta Laju Pertumbuhan Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023.....	2-34
Tabel 2.28 Jumlah Produksi serta Laju Pertumbuhan Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023.....	2-34
Tabel 2.29 Provititas serta Laju Pertumbuhan Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023.....	2-34
Tabel 2.30 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Padi	2-35
Tabel 2.31 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Jagung	2-35
Tabel 2.32 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Kedelai.....	2-35
Tabel 2.33 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Ubi Kayu	2-36
Tabel 2.34 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Ubi Jalar	2-36
Tabel 2.35 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Kacang Tanah.....	2-36
Tabel 2.36 Luas Panen Bawang Merah, Cabai Keriting, dan Cabai Rawit di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023.....	2-37
Tabel 2.37 Jumlah Produksi Bawang Merah, Cabai Keriting, dan Cabai Rawit di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023.....	2-37
Tabel 2.38 Provititas Bawang Merah, Cabai Keriting, dan Cabai Rawit di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023.....	2-37
Tabel 2.39 Performa Tiga Komoditas Sub Sektor Perkebunan	2-37
Tabel 2.40 Performa Lima Buah Sayur Tahunan.....	2-38
Tabel 2.41 Lima Kecamatan dengan Populasi Sapi Potong Terbanyak.....	2-38



Tabel 2.42 Lima Kecamatan dengan Populasi Sapi Perah Terbanyak	2-38
Tabel 2.43 Lima Kecamatan dengan Populasi Domba Terbanyak	2-38
Tabel 2.44 Lima Kecamatan dengan Populasi Kambing Terbanyak	2-39
Tabel 2.45 Lima Kecamatan dengan Populasi Ayam Ras Pedaging Terbanyak.....	2-39
Tabel 2.46 Produksi Perikanan di Kabupaten Bandung	2-39
Tabel 2.47 Jumlah RTUP di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga..	2-40
Tabel 2.48 Kelompok Tani, Jumlah Desa, dan Data Terkait di Setiap Kecamatan yang Terdapat pada Kabupaten Bandung	2-41
Tabel 2.49 Data Jumlah Destinasi dan Kunjungan Pariwisata Kabupaten Bandung tahun 2022	2-43
Tabel 2.50 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung.....	2-46
Tabel 2.51 Data Bencana di Kabupaten Bandung tahun 2017-2023 berdasarkan data BPBD	2-47
Tabel 2.52 Data Korban bencana di Kabupaten Bandung tahun 1975-2021 berdasarkan data informasi BNPB	2-47
Tabel 2.53 Jumlah Jenis Ancaman Bencana Wilayah Kabupaten Bandung.....	2-48
Tabel 2.54 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022.....	2-58
Tabel 2.55 Hubungan Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Serapan Tenaga Kerja Melalui Investasi... 2-58	
Tabel 2.56 Nilai Ketersediaan, kebutuhan, selisih, dan luas wilayah yang belum melampaui daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2022	2-63
Tabel 2.57 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air di Kabupaten Bandung.....	2-68
Tabel 2.58 Indeks Gini Tahun 2019-2023	2-72
Tabel 2.59 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023.....	2-72
Tabel 2.60 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota 2023	2-74
Tabel 2.61 Capaian Komponen IPM Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023	2-75
Tabel 2.62 Capaian Komponen-komponen Pembentuk Indeks Ketimpangan Gender Kab Bandung 2022- 2023.....	2-75
Tabel 2.63 Angka Harapan Hidup 2019-2023	2-78
Tabel 2.64 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota 2023	2-78
Tabel 2.65 Indeks LQ Kabupaten Bandung 2010-2022	2-80
Tabel 2.66 <i>Proportional</i> dan <i>Differential Share</i> Kabupaten Bandung 2010-2022	2-80
Tabel 2.67 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-82
Tabel 2.68 Nama-Nama dan Kode Sektor PDRB Lapangan Usaha.....	2-83
Tabel 2.69 Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023.....	2-83
Tabel 2.70 Persentase Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023.....	2-84
Tabel 2.71 Rata-Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023.....	2-84
Tabel 2.72 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2019-2023.....	2-85
Tabel 2.73 Pengeluaran Per kapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Tahun 2019-2023.....	2-86
Tabel 2.74 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Bandung.....	2-87
Tabel 2.75 Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.....	2-87
Tabel 2.76 Informasi Mengenai UMKM Kuliner.....	2-88
Tabel 2.77 Informasi Mengenai Volume Usaha Koperasi.....	2-88
Tabel 2.78 Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-88
Tabel 2.79 RLS dan HLS 2019-2023.....	2-89
Tabel 2.80 Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota 2023	2-90
Tabel 2.81 Distribusi Angkatan Bekerja Menurut Pendidikan 2019-2023	2-90
Tabel 2.82 Capaian dan Proyeksi IPLM Kabupaten Bandung sampai tahun 2045	2-91
Tabel 2.83 Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung	2-91
Tabel 2.84 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung 2020-2022	2-92
Tabel 2.85 <i>Level of Service</i> (LOS) Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-94
Tabel 2.86 Luasan Selisih Aktual Ideal Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2019 dan 2023	2-94



Tabel 2.87 Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-95
Tabel 2.88 Realisasi Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-96
Tabel 2.89 Proyeksi Pertumbuhan LKPM (Pesimis-Optimis)	2-96
Tabel 2.90 Realisasi Lima Sektor dengan Investasi Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023	2-96
Tabel 2.91 Realisasi Lima Kecamatan dengan Investasi Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023	2-97
Tabel 2.92 Realisasi Lima Sektor dengan Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023	2-97
Tabel 2.93 Realisasi Lima Kecamatan dengan Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023	2-97
Tabel 2.94 Realisasi Lima Sektor dengan Jumlah Proyek Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023	2-97
Tabel 2.95 Realisasi Lima Kecamatan dengan Jumlah Proyek Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023	2-98
Tabel 2.96 Data Perkembangan Jenis Izin dan Jumlah Izin Yang Terbit di Kabupaten Bandung	2-98
Tabel 2.97 Proyeksi pendapatan berdasarkan Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045	2-99
Tabel 2.98 Proyeksi Kebutuhan Pangan (Beras) Per Kapita Per Tahun	2-108
Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Produksi Pangan (Beras)	2-109
Tabel 2.100 GAP Antara Proyeksi Beras dan Kebutuhan Pangan (Beras)	2-109
Tabel 2.101 Proyeksi Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bandung sampai tahun 2045	2-111
Tabel 2.102 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	2-114
Tabel 2.103 Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Kabupaten Bandung)	2-117
Tabel 2.104 Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Kabupaten Bandung)	2-117
Tabel 2.105 Ringkasan Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Permukiman Kabupaten Bandung	2-118
Tabel 2.106 Proyeksi Kebutuhan Air tahun 2025-2045	2-118
Tabel 2.107 Wilayah Pelayanan Air di Kabupaten Bandung	2-120
Tabel 2.108 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	2-121
Tabel 2.109 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Sampah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	2-121
Tabel 2.110 Ringkasan Pembaharuan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	2-122
Tabel 2.111 Proyeksi Ketenagalistrikan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	2-123
Tabel 2.112 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	2-123
Tabel 2.113 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bandung	2-124
Tabel 2.114 Kebutuhan SDM Kesehatan	2-125
Tabel 2.115 Kebutuhan Dokter Spesialis di Kabupaten Bandung sampai tahun 2045	2-126
Tabel 2.116 Kebutuhan Ruang Kelas Kabupaten Bandung	2-127
Tabel 2.117 Proyeksi Kebutuhan SDM Pendidikan	2-127
Tabel 2.118 Strategi dan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat	2-130
Tabel 2.119 Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung	2-137
Tabel 2.120 Program Perwujudan Rencana Strategis Kabupaten Bandung	2-141
Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	4-9
Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2045	4-10
Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	5-17
Tabel 5.2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045	5-28
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	5-33
Tabel 5.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bandung dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045	5-37
Tabel 5.5 Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	5-43
Tabel 5.6 Sasaran Pokok Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	5-51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045	1-2
Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Perencanaan RPJPD dengan Dokumen lainnya	1-5
Gambar 2.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung	2-2
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung.....	2-3
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Bandung	2-5
Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bandung	2-5
Gambar 2.5 Peta Klimatologi Kabupaten Bandung	2-8
Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Bandung	2-9
Gambar 2.7 Peta CAT Kabupaten Bandung.....	2-12
Gambar 2.8 Peta Hidrogeologi Kabupaten Bandung	2-14
Gambar 2.9 Peta Hidrogeologi Dan Konservasi Air Tanah Pendahuluan	2-15
Gambar 2.10 Peta Zona Penggunaan Air Tanah.....	2-16
Gambar 2.11 Peta Penggunaan Air Tanah Kabupaten Bandung.....	2-16
Gambar 2.12 Peta Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Bandung.....	2-24
Gambar 2.13 Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor limbah	2-26
Gambar 2.14 Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor pertanian	2-26
Gambar 2.15 Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor kehutanan	2-27
Gambar 2.16 Peta Potensi sektor Pertanian di Kabupaten Bandung.....	2-30
Gambar 2.17 Pergerakan Musiman Provititas Tiga Komoditas Sayuran Buah Semusim	2-37
Gambar 2.18 Distribusi Kelompok Umur RTUP Kabupaten Bandung Tahun 2023.....	2-41
Gambar 2.19 Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan ..	2-41
Gambar 2.20 Destinasi Pariwisata Kabupaten Bandung.....	2-43
Gambar 2.21 Pengembangan Objek Wisata Unggulan Kabupaten Bandung	2-43
Gambar 2.22 Pola Persebaran Industri	2-44
Gambar 2.23 Sebaran Kontribusi PDRB industri pengolahan per-Kecamatan	2-45
Gambar 2.24 Sebaran Potensi Sub sektor Industri Dengan Sebaran PDRB Sektor C.....	2-46
Gambar 2.25 Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Bandung tahun 2017-2021.....	2-47
Gambar 2.26 Peta Titik Lokasi Kejadian Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung	2-49
Gambar 2.27 Peta Titik Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Bandung.....	2-50
Gambar 2.28 Peta Titik Lokasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung	2-51
Gambar 2.29 Peta Bahaya Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung.....	2-52
Gambar 2.30 Peta Titik Lokasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bandung.....	2-53
Gambar 2.31 Peta Lokasi Kejadian Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung	2-54
Gambar 2.32 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023	2-54
Gambar 2.33 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023	2-55
Gambar 2.34 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2023	2-56
Gambar 2.35 Komposisi Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2020 Hasil Survei Penduduk 2020	2-56
Gambar 2.36 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023.....	2-57
Gambar 2.37 Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2022	2-57
Gambar 2.38 Ketersediaan energi bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2015 dalam sistem grid 5"x5"	2-60
Gambar 2.39 Kebutuhan energi bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"	2-61
Gambar 2.40 Selisih ketersediaan energi bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"	2-62



Gambar 2.41 Nilai ambang batas penduduk terhadap penyediaan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"	2-62
Gambar 2.42 Status daya dukung penyedia bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"	2-63
Gambar 2.43 Persentase Sawah Terairi Irigasi 2017-2021	2-64
Gambar 2.44 Kebutuhan Air di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"	2-65
Gambar 2.45 Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"	2-66
Gambar 2.46 Selisih ketersediaan air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"	2-66
Gambar 2.47 Ambang batas penduduk untuk penyediaan air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"	2-67
Gambar 2.48 Status Daya Dukung terhadap penyediaan air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"	2-67
Gambar 2.49 Grafik Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2019-2023.....	2-69
Gambar 2.50 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	2-69
Gambar 2.51 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung, Provinsi dan Nasional.....	2-70
Gambar 2.52 Persentase Penduduk Miskin (P0)	2-70
Gambar 2.53 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	2-71
Gambar 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	2-73
Gambar 2.55 Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bandung	2-76
Gambar 2.56 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	2-77
Gambar 2.57 Perbandingan Angka Harapan Hidup dengan Provinsi dan Nasional 2019-2023.....	2-78
Gambar 2.58 Lima Kota/Kabupaten dengan Kontribusi PDRB Terbesar Terhadap Provinsi Jawa Barat ...	2-82
Gambar 2.59 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	2-85
Gambar 2.60 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	2-86
Gambar 2.61 Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah dengan Provinsi dan Nasional 2019-2023.....	2-89
Gambar 2.62 Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bandung tahun 2019-2023	2-92
Gambar 2.63 Jalan Mantap Infrastruktur Kabupaten Bandung tahun 2020-2023	2-93
Gambar 2.64 Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	2-100
Gambar 2.65 Jumlah Potensi Konflik Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bandung.....	2-100
Gambar 2.66 Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bandung tahun 2021-2023	2-101
Gambar 2.67 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung tahun 2019-2023.....	2-102
Gambar 2.67 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung 2023.....	2-103
Gambar 2.68 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2003 – 2022	2-104
Gambar 2.69 Perbandingan Kontribusi 4 Sektor Perekonomian Utama Kabupaten Bandung.....	2-105
Gambar 2.70 Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung	2-106
Gambar 2.71 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung, 2010 – 2023.....	2-107
Gambar 2.72 Kemiskinan dan Gini Rasio Kabupaten Bandung	2-108
Gambar 2.73 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bandung 2019-2023.....	2-110
Gambar 2.74 Skor PPH di Kabupaten Bandung 2019-2023.....	2-110
Gambar 2.75 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.....	2-112
Gambar 2.76 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.....	2-113
Gambar 2.77 Struktur Penduduk Kabupaten Bandung.....	2-115
Gambar 2.78 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Bandung 2025-2045.....	2-119
Gambar 2.79 Peta Sebaran Permukiman Kabupaten Bandung	2-136
Gambar 2.80 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Bandung.....	2-140
Gambar 2.81 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung	2-141



Gambar 2.82 Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah	2-142
Gambar 2.83 Pengembangan Kawasan Inklusif yang Mendukung Pusat Pertumbuhan	2-152
Gambar 3.1 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah tahun 2025-2045.....	3-10
Gambar 3.2 Tahapan Penentuan Isu Strategis Kabupaten Bandung	3-12
Gambar 4.1 Strategi (17 Agustus 1945) Berlandaskan Pancasila	4-2
Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas 2045	4-3
Gambar 4.2 Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045	4-5
Gambar 4.3 Visi Kabupaten Bandung tahun 2045.....	4-7
Gambar 4.4 Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Kabupaten Bandung tahun 2045.....	4-8
Gambar 4.5 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	4-12
Gambar 4.6 Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPN.....	4-14
Gambar 5.1 Tahap Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045.....	5-1
Gambar 5.2 Tahapan misi 1 meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas.....	5-3
Gambar 5.3 Tahapan misi 2 transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	5-6
Gambar 5.4 Tahapan misi 3 transformasi tata kelola.....	5-8
Gambar 5.5 Tahapan misi 4 Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah	5-9
Gambar 5.6 Tahapan misi 5 meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter	5-10
Gambar 5.7 Tahapan misi 6 mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata.....	5-11
Gambar 5.8 Tahapan misi 7 meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif.....	5-13
Gambar 5.9 Tahapan misi 8 meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan	5-14



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang menunjang Provinsi Jawa Barat dalam Pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan akan makin penting. Hal ini dapat dilihat dari posisi Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, serta memiliki berbagai peranan pada sektor perekonomian. Melalui peran tersebut nantinya Kabupaten Bandung dapat bertransformasi dalam perkembangan perekonomian yang memberikan dampak keuntungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045;

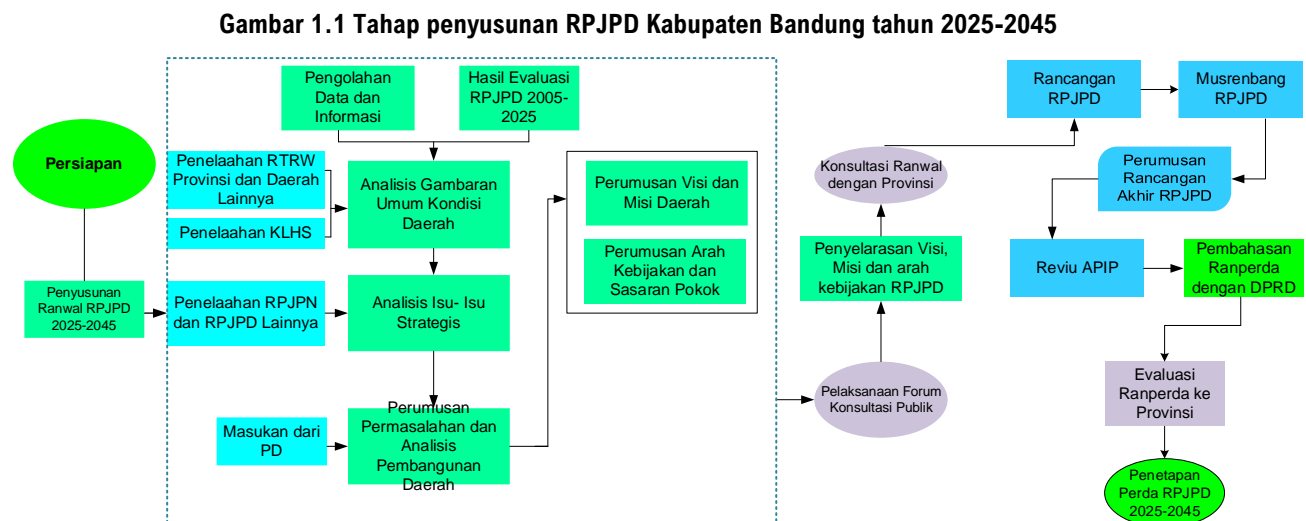
Namun dalam mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Bandung dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berasal dari berbagai sektor, seperti kualitas sumber daya dan pendidikan moral yang belum memadai; tantangan global, krisis ekonomi nasional, risiko bencana yang masih terkendala pembangunan ekonomi; tingkat produktivitas tenaga kerja; tantangan dan kendala penguatan ketahanan terhadap ketahanan keluarga, ekonomi dan pangan; ketimpangan kesejahteraan masyarakat; perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; rendahnya produktivitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan; sarana dan literasi digital masih terbatas; dan belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata dan pengelolaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk mengakomodir berbagai kebijakan yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di Kabupaten Bandung yang terangkum dalam arahan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun kedepan. Arah pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 yang berpedoman pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa proses perencanaan nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang (RPJP). Pada pasal 10 ayat 2 bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD dan RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, penyusunan RPJPD dilakukan melalui persiapan rancangan awal rencana pembangunan, rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 huruf c bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama. Penyusunan Dokumen RPJPD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPJ dalam pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Bappeda perlu menyusun dokumen perencanaan, salah satunya yaitu RPJPD. Hal ini dipertegas dengan Inmendagri no 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.



RPJPD merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dengan substansi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, serta penutup. Hal ini dimuat dalam Inmendagri No 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD tahun 2025-2045, serta tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 dapat ditinjau pada **Gambar 1.1** berikut



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Pada prosesnya penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Proses penyusunan yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan **teknokratik, partipatif, politis** dan **atas-bawah** dan **bawah-atas**. Selain itu pendekatan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik yaitu dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, pendekatan integratif, yaitu dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan spasial, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan dengan mengacu pada pengembangan berbasis kewilayahan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung.

Selain itu, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 menunjukkan bahwa terdapat berbagai capaian mengalami peningkatan seperti, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun dalam pelaksanaan RPJPD 20 (dua puluh) tahun kebelakang adanya sejumlah tantangan yang dihadapi dalam keterlaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung, seperti masih rendahnya capaian Tingkat Pengangguran terbuka, Persentase Kawasan Kumuh (%), Persentase penurunan Luas Genangan Banjir, Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Investasi, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun landasan kebijakan RPJPD pada tahun mendatang.

Mengingat pentingnya penyusunan dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Bandung pada tahun 2025-2045, maka seluruh elemen masyarakat dalam berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Selain itu, adanya penyelarasan Dokumen Perencanaan dari lingkup Nasional, Provinsi dan Daerah secara serentak pada tahun yang sama, serta habisnya masa pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025. Hal ini menjadi momen penting adanya penyelarasan Dokumen Perencanaan dari lingkup Nasional, Provinsi dan Daerah secara serentak pada tahun yang sama, serta habisnya masa pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 dan memasuki masa pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024 menjadi pertimbangan pentingnya penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.



1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, mempertimbangkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Noor 91);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Bagian Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 215)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Tambahan Lembaran Daerah)
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2023-2043;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 adalah mewujudkan perencanaan Jangka Panjang Kabupaten Bandung untuk 20 (dua) puluh tahun mendatang sebagai landasan kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 diantaranya yaitu:

1. Tersusunnya gambaran umum dan kinerja pembangunan RPJPD 2005-2025;
2. Terumuskannya permasalahan dan isu strategis daerah;
3. Terumuskannya visi dan misi daerah;
4. Terumuskannya arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
5. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan;

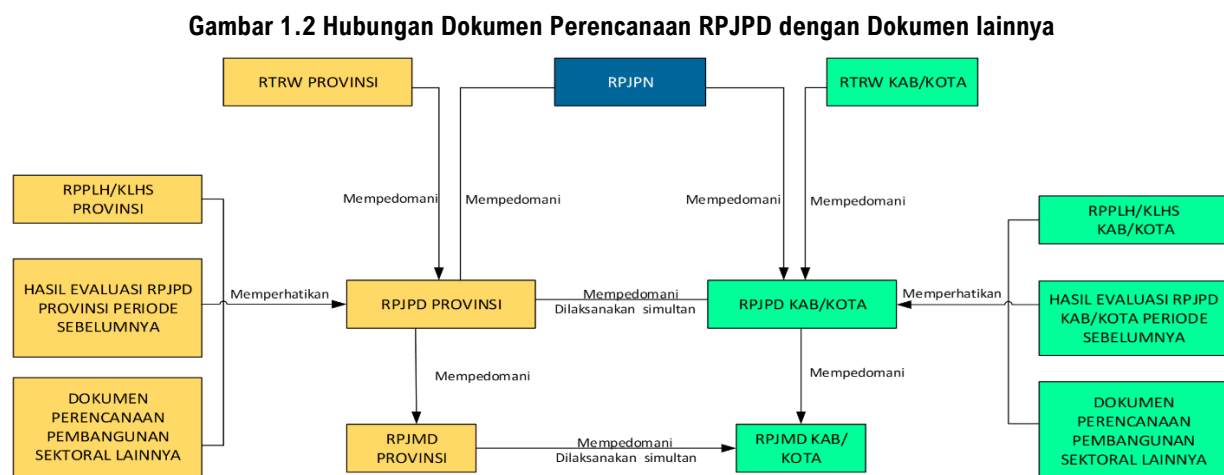
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Dalam rangka menjaga kesesuaian dan keselarasan perencanaan dengan perencanaan yang berada di level Nasional maupun Provinsi, penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 mengacu pada arahan dan kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045. Selain dari itu kebijakan-kebijakan pusat yang bersifat mandatori dan tertuang dalam berbagai kebijakan perencanaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045. Kebijakan Provinsi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman penyusunan RPJPD untuk Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjaga keselarasan dan sinergitas antar daerah, Provinsi dan Nasional.

Adapun dalam lingkup internal Kabupaten Bandung sinergitas dijalani sebagai upaya penyelarasan dalam dokumen perencanaan yang bersifat setara. Salah satu contoh perlunya menjaga keselarasan perencanaan adalah dengan melibatkan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044. Dokumen RTRW Kabupaten Bandung merupakan salah satu dasar perencanaan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJPD. selain daripada itu dalam dokumen RPJPD memuat KLHS RPJPD, RPPLH dan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 sebagai bagian penentu aspek pertimbangan Permasalahan, Isu Pembangunan, Visi, Misi, serta kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045. Adapun skematik hubungan antar dokumen dapat termuat dalam



Gambar 1.2 berikut:



Sumber: Inmendagri No.1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 disusun berdasarkan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, keterhubungan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen lainnya, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai aspek geografis dan demografis yang memuat karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan, wilayah rawan bencana dan demografi wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat yang memuat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, aspek daya saing daerah memuat daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing iklim investasi, pelayanan umum dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Penyajian permasalahan Kabupaten Bandung akan disajikan berdasarkan masing-masing aspek yang sebelumnya dijelaskan pada gambaran umum kondisi daerah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan visi dan misi Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bab ini berisikan penjelasan arah kebijakan dan sasaran pokok dari penurunan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045. Untuk tahap 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI PENUTUP



Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai kaidah pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

Pada sub bab ini akan diuraikan penjelasan aspek geografis dan demografi Kabupaten Bandung mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan aspek demografi.

2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Posisi Strategis Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung memiliki posisi strategis yang penting bagi pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Posisi strategis tersebut memberikan peran penting seiring dengan posisi Kabupaten Bandung yang berposisi sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi. Dalam lingkup nasional, Kabupaten Bandung termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung, kemudian dalam lingkup provinsi, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara.

Dalam menunjang peran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung memiliki peran berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa barat tahun 2022-2042. dengan arahan kegiatan utama industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan. Adapun dalam konstelasi Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah kabupaten Bogor, selain itu pada tahun 2023 Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten/Kota dengan pencapaian reformasi birokrasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, letak Kabupaten Bandung berada antara 6° 41' 00" dan 7° 19' 00" Lintang Selatan dan antara 107° 22' 00" dan 108° 50' 00" Bujur Timur. Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024, luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung adalah sebesar 174.084,34 ha (4,69% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 3.704.067 ha) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat;

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan. Berikut merupakan luas wilayah administratif masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1 Luas Daerah Kabupaten Bandung Menurut Kecamatan tahun 2023

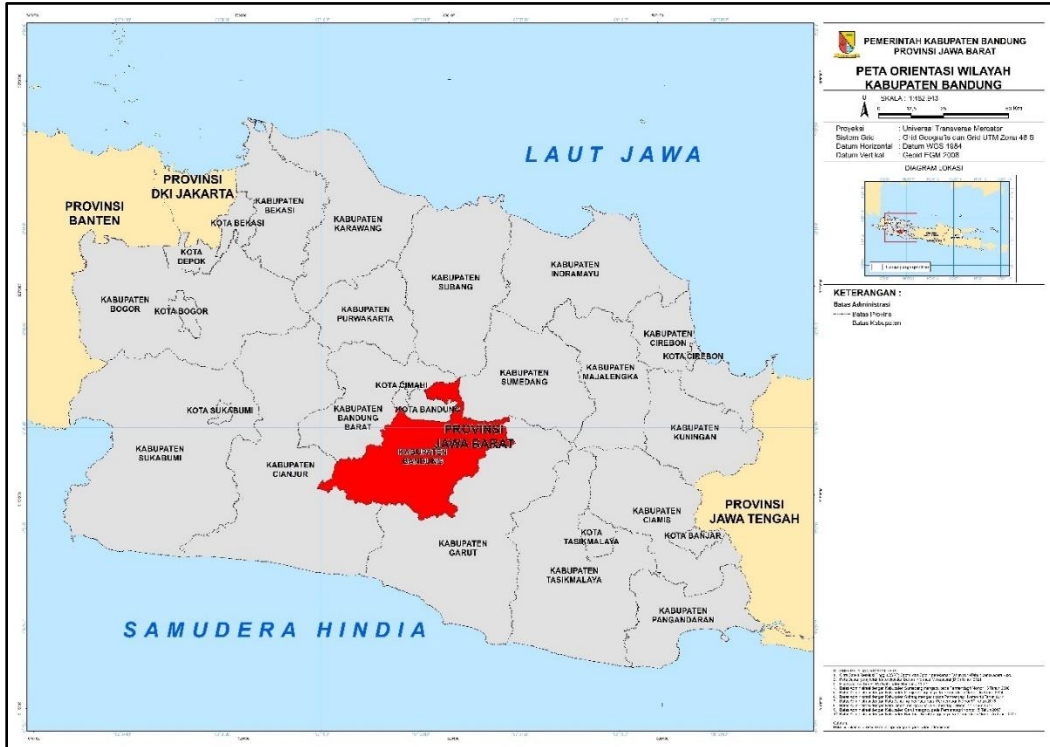
No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Arjasari	6.277,55
2	Kecamatan Baleendah	4.182,97
3	Kecamatan Banjaran	3.903,25
4	Kecamatan Bojongsoang	2.822,38
5	Kecamatan Canguang	2.375,09
6	Kecamatan Cicalengka	4.351,07
7	Kecamatan Cikancung	3.872,63



No	Kecamatan	Luas (Ha)
8	Kecamatan Cilengkrang	3.525,17
9	Kecamatan Cileunyi	3.063,24
10	Kecamatan Cimaung	5.955,56
11	Kecamatan Cimenyan	4.758,98
12	Kecamatan Ciparay	5.366,72
13	Kecamatan Ciwidey	5.519,18
14	Kecamatan Dayeuhkolot	1.115,30
15	Kecamatan Ibum	5.477,22
16	Kecamatan Katapang	1.561,94
17	Kecamatan Kertasari	13.654,39
18	Kecamatan Kutawaringin	4.705,50
19	Kecamatan Majalaya	2.431,45
20	Kecamatan Margaasih	1.832,39
21	Kecamatan Margahayu	1.054,26
22	Kecamatan Nagreg	4.282,97
23	Kecamatan Pacet	9.482,01
24	Kecamatan Pemeungpeuk	1.514,15
25	Kecamatan Pangalengan	21.656,39
26	Kecamatan Paseh	4.789,21
27	Kecamatan Pasir Jambu	19.807,79
28	Kecamatan Rancabali	15.286,64
29	Kecamatan Rancaekek	4.486,63
30	Kecamatan Solokan Jeruk	2.435,27
31	Kecamatan Soreang	2.537,04
Total		174.084,34

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

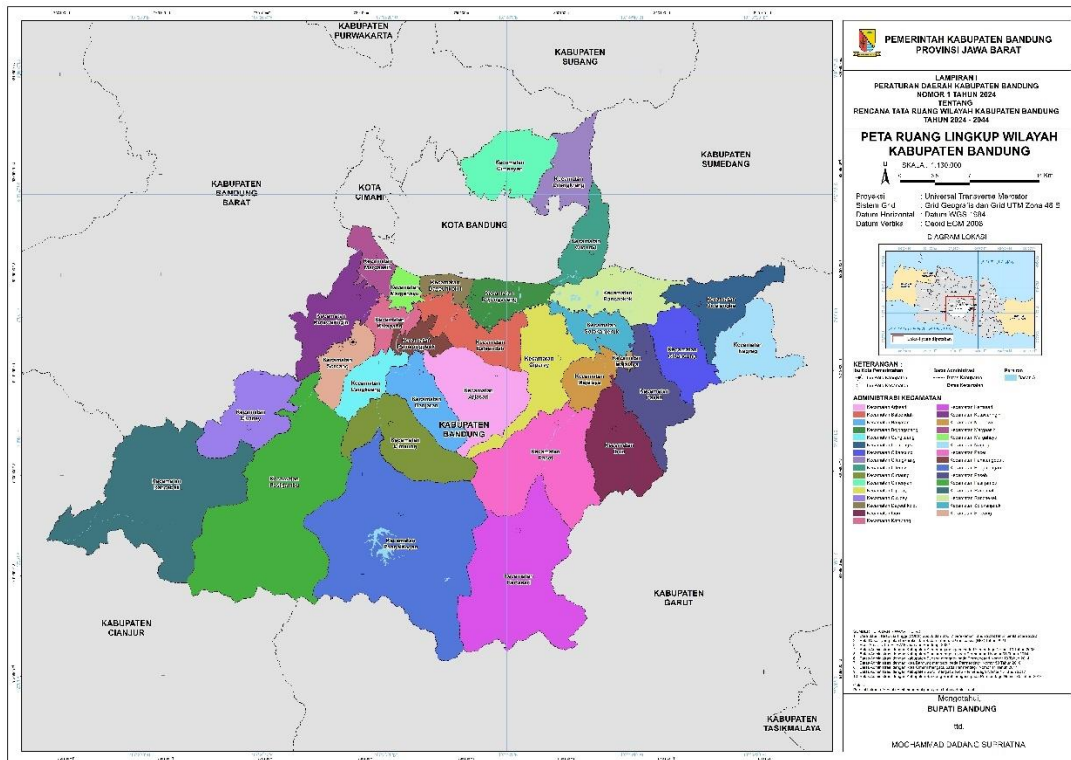
Gambar 2.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari ±500 m sampai 2.429 mdpl, semakin terjal ke arah selatan. Beberapa desa berada di tepian hutan namun sebagian besarnya berada di luar kawasan hutan. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung merupakan pegunungan dengan puncak yang rata – rata ketinggiannya lebih dari 2.500 mdpl. Gunung – gunung tersebut antara lain di sebelah selatan Kabupaten Bandung terdapat Gunung Wayang (2.181 mdpl), Gunung Patuha (2.334 mdpl) Kecamatan Cipeundeuy, Gunung Malabar (2.321 mdpl), serta Gunung Papandayan (2.262 mdpl) dan Gunung Guntur (2.249 mdpl), yang keduanya berada di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi Kabupaten Bandung yang berada tepat pada Cekungan Bandung yang didominasi oleh dataran tinggi atau pegunungan. Wilayah yang memiliki topografi paling tinggi berada di Kecamatan Kertasari dengan ketinggian 1.512 mdpl, sementara wilayah terendah berada pada Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot dengan ketinggian 664 mdpl. Sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%) yang menjadi lokasi sebagian besar kawasan perkotaan di kabupaten, seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsong. Wilayah yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan di selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 mdpl), Gunung Malabar (2.321 mdpl), Gunung Papandayan (2.262 mdpl), dan Gunung Manglayang.

Tabel 2.2 Luas Topografi di Kabupaten Bandung

No	Topografi	Luas (Ha)
1	<700 mdpl	33.842,52
2	800 mdpl	12.354,06
3	900 mdpl	12.228,65
4	1.000 mdpl	9.804,18
5	1.100 mdpl	9.120,41
6	1.200 mdpl	10.011,61
7	1.300 mdpl	10.138,25
8	1.400 mdpl	9.479,07



No	Topografi	Luas (Ha)
9	1.500 mdpl	14.381,89
10	1.600 mdpl	14.026,96
11	1.700 mdpl	12.605,05
12	1.800 mdpl	9.118,17
13	1.900 mdpl	6.178,06
14	2.000 mdpl	4.472,98
15	2.100 mdpl	2.964,81
16	2.200 mdpl	1.818,57
17	2.300 mdpl	1.098,42
18	2.400 mdpl	292,21
19	2.500 mdpl	99,49
20	>2.600 mdpl	48,97
Total		174.084,34

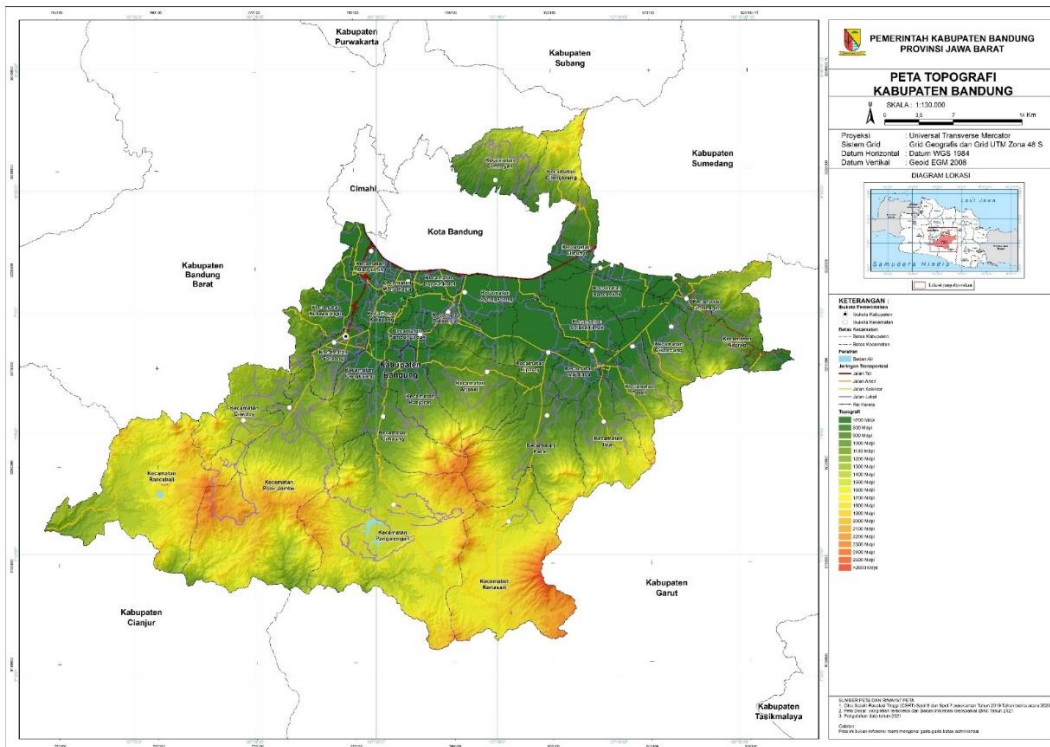
Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Selain dari ketinggian, kondisi Kabupaten Bandung termasuk ke dalam dataran tinggi dan digambarkan dalam bentuk kemiringan lereng dari 0-8%, 8-15%, 15%-25%, 25<45% dan >45%. Gambaran kemiringan Kabupaten Bandung berdasarkan kelas kemiringan lereng yang tersebar dalam beberapa kawasan, antara lain sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - <8% (datar), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Ciparay, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Rancaekek, Solokanjeruk, Margaasih, Margahayu, Cangkuang. Kondisi tanah ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri maupun kawasan lainnya yang bersifat budidaya;
- Kemiringan 8 - <15% (landai), tersebar di Kecamatan Majalaya, Kutawaringin, Soreang. Kondisi tanah ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha namun diperlukan usaha untuk konservasi tanah dan air;
- Kemiringan 15 - <25% (miring agak curam), tersebar di Kecamatan Paseh, Pacet, Cimaung, Arjasari, dan Cicalengka. Tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan namun masih bisa dimanfaatkan sebagai tanaman pertanian atau pun yang bersifat sama. Tanah dengan kemiringan tersebut dapat dikelola dengan pemilihan tanaman yang sifatnya dikendalikan;
- Kemiringan 25 - <45% (curam) merupakan kemiringan yang paling mendominasi di wilayah Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Pasirjambu, Cimaung, Rancabali, Cileunyi, dan Cilengkrang. Kondisi lahan seperti ini rawan dan berpotensi untuk terkenal erosi sehingga diperlukan upaya pelestarian hutan lindung; dan
- Kemiringan >45% (sangat curam) merupakan bagian hulu dari wilayah Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Cimenyan, Kertasari, Ibum dan Pangalengan. Kondisi tanah ini berpotensi untuk terkena erosi sehingga diperlukan upaya konservasi tanah dan air juga upaya pelestarian hutan.

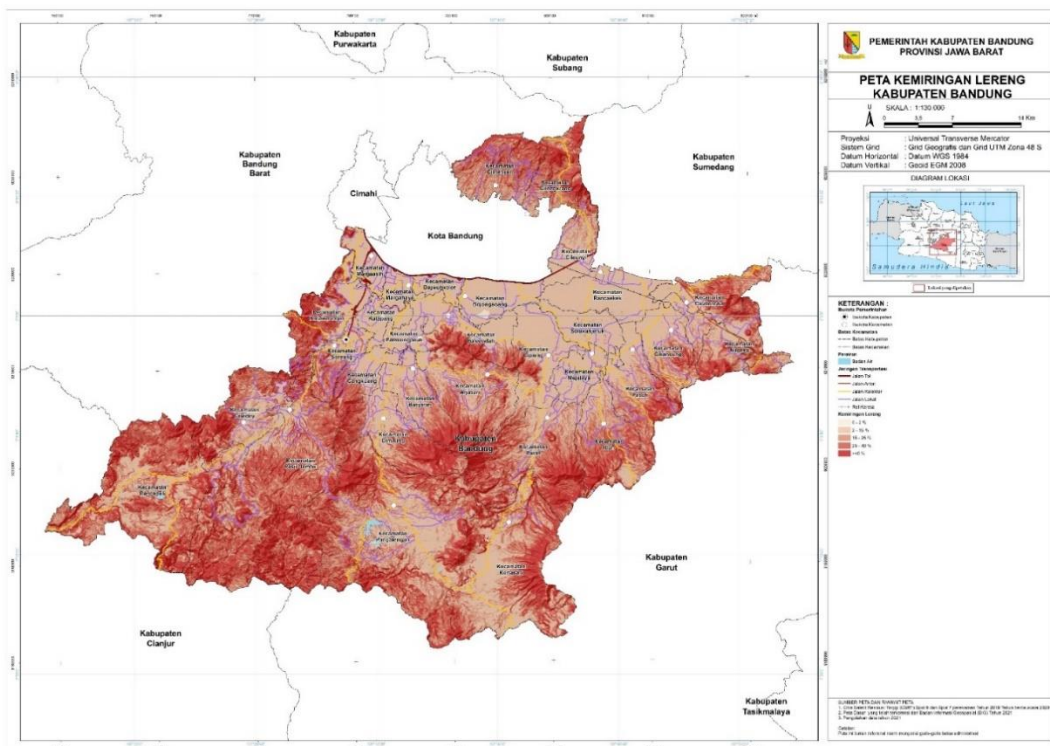


Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi mencakup berbagai elemen iklim yang mempengaruhi suatu wilayah, seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan pola angin. Unsur iklim di Kabupaten Bandung mempengaruhi berbagai aspek, termasuk dalam pertanian, pengelolaan sumber daya alam, energi, kesehatan dan infrastruktur. Berdasarkan data iklim tahun 2023 kondisi suhu rata-rata paling tinggi berada pada Bulan Oktober yaitu 25,9°C, dengan persentase kelembaban rata-rata tertinggi berada di



Bulan Maret yaitu 79,8%, kecepatan angin rata-rata di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 terbesar terjadi tepatnya di Bulan Januari yaitu 3,1 Knot, curah hujan tertinggi tahun 2023 terjadi di Bulan Desember sebesar 336,0 mm.

Tabel 2.3 Kondisi Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun Bandung tahun 2023

No	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%) / Rata-rata	Kecepatan Angin (Knot) / Rata-rata	Jumlah Curah Hujan (mm)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum			
1	Januari	19,0	25,8	32,0	69,5	3,1	68,3
2	Februari	19,8	23,4	30,2	78,8	2,6	110,8
3	Maret	18,4	23,9	32,0	79,8	1,6	200,8
4	April	19,0	24,4	32,0	79,3	1,3	275,5
5	Mei	15,4	24,9	33,4	77,5	1,1	268,5
6	Juni	18,4	24,5	31,4	77,6	1,2	89,8
7	Juli	17,0	24,1	32,0	72,0	1,6	24,0
8	Agustus	17,4	24,4	33,4	70,1	1,5	29,7
9	September	16,2	24,9	34,8	64,8	1,9	18,2
10	Oktober	18,0	25,9	36,0	64,7	1,7	62,2
11	November	19,2	25,0	33,0	78,9	1,1	239,3
12	Desember	18,8	24,9	32,8	78,4	1,0	366,0

Sumber: Kabupaten Bandung dalam angka tahun 2024

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Gambaran umum kondisi geologi di Kabupaten Bandung terdiri dari berbagai jenis batuan. Mulai dari endapan aluvial, endapan danau, kolovium, serta berbagai jenis batuan yang tersebar di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan pegunungan yang tersebar dari selatan sampai dengan utara. Salah satu batuan yang mendominasi di Kabupaten Bandung adalah jenis batuan yang terdapat di Gunung Api Malabar. Persebaran jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bandung akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Luas Satuan Litologi/Formasi Geologi Kabupaten Bandung

No	Singkatan	Satuan Geologi	Deskripsi
1	Ql	Endapan Aluvial	Lempung, lanau, pasir halus hingga kasar dan kerikil serta bongkah-bongkah batuan beku dan sedimen.
2	Qd	Endapan Danau	Lempung, lanau, pasir halus hingga kasar dan kerikil, umumnya bersifat tufan.
3	Qc	Kolovium	Endapan talus, rayapan, dan runtuhan. Bagian tubuh kerucut Gunung api tua, berupa bongkah-bongkah batuan beku, breksi tuf, dan pasir tuf.
4	Qyk	Batuan Gunung api Muda Kaledong	Eflata dan lava aliran bersusunan andesit basalan sumber G. Kaledong.
5	Qyw	Batuan Gunung api Muda Wayang Windu	Eflata dan lava aliran bersusunan andesit basalan sumber G. Wayang-Windu
6	Qyp	Batuan Gunung api Muda Papandayan	Eflata dan lava aliran bersusunan andesit basalan sumber G. Papandayan
7	Qv (p,l)	Lava dan Lahar Gunung Patuha	Lava dan lahar andesit piroksen yang pejal dan berongga dari G. Patuha. Pelembaran atau pengekaratan melapis terdapat secara lokal di daerah Danau Patenggang, fenokris plagioklas yang panjangnya 1 cm biasa terlihat. Breksi lahar biasanya termampat baik, tapi kurang terpilah. Komponen bergaris



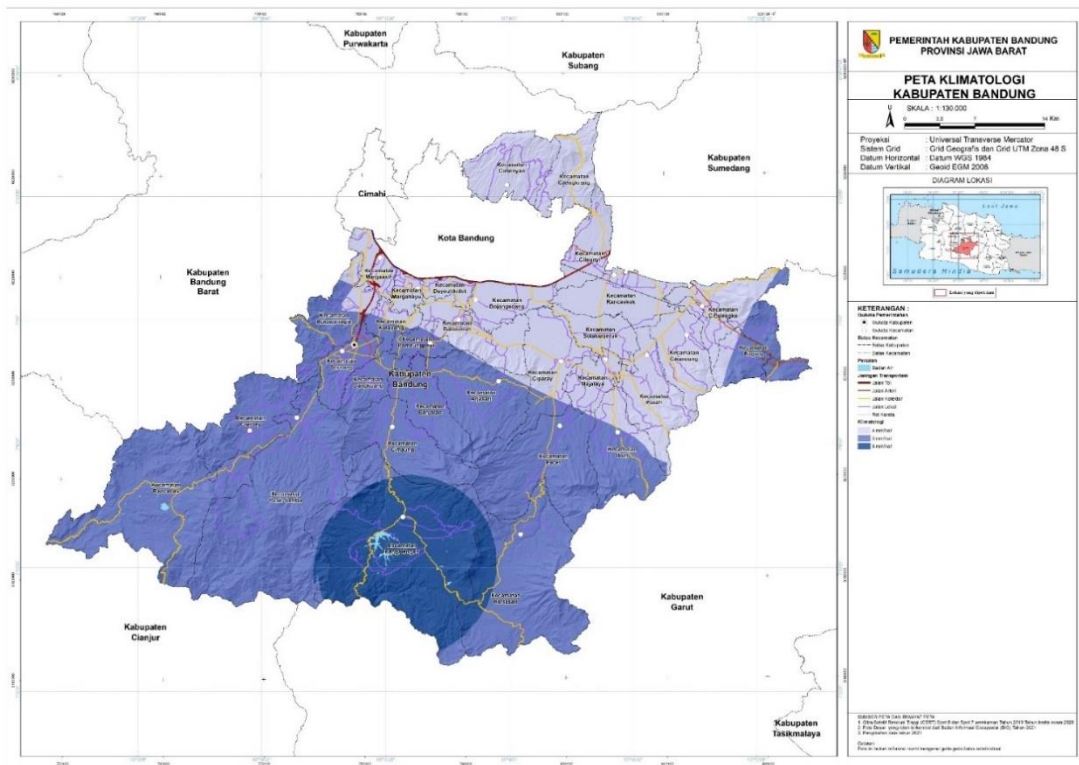
No	Singkatan	Satuan Geologi	Deskripsi
			tengah antara beberapa cm sampai 3 m; matriks tuf pasir berwarna abu-abu.
8	Qyu	Hasil Gunung api Muda Tak Teruraikan	Pasir tufaan, lapili, breksi, lava, aglomerat. Sebagian berasal dari G. Tangkuban Perahu dan sebagian dari G. Tampomas. Antara Sumedang dan Bandung batuan ini membentuk dataran-dataran kecil atau bagian-bagian rata dan bukit-bukit rendah yang tertutup oleh tanah yang berwarna abu-abu kuning dan kemerah-merahan
9	Qyt	Tufa Berbatu apung	Pasir tufaan, lapili, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat yang bersudut dengan banyak bongkah-bongkah dan pecahan-pecahan batu apung. Berasal dari G. Tangkubanperahu (erupsi "A", van Bemmelen, 1934) dan G. Tampomas.
10	Qkl	Lava Kencana	Lava andesitan andesitan-basalan G. Kencana
11	Qtl	Lava Tilu	Lava andesitan andesitan-basalan G. Tilu
12	Qmm	Batuan Gunung api Mandalawangi-Mandalagiri	Tuff kaca mengandung batu apung dan lava bersusunan andesit piroksen hingga basalan
13	Qmt	Batuan Gunung api Malabar-Tilu	Tuf, breksi lahar mengandung sedikit batu apung dan lava
14	Qpb	Tuf Batu apung dan Breksi	Endapan tuff kaca dasitik mengandung batu apung berukuran lapili-bom dan breksi
15	Qsu	Batuan Gunung api Sangiang Tanjung Tak Teruraikan	Perselingan breksi tuf, breksi lahar dan lava basal-andesitan
16	Qvu	Produk Gunung api Tua tak Teruraikan	Breksi Gunung api, lahar, dan lava berseling-seling
17	Qopu	Endapan Efflata Gunung api Tua	Tuf hablur halus-kasar dasitan, breksi tufan mengandung batu apung dan endapan lahar tua bersifat andesit-basalan
18	Ql (k,w)	Lahar dan Lava G. Kendeng	Aliran lava berselingan dengan endapan lahar berupa breksi andesit dan breksi tuf. Komponen menyudut sampai sebesar 40 cm garis tengahnya.
19	Qvl	Lava Hasil Batuan Gunung api Tua	Lava menunjukkan kekar lempeng dan kekar tiang. Susunannya basal dan sebagian telah terpropilitisasikan
20	Qvb	Breksi Produk Batuan Gunung api Tua	Breksi Gunung api, aliran lahar. Susunan komponennya antara andesit dan basal. Terbanyak terdapat di bagian tenggara lembar peta.
21	Qgpk	Batuan Gunung api Guntur-Pangkalan dan Kendang	Rempah lepas dan lava bersusunan andesit-basalan, bersumber dari kompleks Gunung api tua G. Guntur - G. Pangkalan dan G.Kendang.
22	Qwb	Andesit Waringin-Bedil	Perselingan lava, breksi, dan tuf, bersusunan andesit piroksen dan hornblenda
23	QTV	Endapan-endapan Piroklastika yang Tak Terpisahkan	Breksi andesit, breksi tuf, dan tuf lapili. Di sisi timur G. Parang dijumpai batuan piroklastika yang melebar dan ignimbrit (Koesmono, 1975). Kayu terkarsikkan dan yaspis terdapat dalam breksi tersebut.



No	Singkatan	Satuan Geologi	Deskripsi
24	Pb	Breksi Tufaan	Breksi bersifat andesit, basal, lava, batupasir tufaan dan konglomerat. Membentuk punggung-punggung tak teratur, kadang-kadang sangat curam.
25	a	Andesit	Pada umumnya berupa andesit augit hipersten hornblenda dan andesit leuko. Dalam masa dasar terdapat banyak kaca dan felspar
26	d	Dasit	Dasit hornblenda, dasir hipersten hornblenda, dasit augit hornblenda. Berupa retas dengan tebal antara 100-200 m.
27	Tmb	Formasi Besar	Breksi tufaan dan lava, bersusunan andesit sampai basal.

Sumber: : Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

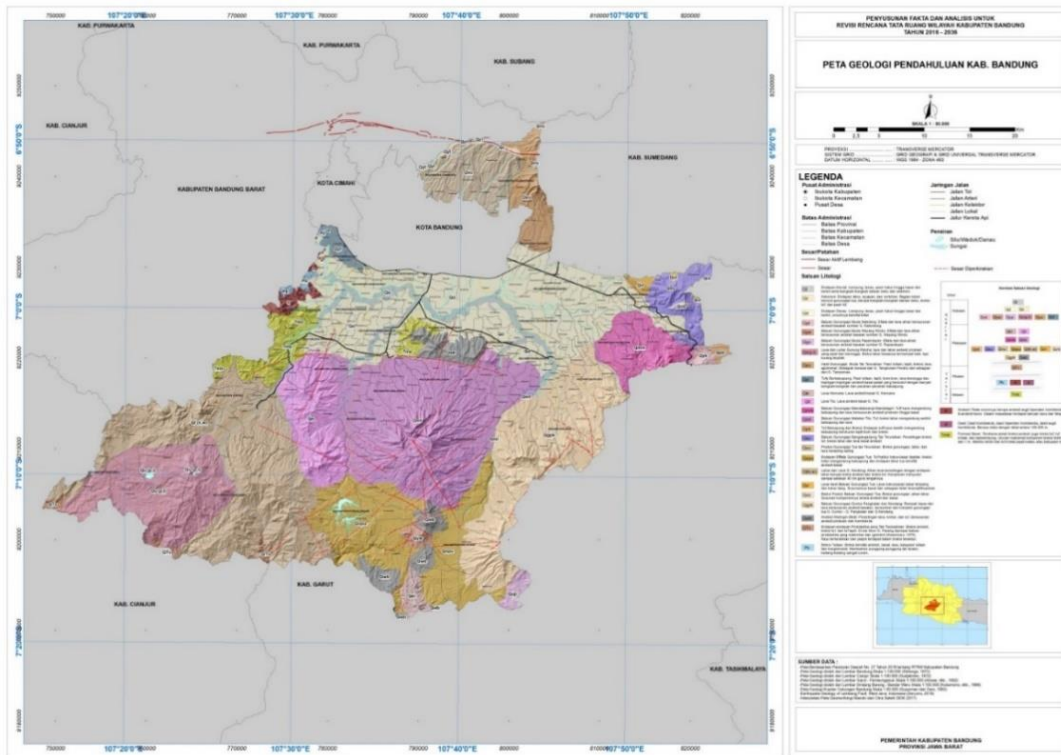
Gambar 2.5 Peta Klimatologi Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044



Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.1.5 Kondisi Hidrogeologi

Hidrogeologi merupakan suatu ilmu yang menghubungkan antara material geologi dan proses maupun aktivitas air khususnya air tanah. Air yang menjadi bagian dari pori-pori batuan disebut air tanah. Kondisi hidrogeologi terbagi menjadi beberapa bagian seperti cekungan air tanah, sistem akuifer, wilayah resapan air tanah, dan kondisi pendayagunaan air tanah.

2.1.1.6 Kondisi Cekungan Air Tanah

Air tanah merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana proses pengimbuhan pengaliran dan pelepasan air tanah tersebut berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air tanah (*groundwater basin*). Wilayah Cekungan Air Tanah telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Pada Wilayah Metropolitan Bandung, terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Cekungan Air Tanah di Daerah Cekungan Bandung

CEKUNGAN AIR TANAH (CAT)			Kabupaten/ Kota	Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (juta m ³ /thn)	
No	Nama	Luas (km ²)			Bebas (Q ₁)	Tertekan (Q ₂)
1.	Ciater	566	Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> Endapan Sungai terdiri atas pasir dan kerikil. Tuf pasiran dari G. Danau dan G. Tangkuban perahu. Batuan gunung api Kuarter Tua, terdiri atas breksi, lahar dan pasir tufan. Batuan gunung api Kuarter yang tak teruraikan, berupa breksi lahar dan lava. 	413	30



CEKUNGAN AIR TANAH (CAT)			Kabupaten/ Kota	Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (juta m ³ /thn)	
No	Nama	Luas (km ²)			Bebas (Q ₁)	Tertekan (Q ₂)
2.	Lembang	169	Kab. Bandung	Endapan danau, terdiri atas batu pasir tufan dan kerikil tufan	164	16
3.	Bandung - Soreang	1.716	Kota Bandung Kab. Bandung Kota Cimahi Kab. Sumedang Kab. Garut	Endapan danau, terdiri atas batu pasir tufan dan kerikil tufan. <ul style="list-style-type: none"> · Tuf pasiran dari G. Dano dan G. Tangkuban perahu serta tuf batu apung dari G. Tangkuban perahu. · Batuan gunung api Kuarter Tua, berupa lava basal. · Batuan gunung api Kuarter tua tak teruraikan, terdiri atas breksi, lahar dan lava. · Batuan gunung api muda tak teruraikan, terdiri atas pasir, lapili, breksi, lava dan aglomerat. · Batuan gunung api G. Malabar Tilu, terdiri atas tuf, breksi dan lava. · Andesit Waringin-Bedil-Malabar Tua, terdiri atas lava, breksi dan tuf serta batuan gunung api dari G. Guntur-Pangkalan. 	795	117
4.	Cibuni	621	Kab. Cianjur Kab. Bandung	<ul style="list-style-type: none"> · Lava dan lahar G. Patuha · Batuan piroklastik G. Parang, terdiri atas breksi, lapili dan tuf. · Lahar dan lava G. Kendeng 	595	28
5.	Banjarsari	605	Kab. Bandung Kab. Garut	<ul style="list-style-type: none"> · Batuan gunung api Kuarter tua tak teruraikan terdiri atas breksi, lahar dan tuf. · Andesit Waringin Bedil, terdiri atas lava, breksi dan tuf. · Batuan gunung api muda G. Windu terdiri atas eflata dan lava aliran. · Batuan gunung api muda G. Papandayan terdiri atas eflata dan aliran lava. · Andesit Waringin-Bedil-Malabar Tua, terdiri atas lava, breksi dan tuf. 	550	30



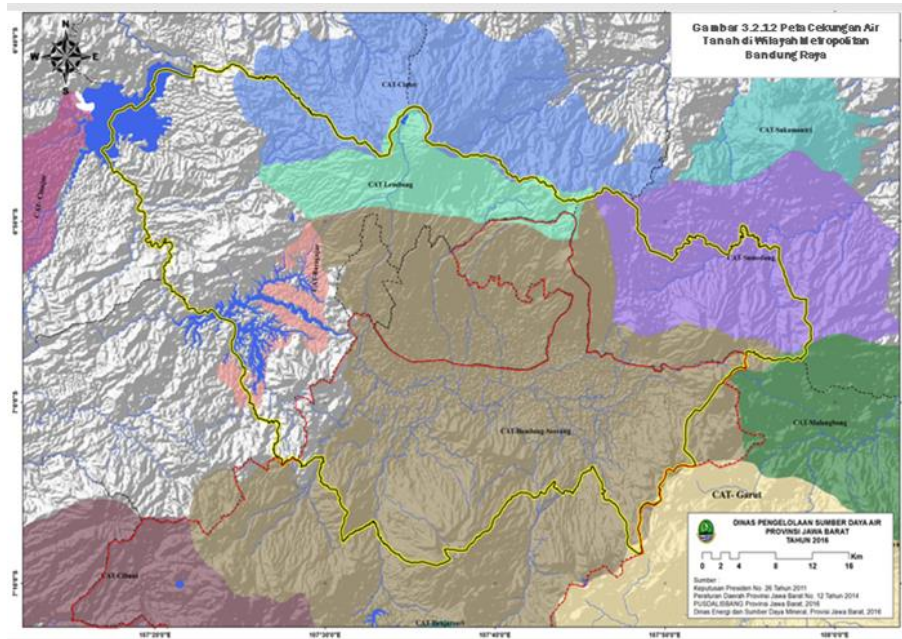
CEKUNGAN AIR TANAH (CAT)			Kabupaten/ Kota	Litologi Akuifer	Jumlah Air Tanah (juta m ³ /thn)	
No	Nama	Luas (km ²)			Bebas (Q ₁)	Tertekan (Q ₂)
				· Endapan rempah lepas gunung api Kwartir tua tak teruraikan, terdiri atas tuf, breksi dan lahar.		
6.	Malangbong	514	Kab. Garut Kab. Majalengka Kab. Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> · Batuan gunung api muda G. Haruman dan Gunung Kaledong, terdiri atas eflata dan lava andesit-basal. · Tuf batu apung dan breksi gunung api Kwartir tua, terdiri atas breksi dan lahar. · Hasil gunung api muda tak teruraikan, terdiri atas breksi, lava andesit-basal, tuf dan lapili 	415	30
7.	Sumedang	483	Kab. Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> a. Endapan danau, terdiri atas batu pasir tufan dan kerikil tufan. b. Batuan gunung api muda tak teruraikan, terdiri atas pasir tufan, lapili, breksi, lava dan aglomerat. c. Batuan gunung api Kwartir Tua, terdiri atas breksi gunung api dan lahar. 	519	28

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Berdasarkan batas administrasi Kabupaten Bandung yang terbaru, Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di Kabupaten Bandung, meliputi CAT Bandung-Soreang, Cibuni, dan Banjarsari. Adapun CAT yang mendominasi di Kabupaten Bandung adalah CAT Bandung – Soreang.



Gambar 2.7 Peta CAT Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.1.7 Kondisi Sistem Akuifer

Berdasarkan kondisi geologi, sistem akuifer memiliki beberapa karakteristik produktivitas air, keterusan, dan debit sumur. Sistem akuifer (lapisan tanah yang memiliki kandungan air yang mengalir melalui rongga udara ke dalam bawah tanah) di Metropolitan Bandung dapat dipisahkan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Wilayah air tanah dengan akuifer melalui ruang antar butir
2. Wilayah air tanah dengan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir
3. Wilayah air tanah dengan akuifer melalui celahan, rekahan dan saluran
4. Wilayah air tanah dengan akuifer berproduktivitas rendah dan air tanah langka

Wilayah air tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung terdiri dari beberapa jenis seperti yang dijelaskan diatas. Uraian masing-masing wilayah air tanah seperti berikut di bawah ini:

1. Wilayah air tanah dengan akuifer melalui ruang antar butir

Wilayah air tanah ini meliputi daerah pedataran dengan penyebaran luas, terbagi atas akuifer produktif sedang dan secara setempat akuifer produktivitas sedang. Akuifer produktif, mempunyai keterusan sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri dekat atau di atas muka tanah setempat, debit sumur umumnya mencapai 5 l/det. Akuifer produktif sedang, terciirikan oleh keterusan akuifer sedang, kedalaman muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di atas muka tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/det. Akuifer secara setempat produktif sedang, akuifer umumnya tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, muka air tanah umumnya dangkal, debit sumur lebih rendah dari 5 l/det.

2. Wilayah air tanah dengan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir

Wilayah air tanah ini umumnya menempati bagian kaki dan badan gunung api dan sebagian pada perbukitan, meliputi akuifer berproduktivitas sedang dan akuifer setempat produktif. Akuifer berproduktivitas sedang, mempunyai keterusan sangat beragam, muka air tanah umumnya dalam, pemunculan mata air debitnya beragam, terbesar pada lava vesikuler, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/det. Akuifer setempat produktif, mempunyai keterusan akuifer beragam, muka air tanah dalam dan pemunculan mata air dengan debit kecil.

3. Wilayah air tanah dengan akuifer melalui celahan, rekahan dan saluran

Wilayah air tanah ini umumnya terdapat di daerah batu gamping dan aliran lava vesikuler, dan terbagi atas akuifer produktif sedang dan setempat produktif. Akuifer produktif sedang, berupa akuifer yang pengalirannya terbatas melalui zona celahan atau rekahan pada batuan lava yang berongga dan mempunyai hubungan antara satu rongga dan lainnya. Akuifer setempat produktif, mempunyai aliran



air tanah yang terbatas melalui celahan, rekahan atau saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam dan debit mata air kebanyakan kecil.

4. **Wilayah air tanah dengan akuifer berproduktivitas rendah dan air tanah langka.**

Wilayah air tanah ini umumnya merupakan daerah yang dibentuk oleh batuan vulkanik padu dan batuan intrusi. Di batuan vulkanik pada umumnya masih dapat diharapkan yaitu berupa akuifer setempat berarti tetapi umumnya mempunyai produktivitas rendah, sedangkan daerah langka atau tak berarti terdapat pada batuan sedimen berupa batu lempung dan batuan dengan butiran kasar berongga tapi tidak memiliki saluran penghubung antara rongga untuk melalukan air. Daerah air tanah langka sangat umumnya terdapat pada sedimen Tersier.

Berdasarkan proporsi tingkat kelulusan akuifer (**Gambar 2.6**) dan produktivitas akuifer (**Gambar 2.7**) di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung memiliki litologi akuifer dengan tingkat kelulusan yang mendominasi sedang-tinggi, dengan tingkat produktivitas akuifer yang mendominasi, yaitu setempat produktif yang tersebar di berbagai bagian kabupaten.

Tabel 2.6 Luas Hidrogeologi (Tingkat Kelulusan) Kabupaten Bandung

No	Tingkat Kelulusan	Luas (Ha)
1	-	126,69
2	Rendah	40.789,43
3	Rendah - Sangat Rendah	11.561,71
4	Rendah - Sedang	6.797,51
5	Sedang - Tinggi	114.680,26
6	Tinggi	128,75
Total		174.084,34

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

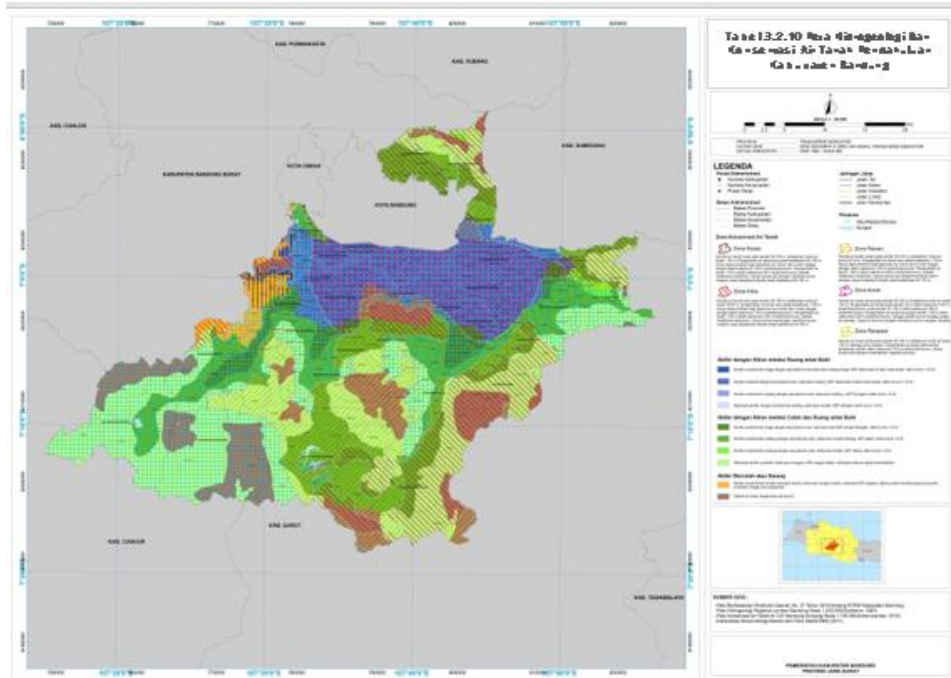
Tabel 2.7 Luas Kondisi Hidrogeologi (Produktivitas Akuifer) Kabupaten Bandung

No	Produktivitas Akuifer	Luas (Ha)
1	Langka	27.120,63
2	Perairan	126,69
3	Produktif dengan Penyebaran Luas	28.706,45
4	Produktif Kecil Setempat Berarti	3.938,85
5	Produktif Sedang	152,44
6	Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas	45.819,39
7	Produktif Tinggi dengan Penyebaran Luas	6.300,85
8	Setempat Produktif	61.919,05
Total		174.084,34

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044



Gambar 2.8 Peta Hidrogeologi Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.1.8 Wilayah Resapan Air Tanah

Wilayah resapan air tanah secara umum merupakan wilayah masuknya air ke dalam tanah dan terpreservasi sebagai air tanah dalam akuifer. Sedangkan wilayah pelepasan air tanah secara umum merupakan wilayah keluarnya aliran air tanah. Daerah resapan air tanah terbagi menjadi daerah resapan air tanah utama, air tanah tambahan, air tanah tak berarti dan umumnya kedap air. Berdasarkan topografi dan sistem akuifer, Kabupaten Bandung memiliki daerah resapan air tanah di Daerah Dataran Gunung Api, Daerah Lereng Gunung Api, dan Daerah Puncak Gunung Api. Sedangkan daerah pelepasan air tanah berada di wilayah Dataran Cekungan Bandung. Kabupaten Bandung terbagi menjadi beberapa wilayah resapan air tanah.

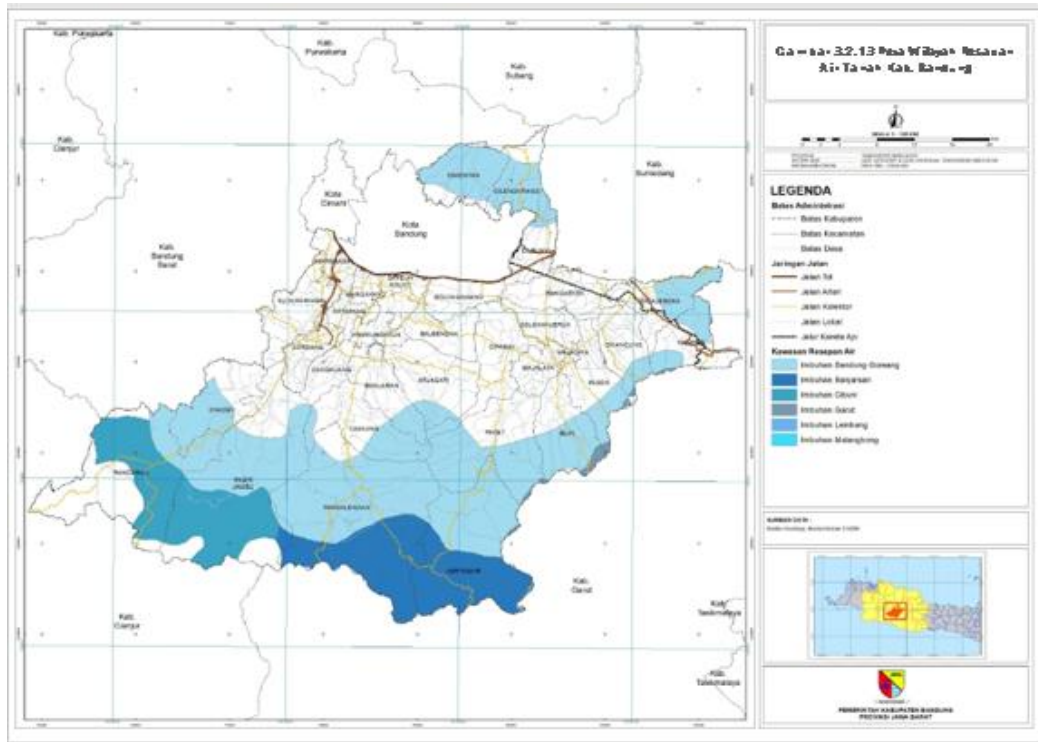
Tabel 2.8 Wilayah Resapan Air Tanah Kabupaten Bandung

No.	Zona Resapan Air Tanah	Luas (Ha)
1	Imbuhan Bandung-Soreang	57.809,09
2	Imbuhan Banjarsari	15.711,30
3	Imbuhan Cibuni	13.773,50
4	Imbuhan Garut	831,42
5	Imbuhan Lembang	0,29
6	Imbuhan Malangbong	30,17
Total		88.155,77

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044



Gambar 2.9 Peta Hidrogeologi Dan Konservasi Air Tanah Pendahuluan



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.1.9 Kondisi Pendayagunaan Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah, zona pendayagunaan air tanah di Provinsi Jawa Barat yang kemudian dilakukan perubahan kriteria penentuan zona (Pasal 6) dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah, maka Kriteria Penentuan Zona adalah sebagai berikut:

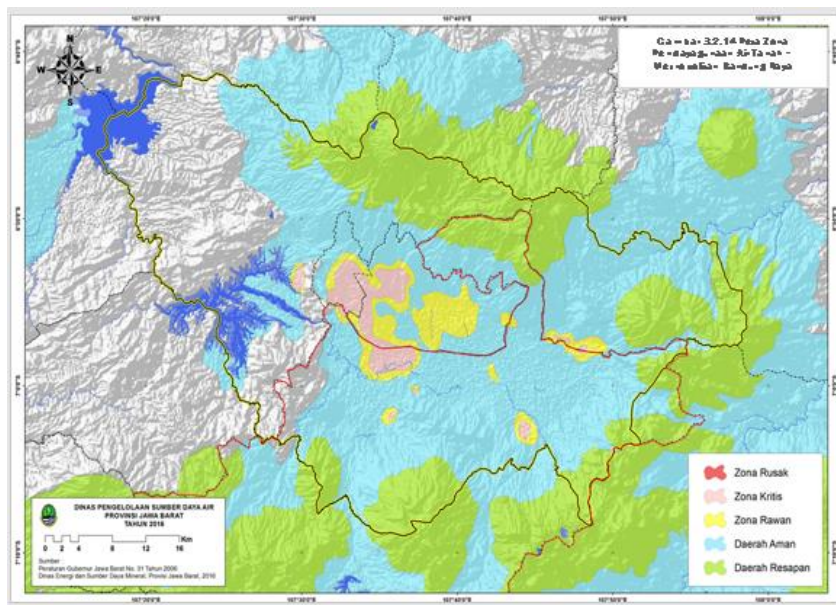
- a) Zona Aman yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1.000 mg/l atau daya hantar listrik kurang dari 1.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Penurunan muka air tanah < 40 %
 - Penurunan preatik < 40 %
 - Penurunan pisometrik < 40 %
- b) Zona Rawan yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas antara 1.000 – 10.000 mg/l atau daya hantar listrik antara 1.000 – 1.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Penurunan muka air tanah 40-60 %
 - Penurunan preatik 40-60 %
 - Penurunan pisometrik 40-60 %
- c) Zona Kritis yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas antara > 10.000 – 1 koperasi 5.000 mg/l atau daya hantar listrik antara > 1.500-5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Penurunan muka air tanah > 60 - 80 %
 - Penurunan preatik > 60 - 80 %
 - Penurunan pisometrik > 60 - 80 %
- d) Zona Rusak yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:



- Penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas lebih dari 100.000 mg/l atau daya hantar listrik lebih dari 5.000 $\mu\text{S/cm}$ atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun
- Penurunan muka air tanah > 80 %
- Penurunan preatik > 80 %
- Penurunan pisometrik > 80 %

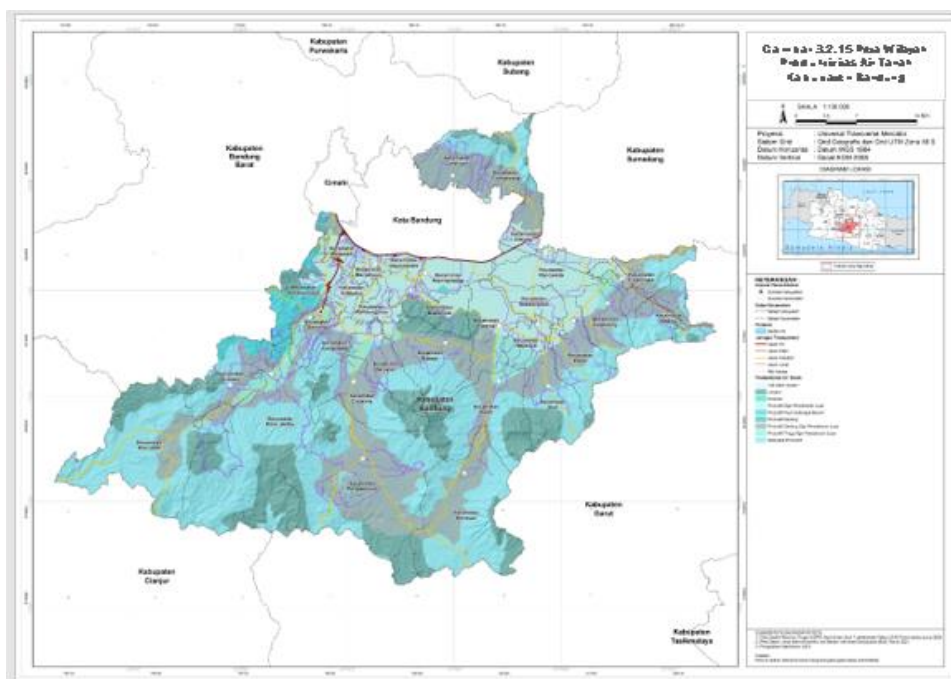
Kemudian, berdasarkan Peta Konservasi Air Tanah CAT Bandung - Soreang (Arismunandar, 2010), terdapat zona resapan air tanah yang teridentifikasi sebagai zona aman. Kondisi pendayagunaan air tanah di Kabupaten Bandung didominasi Zona Daerah Aman dan Daerah Resapan. Terdapat beberapa daerah zona kritis dan rawan di bagian utara Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Berikut adalah pembagian wilayah pendayagunaan air tanah Kabupaten Bandung (**Tabel 2.9, Gambar 2.10 dan Gambar 2.11**).

Gambar 2.10 Peta Zona Penggunaan Air Tanah



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat tahun 2023

Gambar 2.11 Peta Penggunaan Air Tanah Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044



Tabel 2.9 Wilayah Pendayagunaan Air Tanah Kabupaten Bandung

No	Produktivitas Akuifer	Luas (Ha)
1	Langka	27.120,63
2	Perairan	126,69
3	Produktif Dgn Penyebaran Luas	28.706,45
4	Produktif Kecil Setempat Berarti	3.938,85
5	Produktif Sedang	152,44
6	Produktif Sedang Dgn Penyebaran Luas	45.819,39
7	Produktif Tinggi Dgn Penyebaran Luas	6.300,85
8	Setempat Produktif	61.919,05
Total		174.084,34

Sumber: Peta Konservasi Air Tanah CAT Bandung Soreang (Arismunandar, 2010) dan Hasil Perhitungan Tematik, 2022

2.1.1.10 Kondisi Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang berada pada atas lapisan tanah, air ini susah mengalami infiltrasi karena terdapat lapisan sulit untuk ditembus. Air permukaan berbagai macam, sungai, danau, waduk, situ, embung, oxbow dan kolam. Informasi kondisi air permukaan ini berfungsi sebagai gagasan penanganan banjir, pemenuhan kebutuhan air dan konservasi air permukaan.

a) Kondisi Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Peraturan Menteri PUPR No 28/ PRT/M/ 2015). Kabupaten Bandung memiliki sungai dengan panjang 1.756,76 km dan luas sebesar 443,51 Ha.

b) Kondisi Situ dan Embung

Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya (Peraturan Menteri ATR no. 30 tahun 2019). Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau (Peraturan Menteri ATR no. 30 tahun 2019). Kabupaten Bandung memiliki situ dan embung dengan luas total 123,31 Ha dan keliling total sebesar 24.547 m.

Tabel 2.10 Kondisi Situ dan Embung di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Baleendah	Situ	790193	9223830	1,59	511,768
2	Baleendah	Situ	790110	9226230	0,30	226,313
3	Baleendah	Situ	792418	9223230	0,49	326,196
4	Baleendah	Situ	788038	9224410	0,74	397,15
5	Bojongsoang	Situ	793697	9227900	0,26	215,43
6	Bojongsoang	Situ	795255	9228120	0,61	347,296
7	Bojongsoang	Situ	793286	9225560	76,69	4.014,89
8	Bojongsoang	Situ	792932	9225960	4,94	999,704
9	Bojongsoang	Situ	792827	9225710	0,52	319,066
10	Cangkuang	Situ	782070	9221740	2,29	1.382,72
11	Cangkuang	Situ	782001	9221690	0,64	380,104
12	Ciparay	Situ	800396	9225010	0,68	514,681



No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
13	Ciparay	Situ	800179	9225230	0,85	703,171
14	Ciwidey	Situ	768908	9212240	0,53	300,985
15	Dayeuhkolot	Situ	790116	9226920	0,28	265,104
16	Dayeuhkolot	Situ	790769	9228430	0,40	301,953
17	Ibun	Situ	809411	9209970	0,19	186,985
18	Ibun	Situ	809356	9210070	0,33	225,55
19	Margahayu	Situ	785205	9226370	1,18	504,111
20	Margahayu	Situ	784870	9226630	0,64	441,296
21	Margahayu	Situ	785100	9226700	1,25	530,771
22	Margahayu	Situ	784923	9226860	2,77	775,422
23	Margahayu	Situ	785595	9227050	1,17	555,349
24	Margahayu	Situ	785297	9227160	0,79	419,592
25	Margahayu	Situ	785867	9227280	0,95	442,527
26	Margahayu	Situ	785755	9227320	0,30	304,605
27	Margahayu	Situ	785758	9227420	0,10	159,159
28	Margahayu	Situ	784969	9227320	1,16	541,651
29	Pameungpeuk	Situ	787241	9221800	0,74	357,167
30	Pangalengan	Situ	788795	9203860	0,71	486,131
31	Pangalengan	Situ	787696	9200960	5,41	2.599,12
32	Pangalengan	Situ	781481	9200380	1,62	683,636
33	Pasirjambu	Situ	765318	9207190	7,84	1.238,13
34	Rancabali	Situ	755770	9206150	0,47	248,412
35	Rancabali	Situ	755193	9206190	0,13	135,046
36	Rancabali	Situ	757375	9207860	0,15	147,514
37	Rancabali	Situ	757158	9208300	0,12	193,262
38	Rancabali	Situ	761528	9212840	0,09	126,109
39	Rancabali	Situ	755503	9206910	0,47	264,674
40	Rancabali	Situ	756288	9207090	0,08	119,091
41	Rancabali	Situ	757221	9208240	0,03	64,4556
42	Rancabali	Situ	757343	9208100	0,08	115,65
43	Rancabali	Situ	757688	9204770	0,18	177,187
44	Rancabali	Situ	766891	9210090	0,63	383,192
45	Rancabali	Situ	768538	9212280	0,32	229,035
46	Rancabali	Situ	768501	9212190	0,45	254,782
47	Rancaekek	Situ	810277	9228550	1,14	430,92
JUMLAH					123,31	24.547,06

Sumber: Dokumen Fakta-Analisa RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

c) Kondisi Danau

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan (Peraturan Menteri ATR no. 30 tahun 2019). Kabupaten Bandung memiliki Danau dengan luas total 84,58 Ha dan keliling total sebesar 15.096 m.

Tabel 2.11 Kondisi Danau

No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Cimencyan	Danau	790656	9241080	1,01	384,8
2	Ciwidey	Danau	764792	9210270	0,94	483,19
3	Ibun	Danau	804179	9207230	11,47	1.415,15
4	Ibun	Danau	807306	9209830	1,52	880,192
5	Kertasari	Danau	795822	9205170	0,15	200,796
6	Kertasari	Danau	793519	9202270	8,19	1.805,15
7	Kertasari	Danau	791508	9197640	1,46	840,736



No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
8	Pacet	Danau	796295	9209910	0,24	191,308
9	Pangalengan	Danau	792066	9205380	1,72	487,614
10	Pangalengan	Danau	779736	9199450	0,98	428,66
11	Rancabali	Danau	755725	9206710	0,69	423,033
12	Rancabali	Danau	760389	9207090	51,09	4.526,49
13	Rancabali	Danau	757888	9208150	1,69	569,381
14	Rancabali	Danau	762351	9209050	0,18	175,671
15	Rancabali	Danau	758038	9209180	0,18	204,065
16	Rancabali	Danau	764191	9209340	0,08	115,316
17	Rancabali	Danau	758535	9209420	1,14	481,199
18	Rancabali	Danau	755900	9206290	0,08	112,199
19	Rancabali	Danau	755943	9206310	0,11	129,139
20	Rancabali	Danau	756102	9206380	0,29	234,851
21	Rancabali	Danau	756979	9208320	0,09	117,046
22	Rancabali	Danau	756205	9206830	0,37	282,361
23	Rancabali	Danau	756340	9206850	0,11	146,797
24	Rancabali	Danau	758419	9208160	0,81	461,104
Jumlah					84,58	15.096,25

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Kondisi Waduk

Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai (Peraturan Menteri ATR no. 30 tahun 2019). Kabupaten Bandung memiliki Waduk dengan luas total 315,15 Ha dan keliling total sebesar 47.392,88 m.

Tabel 2.12 Properti Waduk

No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Pangalengan	Waduk	781667	9203720	145,01	18.991,8
2	Pangalengan	Waduk	781055	9201940	4,58	1.844,31
3	Pangalengan	Waduk	782610	9202010	161,08	24.929
4	Pangalengan	Waduk	780401	9203100	4,48	1.627,77
JUMLAH					315,15	47.392,88

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

d) Kondisi Oxbow

Oxbow adalah lahan bekas sungai akibat dari perubahan morfologi sungai secara alami atau buatan. oxbow di Kabupaten Bandung banyak ditemukan di Sungai Citarum, hal ini akibat pelurusan sungai yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir. Kabupaten Bandung memiliki oxbow dengan luas total 83,41 Ha dan keliling total sebesar 63.638 Ha.

Tabel 2.13 Kondisi Oxbow

No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Baleendah	Oxbow	794968	9225230	1,79	1.440
2	Baleendah	Oxbow	792348	9224420	1,87	1.665
3	Baleendah	Oxbow	786630	9227660	8,50	5.740
4	Baleendah	Oxbow	790940	9226350	2,27	1.776
5	Baleendah	Oxbow	789881	9226120	0,87	1.387
6	Baleendah	Oxbow	796004	9225970	0,97	1.521
7	Bojongsoang	Oxbow	794968	9225230	1,79	1.440



No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
8	Bojongsoang	Oxbow	792348	9224420	1,87	1.665
9	Bojongsoang	Oxbow	798494	9226820	0,79	594
10	Bojongsoang	Oxbow	790940	9226350	2,27	1.776
11	Bojongsoang	Oxbow	795616	9226090	0,19	450
12	Bojongsoang	Oxbow	796004	9225970	0,97	1.521
13	Bojongsoang	Oxbow	797483	9226470	0,71	918
14	Bojongsoang	Oxbow	797737	9226600	0,44	528
15	Bojongsoang	Oxbow	798182	9226640	0,69	858
16	Ciparay	Oxbow	800396	9225010	0,68	515
17	Ciparay	Oxbow	800231	9225270	1,55	1.537
18	Ciparay	Oxbow	798956	9225800	0,79	615
19	Ciparay	Oxbow	797017	9226340	1,31	1.105
20	Ciparay	Oxbow	798494	9226820	0,79	594
21	Ciparay	Oxbow	801972	9222780	0,06	106
22	Ciparay	Oxbow	796004	9225970	0,97	1.521
23	Ciparay	Oxbow	797483	9226470	0,71	918
24	Ciparay	Oxbow	797737	9226600	0,44	528
25	Ciparay	Oxbow	798182	9226640	0,69	858
26	Ciparay	Oxbow	798945	9226160	0,53	645
27	Dayeuhkolot	Oxbow	786630	9227660	8,50	5.740
28	Kutawaringin	Oxbow	779808	9229100	10,50	5.375
29	Kutawaringin	Oxbow	780538	9228570	3,49	2.755
30	Margaasih	Oxbow	779808	9229100	10,50	5.375
31	Margaasih	Oxbow	780538	9228570	3,49	2.755
32	Margaasih	Oxbow	782699	9227500	1,37	1.219
33	Margahayu	Oxbow	783961	9226560	0,57	488
34	Margahayu	Oxbow	782699	9227500	1,37	1.219
35	Margahayu	Oxbow	786630	9227660	8,50	5.740
36	Solokanjeruk	Oxbow	801972	9222780	0,06	106
37	Solokanjeruk	Oxbow	798945	9226160	0,53	645
JUMLAH					83,41	63.638,00

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

e) Kondisi Kolam

Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Kolam terbentuk secara alami atau dapat dibuat manusia, secara umum adalah buatan manusia. Kolam biasa digunakan sebagai tambak ikan, tempat pemancingan dan lain-lain. Kolam di Kabupaten Bandung memiliki luas badan air sebesar 27,22 Ha dan keliling total 15.628,91 m.

Tabel 2.14 Kondisi Kolam

No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
1	Baleendah	Kolam	790285	9226180	3,82	1.358,01
2	Baleendah	Kolam	794734	9221860	0,69	330,981
3	Baleendah	Kolam	792566	9224320	0,59	338,131
4	Bojongsoang	Kolam	792639	9224200	0,73	351,179
5	Bojongsoang	Kolam	792894	9224480	0,09	118,128
6	Bojongsoang	Kolam	792939	9224460	0,17	169,888
7	Bojongsoang	Kolam	792933	9224500	0,13	159,568
8	Bojongsoang	Kolam	792972	9224490	0,12	139,03
9	Cangkuang	Kolam	781778	9219590	0,23	192,973
10	Cangkuang	Kolam	781735	9219510	0,11	129,535
11	Cangkuang	Kolam	781839	9221860	0,22	189,123
12	Cangkuang	Kolam	780478	9221200	0,40	251,632
13	Cicalengka	Kolam	816773	9229050	0,04	80,5514



No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
14	Cileunyi	Kolam	803129	9232510	0,23	249,489
15	Cileunyi	Kolam	803315	9232270	0,56	418,859
16	Cileunyi	Kolam	803356	9232170	0,18	176,987
17	Cileunyi	Kolam	804044	9233260	0,25	226,085
18	Cileunyi	Kolam	804183	9233130	0,46	370,866
19	Cileunyi	Kolam	803317	9232130	0,10	124,885
20	Cileunyi	Kolam	803226	9232270	0,03	71,0127
21	Cileunyi	Kolam	803227	9232240	0,01	47,4653
22	Ciwidey	Kolam	769705	9212570	0,35	231,209
23	Dayeuhkolot	Kolam	788001	9227680	0,29	263,22
24	Kertasari	Kolam	799264	9204180	0,09	120,855
25	Kertasari	Kolam	795291	9204420	0,11	131,431
26	Margaasih	Kolam	780403	9231360	0,11	134,945
27	Margaasih	Kolam	780250	9234600	0,01	47,8622
28	Margaasih	Kolam	780264	9234580	0,02	55,1653
29	Margaasih	Kolam	780261	9234610	0,02	56,7161
30	Margaasih	Kolam	780277	9234600	0,03	65,3586
31	Margaasih	Kolam	780342	9234570	0,01	51,1175
32	Margaasih	Kolam	780295	9234580	0,06	97,1502
33	Margaasih	Kolam	780325	9234600	0,03	70,9454
34	Margaasih	Kolam	780317	9234580	0,02	55,597
35	Margaasih	Kolam	780337	9234560	0,02	56,9546
36	Margaasih	Kolam	780349	9234580	0,02	57,7635
37	Margahayu	Kolam	783799	9229840	0,25	194,517
38	Margahayu	Kolam	783843	9229830	0,14	153,24
39	Pameungpeuk	Kolam	786167	9222830	0,27	280,477
40	Pameungpeuk	Kolam	786278	9222550	0,13	150,025
41	Pangalengan	Kolam	788529	9199330	9,13	2.638,36
42	Pangalengan	Kolam	788318	9199710	3,00	2.272,3
43	Pangalengan	Kolam	782020	9206460	0,16	247,028
44	Pangalengan	Kolam	786876	9201800	0,31	272,838
45	Pangalengan	Kolam	780908	9211760	1,43	781,786
46	Pangalengan	Kolam	787956	9203640	0,75	424,957
47	Pangalengan	Kolam	781729	9209480	0,93	479,839
48	Pangalengan	Kolam	779667	9199510	0,17	208,067
49	Pangalengan	Kolam	787859	9203640	0,08	118,033
50	Pangalengan	Kolam	788310	9202470	1,34	724,112
51	Paseh	Kolam	808077	9220830	0,23	260,799
52	Rancabali	Kolam	755437	9206580	1,60	714,678
53	Rancabali	Kolam	756414	9207430	1,51	724,883
54	Rancabali	Kolam	756695	9207970	0,48	362,036
55	Rancabali	Kolam	756971	9208050	0,71	401,654
56	Rancabali	Kolam	758514	9209600	0,48	359,539
57	Rancabali	Kolam	756184	9206400	0,19	226,617
58	Rancabali	Kolam	756255	9206410	0,11	125,335
59	Rancabali	Kolam	756383	9206480	0,34	299,039
60	Rancabali	Kolam	756472	9207120	0,05	89,5667
61	Rancabali	Kolam	757247	9208230	0,01	37,6389
62	Rancabali	Kolam	755125	9206260	0,28	247,449
63	Rancabali	Kolam	755043	9205990	0,43	315,361
64	Rancabali	Kolam	758077	9209280	0,04	75,9143
65	Rancaekek	Kolam	810066	9228420	0,25	186,476
66	Rancaekek	Kolam	809887	9228690	0,44	284,773



No	Kecamatan	Jenis	Koordinat X (m)	Koordinat Y (m)	Luas (Ha)	Keliling (m)
67	Rancaekek	Kolam	808952	9229270	0,28	217,744
68	Solokanjeruk	Kolam	799290	9226190	0,91	455,815
69	Solokanjeruk	Kolam	800644	9224980	0,18	168,787
70	Solokanjeruk	Kolam	800637	9225020	0,09	127,361
JUMLAH					27,22	15.628,91

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

f) Kondisi Genangan

Genangan adalah perairan di daratan yang merupakan akumulasi dari air hujan, limpasan air, atau aliran air lainnya yang tidak dapat meresap ke dalam tanah atau dialirkan ke saluran pembuangan, sungai, atau badan air lainnya. Genangan pada umumnya tidak diinginkan terjadi karena air menumpuk di tempat-tempat kegiatan manusia seperti tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat bersosialisasi. Masih banyak genangan yang terjadi di Kabupaten Bandung, dengan total luas tersurvey seluas 98,81 ha, tinggi 0,05 sampai 2 meter, durasi 2 sampai 120 jam, dan frekuensi 1 sampai 10 kali pertahun.

Tabel 2.15 Kondisi genangan

No	Tahun	Nama Genangan	Tinggi Genangan (m)	Luas Genangan (ha)	Durasi Genangan (jam)	Frekuensi Genangan (pertahun)
1	2021	Bojongmalaka Indah	0,5-1	4,80	24-48	1
2	2021	Kp. Nusa (Ds. Rancamanyar)	0,5	3,2	48	5
3	2021	Kamasan	1,5-2	7,53	3-4	3
4	2021	Tarajusari (Ds. Kamasan)		0	2	3
5	2021	Sukasari	0,5	8,14	48	5
6	2021	Tarajusari (Ds. Tarajusari)	1	6,6	24	5
7	2021	Rancaekek Kencana (Bojong Alam)	0,05-0,1	6,45	24	5
8	2021	Rancaekek Kencana	0,05-0,1	7,4	1-2	5
9	2021	Rancaekek Wetan	0,2-0,5	1	2-3	5
10	2021	Kp. Sayang (Ds. Tarajusari)	0,5	4,2	24	4
11	2021	Kp. Cupu (Ds. Rancamanyar)	1	1	1-2	5
12	2021	Ciodeng (Bojong Malaka)	1	4	24	2
13	2021	Pantai Bojong Manggu	1	7,5	5-6	3
14	2021	Rancaekek Kulon	0,5-1	9,1	2-3	5
15	2021	Parung Halang - Andir	1	0,8	24-48	3
16	2022	Andir (Kp. Muara)	0,3	5,2	48	3
17	2022	Jl. Teratai Raya (Rancaekek Kencana)	0,4	0,28	5	5
18	2022	Jl. Teratai Raya 2 (Rancaekek Kencana)	0,3	0,3	4	5
19	2022	Jl. Dahlia (Rancaekek Kencana)	0,3-0,5	0,16	4	10
20	2022	Jl. Gradiul (Rancaekek Kencana)	0,17	0,12	24	5
21	2022	Jl. Kaktus (Rancaekek Kencana)	0,5	0,2	4	5
22	2022	Jl. Cempaka (Rancaekek Kencana)	0,12	0,1	4	5
23	2022	Jl. Raya Majalaya-Bojongloa (Simpang Walini)	0,7	0,0474	24	5
24	2022	Jl. Raya Bojongsoang Cipagalo	0,3	0,3	4	5
25	2022	Jl. Cikoneng 2 - Bojongsoang	0,5	0,18	4	10
26	2022	Jl. Raya Bojongsoang (2) - Cipagalo	0,3-0,5	0,16	4	10
27	2022	Jl. Raya Sapan (RT2/RW9 Cigede) Tegalluar	0,3	0,389	4	5
28	2022	Jl. Raya Sapan (dekat jembatan Tegalluar)	0,7	0,493	48	10
29	2022	Jl. Raya Sapan (2) - Tegalluar	0,5	0,23	120	5
30	2022	Cijagra - Bojongsoang	0,5-1	1,94	48	5
31	2022	Jl. Bojongsoang (3) - Bojongsoang	0,8	0,087	96	3
32	2022	Jl. Dangdek - Kopo Sayati	0,3	1,5681	2	10
33	2022	Jl. Warung Lobak Soreang	0,4	0,98	24	10



No	Tahun	Nama Genangan	Tinggi Genangan (m)	Luas Genangan (ha)	Durasi Genangan (jam)	Frekuensi Genangan (pertahun)
34	2022	Jadek Kopo Sayati - Margahayu	0,5	1,1684	4	10
35	2022	Dekat Lanud Sulaiman Margahayu	0,5	2,5931	4	10
36	2022	Jl. Bayangkara - Cibiru Hilir	0,3	2,0265	48	10
37	2022	Jl. Cibiru Hilir - Cibiru Hilir	0,3	0,445	3	10
38	2022	Bumi Orange - Cimekar	0,5	0,1762	12	10
39	2022	Komplek Aspol Cibiru - Cibiru	0,3	2,0265	48	10
40	2022	Ci Jalupang Pananjung - Cangkuang	0,6	2,6735	24	10
41	2022	Cisangkuy Rancatungku - Pameungpeuk	0,4	2,9615	24	10
42	2022	GBI 1 Blok C Buah Batu - Bojongsoang	0,5	0,0652	12	10
43	2022	GBI 1 Blok F Buah Batu - Bojongsoang	0,3	0,1189	10	10
44	2022	GBI Blok F 14 Buah Batu - Bojongsoang	0,3	0,0973	6	10

umber: Masterplan Drainase Kabupaten Bandung (2022)

Penyebab terjadinya genangan bervariasi namun dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori di bawah ini:

1. Kapasitas saluran yang minim, yaitu kecilnya dimensi saluran sejak awal dibangun sehingga tidak dapat menampung aliran yang melewatinya;
2. Diferensiasi fungsi saluran, yaitu berkurangnya kapasitas saluran yang disebabkan oleh pendangkalan baik akibat sedimentasi atau sampah;
3. Tidak terdapat saluran drainase, yaitu nihilnya saluran di suatu lokasi sehingga air tidak dialirkan dan menggenang; dan
4. Kapasitas sungai kurang memadai, yaitu ketidakmampuan sungai menampung aliran baik karena bertambahnya air yang mengalir ataupun berkurangnya kapasitas sungai akibat sedimentasi dan/atau sampah.

2.1.1.11 Kondisi Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung terdiri atas beberapa jenis tanah, seperti Andosol, Gawir, Gleisol, Kambisol, Latisol, dan Mediteranian Harpik. Adapun komposisi jenis tanah terbanyak didominasi oleh jenis Kambisol Eutrik sebanyak 110.8856 Ha atau dengan persentase 25%. Jenis tanah Kambisol Eutrik ini memiliki karakteristik kelembapan tanah yang tinggi sehingga tumbuhan yang ditanam pada jenis tanah ini dapat subur sesuai musimnya. Adapun lampiran mengenai sebaran luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung, dapat dijelaskan pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16 Jenis Tanah di Kabupaten Bandung

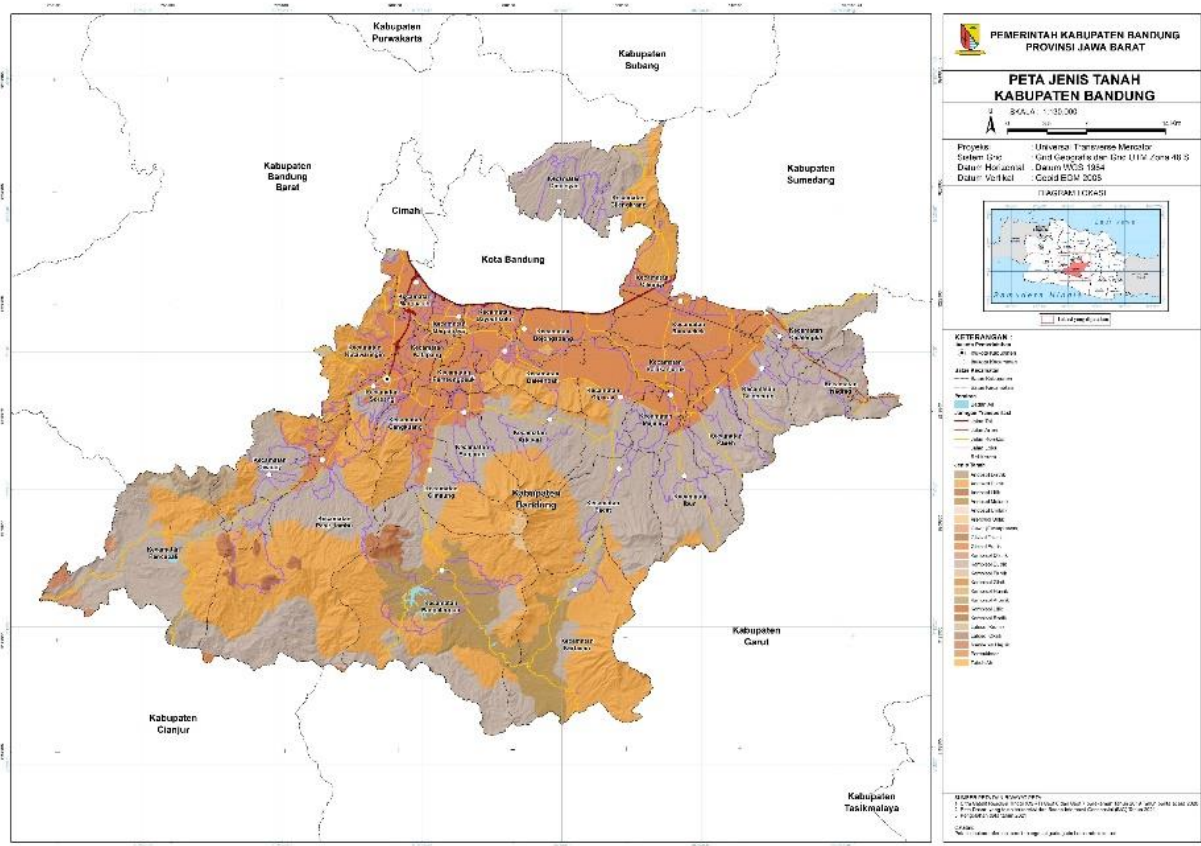
No	Jenis Tanah	Luas Total Jenis Tanah (Ha)
1	Andosol Distrik	1.720,14
2	Andosol Eutrik	53.786,85
3	Andosol Litik	1.627,10
4	Andosol Melanik	9.361,50
5	Andosol Umbrik	23,02
6	Arenosol Ustik	342,18
7	Gawir (Escarments)	10,53
8	Gleisol Distrik	6,15
9	Gleisol Eutrik	33.542,80
10	Kambisol Distrik	501,21
11	Kambisol Eutrik	71.453,39



No	Jenis Tanah	Luas Total Jenis Tanah (Ha)
12	Kambisol Fluvik	8,25
13	Kambisol Gleik	2,07
14	Kambisol Humik	1,67
15	Kambisol Kromik	2,36
16	Kambisol Litik	38,92
17	Kambisol Rodik	2,35
18	Latosol Kromik	504,77
19	Latosol Oksik	53,60
20	Mediteran Haplik	386,33
21	Permukiman	59,02
22	Tubuh Air	650,14
	Jumlah	174.084,34

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

Gambar 2.12 Peta Kondisi Jenis Tanah Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.1.12 Kondisi Perubahan Iklim

Dalam menghadapi krisis pemanasan global, telah diidentifikasi kelompok gas yang menempati atmosfer bumi yang disebut gas rumah kaca. Gas-gas ini meningkatkan suhu atmosfer karena berkarakteristik menyerap dan mengikat radiasi sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Contoh-contoh dari GRK antara lain karbon dioksida, metana, dinitrogen monoksida, klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksaflorida, dan nitrogen triflorida. GRK dihasilkan dari proses alami dan kegiatan manusia.

GRK dalam jumlah yang terkontrol berfungsi menghangatkan suhu bumi, tetapi dalam jumlah yang berlebihan GRK menyebabkan terjadinya pemanasan global. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mencegah laju pemanasan global menjadi tidak terkendali, pertama-tama adalah inventarisasi emisi GRK



sebagai basis data sumber dan penyerapan emisi, untuk kemudian dijadikan dasar untuk menentukan aksi misalnya berupa peraturan pembatasan emisi bagi berbagai sektor maupun penambahan media-media penyerapan emisi.

Inventarisasi emisi GRK telah dilakukan secara periodik di Kabupaten Bandung. Namun, data yang dihasilkan masih kurang baik akibat rumitnya perolehan data sumber dan penyerap emisi. Secara umum, emisi dari pertanian menunjukkan angka yang stabil dan terdapat kecenderungan pertambahan penyerapan emisi pada item Kehutanan. Perlu diperhatikan terdapat lonjakan pada item Limbah pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh keberadaan data komponen “Limbah Cair Industri” yang tidak diperoleh di tahun lainnya. Hal serupa terjadi pada item Energi, ketika data tersedia di tahun yang sama.

Tabel 2.17 Emisi Gas Rumah Kaca

No	Item	Emisi GRK netto (Gg CO2 eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi	0	0	4806,59	3704,1	0
2	IPPU	0	0	0	0	0
3	Pertanian	771,97	764,47	692,51	705,6	682,52
4	Kehutanan	-438,71	-411,66	-546,49	-568,28	-594,51
5	Limbah	341,58	349,07	4681,28	44066,4	380,68
	TOTAL	674,84	701,88	9633,89	47907,82	468,69

Sumber: Laporan IGRK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2023 (Diolah)

GRK, yang berasal dari proses alam dan aktivitas manusia, dihitung dalam inventarisasi melalui penghitungan berbagai sektor, yakni energi, IPPU (*Industrial Processes and Production Use/Proses Industri dan Penggunaan Produk*), pertanian, kehutanan, dan limbah. Telah dilakukan upaya pengumpulan data yang dibutuhkan untuk inventarisasi GRK dan dimasukkan ke dalam Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGNSMART) meski belum lengkap. Data dikumpulkan dari laporan-laporan masing-masing sektor, misalnya dalam LKIP, Kabupaten Bandung dalam Angka, Provinsi Jawa Barat dalam Angka, rencana-rencana induk, laporan-laporan dari perusahaan swasta/BUMN/D, dan lain-lain. Di atas telah ditampilkan hasil penghitungan SIGNSMART dengan item bertanda merah merupakan item dengan keterbatasan.

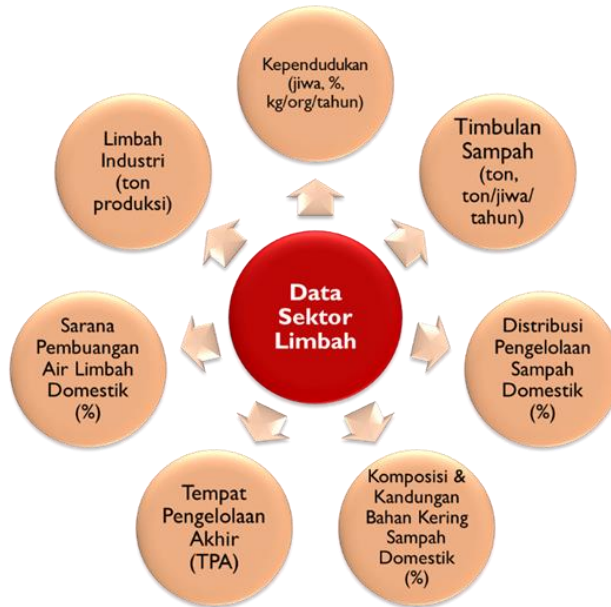
Secara umum, selain dua item terbatas tersebut, data yang digunakan untuk menghitung GRK cukup lengkap dan dapat diandalkan, namun menurut Laporan IGRK Kabupaten Bandung 2023, terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

- Tidak tersedianya beberapa data, seperti data pemakaian karbonat industri;
- Tidak dilakukannya updating data setiap tahun, seperti data limbah domestik, dan data berat kering sampah;
- Sulitnya mengakses data dari sumber data yang sebenarnya memilikinya, seperti data bahan bakar dari Pertamina atau perusahaan sejenis;
- Adanya data-data yang berbeda setiap tahunnya dan tidak serial, seperti data hortikultura dan data produksi industri;
- Adanya format yang tidak tepat interpretasinya, seperti data keberadaan TPA.

Untuk sektor limbah, selain komponen “Limbah Cair Industri”, data yang diolah dalam penghitungan emisi GRK cukup lengkap dan dapat diandalkan.



Gambar 2.13 Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor limbah



Sumber: Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

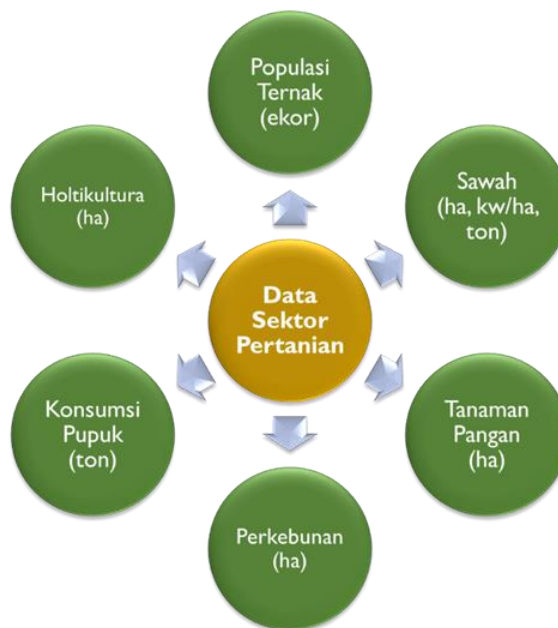
Tabel 2.18 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

Nomor	Item	Emisi GRK netto (Gg CO2 eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Limbah Cair Industri	N/A	N/A	4346,06	43703,31	N/A
2	Limbah Cair Domestik	189,27	195,62	179,49	207,33	224,23
3	Pembakaran	4,73	4,20	3,47	2,26	2,33
4	Pengolahan secara Biologis	0,05	0,07	0,08	0,01	0,01
5	Limbah Padat	145,85	146,73	149,28	153,00	153,66
TOTAL		339,89	346,61	4678,37	44065,91	380,23

Sumber: Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

Untuk sektor pertanian, data yang digunakan untuk penghitungan emisi GRK sudah cukup lengkap dan dapat diandalkan.

Gambar 2.14 Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor pertanian



Sumber: Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023



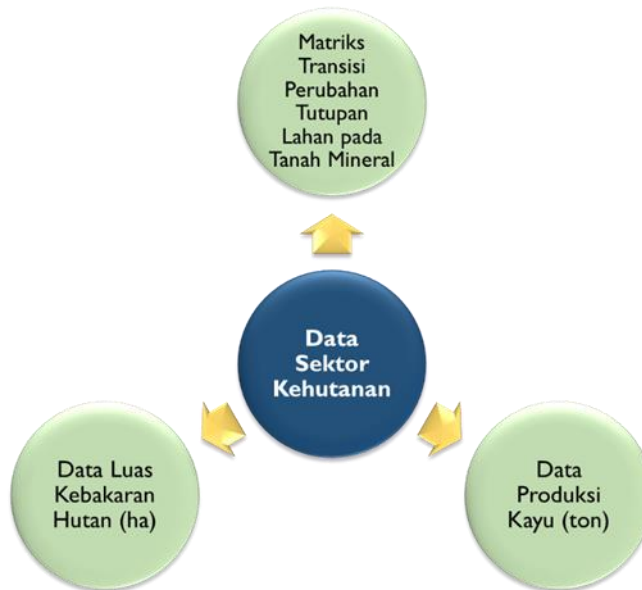
Tabel 2.19 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian

No	Item	Emisi GRK netto (Gg CO2 eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Rice cultivation</i>	403,95	414,66	360,17	344,52	346,89
2	<i>N2O from managed soils</i>	186,06	165,93	181,45	193,27	182,35
3	<i>Urea</i>	15,91	13,59	18,90	24,36	16,80
4	<i>Liming</i>	0	0	0	0	0
5	<i>Biomass burning</i>	9,18	9,20	8,27	4,09	3,82
6	<i>Livestock</i>	156,87	161,09	123,73	139,36	132,66
TOTAL		771,87	764,47	692,51	705,60	682,52

Sumber: Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

Untuk sektor kehutanan, data yang digunakan untuk penghitungan emisi GRK sudah cukup lengkap dan dapat diandalkan.

Gambar 2.15 Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor kehutanan



Sumber: Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

Tabel 2.20 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

No	Item	Emisi GRK netto (Gg CO2 eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Peat fire</i>	0	0	0	0	0
2	<i>Peat decomposition</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Biomass</i>	-438,71	-411,66	-546,49	-568,28	-594,51
TOTAL		-438,71	-411,66	-546,49	-568,28	-594,51

Sumber: Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

Perlu diperhatikan bahwa di luar komponen “Limbah Cair Industri”, telah terdapat data yang dapat digunakan sebagai acuan untuk sektor kehutanan, pertanian, dan limbah. Pada data tersebut, terlihat tren peningkatan penyerapan gas rumah kaca dari komponen *biomass* dan peningkatan sumber emisi dari komponen limbah padat dan limbah cari domestik.

Dalam hal upaya pengendalian GRK, telah dilaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah dalam bentuk Perbup, Surat Edaran, dan program seperti rehabilitasi kawasan gundul, konservasi hutan, pengelolaan sampah organik, hingga program edukasi sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung



mendapatkan penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023.

2.1.1.13 Penggunaan Lahan

Kabupaten Bandung memiliki luas 174.084 Hektar. Persebaran penggunaan lahan eksisting di tahun 2019 terdiri dari beberapa peruntukan lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Tinggi dengan luas 36.093,31 Ha atau sekitar 20,73%. Sawah dengan padi terus menerus sebesar 29.943,11 Ha atau sekitar 17,20%. Sementara untuk guna lahan terkecil yaitu, lapangan diperkeras dengan luas 0,71 Ha. Adapun besar luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Bandung tahun 2019

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Area Parkir Dan Lapangan	6,37	0,00%
Bangunan Industri dan Perdagangan	1.748,29	1,00%
Bangunan non-permukiman lain	8,83	0,01%
Bangunan Permukiman Desa	10.019,35	5,76%
Bangunan Permukiman Kota	15.154,47	8,71%
Danau Buatan Lainnya	1,19	0,00%
Danau/Telaga Alami	214,64	0,12%
Embung	3,78	0,00%
Hampan Lahar/Lava	20,91	0,01%
Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	36.093,31	20,73%
Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	2.245,01	1,29%
Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,66	0,00%
Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	197,75	0,11%
Kebun Campuran	8.674,39	4,98%
Kolam Air Tawar Lain	44,47	0,03%
Kolam Oksidasi dan Pengelolaan Limbah	81,72	0,05%
Ladang/Tegalan dengan Palawija	26.742,73	15,36%
Lahan Terbuka Lain	778,67	0,45%
Landas Pacu (runway) dan taxiway	71,30	0,04%
Lapangan diperkeras	0,71	0,00%
Padang Golf	60,68	0,03%
Padang Rumput	24,67	0,01%
Penambangan Terbuka Lain	121,00	0,07%
Perkebunan Lain	1.030,01	0,59%
Perkebunan Teh	21.752,91	12,50%
Permukaan diperkeras lain	29,66	0,02%
Saluran Air	12,14	0,01%
Sawah dengan padi diselingi palawija/tanaman lain/bero	3.967,31	2,28%
Sawah dengan padi terus menerus	29.943,11	17,20%
Semak/Belukar	14.702,12	8,45%
Stadion	14,06	0,01%
Sungai	247,55	0,14%
Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,92	0,00%
Waduk Irigasi	63,13	0,04%
Grand Total	174.084,3	100,00%

Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah /Potensi Sumber Daya

Potensi sumber daya merupakan gambaran mengenai potensi eksisting yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung dan menjadi modal dasar pembangunan di Kabupaten Bandung. Adapun beberapa potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung diantaranya;

a. Potensi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

➤ Sumber Daya Lahan

Wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh agrikultur (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), dimana sekitar seperlima (19,97%) dari lahan pertanian merupakan sawah. Lokasi wilayah



agrikultur sebagian besar berada di wilayah selatan, serta bagian timur dan utara. Adapun lima kecamatan dengan luas lahan pertanian terbesar dengan total kontribusi lebih dari separuh (54,39%) lahan pertanian di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 secara berurutan berada di **Kecamatan Pasirjambu, Pangalengan, Rancabali, Kertasari, dan Pacet**. Akan tetapi, apabila dilihat berdasarkan luasnya lahan sawah, lima kecamatan dengan lahan sawah terbesar dengan kontribusi lebih dari sepertiga (35,17%) lahan sawah di Kabupaten Bandung pada tahun yang sama berada di **Kecamatan Rancaekek, Ciparay, Solokan Jeruk, Pacet, dan Bojongsoang**. Selama periode tahun 2019-2023 terjadi alih fungsi lahan pertanian sehingga, tahun 2023 luasan sawa mengalami pengurangan. Informasi mengenai luas lahan sawah maupun pertanian terbaru dalam satuan hektar (Ha) dapat dilihat pada **Tabel 2.22** berikut.

Tabel 2.22 Luas Lahan Sawah Kabupaten Bandung Tahun 2023

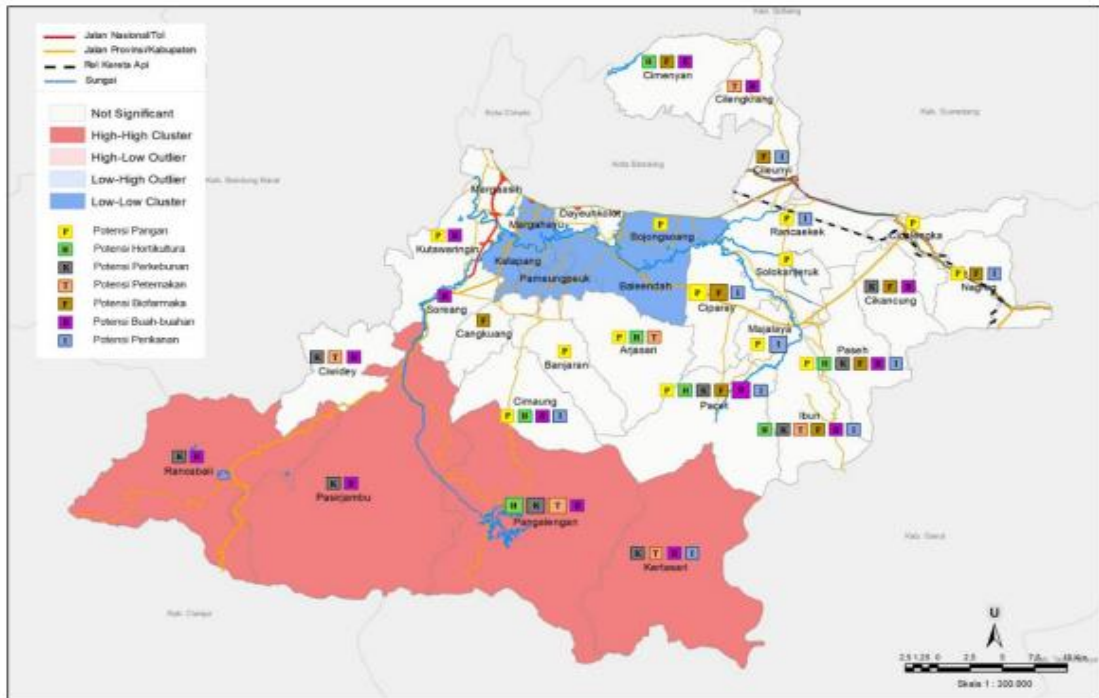
NO	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Luas Lahan Pertanian Total
1	2	3	4	5
1	Ciwidey	1.397	1.658	3.055
2	Rancabali	460	14.000	14.460
3	Pasirjambu	676	22.642	23.318
4	Cimaung	1.287	3.268	4.555
5	Pangalengan	198	18.216	18.414
6	Kertasari	74	14.232	14.306
7	Pacet	1.460	6.324	7.784
8	Ibun	1.090	3.157	4.247
9	Paseh	1.366	2.634	4.000
10	Cikancung	847	2.819	3.666
11	Cicalengka	795	1.548	2.343
12	Nagreg	286	4.232	4.518
13	Rancaekek	3.052	273	3.324
14	Majalaya	1.181	342	1.523
15	Solokan Jeruk	1.633	87	1.720
16	Ciparay	2.542	1.332	3.874
17	Baleendah	1.076	1.004	2.080
18	Arjasari	1.224	3.594	4.818
19	Banjaran	1.223	1.534	2.757
20	Cangkuang	786	777	1.563
21	Pameungpeuk	733	59	792
22	Katapang	593	19	612
23	Soreang	599	1.027	1.626
24	Kutawaringin	1.086	2.734	3.820
25	Margaasih	427	523	950
26	Margahayu	54	37	91
27	Dayeuhkolot	135	77	212
28	Bojongsoang	1.423	464	1.887
29	Cileunyi	746	1.503	2.249
30	Cilengkrang	186	2.038	2.224
31	Cimemyan	110	3.035	3.145
Jumlah		28.748	115.188	143.936

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024

Peta Potensi sektor Pertanian di Kabupaten Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.16 Peta Potensi sektor Pertanian di Kabupaten Bandung



Sumber: Masterplan Ekonomi Kabupaten Bandung, 2021

Salah satu permasalahan sektor pertanian yang paling menonjol adalah semakin berkurangnya lahan pertanian, terutama lahan sawah. Hampir selama sepuluh tahun terakhir ini, luas lahan sawah telah berkurang sebanyak 6.880 Ha dari luasan awal 35.682 Ha pada tahun 2014 berkurang menjadi 28.748 Ha. Informasi mengenai luas lahan sawah tadah hujan di kabupaten Bandung dari tahun 2014 sampai 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.23**.

Walaupun lahan sawah secara keseluruhan mengalami penurunan luasan, namun luas lahan sawah tadah hujan selama periode 2014 -2023 mengalami peningkatan menjadi hampir tiga kali lipatnya (279,03%). Data mengenai luas lahan sawah tadah hujan dapat dilihat pada **Tabel 2.25** Kecamatan yang paling banyak mengalami alih fungsi lahan adalah Pasir Jambu, Kutawaringin, dan Pacet. Adapun periode tahun 2018-2019 merupakan masa terjadinya alih fungsi lahan terbanyak. Informasi mengenai alih fungsi lahan dapat dilihat pada **Tabel 2.25**.

Tabel 2.23 Perkembangan Lahan Sawah Tadah Hujan di di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2023

NO	KECAMATAN	PERKEMBANGAN LUAS LAHAN SAWAH									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ciwidey	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.341	1.418	1.418	1.418	1.397
2	Rancabali	598	596	596	551	596	548	464	464	464	460
3	Pasirjambu	1.471	1.471	1.471	1.471	1.242	1.044	960	960	946	676
4	Cimaung	1.708	1.705	1.705	1.705	1.705	1.679	1.593	1.593	1.563	1.287
5	Pangalengan	538	538	538	538	566	465	381	381	381	198
6	Kertasari	178	178	178	174	178	158	75	75	145	74
7	Pacet	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	1.811	1.725	1.725	1.725	1.460
8	Ibun	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.118	1.133	1.133	1.133	1.090
9	Paseh	1.520	1.520	1.520	1.520	1.525	1.216	1.423	1.423	1.423	1.366
10	Cikancung	904	904	904	904	941	555	956	956	927	847
11	Cicalengka	1.024	1.007	961	961	904	846	950	950	920	795
12	Nagreg	355	355	355	355	355	273	289	289	289	286
13	Rancaekek	3.120	3.111	3.072	3.072	3.072	2.950	3.099	3.099	3.072	3.052



NO	KECAMATAN	PERKEMBANGAN LUAS LAHAN SAWAH									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Majalaya	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.177	1.235	1.235	1.235	1.181
15	Solokan Jeruk	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.736	1.655	1.655	1.650	1.633
16	Ciparay	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905	2.612	2.525	2.525	2.525	2.542
17	Baleendah	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.261	1.176	1.176	1.175	1.076
18	Arjasari	1.489	1.489	1.489	1.487	1.473	1.269	1.184	1.184	1.269	1.224
19	Banjaran	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.315	1.230	1.230	1.230	1.223
20	Cangkuang	1.169	1.169	1.169	1.129	1.129	931	846	846	846	786
21	Pameungpeuk	860	842	796	749	749	723	820	820	765	733
22	Katapang	887	842	842	842	842	796	711	711	711	593
23	Soreang	851	846	846	846	846	834	749	749	749	599
24	Kutawaringin	1.531	1.527	1.527	1.527	1.527	1.137	1.052	1.052	1.052	1.086
25	Margaasih	573	573	573	573	573	539	455	455	455	427
26	Margahayu	55	55	55	55	55	29	68	68	68	54
27	Dayeuhkolot	133	133	133	133	133	131	188	188	188	135
28	Bojongsoang	1.602	1.588	1.588	1.588	1.588	1.644	1.597	1.597	1.597	1.423
29	Cileunyi	1.115	1.112	1.112	1.112	1.112	701	883	883	883	746
30	Cilengkrang	285	266	266	143	143	141	220	220	204	186
31	Cimencyan	224	224	224	224	224	181	98	98	98	110
	Jumlah	35.682	35.543	35.412	35.151	34.970	31.161	31.158	31.158	31.106	28.748

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024(diolah)

Lima kecamatan dengan penurunan laju penurunan lahan sawah terbesar terjadi di **Pangalengan** (63,20%), **Kertasari** (58,43%), **Pasirjambu** (54,04%), **Cimencyan** (50,89%), dan **Cilengkrang** (34,74%). Adapun lima kecamatan dengan penurunan laju pertumbuhan lahan sawah terendah terjadi di **Margahayu** (1,82%), **Rancaekek** (2,18%), **Ciwidey** (2,38%), **Majalaya** (5,97%), dan **Banjaran** (6,14%). Alih fungsi lahan pertanian umumnya disebabkan oleh perubahan menjadi lahan non pertanian. Namun, terdapat juga perubahan lahan sawah basah menjadi lahan sawah tadah hujan / lahan kering. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya pasokan air dilahan tersebut. Data mengenai luas lahan sawah tadah hujan dapat dilihat pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2.24 Perkembangan Luas lahan sawah di Kabupaten Bandung tahun 2014-2023

NO	KECAMATAN	PERKEMBANGAN LUAS LAHAN SAWAH TADAH HUJAN									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ciwidey	182	182	100	100	82	15	15	15	15	392
2	Rancabali	128	126	126	121	126	86	86	86	86	33
3	Pasirjambu	97	97	97	214	115	115	115	115	32	452
4	Cimaung	50	50	50	50	50	50	50	50	53	252
5	Pangalengan	36	36	36	36	64	64	64	64	64	25
6	Kertasari	38	38	38	38	38	28	28	28	10	0
7	Pacet	403	403	303	403	284	210	210	210	210	310
8	Ibun	129	119	129	129	129	118	118	118	129	336
9	Paseh	178	178	163	178	290	127	127	127	127	232
10	Cikancung	154	154	154	154	368	142	342	342	332	510
11	Cicalengka	123	50	11	11	50	88	88	88	162	415
12	Nagreg	81	81	81	81	81	81	81	81	81	112
13	Rancaekek	92	86	47	92	92	639	639	639	612	1.459
14	Majalaya	73	73	73	73	73	76	76	76	76	18



NO	KECAMATAN	PERKEMBANGAN LUAS LAHAN SAWAH TADAH HUJAN									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15	Solokan Jeruk	43	43	43	43	43	43	43	43	43	819
16	Ciparay	25	50	50	50	50	54	54	54	54	84
17	Baleendah	135	135	135	135	135	135	135	135	99	120
18	Arjasari	102	102	102	100	100	250	250	250	122	410
19	Banjaran	-	-	-	-	20	20	20	20	20	272
20	Cangkuang	71	79	79	79	79	79	79	79	79	111
21	Pameungpeuk	53	79	-	20	20	20	20	20	20	5
22	Katapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
23	Soreang	-	-	-	80	80	80	80	80	80	57
24	Kutawaringin	201	378	375	375	375	242	242	242	115	128
25	Margaasih	15	15	15	15	15	15	15	15	15	9
26	Margahayu	20	20	25	25	25	10	29	29	29	54
27	Dayeuhkolot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
28	Bojongsoang	23	23	23	23	23	210	210	210	210	894
29	Cileunyi	434	431	431	431	400	163	163	163	254	356
30	Cilengkrang	-	-	-	-	-	5	5	5	5	119
31	Ciminyan	30	27	27	27	27	27	27	27	24	110
	Jumlah	2.916	3.055	2.713	3.083	3.234	3.192	3.411	3.411	3.158	8.136

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

selama periode 2014 -2023 mengalami peningkatan menjadi hampir tiga kali lipat nya (279,03%). Data mengenai luas lahan sawah tadah hujan dapat dilihat pada **Tabel 2.25**.

Tabel 2.25 Perkembangan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2022

NO	KECAMATAN	PERKEMBANGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH							
		2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	Ciwidey	-	-	-	-	(90)	77	-	-
2	Rancabali	(2)	-	(45)	45	(48)	(84)	-	-
3	Pasirjambu	-	-	-	(229)	(198)	(84)	-	(14)
4	Cimaung	(3)	-	-	-	(26)	(86)	-	(30)
5	Pangalengan	-	-	-	28	(101)	(84)	-	-
6	Kertasari	-	-	(4)	4	(20)	(83)	-	70
7	Pacet	-	-	-	-	(324)	(86)	-	-
8	Ibun	-	-	-	-	(131)	15	-	-
9	Paseh	-	-	-	5	(309)	207	-	-
10	Cikancung	-	-	-	37	(386)	401	-	(29)
11	Cicalengka	(17)	(46)	-	(57)	(58)	104	-	(30)
12	Nagreg	-	-	-	-	(82)	16	-	-
13	Rancaekek	(9)	(39)	-	-	(122)	149	-	(27)
14	Majalaya	-	-	-	-	(79)	58	-	-
15	Solokan Jeruk	-	-	-	-	(93)	(81)	-	(5)
16	Ciparay	-	-	-	-	(293)	(87)	-	-
17	Baleendah	-	-	-	-	(123)	(85)	-	(1)
18	Arjasari	-	-	(2)	(14)	(204)	(85)	-	85
19	Banjaran	-	-	-	-	12	(85)	-	-
20	Cangkuang	-	-	(40)	-	(198)	(85)	-	-
21	Pameungpeuk	(18)	(46)	(47)	-	(26)	97	-	(55)
22	Katapang	(45)	-	-	-	(46)	(85)	-	-
23	Soreang	(5)	-	-	-	(12)	(85)	-	-
24	Kutawaringin	(4)	-	-	-	(390)	(85)	-	-



NO	KECAMATAN	PERKEMBANGAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH							
		2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
25	Margaasih	-	-	-	-	(34)	(84)	-	-
26	Margahayu	-	-	-	-	(26)	39	-	-
27	Dayeuhkolot	-	-	-	-	(2)	57	-	-
28	Bojongsoang	(14)	-	-	-	56	(47)	-	-
29	Cileunyi	(3)	-	-	-	(411)	182	-	-
30	Cilengkrang	(19)	-	(123)	-	(2)	79	-	(16)
31	Cimencyan	-	-	-	-	(43)	(83)	-	-
	Jumlah	(139)	(131)	(261)	(181)	(3.809)	(3)	-	(52)

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024

Pada Tahun 2022 telah ditandatangani BA Kesepakatan verifikasi aktual penyelesaian ketidaksesuaian lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang. dari BA tersebut disepakati bahwa luasan LSD sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan / Sub Zona Tanaman Pangan adalah seluas 16.915,90 Ha. BA ini kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan RTRW sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan dinyatakan bahwa luas Kawasan Tanaman Pangan kurang lebih 22.582 Hektar dan seluas 17.709 hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 17.709 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan) hektar. Data mengenai luas lahan sawah dilindungi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Tabel 2.26**.

Tabel 2.26 Luas Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Bandung Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Ciparay	2178,58
2	Pacet	1452,65
3	Cimaung	1285,75
4	Ciwidey	942,17
5	Paseh	938,12
6	lbum	897,71
7	Arjasari	893,30
8	Banjaran	776,41
9	Rancaekek	742,99
10	Pasirjambu	730,47
11	Baleendah	646,93
12	Majalaya	641,45
13	Solokanjeruk	629,32
14	Pameungpeuk	513,84
15	Cicalengka	481,81
16	Cikancung	479,16
17	Rancabali	403,82
18	Pangalengan	393,21
19	Cangkuang	370,16
20	Bojongsoang	363,46
21	Kutawaringin	279,39
22	Katapang	236,80
23	Soreang	175,67
24	Cilengkrang	173,25
25	Nagreg	83,43
26	Cileunyi	80,46
27	Kertasari	64,18
28	Margaasih	31,02
29	Cimencyan	29,99
	TOTAL	16.915,90
	GRAND TOTAL	16.915,76



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024

Dengan semakin berkurang luas lahan pertanian, maka kedepan perlu ada upaya upaya intensifikasi pertanian secara massif namun tetap berkelanjutan. Perlu ada dukungan yang kuat terhadap perbaikan pengelolaan pertanian secara keseluruhan, baik aspek kebijakan, penyediaan infrastuktur dan sarana pertanian, pembiayaan, penguatan kelembagaan sdm petani. Investasi ini diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Bandung

➤ **Kondisi Komoditas Pangan: Padi dan Palawija**

Keberadaan padi dan palawija sangat menentukan ketahanan pangan di suatu daerah. Komoditas-komoditas yang dimaksud dalam palawija dapat direpresentasikan dalam jagung, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu. Ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur provitas atau produktivitas padi dan palawija berasal dari hasil pembagian jumlah produksi (ton) dengan luas panen (Ha). Informasi mengenai luas panen, jumlah produksi, provitas, beserta dengan laju pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir ini untuk padi dan palawija dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.27 Luas Panen serta Laju Pertumbuhan Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)			Laju Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Padi	103.484	98.628	87.145	-4,69%	-11,64%	-15,79%
Jagung	15.906	17.408	12.587	9,44%	-27,69%	-20,87%
Kacang Tanah	1.399	1.685	1.543	20,44%	-8,43%	10,29%
Kedelai	283	413	36	45,94%	-91,28%	-87,28%
Ubi Jalar	2.503	3.682	3.410	47,10%	-7,39%	36,24%
Ubi Kayu	3.896	5.670	3.881	45,53%	-31,55%	-0,39%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.28 Jumlah Produksi serta Laju Pertumbuhan Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Jenis Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)			Laju Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Padi	657.813	630.713	557.334	-4,12%	-11,63%	-15,27%
Jagung	107.154	118.011	85.336	10,13%	-27,69%	-20,36%
Kacang Tanah	2.001	2.439	2.248	21,89%	-7,83%	12,34%
Kedelai	426	596	52	39,91%	-91,28%	-87,79%
Ubi Jalar	33.876	50.179	46.614	48,13%	-7,10%	37,60%
Ubi Kayu	82.244	120.041	82.159	45,96%	-31,56%	-0,10%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.29 Provitas serta Laju Pertumbuhan Padi dan Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Jenis Komoditas	Provitas (Ton/Ha)			Laju Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Padi	6,36	6,39	6,4	0,47%	0,16%	0,63%
Jagung	6,74	6,78	6,78	0,59%	0,00%	0,59%
Kacang Tanah	1,43	1,45	1,46	1,40%	0,69%	2,10%
Kedelai	1,51	1,44	1,44	-4,64%	0,00%	-4,64%
Ubi Jalar	13,53	13,63	13,67	0,74%	0,29%	1,03%
Ubi Kayu	21,11	21,17	21,17	0,28%	0,00%	0,28%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Kondisi tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa padi menguasai lebih dari tiga per empat nya (77,36%-81,18%) lahan keseluruhan yang ditanami komoditas pangan diatas. Hal tersebut diikuti juga oleh jumlah produksi yang mendominasi lebih dari dua per tiga nya (68,41%-74,45%) produksi



keseluruhan. Akan tetapi, provitas komoditas padi berada dibawah ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Secara keseluruhan, luas panen dan jumlah produksi padi dan palawija mengalami penurunan dari 2021 ke 2023, khususnya komoditas padi. Hanya komoditas kacang tanah dan ubi jalar mengalami peningkatan luas panen dan jumlah produksi secara keseluruhan. Walaupun demikian, pada dasarnya selama tiga tahun berturut-turut produktivitas pertanian mengalami peningkatan, karena hal tersebut ditunjukkan melalui indikator provitasnya. Satu-satunya sektor yang mengalami penurunan provitas adalah kedelai.

Kondisi komoditas-komoditas padi dan palawija di berbagai kecamatan tidaklah sama. Kecamatan yang unggul dalam sektor padi belum tentu unggul di komoditas-komoditas palawija, demikian juga sebaliknya. Rata-rata provitas selama tiga tahun dapat menjadi suatu indikator untuk mengindikasikan kecamatan-kecamatan yang unggul dalam setiap komoditas. Berikut disajikan tabel untuk lima kecamatan terunggul atau dengan rata-rata provitas tertinggi pada setiap komoditas.

Tabel 2.30 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Padi

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Provitas (Kwt/Ha)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Rancaekek	47.453	50.828	53.099	68,40	66,91	65,74
2	Solokan Jeruk	32.586	31.496	25.806	67,89	66,36	65,32
3	Majalaya	25.327	23.374	20.984	67,76	66,20	65,19
4	Bojongsoang	32.031	31.274	20.273	66,59	66,75	64,77
5	Soreang	15.082	15.349	15.228	66,59	65,74	65,19

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Rata-rata provitas padi tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di lima kecamatan berikut ini: Rancaekek (67,02); Solokan Jeruk (66,52); Majalaya (66,38); Bojongsoang (66,04); dan Soreang (65,84).

Tabel 2.31 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Jagung

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Provitas (Kwt/Ha)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nagreg	32.078	36.648	29.315	69,09	69,02	69,25
2	Cileunyi	4.706	6.934	3.575	67,90	68,51	68,48
3	Cicalengka	11.039	15.010	4.742	68,31	68,29	68,23
4	Pacet	3.739	6.113	3.225	67,73	67,85	68,17
5	Cikancung	8.877	7.958	6.880	67,61	67,96	67,99

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Rata-rata provitas jagung tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di lima kecamatan: Nagreg (69,12); Cileunyi (68,30); Cicalengka (68,28); Pacet (67,92); dan Cikancung (67,85).

Tabel 2.32 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Kedelai

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Provitas (Kwt/Ha)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Cangkuang	103	144	1	18,44	15,19	14,26
2	Paseh	33	93	4	14,30	14,34	14,50
3	Banjaran	-	4	32	-	14,27	14,53
4	Soreang	57	107	-	14,24	14,27	-
5	Cimaung	77	67	-	14,21	14,18	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Rata-rata provitas kedelai tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di lima kecamatan berikut ini: Cangkuang (15,96); Paseh (14,38); Banjaran (9,60); Soreang (9,50); dan Cimaung (9,46).



Tabel 2.33 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Ubi Kayu

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Provitas (Kwt/Ha)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Paseh	4.774	9.072	5.538	212,16	212,47	212,19
2	Cileunyi	9.976	9.382	10.079	212,26	212,26	212,19
3	Cicalengka	2.503	9.173	1.399	212,12	212,35	211,96
4	Cimaung	5.217	7.924	6.788	212,09	211,86	212,12
5	Kutawaringin	2.610	5.650	1.781	212,21	211,61	211,98

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Rata-rata provitas ubi kayu tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di lima kecamatan: Paseh (212,27); Cileunyi (212,24); Cicalengka (212,14); Cimaung (212,02), dan Kutawaringin (211,93).

Tabel 2.34 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Ubi Jalar

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Provitas (Kwt/Ha)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Arjasari	5.291	6.824	4.799	137,08	137,31	137,89
2	Cimaung	6.854	13.475	12.866	137,63	136,95	137,46
3	Pacet	1.897	1.925	1.686	136,49	136,51	137,11
4	Banjaran	1.863	3.457	3.554	136,99	136,11	136,70
5	Cileunyi	1.106	2.386	2.032	136,51	136,34	136,39

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Rata-rata provitas ubi jalar tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di lima kecamatan: Arjasari (137,43); Cimaung (137,35); Pacet (136,70); Banjaran (136,60); dan Cileunyi (136,41).

Tabel 2.35 Lima Kecamatan Terunggul Pada Komoditas Kacang Tanah

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Provitas (Kwt/Ha)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Paseh	238	203	317	14,45	14,83	14,87
2	Cimaung	49	76	59	14,70	14,82	14,45
3	Nagreg	280	320	263	14,43	14,49	15,01
4	Pacet	76	283	91	14,59	14,42	14,89
5	Cikancung	378	241	163	14,31	14,49	15,08

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Rata-rata provitas kacang tanah tertinggi selama tiga tahun berturut-turut di lima kecamatan berikut ini: Paseh (14,72); Cimaung (14,66), Nagreg (14,64); Pacet (14,63); dan Cikancung (14,63).

➤ **Kondisi Hortikultura**

Performa **bawang merah, cabai keriting, dan cabai rawit** dapat mewakili sayuran buah musiman secara keseluruhan. Ketiga komoditas ini sudah mewakili sekitar seperempat total produksi (23,27%) dari sayuran buah musiman pada tahun 2023, meskipun luas panen tidak mencapai sepersepuluhnya (8,44%). Ketiga sektor ini selama tiga tahun terakhir ini diperkirakan berkontribusi terhadap produksi Jawa Barat, yaitu: bawang merah (37%), cabai keriting (32%), dan cabai rawit (17%). **Gambar 2.17** menjelaskan fluktuasi provitas dari masing-masing komoditas, dimana dapat dilihat bahwa bawang merah cenderung paling stabil dan cabai rawit paling fluktuatif pada tahun 2023. Adapun informasi mengenai luas panen, jumlah produksi, provitas, beserta dengan laju pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir ini untuk padi dan palawija dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.



Tabel 2.36 Luas Panen Bawang Merah, Cabai Keriting, dan Cabai Rawit di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)			Laju Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Bawang Merah	5.002	6.595	5.507	31,85%	-16,50%	10,10%
Cabai Keriting	3.338	3.275	3.039	-1,89%	-7,21%	-8,96%
Cabai Rawit	1.342	1.518	1.490	13,11%	-1,84%	11,03%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.37 Jumlah Produksi Bawang Merah, Cabai Keriting, dan Cabai Rawit di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Jenis Komoditas	Jumlah Produksi (Kwt)			Laju Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Bawang Merah	58.900	77.279	65.515	31,20%	-15,22%	11,23%
Cabai Keriting	69.820	63.833	59.371	-8,57%	-6,99%	-14,97%
Cabai Rawit	23.680	30.760	27.638	29,90%	-10,15%	16,71%

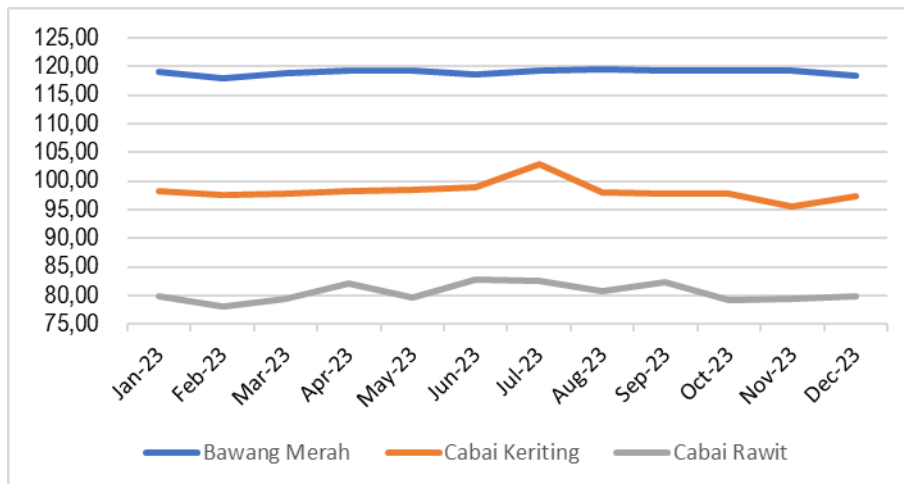
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.38 Provititas Bawang Merah, Cabai Keriting, dan Cabai Rawit di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

Jenis Komoditas	Provititas (Kwt/Ha)			Laju Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Bawang Merah	11,78	11,72	11,90	-0,51%	1,54%	1,02%
Cabai Keriting	20,92	19,49	19,54	-6,84%	0,26%	-6,60%
Cabai Rawit	17,65	20,27	18,55	14,84%	-8,49%	5,10%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Gambar 2.17 Pergerakan Musiman Provititas Tiga Komoditas Sayuran Buah Semusim



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Performa **kopi arabika, kopi robusta, dan teh** dapat mewakili sub sektor perkebunan secara keseluruhan. Ketiga komoditas ini sudah mewakili lebih dari tiga per empat total produksi (81,58%) dari sub sektor perkebunan pada tahun 2023, dengan luas panen yang juga sangat fantastis (83,03%). **Tabel 2.39** akan menampilkan informasi luas areal, produksi, provititas, dan laju pertumbuhan untuk ketiga komoditas tersebut.

Tabel 2.39 Performa Tiga Komoditas Sub Sektor Perkebunan

Jenis Komoditas	Tahun 2023		
	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Provititas (Kg/Ha)
Kopi Arabika	14.808,46	8508,67	872,47
Kopi Robusta	150,00	97,09	898,98
Teh	1,697,00	3.177,30	1.915,19

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)



Lima komoditas buah sayur tahunan dengan total produksi terbanyak di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 adalah **pisang, alpukat, jeruk siam/keprok, mangga, dan jambu biji**. Kelima jenis buah ini sudah mewakili lebih dari separuh total produksi (59,96%) dari buah sayur tahunan pada tahun 2023, dengan luas panen yang juga mendominasi (59,01%). **Tabel 2.40** akan menampilkan informasi luas areal, produksi, provitas, dan laju pertumbuhan untuk kelima buah tersebut.

Tabel 2.40 Performa Lima Buah Sayur Tahunan

Jenis Komoditas	Tahun 2023		
	Luas Panen (rumpun)	Jumlah Produksi (Kwt)	Provitas (Kg/rumpun)
Pisang	159.963	157.831	98,67
Alpukat	97.038	82.916	85,45
Jeruk Siam/Keprok	64.544	66.494	103,02
Mangga	48.896	51.721	105,58
Jambu Biji	52.660	43.208	82,05

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

➤ Kondisi Peternakan

Sub sektor peternakan dapat disederhanakan menjadi dalam tiga komoditas saja, yaitu: daging, susu, dan telur. Jumlah produksi pada tahun 2023 di Kabupaten Bandung untuk seluruh komoditas tersebut adalah: daging (46.379 ton), susu (68.867 ton), dan telur (9.473 ton). Adapun hewan ternak pada tahun tersebut sebagai gambaran dari performa sub sektor ini, yaitu: sapi potong (14.797 ekor jantan dan 8.894 ekor betina), sapi perah (6.370 ekor jantan dan 21.291 ekor betina), domba (91.086 ekor jantan dan 131.502 ekor betina), kambing (7.566 ekor jantan dan 12.339 ekor betina), serta ayam ras pedaging (4.063.367 ekor jantan). Tabel-tabel dibawah ini menampilkan lima kecamatan dengan masing-masing jumlah hewan ternak terbanyak.

Tabel 2.41 Lima Kecamatan dengan Populasi Sapi Potong Terbanyak

Nama Kecamatan	Sapi Potong (Ekor)		
	Jantan	Betina	Total
Cikancung	8.251	6.270	14.521
Ciminyan	1.030	12	1.042
Pasirjambu	642	362	1.004
Cileunyi	880	95	975
Kutawaringin	701	260	961

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.42 Lima Kecamatan dengan Populasi Sapi Perah Terbanyak

Nama Kecamatan	Sapi Perah (Ekor)		
	Jantan	Betina	Total
Pangalengan	3.725	10.875	14.600
Cilengkrang	835	3.365	4.200
Kertasari	523	2.715	3.238
Pasirjambu	515	1.478	1.993
Arjasari	-	1.334	1.334

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.43 Lima Kecamatan dengan Populasi Domba Terbanyak

Nama Kecamatan	Domba (Ekor)		
	Jantan	Betina	Total
Ibun	47.464	62.064	109.528
Arjasari	1.293	11.018	12.311
Rancaekek	4.432	6.965	11.397
Cimaung	3.934	4.525	8.459
Kertasari	2.175	4.840	7.015

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)



Tabel 2.44 Lima Kecamatan dengan Populasi Kambing Terbanyak

Nama Kecamatan	Kambing (Ekor)		
	Jantan	Betina	Total
Pasirjambu	665	1.187	1.852
Ciwidey	551	974	1.525
Kertasari	556	872	1.428
Rancabali	394	684	1.078
Pangalengan	351	602	953

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Tabel 2.45 Lima Kecamatan dengan Populasi Ayam Ras Pedaging Terbanyak

Nama Kecamatan	Ayam Ras Pedaging (Ekor)
	Total
Cikancung	1.470.000
Arjasari	675.000
Cimaung	395.500
Paseh	230.000
Ibun	170.000

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

➤ **Kondisi Perikanan**

Perikanan merupakan salah satu potensi yang cukup penting di Kabupaten Bandung dimana pembenihan dan pengolahan menjadi segmen utama perikanan di Kabupaten Bandung. **Tabel 2.46** menampilkan jumlah produksi berbagai komoditas ikan, dimana ikan mas, nila, dan lele mendapatkan penekanan khusus. Adapun jumlah produksi ikan hias yang dilaporkan dalam satuan ekor, karena konteks pada kategori ini adalah bukan ikan yang dikonsumsi atau dimakan, seperti halnya ikan-ikan lainnya.

Tabel 2.46 Produksi Perikanan di Kabupaten Bandung

NO	KOMODITAS	PRODUKSI PERIKANAN					Laju Pertumbuhan 2019-2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ikan Mas (ton)	3.500,60	3.778,93	3.790,81	1.364,12	1.532	-56,24%
2	Ikan Nila (ton)	4.350,39	4.425,21	4.457,54	2.962,30	3.094	-28,88%
3	Ikan Lele (ton)	5.960,82	5.855,57	6.216,490	11.080,76	11.343	90,29%
4	Aneka Ikan (ton)	672,14	621,98	619,39	128,30	110	-83,63%
5	Ikan Hias (ekor)	1.411.349	1.437.241	1.230.906	5.365.261	5.535.570	292,22%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa ikan hias mengalami pertumbuhan terbesar sepanjang lima tahun terakhir ini, dimana nilainya hampir menjadi empat kali lipatnya. Itulah sebabnya, perlu menaruh perhatian pada budidaya ikan hias yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: **Pacet, Ciparay, Ibun, Cangkung, Baleendah, Rancaekek, Katapang, dan beberapa kecamatan lainnya.** Penurunan terbesar pada aneka ikan diduga terjadi karena berpindahnya produksi ke sektor lainnya, seperti ikan lele yang naik hampir dua kali lipatnya selama lima tahun.

Laju pertumbuhan produksi ikan dapat dijaga dengan menaruh perhatian pada kecamatan-kecamatan yang unggul dalam **pembenihan, pembesaran, pengolahan, dan minapadi ikan.** Lahan yang digunakan di kabupaten Bandung untuk produksi perikanan sebesar 1.230,37 Ha, pembenihan sebesar 278,35 Ha, serta minapadi sebesar 4.480,59 Ha. Wilayah pembenihan terkonsentrasi pada kecamatan **Majalaya, Ciparay, Pacet, Ibun, Paseh, Bojongsoang, dan Banjaran.** Adapun daerah yang berpotensi dalam pembesaran ikan tersebar di kecamatan **Bojongsoang, Ciparay, Majalaya,**



Pacet, Paseh, Soreang, dan Igun. Setelah itu, pengolahan perikanan didominasi pada kecamatan **Banjaran, Pasirjambu, Bojongsoang, Majalaya dan lainnya.**

Bojongsoang dan Majalaya adalah dua daerah yang sebenarnya berpotensi untuk memaksimalkan produksi perikanan di Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi, karena Bojongsoang menjadi kecamatan dengan lahan produksi perikanan terbesar seluas 479,33 Ha pada tahun 2023 dengan jumlah lebih dari sepertiganya (39,86%) dari keseluruhan Kabupaten Bandung. Lalu, Majalaya merupakan kecamatan dengan lahan pembenihan perikanan terbesar seluas 82,62 Ha pada tahun 2023 dengan jumlah mendekati sepertiganya (29,68%) dari keseluruhan. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kedua kecamatan tersebut. RTRW kecamatan Bojongsoang mengalokasikan daerah ini untuk luas wilayah perikanan sebesar 130 Ha. Bahkan, untuk kecamatan Majalaya sama sekali tidak memiliki pola ruang perikanan. Adapun budidaya Minapadi ikan masih berkaitan dengan perikanan. Kecamatan yang mendominasi dengan kontribusi lebih dari separuh (51,57%) luas lahan di Kabupaten Bandung adalah **Majalaya (994,19 Ha), Ciparay (713,50 Ha), dan Pacet (603,00 Ha).** Daerah-daerah seperti kecamatan **Igun, Banjaran, Soreang, Cangkung, dan Ciwidey** juga memiliki luas lahan yang besar, sehingga berpotensi dalam minapadi perikanan.

➤ **Sumber Daya Petani**

Salah satu penggerak sektor pertanian adalah petani dan kelembagaan kelompok tani. BPS mencatat bahwa, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada tahun 2023 berdasarkan hasil pencacahan lengkap sensus pertanian pada tahap 1 sebesar 158.965 rumah tangga. Adapun jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) sebesar 162.216 unit. Jumlah RUTP tersebut naik 12.08% dan UTP naik 1.05 % dari Sensus Pertanian 2013. Jumlah RUTP maupun UTP yang terbesar bergerak di sektor tanaman pangan, diikuti hortikultura dan peternakan. Berdasarkan sensus tahun 2023, diperoleh data bahwa, jumlah petani milenial yang berumur 19-39 tahun sebanyak 30.812 orang. Jumlah ini cukup banyak, karena mewakili hampir seperlima (19,39%) dari keseluruhan petani di kabupaten Bandung.

Data jumlah petani yang terdaftar di SIMLUHTAN pada Juli 2023 menunjukkan bahwa, jumlah petani yang sudah bergabung dalam kelompok tani sebesar 120.985 orang. Seluruh petani tersebut masuk ke dalam 3.910 kelompok tani. Apabila diasumsikan bahwa, satu UTP berarti satu petani, maka terdapat selisih sebesar 41.231 petani yang belum bergabung dalam kelompok tani dan belum terdaftar dalam SIMLUHTAN. Data pada waktu yang sama menunjukkan bahwa, terdapat 3921 kelompok tani (Poktan), dimana hampir dua per tiganya (65,83%) atau sebanyak 2581 Poktan masuk ke dalam kelompok pemula. Sisanya, sebesar 1.235 Poktan (31,50%) dikategorikan ke dalam kelas lanjut, 90 Poktan (2,30%) kelas madya, dan hanya sebesar 7 Poktan (0,18%) diklasifikasikan sebagai kelas utama. Informasi mengenai jumlah RTUP di Kabupaten Bandung beserta dengan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga dapat dilihat pada **Tabel 2.47**

Tabel 2.47 Jumlah RTUP di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga

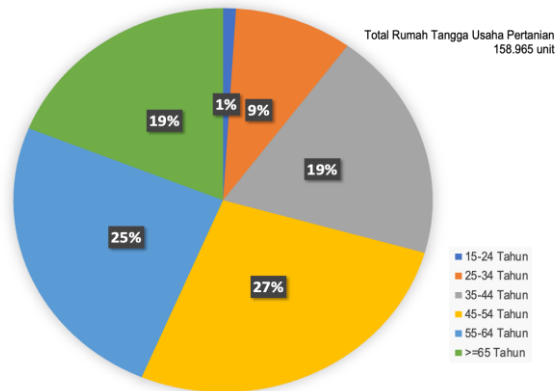
TAHUN	Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga						Jumlah
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	>64	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	1.313	14.822	32.035	38.550	34.358	25.575	146.353
2023	1.568	14.513	30.685	42.801	39.264	30.034	158.965
Laju Pertumbuhan	19,42%	-2,08%	-4,21%	11,03%	14,28%	18,83%	8,62%

Sumber: Sensus Pertanian (BPS, 2023)



Data diatas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran kepala RTUP yang berusia produktif di 25-44 tahun ke 15-24 dan diatas 45 tahun. Gambar 2.18 menjelaskan distribusi masing-masing umur untuk RTUP pada tahun 2023 berdasarkan tabel yang tertera di atas. Adapun Gambar 2.19 menampilkan jumlah petani (dalam satuan orang) yang menggunakan lahan pertanian di setiap kecamatan.

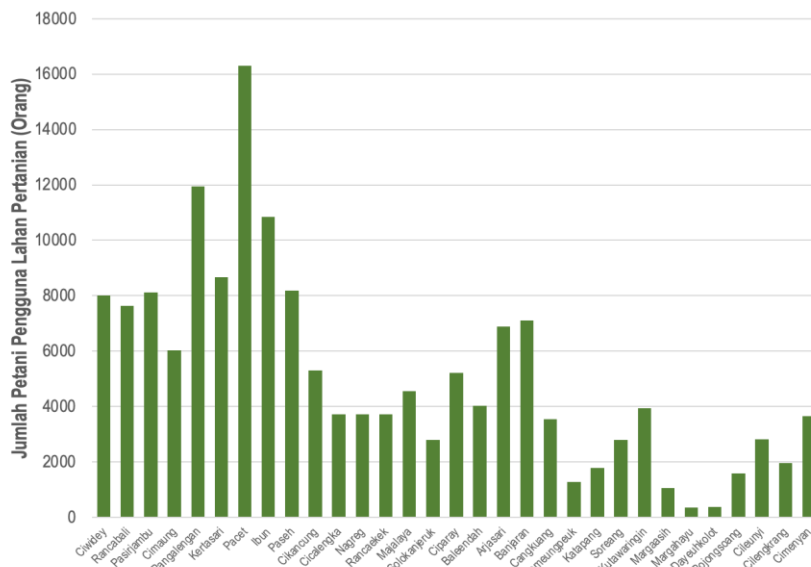
Gambar 2.18 Distribusi Kelompok Umur RTUP Kabupaten Bandung Tahun 2023



Sumber: Sensus Pertanian, BPS Tahun 2023

Jumlah kelompok tani (Poktan) beserta rinciannya di setiap kecamatan yang terbaru pada tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.48**

Gambar 2.19 Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan



Sumber: Sensus Pertanian, BPS Tahun 2023

Tabel 2.48 Kelompok Tani, Jumlah Desa, dan Data Terkait di Setiap Kecamatan yang Terdapat pada Kabupaten Bandung

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA DENGAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)	JUMLAH BLOK	JUMLAH POKTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ciparay	2.178,58	14	13	159	87
2	Pacet	1.452,65	13	13	126	194
3	Cimaung	1.285,75	10	10	65	84
4	Ciwidey	942,17	7	7	61	70
5	Paseh	938,12	12	10	52	45



NO	KECAMATAN	LUAS AREAL (HA)	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA DENGAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)	JUMLAH BLOK	JUMLAH POKTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Ibun	897,71	12	11	59	60
7	Arjasari	893,3	11	11	86	75
8	Banjaran	776,41	11	10	73	43
9	Rancaekek	742,99	14	7	52	28
10	Pasirjambu	730,47	10	9	61	57
11	Baleendah	646,93	8	7	31	29
12	Majalaya	641,45	11	8	56	49
13	Solokanjeruk	629,32	7	7	38	30
14	Pameungpeuk	513,84	6	5	34	21
15	Cicalengka	481,81	12	10	57	35
16	Cikancung	479,16	9	9	66	37
17	Rancabali	403,82	5	2	20	35
18	Pangalengan	393,21	13	5	24	18
19	Cangkuang	370,16	7	7	41	28
20	Bojongsoang	363,46	6	5	31	26
21	Kutawaringin	279,39	11	7	81	52
22	Katapang	236,8	7	4	32	30
23	Soreang	175,67	10	5	38	10
24	Cilengkrang	173,25	6	5	26	27
25	Nagreg	83,43	8	5	23	17
26	Cileunyi	80,46	6	5	15	10
27	Kertasari	64,18	8	2	7	7
28	Margaasih	31,02	6	1	4	4
29	Cimencyan	29,99	9	7	14	11
	Jumlah	16.915,76	269	207	1.432	1.219

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2023

b. Potensi Pariwisata dan Budaya

Sektor Pariwisata merupakan sektor potensial yang sedang meningkat secara pesat di Kabupaten Bandung. Adapun proses pengembangannya tidak terlepas dari dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA). Pada dokumen tersebut kawasan pariwisata terbagi kedalam beberapa klasifikasi dengan jumlah 13 kawasan, meliputi:

1. Kawasan Pariwisata Perkotaan Soreang
2. Kawasan Agrowisata Edukatif Ciwidey
3. Kawasan Ekowisata Pegunungan Kawah Putih
4. Kawasan Pariwisata Perairan Danau Situ Patenggang
5. Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda – Jelekong
6. Kawasan Pariwisata Petualangan Alam Lamajang
7. Kawasan Agrowisata Rekreatif Malabar
8. Kawasan Pariwisata Olahraga Air Cileunca
9. Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang
10. Kawasan Pariwisata Alam Hutan Paseh
11. Kawasan Rekreasi Alam Cicalengka - Nagreg
12. Kawasan Pariwisata Sejarah Cileunyi – Rancaekek
13. Kawasan Geowisata Cimencyan – Cilengkrang

Adapun berdasarkan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), potensi pariwisata di Kabupaten Bandung terbagi menjadi 7 DPK yaitu:



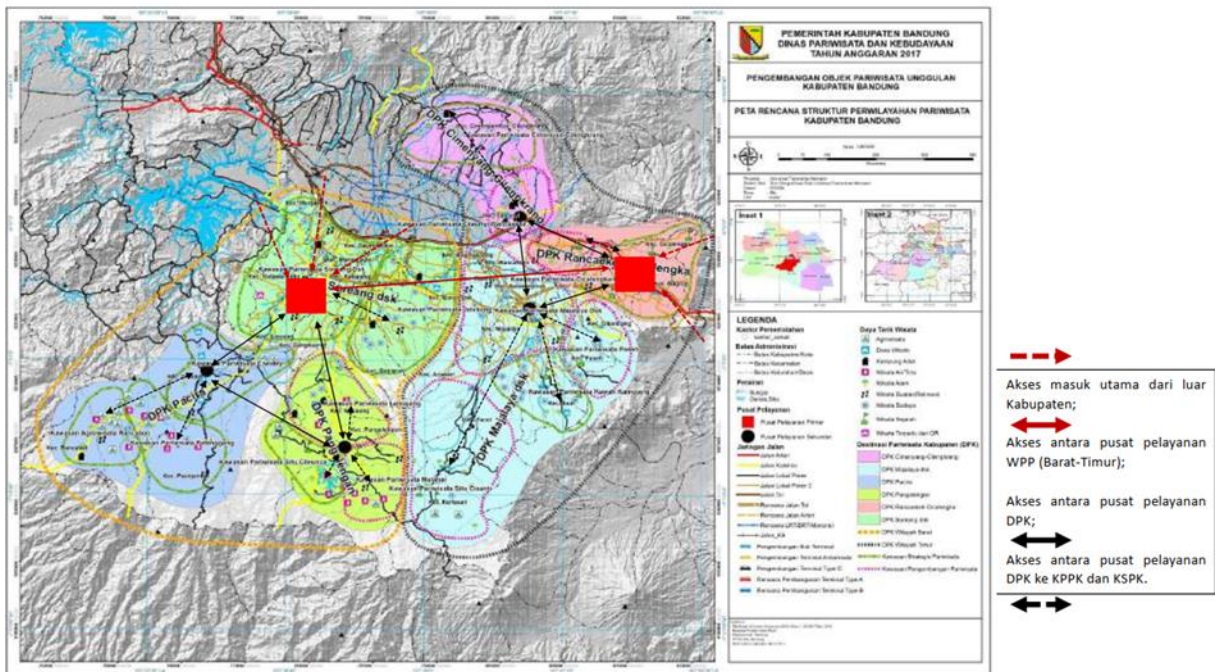
Gambar 2.20 Destinasi Pariwisata Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen Riparda Kabupaten Bandung, 2019.

Secara akses pelayanan DPK yang ada di kabupaten Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.21 Pengembangan Objek Wisata Unggulan Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen Riparda Kabupaten Bandung, 2019

Berdasarkan gambar maka dapat terlihat bahwa akses antar DPK sudah terhubung dengan cukup baik terutama dengan adanya tol Soreang-Pasirkoja yang membuat akses pariwisata di Bandung Selatan lebih mudah. Adapun yang menjadi akses utama antara DPK timur dan Barat belum terhubung dengan baik sehingga perlu dibangun akses langsung yang menghubungkan 2 wilayah tersebut. Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Bandung tahun 2022 ialah sebagai berikut:

Tabel 2.49 Data Jumlah Destinasi dan Kunjungan Pariwisata Kabupaten Bandung tahun 2022

DP (Daerah Pembangunan)	Jumlah Desa Wisata	Jumlah Destinasi	Total Kunjungan
Soreang & sekitarnya	13	141	952.855
Pacira	15	161	1.443.350
Pangalengan	11	115	1.444.071
Majalaya	22	155	683.513
Cicalengka & sekitarnya	16	61	386.384



DP (Daerah Pembangunan)	Jumlah Desa Wisata	Jumlah Destinasi	Total Kunjungan
Cimencyan – Cilengkrang & Cileunyi	10	94	1.249.727
Dayeuhkolot – Baleendah & Bojongsoang	3	80	490.663
Total Destinasi & Kunjungan Tahun 2022		807	6.650.563

Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata, 2022.

Berikut adalah nama-nama dari beberapa desa wisata di Kabupaten Bandung, yaitu: Mekarsari, Girmulya Satia, Cigunung, Kasepuhan Bunisari, Handal, Nanjungvillage, Mandalamekar, Biloeng, Edukasi sepatu, Jagatriksa, Saung Sawah, Maruyung, Gaya, Dewi Hurip, Loa, Kampung Tik Tok, Panundaan, Lamajang, Margaluyu, Ciburial, Jelekong, Terpadu Bumiwangi, Jatiendah, Cibiru Wetan, Fortuna, Kendan, Tenjolaya, Ciherang, Patengan, Tarumajaya, Mekaraksana Cikancung, dan Batu Nyusun.

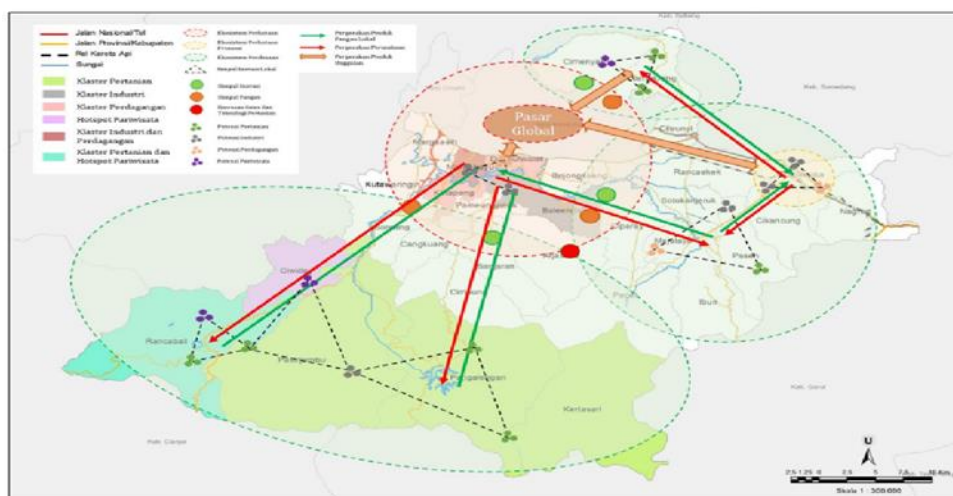
Berdasarkan data di atas tersaji jumlah desa wisata sampai dengan 2022 dan terdapat 90 desa wisata di Kabupaten Bandung. Saat ini, terdapat 50 desa wisata yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati No. 556/Kep.770-Disbudpar/2022. Pada tahun 2023, di targetkan Kabupaten Bandung memiliki 100 Desa Wisata. Selain itu, pada tahun 2022 di Kabupaten Bandung terdapat 807 destinasi wisata dengan jumlah kunjungan mencapai 6,5 juta kunjungan.

Selain pariwisata terdapat juga potensi budaya di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah cagar budaya yang saat ini telah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati No 430/Kep.712-Disbudpar/2022 tentang Penetapan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Bandung. Pada surat keputusan tersebut terdapat tiga cagar budaya yang ditetapkan, antara lain Rumah Adat Cikondang yang terdapat di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan. Kemudian Bumi Alit Batukarut di Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari dan Makam Syekh Abdul Manaf di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih. Penetapan cagar budaya melalui surat keputusan bupati ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melestarikan budaya di Kabupaten Bandung.

c. Potensi Industri

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dan merupakan sektor dengan permintaan impor tertinggi diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tiga sektor yang menjadi penghasil usaha bruto didominasi oleh 3 (tiga) sektor, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan dan terakhir sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

Gambar 2.22 Pola Persebaran Industri



Sumber: Masterplan Ekonomi, 2021

Sektor industri merupakan sektor yang dinilai cukup penting untuk dikembangkan walaupun tidak menjadi sektor unggulan. Potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa, terdapat klaster pertanian di bagian Selatan, klaster industri dan perdagangan di bagian Tengah, serta

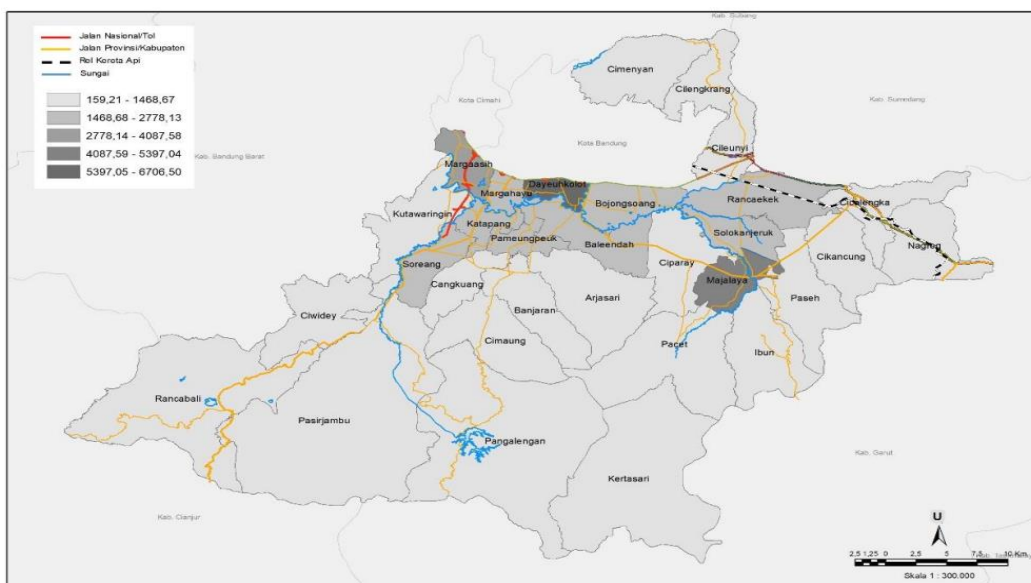


hotspot pariwisata di bagian Selatan. Dari klaster tersebut kemudian dirumuskan dua ekosistem ekonomi yaitu, ekosistem pedesaan dengan sektor unggulan pertanian dan pariwisata terdapat di bagian Selatan dan dua ekosistem penunjang di bagian Timur dan Utara, serta ekosistem perkotaan dengan sektor unggulan industri dan perdagangan yang terdapat di bagian Tengah, dengan ekosistem promosi di bagian Timur.

Secara konsep terdapat dua jenis pergerakan ekonomi yaitu, pergerakan produk pangan lokal dari ekosistem desa ke kota, dan pergerakan perusahaan menengah besar dari ekosistem kota ke desa.

Adapun potensi industri di kabupaten Bandung ini dapat digambarkan peta sebaran kontribusi PDRB industri pengolahan per-Kecamatan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.23 Sebaran Kontribusi PDRB industri pengolahan per-Kecamatan



Sumber: *Masterplan Ekonomi, 2021*

Potensi sektor industri di Kabupaten Bandung dirumuskan dengan pendekatan sebagai berikut:

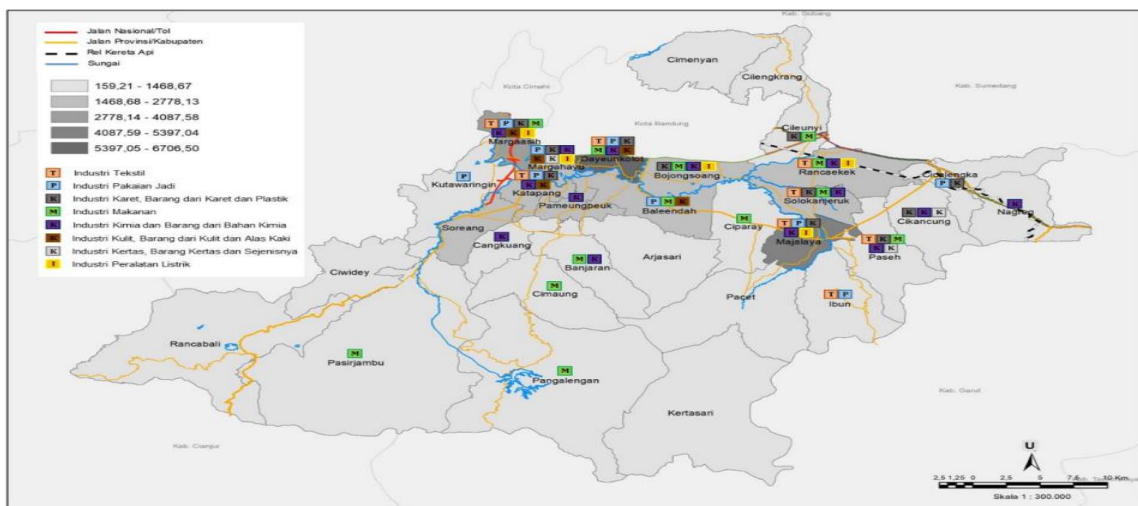
- Kelas industri yang tergolong unggulan merupakan kelas dengan nilai produksi tinggi (di atas 1 miliar rupiah);
- Kecamatan yang memiliki kelas industri unggulan adalah kecamatan dengan nilai produksi kelas industri yang dimaksud berada di atas nilai rata-rata Kabupaten;
- nilai produksi dari kelas industri di kecamatan dihitung dengan mengalikan asumsi nilai produksi per satuan kelas industri yang dimaksud dengan jumlah industri yang di kecamatan;
- Asumsi nilai produksi per satuan kelas industri diperoleh dari total nilai produksi dibagi jumlah perusahaan dari kelas industri yang dimaksud.

Berdasarkan data industri sejak tahun 2018, secara umum dapat disimpulkan bahwa, industri yang ada di Kabupaten Bandung didominasi oleh jenis industri tekstil, pakaian dan sepatu. Selain itu, industri makanan dan minuman juga berkontribusi cukup tinggi dalam nilai produksi industri Kabupaten Bandung. Jika dilihat hasil perhitungan nilai produksi per satuan industri, angka paling tinggi terdapat pada Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya, serta Industri Peralatan Listrik. Keduanya memiliki jumlah industri yang relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kedua industri tersebut tergolong industri padat karya.

Beberapa sebaran potensi sub sektor industri dengan sebaran PDRB sektor C di Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut:



Gambar 2.24 Sebaran Potensi Sub sektor Industri Dengan Sebaran PDRB Sektor C



Sumber: Masterplan Ekonomi, 2021

d. Potensi Panas Bumi

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah, air, hutan, panas bumi, serta tambang menjamin kelestarian sumber daya yang terkendali, lestari dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem) dan memberikan manfaat bagi pemerataan dan kemakmuran rakyat dan berbudaya disertai upaya peningkatan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan berkompetensi.

Pembangunan sektoral ini perlu untuk mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan yang telah diagendakan pada *SDG's 2030*. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah potensi panas bumi dengan besar potensi diperkirakan sebesar 2.711 Mega Watt (MW). Dari jumlah tersebut, energi panas bumi yang sudah termanfaatkan (*ter-install*) baru mencapai ± 787 MW yang tersebar di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, Kamojang dan Cibuni. Energi panas bumi yang telah termanfaatkan berperan penting menyuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali. Meninjau masih tingginya potensi panas bumi yang belum termanfaatkan diperkirakan potensi luas cakupan ini kedepan akan semakin berkembang. Informasi detail mengenai potensi panas bumi di Kabupaten Bandung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung

No	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1	Pangalengan	PT Pertamina Geothermal Energy	Wayang Windu	PT. Star Energy	400	227
2.	Pasirjambu/Rancabali	PT. Geo dipa Energi	Patuha	PT Geo Dipa Energi	706	50
3	Ibum	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	855	240
4	Kertasari	PT Star Energy	Darajat	PT. Star Energy	610	270
5	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	140	0
Jumlah					2.711	787

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, 2020

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana/Wilayah Rawan Bencana adalah wilayah atau kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam. Suatu kawasan bisa disebut sebagai daerah rawan bencana jika dalam kurun



waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, dan teknologi. Kejadian bencana di Kabupaten Bandung dalam rentang waktu 2017-2023 didominasi oleh bencana kekeringan, tepatnya di tahun 2023 total bencana yang terjadi sebesar 1.823 kejadian. Kejadian bencana secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Data Bencana di Kabupaten Bandung tahun 2017-2023 berdasarkan data BPBD

No	Jenis Bencana	Tahun							Total (kejadian)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Gempa Bumi	-	7	1	-	1	-	5	14
2	Banjir	4	7	33	67	101	93	61	366
3	Banjir Bandang	2	-	1	-	-	-	-	3
4	Tanah Longsor	52	50	5	38	87	145	130	507
5	Kekeringan	-	5	-	-	-	-	392	397
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	4	-	25	7	8	-	262	306
7	Cuaca Ekstrim	12	4	7	36	46	69	54	228
8	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Pandemi Covid-19	-	-	-	1	1	-	-	2
	Total	74	73	72	149	244	307	904	1.823

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bandung 2023-2027, Data BPBD Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Gambar 2.25 Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Bandung tahun 2017-2021



Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bandung 2023-2027, Data BPBD Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Adapun sejarah kebencanaan di Kabupaten Bandung berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung dari tahun 1975-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52 Data Korban bencana di Kabupaten Bandung tahun 1975-2021 berdasarkan data informasi BNPB

No	Jenis Bencana	Korban (Jiwa)					Kerusakan (Unit)				
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Jumlah	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan
1	Gempa Bumi	23	-	771	-	76.366	77.160	46257	1584	-	447
2	Banjir	40	5	428	1.447.099	201.934	1.649.506	5666	473	5	743
3	Banjir Bandang	-	-	-	39.680	122	39.802	-	-	-	-



No	Jenis Bencana	Korban (Jiwa)					Kerusakan (Unit)				
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Jumlah	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan
4	Tanah Longsor	132	16	105	6.129	6.477	12.859	1589	1	2	6
5	Kekeringan	-	-	-	258.039	-	258.039	-	-	-	-
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
7	Cuaca Ekstrim	6	-	110	20.732	10.077	30.925	11995	19	3	22
8	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-
	Total	201	21	1414	1.771.679	296.476	2.069.791	65507	2077	10	1218

Sumber: Data dan Informasi Bencana BNPB Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kabupaten Bandung pernah mengalami 608 kali kejadian bencana dari tahun 1975-2021. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak kerugian seperti korban jiwa, kerugian fisik dan ekonomi.

2.1.4 POTENSI BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi dan bencana yang berpotensi terjadi dapat timbul sesuai dengan kondisi lingkungan. Bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung dilihat berdasarkan data DIBI, sedangkan bencana yang potensial akan terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi

pengkajian risiko bencana. Berdasarkan data DIBI, terdapat 9 (Sembilan) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim (angin puting beliung) dalam hal ini angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, tanah longsor, dan pandemi (Covid-19). Namun selain bencana tersebut, Kabupaten Bandung ternyata juga memiliki bencana potensial lainnya seperti letusan gunung api. Dengan demikian bencana-bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung terdapat 9 (sembilan) jenis bencana seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Jumlah Jenis Ancaman Bencana Wilayah Kabupaten Bandung

No	Jenis Ancaman Bencana	Memiliki Ancaman Bencana	
		Iya	Tidak
1	Banjir **)	✓	
2	Banjir Bandang *)	✓	
3	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)**)	✓	
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi **)		✓
5	Gempa Bumi **)	✓	
6	Kebakaran Hutan dan Lahan **)	✓	
7	Kekeringan **)	✓	
8	Letusan Gunung Api **)	✓	
9	Tanah Longsor **)	✓	
10	Tsunami **)		✓
11	Kebakaran Gedung dan Permukiman **)		✓
12	Kegagalan Teknologi **)		✓
13	Konflik Sosial **)		✓
14	Pandemi Covid - 19 **)	✓	
Catatan	*) INARisk.bnpb.go.id		
	**) Perka BNPB No. 2 Tahun 2012		
	abe Tidak terdapat data ancaman Bahaya di Kabupaten Bandung		

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

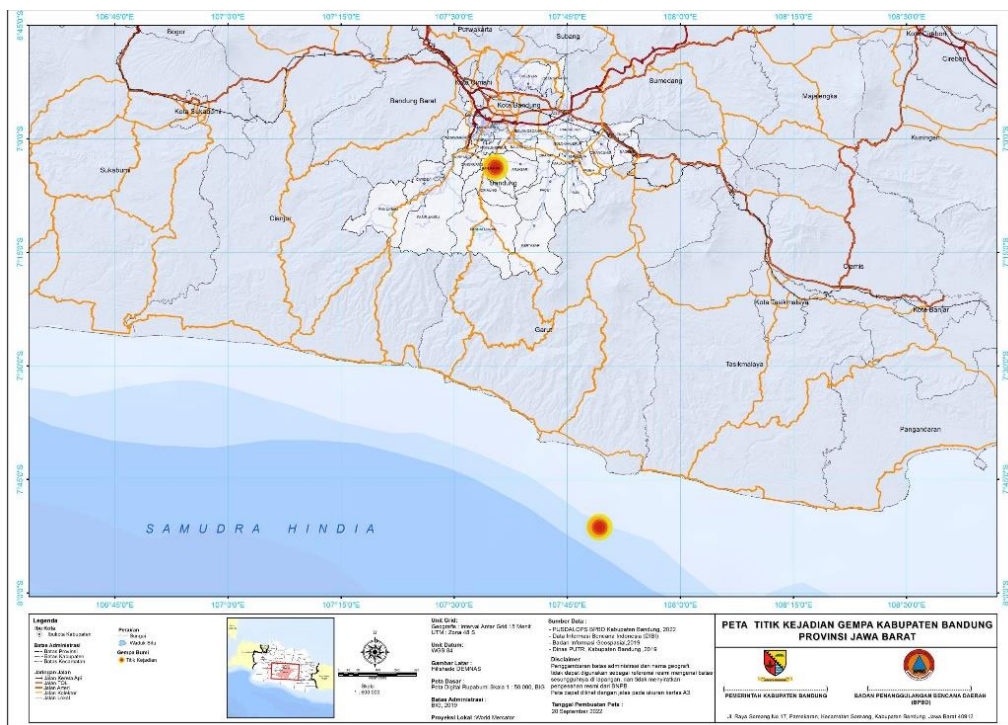


2.1.4.1 Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Bandung memiliki 5 (lima) Kecamatan yang berpotensi terdapat rawan beresiko gempa, diantaranya adalah Kecamatan Pangalengan, Banjaran, Cimaung, Kertasari dan Cilengkrang Secara geologis Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi (gempa tektonik dan gempa vulkanik). Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah cabang-cabang dari sesar utama (sesar Lembang) yang pengaruhnya signifikan dari bagian utara wilayah Kabupaten Bandung hingga mempengaruhi wilayah Selatan. Adapun sesar lainnya yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung adalah Sesar Citarum dan Sesar Cicalengka).

Gempa yang cukup besar terjadi pada bulan September 2019 yang berpusat di daerah Pacet dengan kekuatan 4,1 skala richter cukup membuat wilayah Kabupaten Bandung terguncang terutama wilayah Pangalengan dan Kertasari. Kedua wilayah tersebut mempunyai karakteristik patahan yang banyak dan bervariasi, sehingga dapat menjadi katalisator gelombang gempa yang dihasilkan dari aktivitas pertemuan lempeng dataran di Samudera Hindia. Adapun lokasi kejadian bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut.

Gambar 2.26 Peta Titik Lokasi Kejadian Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

2.1.4.2 Bencana Banjir

Kawasan rawan banjir umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu/Sub DAS Hulu Citarum, dengan muara-muara anak sungainya yang sering menyebabkan banjir, antara lain Sungai Ciganitri, Sungai Citarik, Sungai Cimanggung, Sungai Cikawung, Sungai Cimuncang dan Sungai Cipamokolan. Luas kawasan yang terkena genangan banjir rutin seluas 1.700 Ha. Sementara itu sungai yang pembuangannya melintasi jalan, antara lain: sungai Cipamokolan dan sungai Cinambo (Desa Tegalluar); sungai Babakan Sayang dan sungai Ciendog (Desa Babakan Sayang). Sungai-sungai tersebut bermuara di sungai Citarik yang selanjutnya menuju arah sungai Citarum di Desa Sapan. Itulah sebabnya setiap tahun Desa Sapan mengalami banjir. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan dan air kembali ke lokasi jalan tol, serta menggenangi di sisi kanan-kiri badan jalan. Walau terjadi secara temporer, daerah lainnya yang memiliki potensi banjir adalah Kecamatan Margahayu, Cileunyi, Katapang, Soreang dan Kecamatan Margaasih.

Jika dilihat dari cakupan DAS, maka sedimentasi yang terjadi pada DAS Cirasea adalah 1,7 juta ton/tahun, DAS Citarik 773 ribu ton/tahun, sub-DAS Cisangkuy 1,3 juta ton/tahun, dan DAS Ciwidey 1,0 juta ton/tahun. Cekungan Bandung merupakan salah satu wilayah pengendapan sedimen untuk daerah tangkapan



Waduk Saguling. Material erosi yang berasal dari sub DAS Cirasea, Cisangkuy dan Ciwidey akan mempunyai peluang mengendap di Cekungan Bandung dan hanya sebagian kecil yang akan diteruskan menuju Waduk Saguling. Cekungan Bandung akan menerima beban hasil sedimentasi sebesar 6,5 juta ton/tahun. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung antara lain disebabkan oleh:

- Curah hujan yang cukup tinggi;
- Perubahan tata guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS)/wilayah Citarum Hulu yang mengakibatkan sedimentasi dan puncak banjir meningkat;
- Pertambahan penduduk dan pembangunan permukiman yang tidak berwawasan lingkungan; Permukiman padat/kumuh di daerah bantaran sungai
- Pengurangan kapasitas palung sungai akibat dari pembuangan sampah ke Sungai Belum adanya penataan sistem drainase cekungan Bandung yang komprehensif dan memadai.

Adapun peta lokasi kejadian bencana banjir di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada gambar berikut.

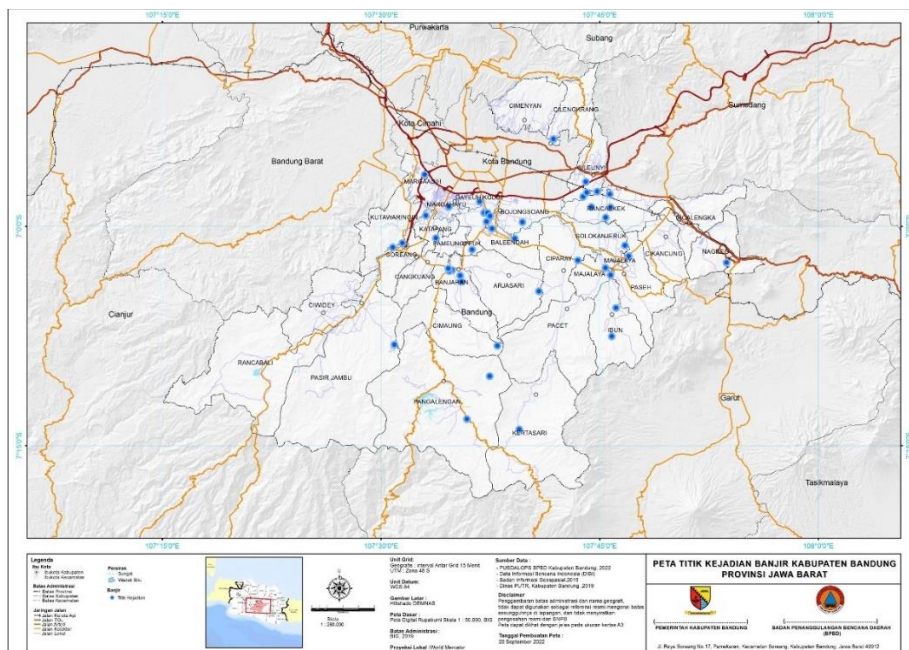
2.1.4.3 Bencana Banjir Bandang

Banjir Bandang (*flash flood*) biasanya terjadi pada aliran sungai berkemiringan dasar sungai curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat dapat mencapai ketinggian lebih dari 12 meter, limpahannya dapat membawa batu besar, bongkahan dan pepohonan serta merusak dan menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali. Banjir semacam ini dapat menyebabkan jatuh korban manusia maupun kerugian harta benda besar dalam waktu singkat.

Beberapa kejadian banjir bandang di Kabupaten Bandung tercatat pada tanggal 28 februari 2017, bertempat di Kp. Sindang Pala RT 01 RW 03 Desa Mekar Wangi Kecamatan Ibum telah terjadi bencana banjir bandang yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Dimensi longsoran panjang 8 meter, lebar 2,5 meter dan tinggi 10,5 meter. Pada saat kejadian bencana banjir ini tidak terdapat korban jiwa.

Selain itu pada Tanggal 07 Juni 2022 di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu terjadi kejadian banjir bandang yang mengakibatkan jembatan penghubung antara Kecamatan Ciwidey dan Pasir Jambu ambruk. Berikut merupakan titik kejadian banjir tersaji pada Gambar 2.27 berikut:

Gambar 2.27 Peta Titik Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

2.1.4.4 Bencana Tanah Longsor

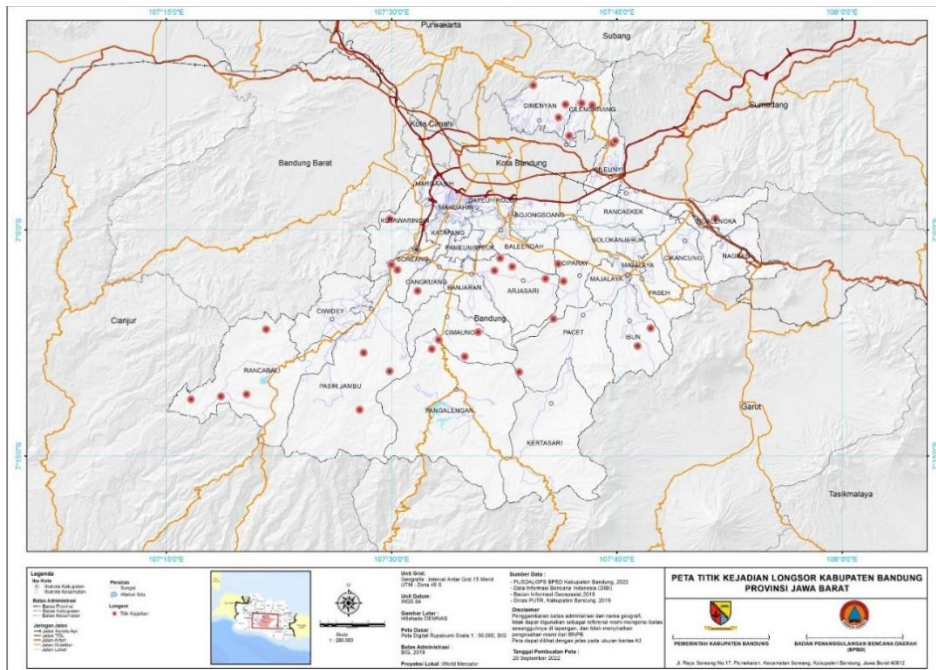
Bencana yang juga pernah terjadi adalah erosi tanah (longsor). Tingkat kepekaan tanah terhadap erosi ini sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik tanah, jenis tanah, tekstur, konsistensi tanah disamping intensitas atau jumlah curah hujan, tutupan vegetasi maupun teknik pengelolaan tanah atau usaha konservasi



tanahnya. Berdasarkan kepekaan terhadap erosi di Kabupaten Bandung, terdapat 79,68 Ha atau sebesar 0,05% dari Kabupaten Bandung dengan kondisi tanah sangat peka terhadap erosi.

Keterkaitan dengan potensi tanah longsor di Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Tercatat terdapat 22 kecamatan yang terdapat potensi bencana tanah longsor. Sampai dengan Tahun 2021, telah dilaksanakan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya tanah longsor, yaitu Kecamatan Kertasari, Arjasari dan Rancabali. Hal ini menyebabkan masih adanya Kecamatan yang belum terpetakan lahan yang mempunyai potensi tanah longsor. Adapun peta lokasi kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada **Gambar 2.28** berikut.

Gambar 2.28 Peta Titik Lokasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung



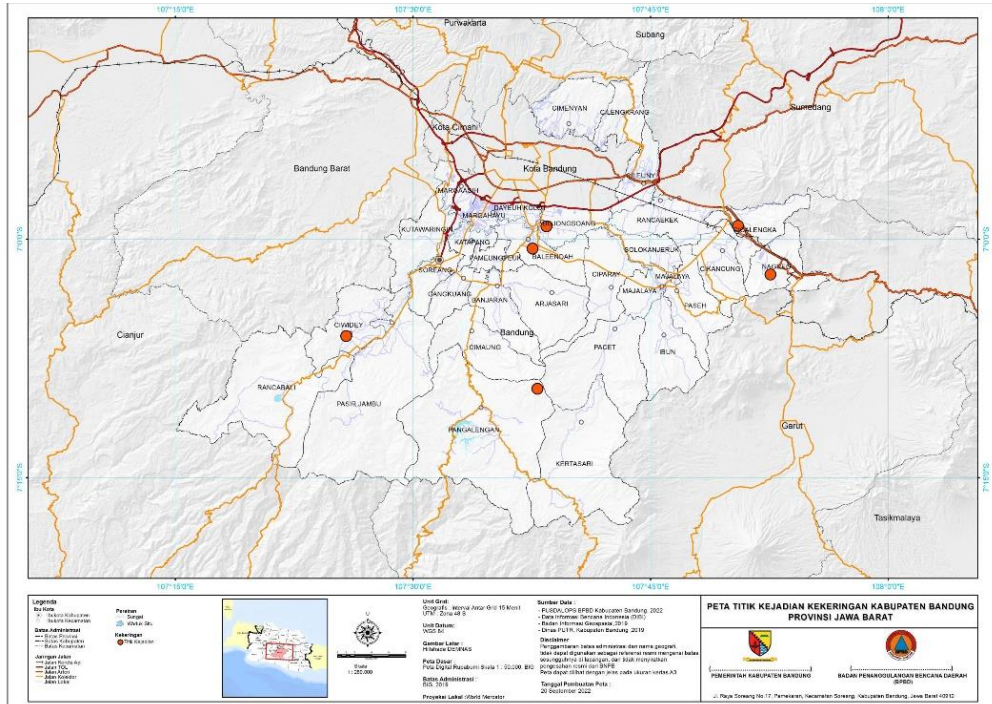
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

2.1.4.5 Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan sebuah fenomena alam yang biasa terjadi akibat dari pengaruh iklim. Kejadian bencana kekeringan di Kabupaten Bandung pernah terjadi pada Tahun 2018 dengan jumlah kejadian 5 kali. Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bandung, selain mengakibatkan gagal panen di bidang pertanian juga mengakibatkan sulitnya air bersih. Adapun peta bahaya bencana kekeringan di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut.



Gambar 2.29 Peta Bahaya Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

2.1.4.6 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat, serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.

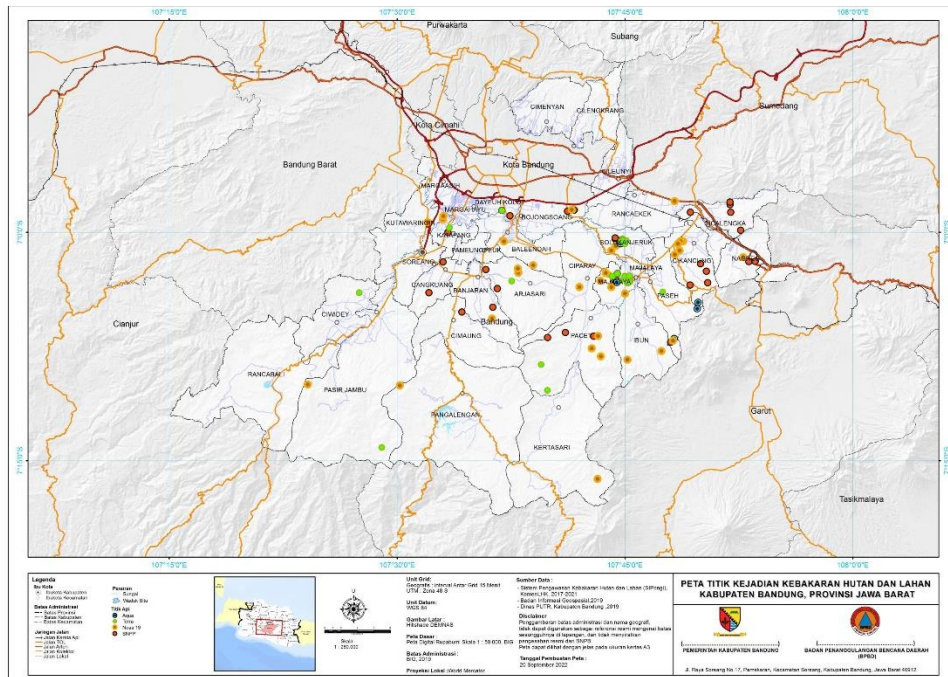
Sejak kurun 5 tahun terakhir, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bandung terdapat sebanyak 44 kali. Kejadian terbanyak pada Tahun 2019 dengan jumlah 25 kali. Lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada Tahun 2019 terjadi di beberapa lokasi, yaitu:

- Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, terbakar mencapai ± 26 hektare.
- Desa Mangunjaya, Kecamatan Cimaung, terbakar mencapai ± 100 hektare.
- Kawah Putih di Kecamatan Pasir Jambu, terbakar mencapai ± 15 hektare.
- Puncak Besar Pacet di Kecamatan Pangalengan, terbakar mencapai ± 100 hektare.
- Desa Mekarmaju, Kecamatan Arjasari, terbakar mencapai ± 10 hektar.

Adapun peta lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada **Gambar 2.30** berikut:



Gambar 2.30 Peta Titik Lokasi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

2.1.4.7 Bencana Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrim merupakan keadaan atau fenomena atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu dan berskala jangka pendek yang biasa terjadi pada wilayah dengan suhu udara yang tinggi, angin puting beliung, intensitas curah hujan yang tinggi, longsor dan kebakaran hutan. Beberapa kejadian ancaman bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) sejak kurun 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Bandung diantaranya angin puting beliung yang mengakibatkan mengakibatkan pohon tumbang, dan kerusakan rumah. Data kejadian cuaca ekstrim (angin puting beliung) selama 5 tahun (tahun 2017-2021) sebanyak 96 kali dan sering terjadi setiap tahunnya.

2.1.4.8 Bencana Letusan Gunung Api

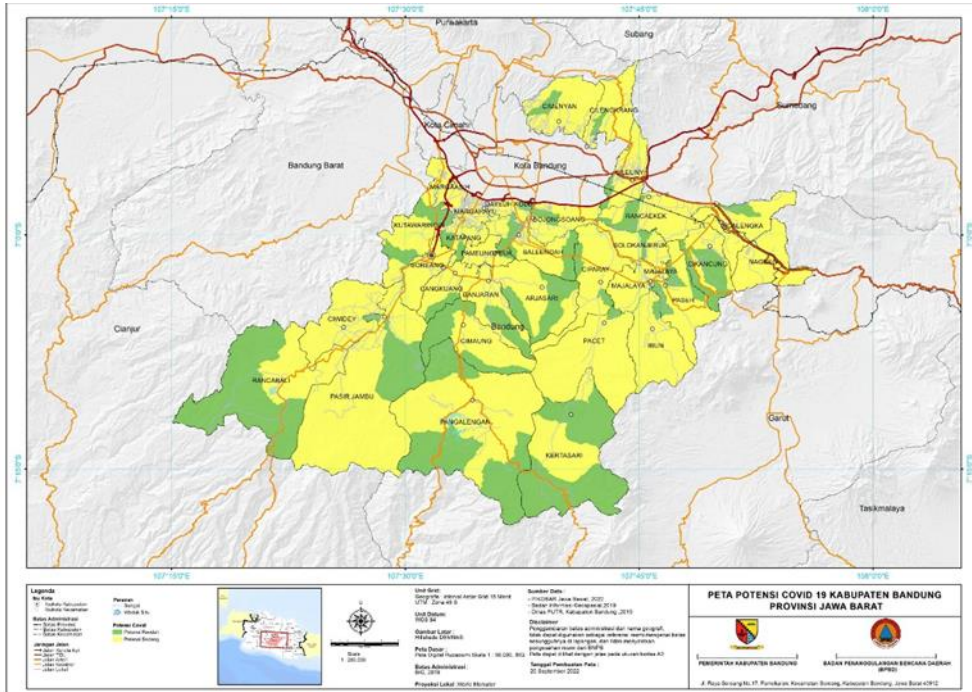
Potensi aliran lahar di Bandung Selatan dengan dijumpainya batuan gunung api bawah permukaan berumur Miosen mendukung terjadinya tumpang-tindih vulkanisme Tersier di bawah vulkanisme Kuartar. (Jurnal Geologi Vol.1, No.2 Tahun 2006), dan keberadaan Gunung Kawah Putih dan Papandayan yang berpotensi aliran lahar menuju Selatan khususnya di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali dan dampak Gunung Papandayan di Kecamatan Kertasari ± 12 Km.

2.1.4.9 Bencana Pandemi Covid-19

Infeksi Virus Covid-19 yang dimulai sejak akhir tahun 2019 di China kini menyebar ke seluruh dunia. Hingga Mei 2020, infeksi virus ini telah menginfeksi 185 negara dengan penderita lebih dari 270 ribu jiwa. Beberapa negara kemudian menutup akses masuk maupun keluar (lockdown) untuk mencegah penularan yang lebih meluas. Terlebih Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status pandemi pada infeksi Virus Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di Kabupaten Bandung. Siklus perkembangan pandemi ini mengakibatkan pemerintah daerah perhatian penuh dalam penanganan wabah penyakit Covid-19. Adapun peta titik lokasi bahaya epidemi/pandemi dan wabah penyakit di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada **Gambar 2.31** berikut.



Gambar 2.31 Peta Lokasi Kejadian Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung



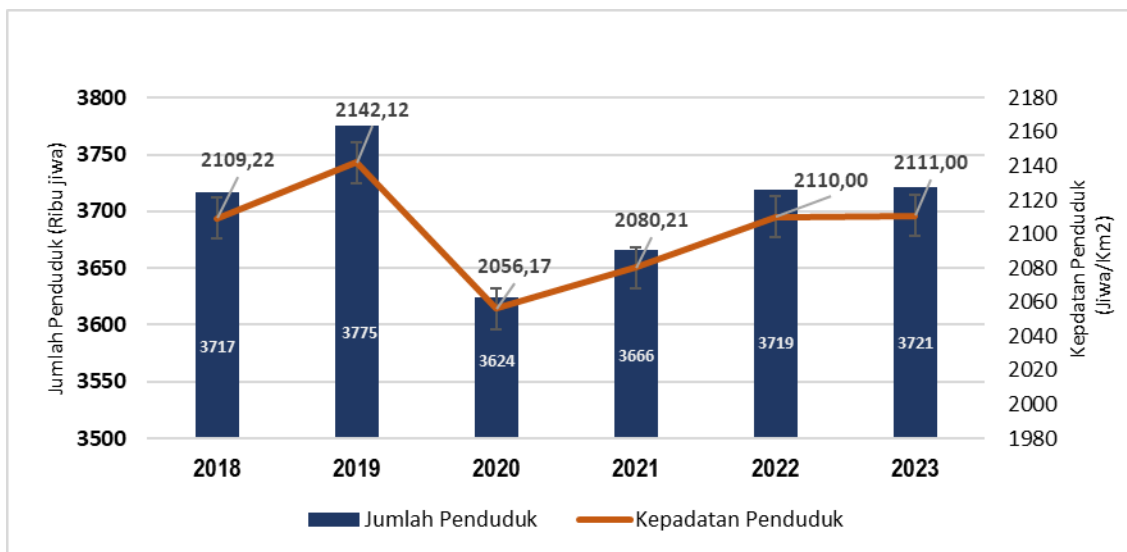
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2023-2027

2.1.5 Demografi Wilayah

Pada tahun 2020, BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.056 jiwa/km². Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010. Berdasarkan hasil proyeksi untuk tahun 2023, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.721.111 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.111 jiwa/km². Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2018-2023 ditampilkan dalam Gambar 2.32.

Jika ditinjau dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2022 menempati peringkat kedua dalam jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu setelah Kabupaten Bogor. Selengkapnya jumlah penduduk untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat di lihat pada **Gambar 2.32** berikut: Gambar 2.33

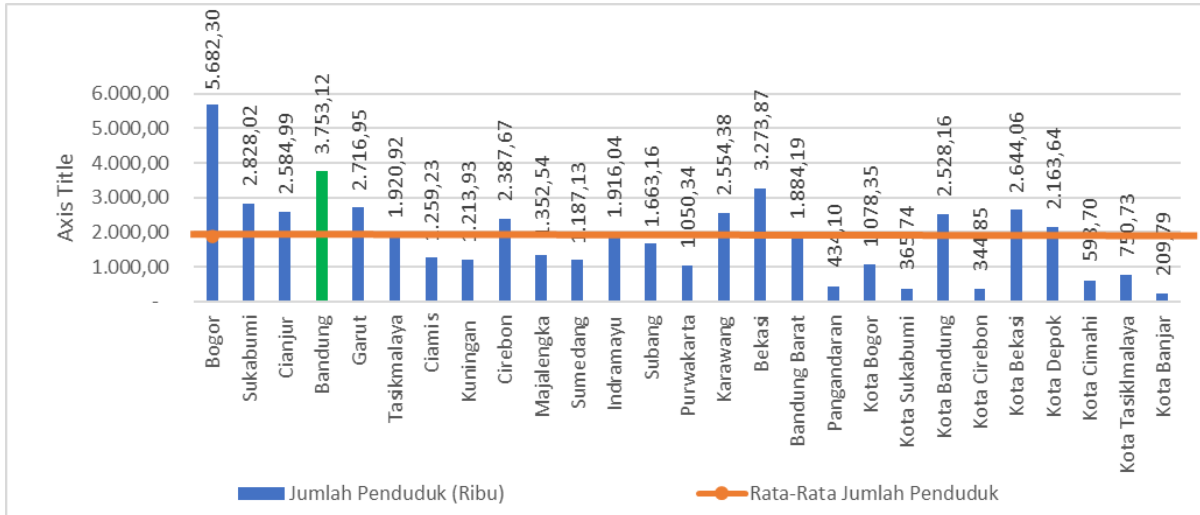
Gambar 2.32 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)



Gambar 2.33 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (diolah)

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2023, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 50,90% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.894.101 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49,10% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.827.010 jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dengan *dependency* rasio sebesar 45% pada tahun 2023. Dengan demikian, setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bandung menanggung sekitar 45 penduduk tidak produktif. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2023 digambarkan dalam piramida penduduk di **Gambar 2.34**. Berdasarkan piramida penduduk di **Gambar 2.35**, tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung memiliki bentuk *expansive*, yang ditandai dengan besarnya penduduk dalam kelompok umur muda terutama penduduk 0-19 tahun, serta sedikitnya jumlah penduduk dalam kelompok usia tua. Bentuk ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Adapun fenomena ini tercerminkan dalam hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS per September 2020. Walau ada perbedaan total jumlah penduduk antara hasil survei dengan Ditjen Dukcapil, secara umum komposisi penduduk Kabupaten Bandung tergolong ke kategori Gen Z, yakni penduduk usia 8-23 tahun, disusul oleh kategori Milenial, yakni penduduk usia 24- 39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan.

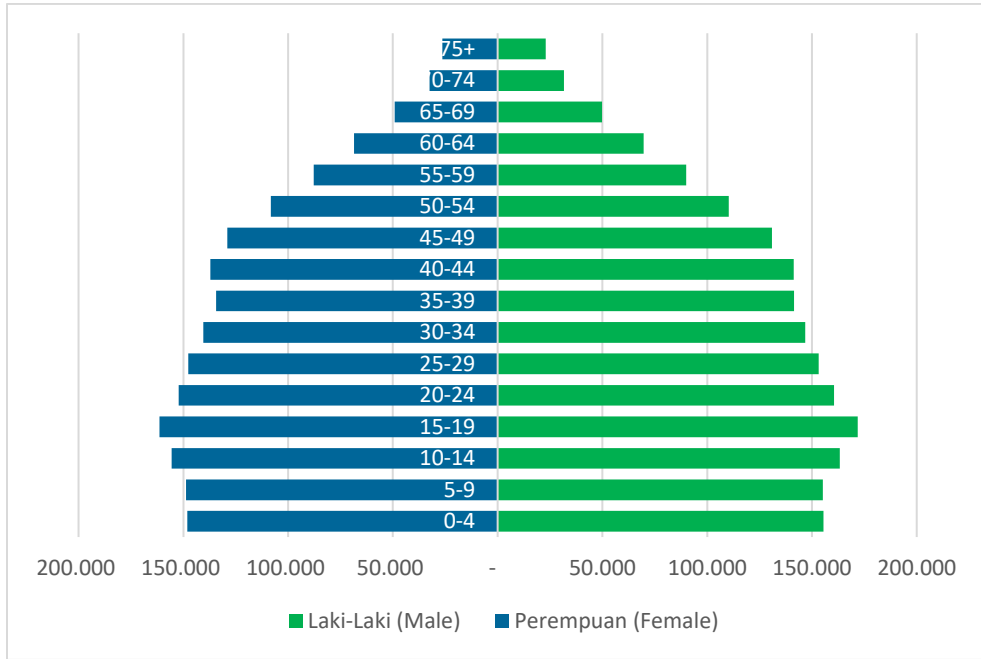
Bentuk kependudukan yang *expansive* ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi diikuti dengan jumlah kematian yang juga tinggi. Bentuk piramida penduduk seperti ini memberikan informasi bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan.

Pada tahun 2023, tercatat angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung sebesar 1,49%. Jika ditinjau pertahun, kecenderungan jumlah penduduk Kabupaten Bandung mengalami laju pertumbuhan penduduk positif dengan persentase yang menurun selama 5 tahun terakhir, kecuali laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2021 yang mengalami kenaikan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid.

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Bandung, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung cenderung terkonsentrasi di bagian utara, seperti Kecamatan Baleendah, Rancaekek, Ciparay, dan Cileunyi. Adapun wilayah-wilayah yang berlokasi cenderung jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Cilengkrang, Rancabali, Nagreg, dan Kertasari cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu kategori kepadatan penduduk 0-2.500 jiwa/km², 2.500-5.000 jiwa/km², 5.000-7.500 jiwa/km², 7.500-10.000 jiwa/km², dan >10.000 jiwa/km². Distribusi penduduk di Kabupaten Bandung ditampilkan dalam peta berikut. Adapun informasi lengkap mengenai demografi Kabupaten Bandung dijabarkan pada Tabel 2.54.

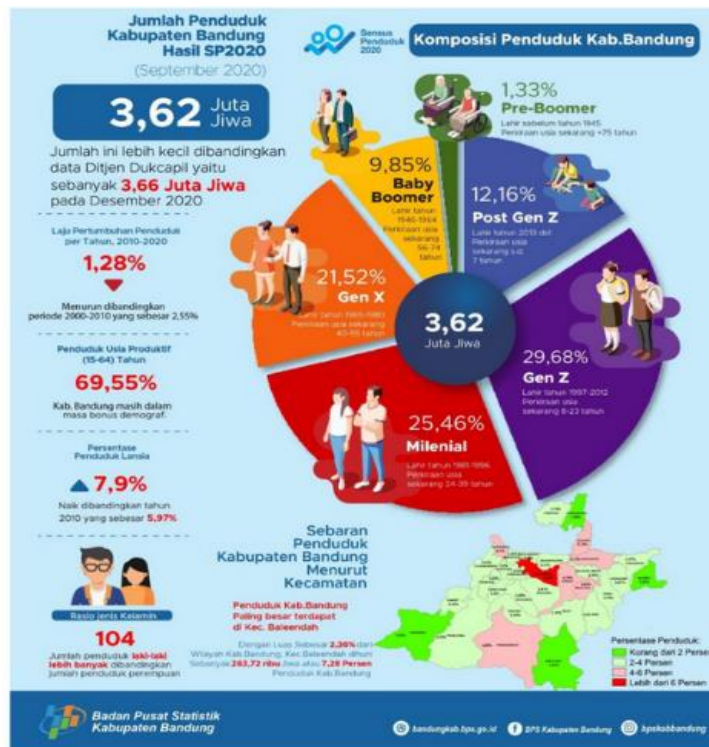


Gambar 2.34 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

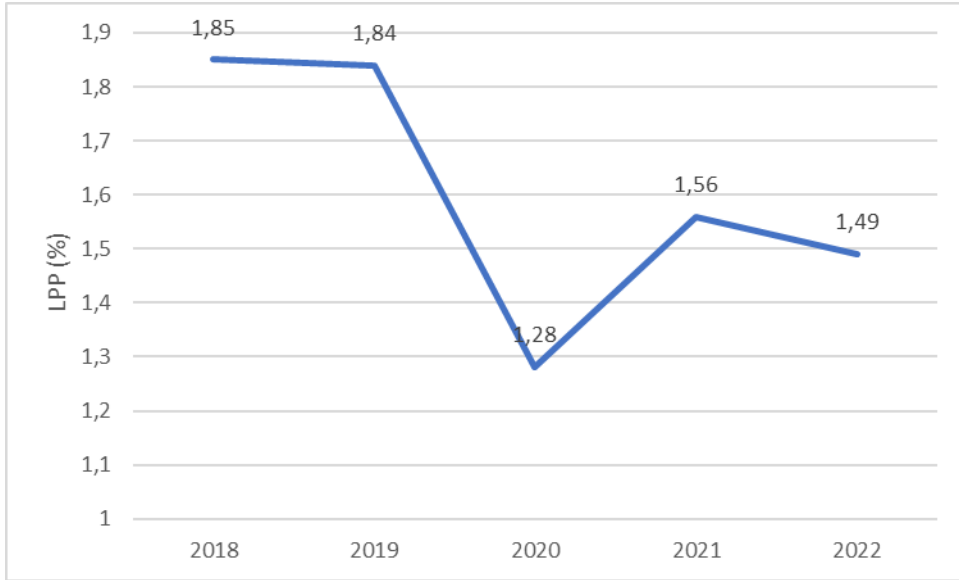
Gambar 2.35 Komposisi Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2020 Hasil Survei Penduduk 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bandung 2021

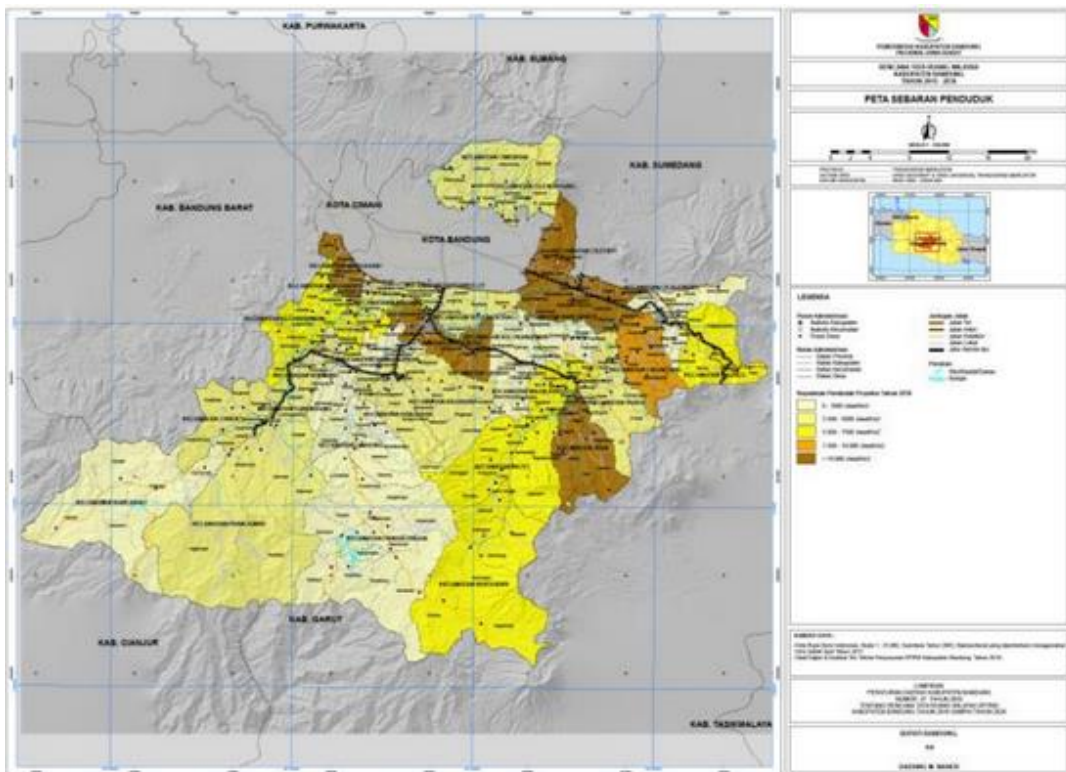


Gambar 2.36 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.37 Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2022



Sumber: Perda No. 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044



Tabel 2.54 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
2018	Laki- Laki	560.770	1.248.682	73.465	1.882.917	50,65			
	Perempuan	539.659	1.209.745	84.970	1.834.347	49,35			
	Jumlah	1.100.429	2.458.427	158.435	3.717.291	100	1,63	51,21	2.110
	%	29,60	66,13	4,26					
2019	Laki- Laki	495.795	1.221.733	99.879	1.911.199	50,62			
	Perempuan	465.241	1.185.747	93.284	1.864.090	49,38			
	Jumlah	961.036	2.407.480	193.163	3.775.279	100	1,56	47,94	2.143
	%	26,98	67,59	5,42					
2020	Laki- Laki	491.899	1.268.998	87.121	1.848.018	51,00			
	Perempuan	467.055	1.220.133	88.584	1.775.772	49,00			
	Jumlah	958.954	2.489.131	175.705	3.623.790	100	-4,01	46,00	2.056
	%	26,46	68,69	4,85					
2021	Laki- Laki	491.177	1.304.675	99.287	1.895.139	50,96			
	Perempuan	467.436	1.254.502	101.583	1.823.521	49,04			
	Jumlah	958.613	2.559.177	200.870	3.718.660	100	1,17	45,30	2.080
	%	25,78	69,82	5,40					
2022	Laki- Laki	491.177	1.304.675	99.287	1.895.139	50,96			
	Perempuan	467.436	1.254.502	101.583	1.823.521	49,04			
	Jumlah	958.613	2.559.177	200.870	3.718.660	100	1,43	45,30	2.110
	%	25,78	68,82	5,40					

Tabel 2.55 Hubungan Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Serapan Tenaga Kerja Melalui Investasi

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	Jumlah Tenaga Kerja yang diserap melalui investasi	Persentase Jumlah Angkatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Produktif (%)	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang diserap melalui investasi terhadap Jumlah Angkatan Kerja
2022	2.559.177	1.808.799	127.888	70,68 %	7.07 %

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2023

Jumlah usia produktif di Kabupaten Bandung (15-64 tahun) sebanyak 2.559.177. Jumlah angkatan kerja sebanyak 1.808.799 tahun 2022. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh kegiatan penanaman modal sebanyak 127.888. Jika dipersentasekan sebesar 70,68 % dari total usia produktif yang siap/potensial diserap oleh investasi. Namun baru 7.07 % yang terserap oleh investasi.

2.1.6 MASYARAKAT ADAT KABUPATEN BANDUNG

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki Sejarah asal usul dan menempati wilayah adat secara turun menurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat dan Lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat adat sebagai komunitas adat (Dalidjo, 2021).

Mengacu pada Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), karakteristik penanda Masyarakat Adat, antara lain identifikasi diri (self-identification); keberlanjutan sejarah (sebelum diinvasi oleh kekuatan penjajah atau kolonial); penduduk asal (sejarah); hubungan spiritual dengan tanah dan wilayah adat; identitas yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem sosial politik dan ekonomi yang khas.

Terkait dengan keberadaan Masyarakat adat, Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat adat melalui Undang-undang Dasar 1945 (UUD) 1945 dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat (3). Walaupun demikian, masyarakat adat di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan dikarenakan adanya perkembangan masyarakat akibat pengaruh global. Tantangan ini dapat diatasi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat, memperkuat identitas budaya dan pengetahuan tradisional mereka, memberikan kesempatan berpartisipasi dalam Pembangunan, memastikan akses setara ke layanan dasar. Hal tersebut dapat diperkuat dengan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk regulasi untuk mempertahankan keberadaan dan mengadopsi keunikan local dan karakteristik mereka. Saat ini keberadaan Masyarakat adat tersebut diakui dengan terbitnya Keputusan Bupati Bandung Nomor 430/Kep.712-Disbudpar/2022 tentang Penetapan Cagar Budaya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Menurut Keputusan Bupati Bandung tersebut terdapat 3 (tiga) masyarakat adat atau kampung adat yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Bandung adalah :



1. Kampung Adat Mahmud

Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang terdapat di Kabupaten Bandung, terletak di RW 04 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih. Jaraknya kira-kira 6 km dari Soreang sebagai ibu kota kabupaten. Kondisi alamnya cukup indah berada di pinggir Sungai Citarum dan dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas. Jumlah penduduknya kira-kira ada 1200 orang yang terbagi ke dalam 1 RW dan 4 RT. Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat di Kampung Mahmud bekerja sebagai petani, pedagang, sopir dan pegawai negeri atau swasta.

Kata Mahmud berasal dari bahasa Arab yaitu Mahmuudah yang memiliki arti puji. Kata puji tidak memiliki arti yang sama dengan terpuji, tetapi memiliki artireueus (bangga) atau deudeuh (kasih sayang penuh dengan penuh rasa ikhlas).

Beberapa keunikan yang bersifat local di Kampung Mahmud antara lain :

- memiliki adat istiadat dalam membangun rumah yang berbeda dengan daerah lain di sekitarnya. Struktur tanah yang ada di Kampung Mahmud bentuknya seperti endapan rawa dari sungai Citarum yang berada di sekelilingnya. Dengan kondisi demikian sangat tidak diperbolehkan membangun rumah secara permanen, karena dengan kondisi tanah yang tidak memungkinkan apabila dipaksakan akan mendatangkan petaka.
- Kampung adat ini memiliki ciri khas dalam tata cara berkehidupan yang berpedoman pada agama yang sangat kuat. Pemukiman masyarakat merupakan kumpulan rumah panggung yang berkelompok dalam satu wilayah dan memanfaatkan bahan bangunan dari kayu maupun bambu untuk bilik. Pemilihan kayu sebagai bahan bangunan karena berkaitan dengan kekuatan dan kepercayaan bahwa sebuah kayu akan memberikan kekuatan magis atau ajaib.
- Pada umumnya, rumah di daerah Kampung Mahmud berbentuk memanjang atau memiliki atap yang panjang dan sering disebut rumah berbentuk persegi panjang. Hal ini bertujuan untuk menampung jumlah anggota keluarga yang banyak. Apabila dilihat dari luas bangunan, rumah di daerah Kampung Mahmud rata-rata berukuran sangat besar, yaitu dengan rata-rata 4x8 meter sampai yang berukuran 10x20 meter berikut halaman rumah yang cukup luas.

2. Kampung Adat Cikondang

Kampung adat ini terletak di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan tepatnya di kaki Gunung Tilu Pangalengan. Pada abad 17 terdapat 61 rumah adat yang didirikan namun saat ini hanya tersisa satu rumah adat disebabkan musnah karena musibah kebakaran padatahun 1942. Luas lahan secara keseluruhan adalah 30.000 m² terdiri dari lahan hunian yang meliputi rumah adat dan bangunan pendukungnya seperti leuit, tampian dan saung lisung, hutan larangan, pemakaman dan sawah adat.

Nama Cikondang berasal dari nama kampung yang memiliki seke atau mata air yang ditumbuhi pohon besar bernama kondang. Mata Air itulah yang menjadi asal nama Cikondang yaitu perpaduan antara “ci” dari “cai” yang berarti air dan “kondang” yang mengacu pada naman pohon Kondang.

Masyarakat setempat meyakini bahwa karuhun (leluhur) Cikondang adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Mereka memanggilnya Uyut Pameget (buyut laki-laki) dan Uyut Istri (buyut perempuan) yang diyakini membawa berkah dan lindungan pada anak cucunya.

Keunikan Kampung Adat Cikondang antara lain :

- Masyarakatnya masih memegang teguh tradisi dari para leluhurnya, salah satunya yaitu rumah adat yang telah berusia 370 tahun dan sampai saat ini masih kokoh berdiri.
- Masih terawatnya peninggalan leluhur diantaranya tunduk atau kalender tradisional Sunda, naskah kuno, leuit, saung lisung, makam dan hutan larangan.
- Upacara adat berkaitan dengan lingkungan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Cikondang, diantaranya hajat lembur, hajat solokan untuk saluran irigasi, hajat paralon untuk air bersih, ngadeugkeun untuk mendirikan rumah, mitembeuyan waktu awal tanam padi, ritus-ritus tersebut erat dengan nilai-nilai yang menggambarkan hubungan manusia-alam-Tuhan. Upacara-upacara/hajatan tersebut menjadi pengingat kepada masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, mengenang para leluhur dan menjaga keseimbangan alam sebagai lingkungan tempat hidup.

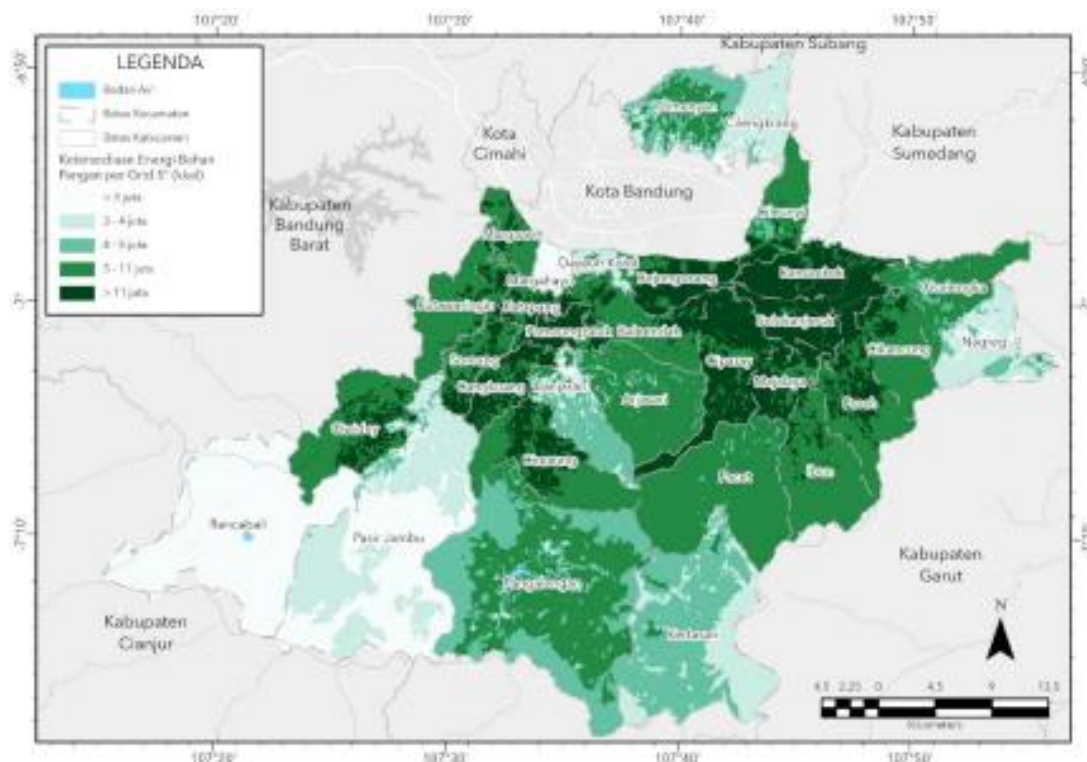


2.1.7 Daya Dukung Dan Daya Tampung

2.1.7.1 Daya Dukung Pangan

Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bandung dihitung menggunakan data produksi tanaman pangan, hortikultura, dan hasil peternakan yang didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan nilai IJE penyedia bahan pangan. Sebaran ketersediaan pangan hasil pemodelan ini terdapat pada **Gambar 2.38**. Terlihat bahwa wilayah bagian Utara Kabupaten Bandung memiliki ketersediaan pangan yang tinggi, wilayah ini diantaranya meliputi Kecamatan Bojongsoang, Solokanjeruk, Ciparay, dan Majalaya. Kabupaten Bandung dengan nilai ketersediaan pangan per grid yang tinggi ini memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh sawah irigasi. Sebagai catatan bahwa peta ketersediaan tersebut menunjukkan nilai ketersediaan di setiap grid, jika nilai pada setiap grid ini diakumulasikan per kecamatan bukan berarti kecamatan dengan nilai ketersediaan pangan per grid tinggi akan memiliki hasil akumulasi yang tinggi pula, terdapat faktor luas wilayah yang mempengaruhinya. Nilai akumulasi ketersediaan bahan pangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung terdapat pada **Tabel 2.56**.

Gambar 2.38 Ketersediaan energi bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2015 dalam sistem grid 5"x5"

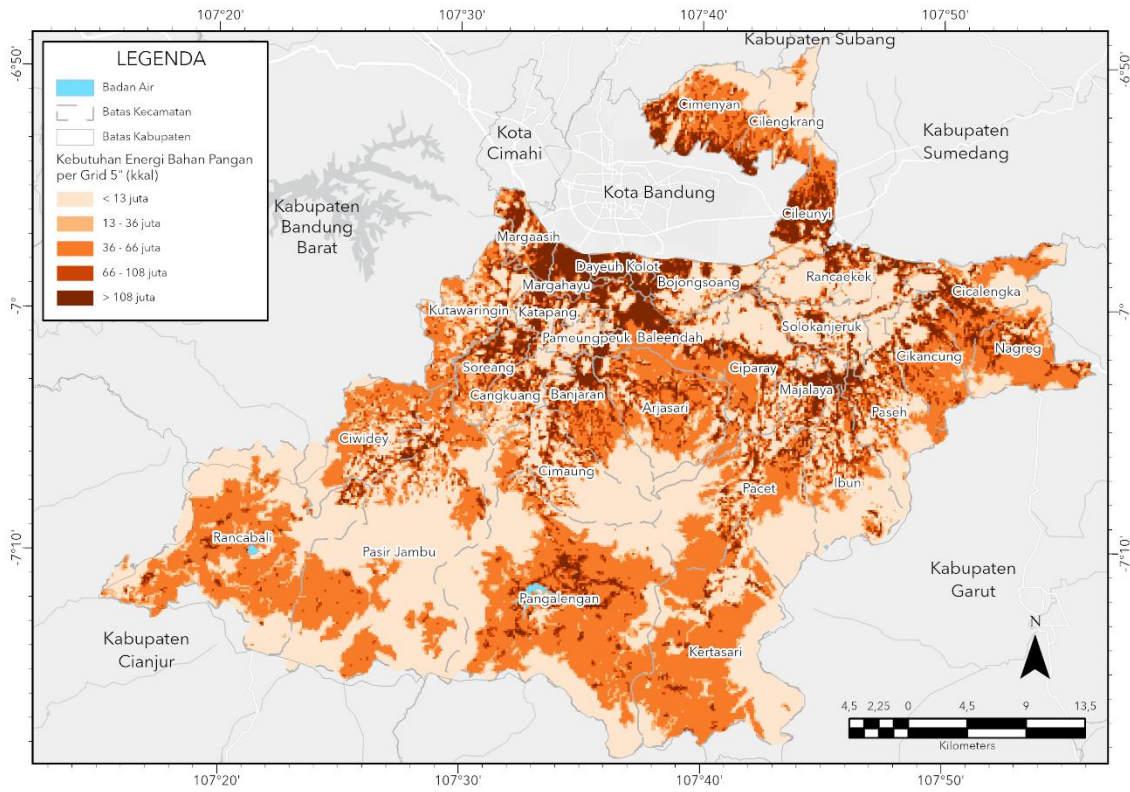


Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Kebutuhan pangan dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk di setiap grid dengan kebutuhan pangan per kapita, sehingga dapat dipastikan bahwa grid dengan jumlah penduduk tinggi akan memiliki kebutuhan pangan yang tinggi pula. Gambar 2.23 menunjukkan sebaran dari hasil pemodelan kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung. Terlihat bahwa kebutuhan pangan per grid yang tinggi terdapat pada wilayah Kabupaten Bandung bagian Utara, diantaranya Kecamatan Pengalengan, Kertasari, Rancabali dan beberapa pada kecamatan di bagian Utara Kabupaten Bandung. Sama halnya dengan ketersediaan bahan pangan, peta ini menunjukkan kebutuhan pangan per grid yang apabila diakumulasikan bukan berarti grid dengan kebutuhan tinggi akan memiliki kebutuhan akumulasi per kecamatan yang tinggi pula, faktor luas wilayah akan berpengaruh. Nilai akumulasi kebutuhan pangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung terdapat pada **Tabel 2.56**



Gambar 2.39 Kebutuhan energi bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5”x5”

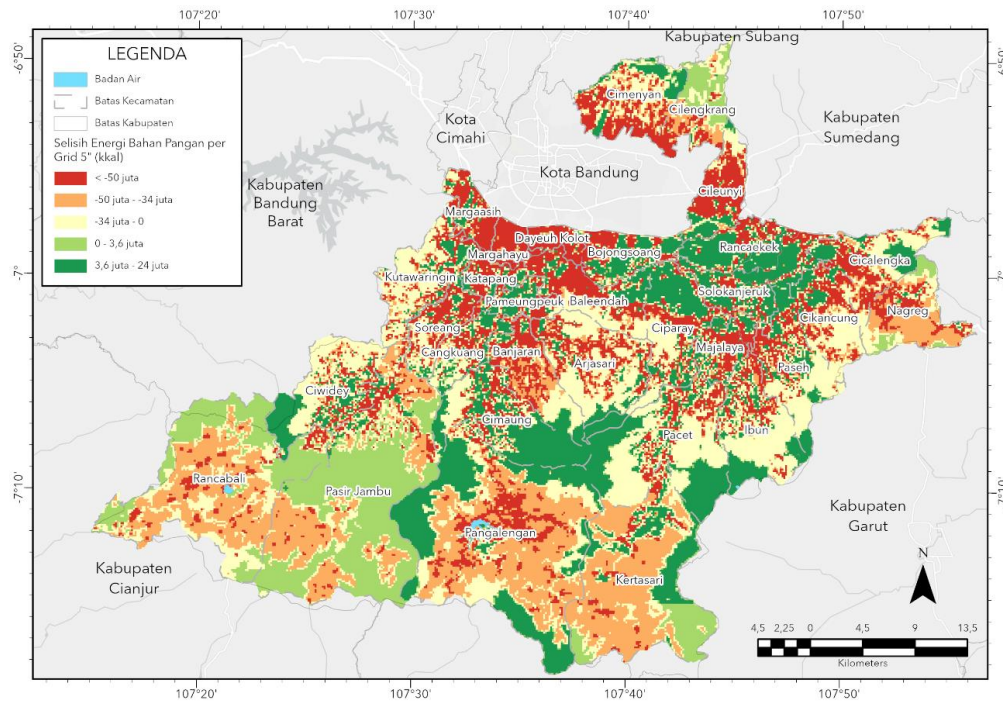


Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Setelah diketahui nilai ketersediaan dan kebutuhan pangan, selisih dari ketersediaan terhadap kebutuhan pangan perlu dihitung untuk menganalisis daya dukung lingkungan hidup dalam penyediaan pangan. Hasil perhitungan selisih ini menunjukkan bahwa terdapat daerah yang masih dapat mendukung penyediaan pangan di suatu daerah yang ditunjukkan dengan nilai selisih positif, dan daerah yang sudah tidak dapat mendukung penyediaan pangan (defisit bahan pangan) yang ditunjukkan dengan nilai selisih negatif. Namun, perlu diperhatikan bahwa selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan, hanya saja daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhannya. Perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Bandung tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Berdasarkan peta selisih ketersediaan yang ditunjukkan oleh Gambar 2.40, daerah yang memiliki grid dengan selisih negatif sebagian besar berada di kecamatan yang memiliki kebutuhan tinggi, yaitu Kecamatan Pengalengan, Kertasari, Rancabali dan beberapa pada kecamatan di bagian Utara Kabupaten Bandung. Namun, apabila nilai selisih ini diakumulasikan untuk setiap kecamatan **Tabel 2.28** semua kecamatan di Kabupaten Bandung memiliki selisih ketersediaan yang bernilai negatif.



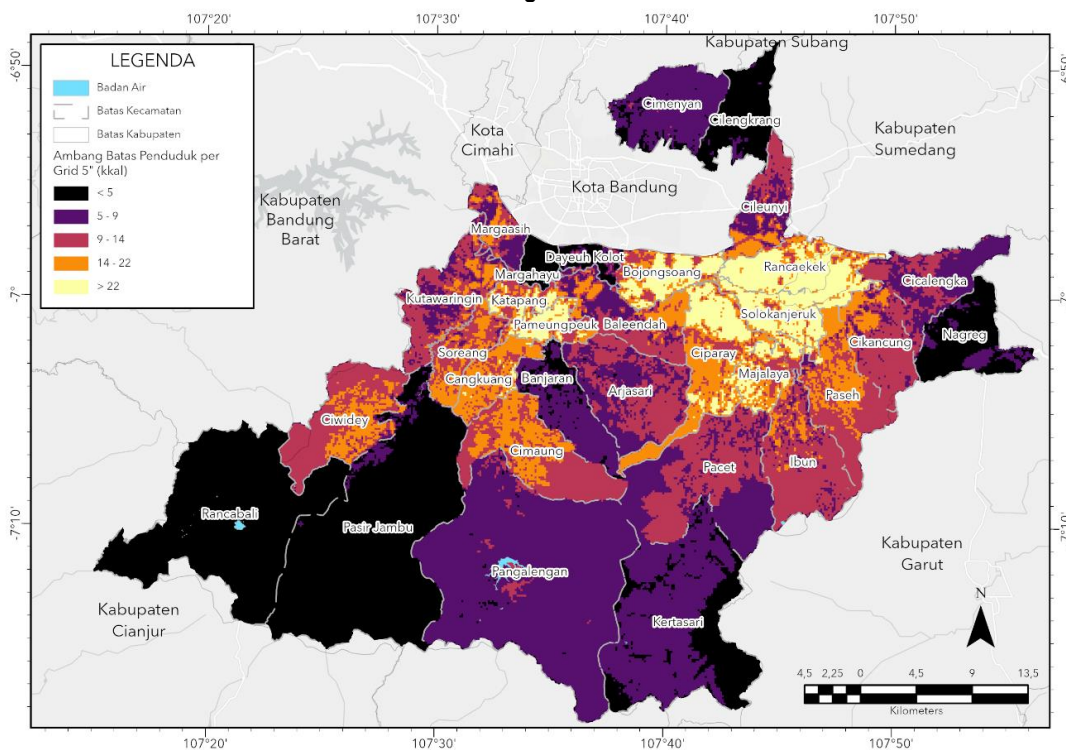
Gambar 2.40 Selisih ketersediaan energi bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Perhitungan nilai ambang batas digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya dengan ketersediaan pangan yang ada di wilayah tersebut. Nilai ambang batas penduduk terhadap daya dukung penyedia pangan terdapat pada **Gambar 2.41**. Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa wilayah dengan ketersediaan pangan yang tinggi memiliki nilai ambang batas yang tinggi pula. Ambang batas penduduk untuk setiap grid memiliki nilai tertinggi 74, hal ini berarti grid tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk 74 jiwa penduduk.

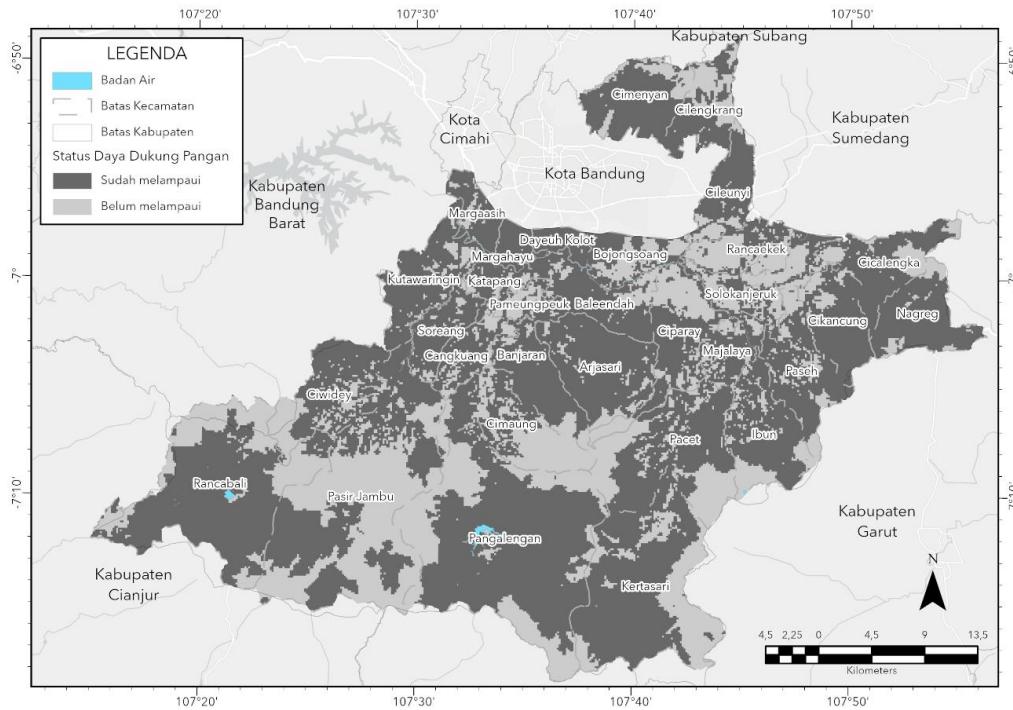
Gambar 2.41 Nilai ambang batas penduduk terhadap penyediaan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045



Gambar 2.42 Status daya dukung penyedia bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Selanjutnya, berdasarkan nilai ambang batas yang telah diperoleh, maka dapat dilakukan penentuan status daya dukung penyedia pangannya. Status daya dukung ditentukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk di setiap grid dengan nilai ambang batasnya. Apabila nilai ambang batas suatu grid lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka grid tersebut masih mampu mendukung penyediaan pangan yang statusnya adalah ‘belum melampaui’, dan sebaliknya. Gambar 2.42 menunjukkan sebaran status daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Bandung. Seperti yang terlihat, sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung sudah tidak dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan perhitungan pada sebesar 67,56% dari luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki status daya dukung pangan yang sudah melampaui. Pada tabel berikut disajikan data status daya dukung pangan per Kecamatan.

Tabel 2.56 Nilai Ketersediaan, kebutuhan, selisih, dan luas wilayah yang belum melampaui daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan Bahan Pangan (juta kkal)	Kebutuhan Bahan Pangan (juta kkal)	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Luas Belum Melampaui	
				Ha	%
Arjasari	19236,27992	127668,8053	-108432,5254	683,53	10,88%
Baleendah	16462,69918	120514,0457	-104051,3465	787,238	18,92%
Banjaran	7376,535714	85036,67771	-77660,14199	624,605	16,05%
Bojongsoang	20028,91361	57730,83218	-37701,91856	1303,443	46,05%
Cangkuang	13279,74969	44622,83589	-31343,0862	740,098	31,06%
Cicalengka	12431,17372	84902,2312	-72471,05748	1110,352	25,47%
Cikancung	15022,79397	85657,65431	-70634,86034	566,604	14,66%
Cilengkrang	4838,414468	47989,37337	-43150,9589	1311,335	37,22%
Cileunyi	10776,63407	94408,78373	-83632,14966	586,885	19,14%
Cimaung	27299,19868	58858,12084	-31558,92216	3495,25	58,59%
Cimendan	10542,92636	107887,0094	-97344,08301	916,537	19,26%
Ciparay	33035,83741	83501,37162	-50465,53421	2406,497	44,72%

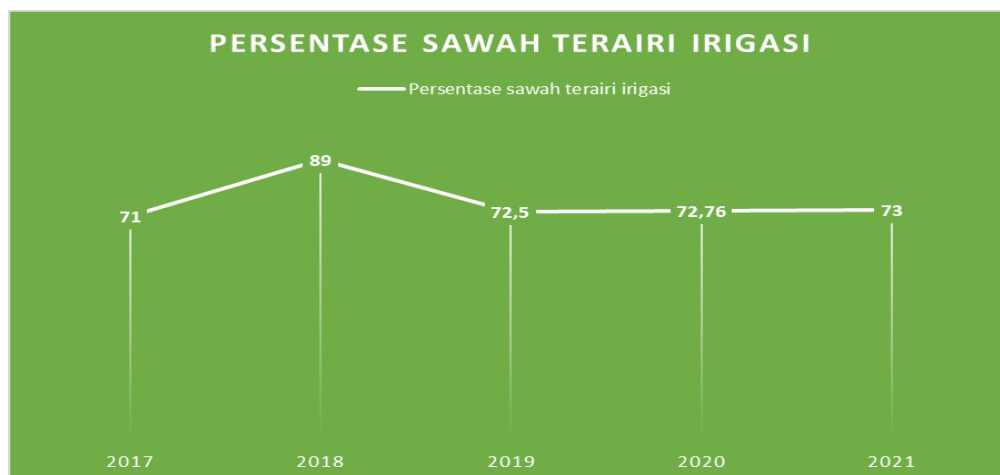


Kecamatan	Ketersediaan Bahan Pangan (juta kkal)	Kebutuhan Bahan Pangan (juta kkal)	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Luas Belum Melampaui	
				Ha	%
Ciwidey	24322,82717	75347,0587	-51024,23152	1772,231	32,14%
Dayeuh Kolot	2191,543881	53697,09397	-51505,55009	54,211	4,84%
Ibun	19035,10462	69662,80369	-50627,69906	1544,061	28,19%
Katapang	8912,835104	45424,32225	-36511,48715	414,832	26,67%
Kertasari	25124,99506	182021,5312	-156896,5362	4146,892	30,38%
Kutawaringin	16639,89694	79730,14955	-63090,25261	673,94	14,34%
Majalaya	15508,01366	66052,89954	-50544,88588	716,528	29,51%
Margaasih	6526,018277	63081,60532	-56555,58704	278,933	15,23%
Margahayu	845,7820553	50363,6494	-49517,86735	4,714	0,45%
Nagreg	6293,95322	77567,34638	-71273,39316	537,898	12,58%
Pacet	29506,75885	111274,9548	-81768,19598	3558,675	37,49%
Pameungpeuk	9843,343796	36551,35097	-26708,00718	560,966	37,07%
Pangalengan	49974,69477	319904,7061	-269930,0113	6509,437	30,06%
Paseh	22718,87873	75849,02874	-53130,15002	1252,221	26,22%
Pasir Jambu	26171,15104	171090,3169	-144919,1658	10543,683	53,23%
Rancabali	9925,948127	189456,281	-179530,3329	4575,328	29,93%
Rancaekek	39865,76356	67812,33494	-27946,57137	2717,115	60,40%
Solokanjeruk	21292,35907	38197,99818	-16905,63911	1362,346	56,06%
Soreang	11880,57895	66353,78917	-54473,21021	388,905	15,25%
Total	540976,8192	2851339,734	-2310362,915	56145,29	32,44%

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf pertama sub bab 2.1.6.1. ini, keberadaan sawah yang terairi irigasi juga penting berkaitan dengan ketahanan pangan. Persentase sawah terairi irigasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberadaan sawah yang sudah diairi dan dilayani oleh jaringan irigasi. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, nilai ini bersifat variatif sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah.

Gambar 2.43 Persentase Sawah Terairi Irigasi 2017-2021



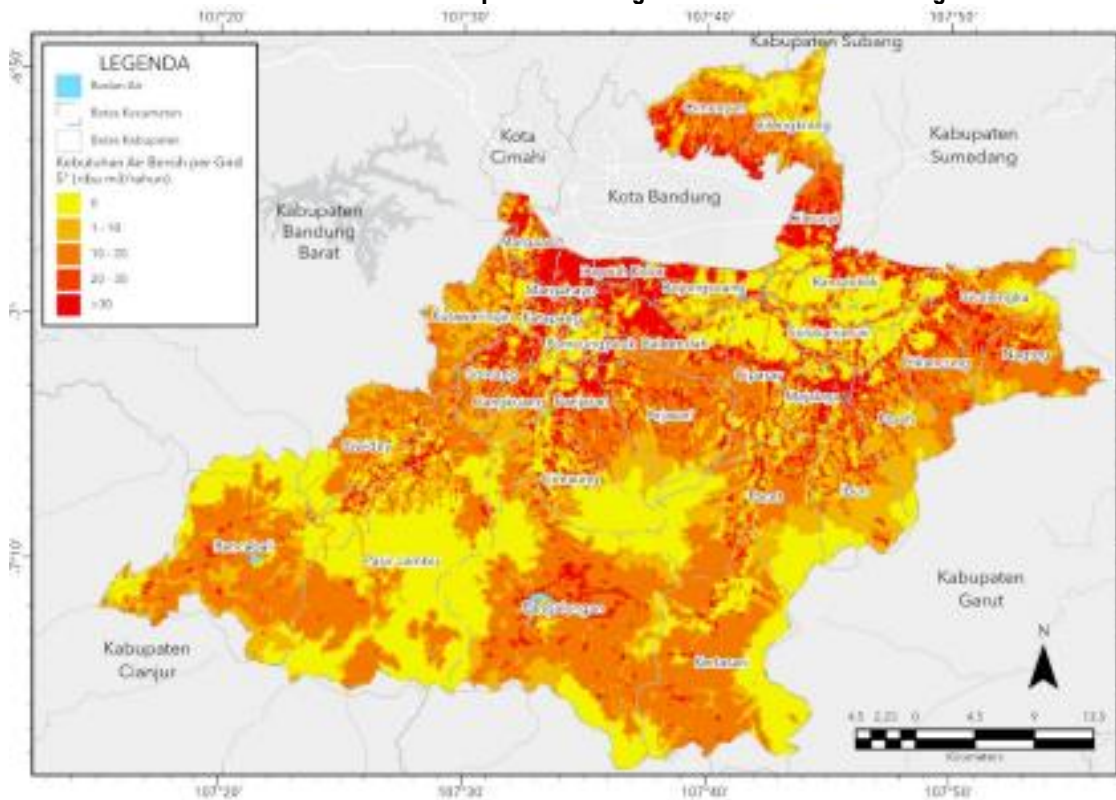
Sumber: Perubahan Rencana Strategis Dinas PUTR Kabupaten Bandung 2021-2026



2.1.7.2 Daya Dukung Air

Penentuan kebutuhan dan ketersediaan air adalah hal pertama yang dilakukan. Pada pemodelan ini, nilai kebutuhan air tidak hanya dihitung dari kebutuhan penduduk atau domestik saja, namun dihitung pula kebutuhan air untuk lahan, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Perhitungan kebutuhan domestik akan air telah disesuaikan dengan ketetapan Selisih ketersediaan terhadap kebutuhan air kemudian dihitung untuk menentukan nilai ambang batas. Perhitungan nilai ambang batas hanya mempertimbangkan kebutuhan pada sektor domestik saja. Dari nilai ambang batas inilah kemudian dapat ditentukan status daya dukung lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Bandung. Kebutuhan air yang meliputi kebutuhan domestik dan lahan di Kabupaten Bandung tersebar seperti yang terlihat pada Gambar 2.44. Secara umum kebutuhan air yang tinggi tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Terlihat bahwa kebutuhan air yang tinggi paling banyak berada di bagian Kecamatan Pameungpeuk, Canguang, Solokanjeruk, Katapang, Cimaung, Cilengkrang, dan Pengalengan.

Gambar 2.44 Kebutuhan Air di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5"x5"

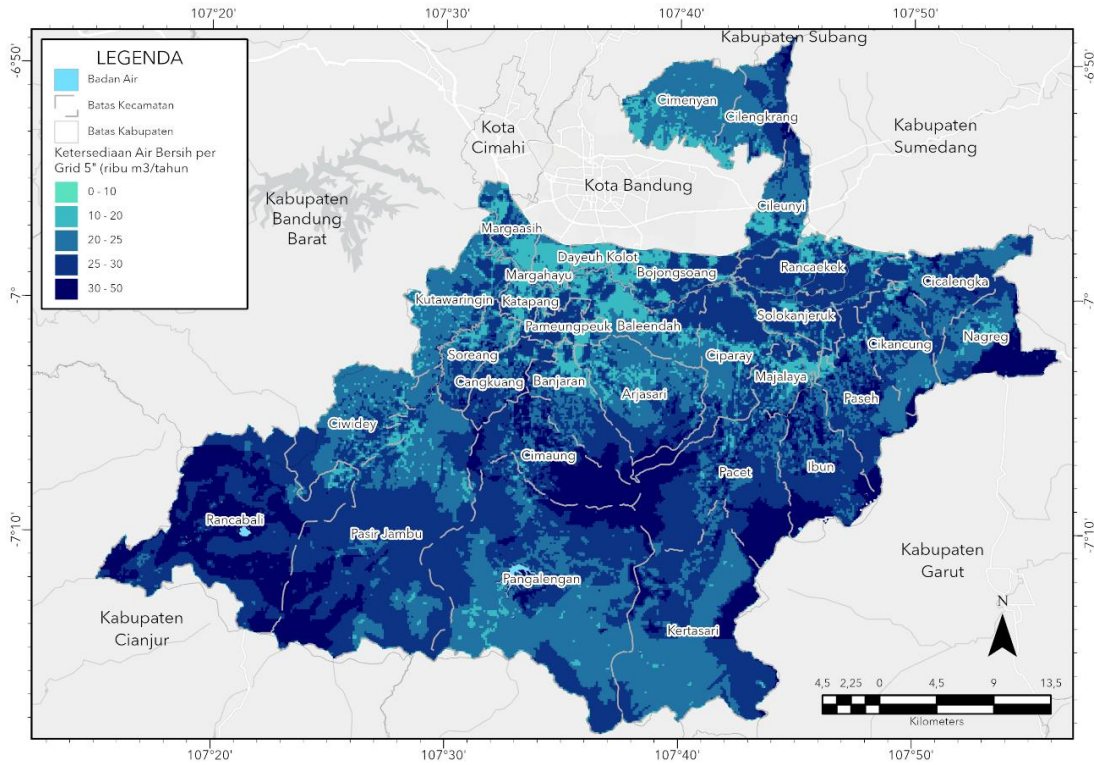


Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Kebutuhan air akan bervariasi berdasarkan sebaran penduduk dan jenis tutupan lahan. Namun, kebutuhan air yang dibutuhkan untuk lahan pertanian lebih dominan atau lebih besar dibandingkan kebutuhan air untuk domestik. Dapat dilihat pada Gambar 2.44, bagian selatan Kabupaten Bandung memiliki kebutuhan air yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini karena daerah tersebut merupakan lahan sawah, sehingga memiliki kebutuhan air yang lebih tinggi. Lahan permukiman yang merepresentasikan keberadaan penduduk dengan kebutuhan domestik memiliki kebutuhan air yang cukup rendah (ditandai dengan warna kuning di peta pada Gambar 2.45 dengan adanya ketersediaan dan kebutuhan air, maka dapat dihitung selisih ketersediaan terhadap kebutuhan air. Di beberapa wilayah ditemukan kondisi hasil selisih ini bernilai negatif. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami defisit air, namun tidak mengindikasikan bahwa daerah tersebut akan mengalami kekeringan atau kebutuhan penduduk akan air tidak terpenuhi. Gambar 2.45 menunjukkan peta sebaran ketersediaan air di Kabupaten Bandung. Pada peta terlihat bahwa semakin biru tua warna dalam peta tersebut menunjukkan semakin banyak ketersediaan air yang ada di Kabupaten Bandung. Gambar 2.46 menunjukkan peta sebaran selisih ketersediaan air di Kabupaten Bandung. Pada peta terlihat bahwa sebagian besar Kabupaten Bandung memiliki ketersediaan yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya. Hal ini direpresentasikan dengan warna hijau (selisih positif) yang lebih dominan daripada warna merah dan oranye (selisih negatif).

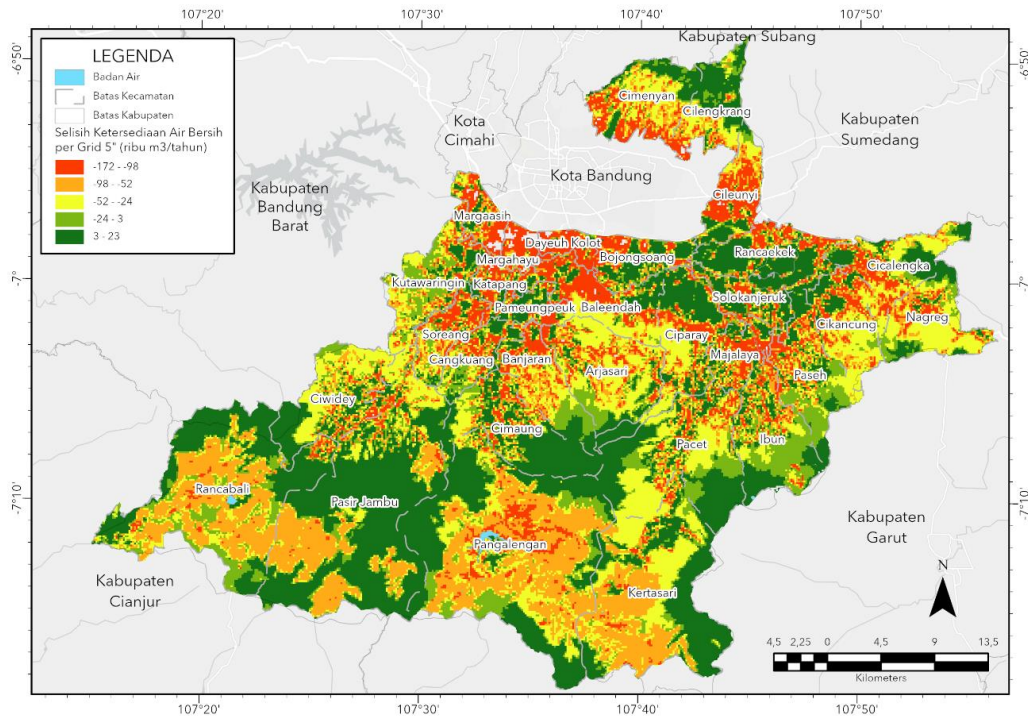


Gambar 2.45 Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Gambar 2.46 Selisih ketersediaan air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"



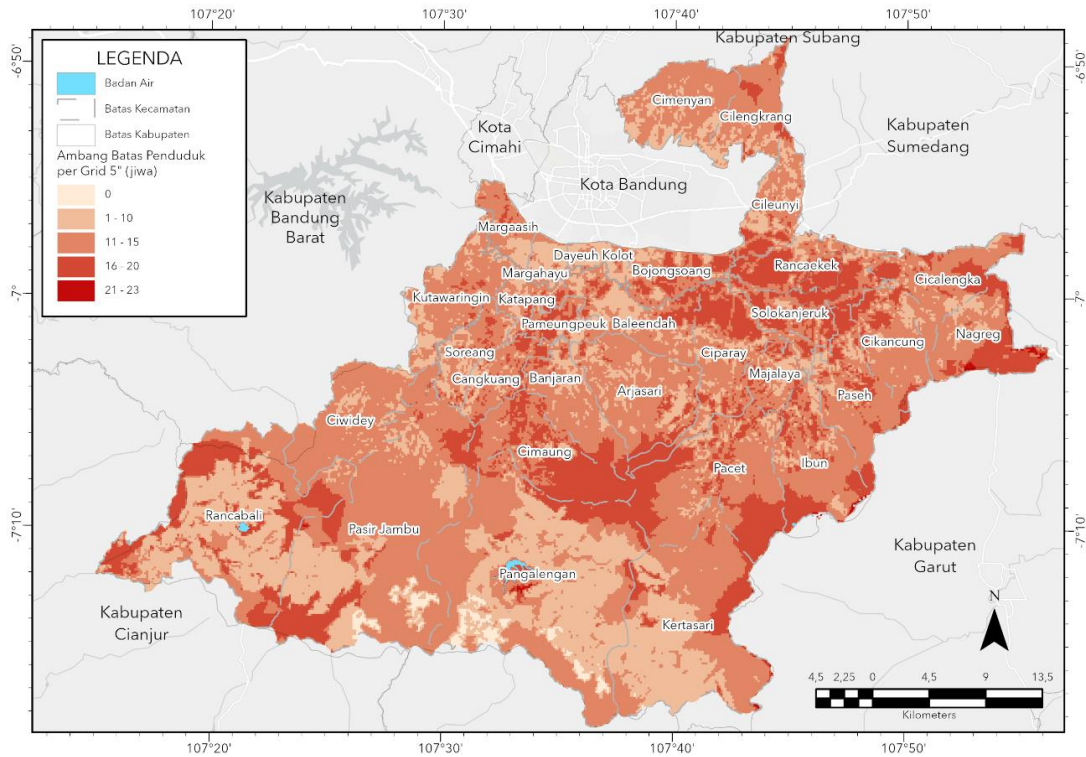
Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Wilayah yang memiliki selisih ketersediaan bernilai negatif umumnya terdiri atas tutupan lahan berupa lahan pertanian, yang memang memiliki nilai kebutuhan air yang tinggi. Wilayah ini diantaranya adalah Kecamatan Pameungpeuk, Canguang, Solokanjeruk, Katapang, Cimaung, Cilengkrang, dan Pengalengan. Penentuan ambang batas dilakukan untuk mengetahui kapasitas penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhannya oleh suatu wilayah. Pada perhitungan ambang batas, diasumsikan ketersediaan air digunakan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan lahan terlebih dahulu, kemudian sisanya digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan air domestik. Semakin tinggi ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan domestik, akan semakin tinggi pula nilai ambang batasnya. Peta sebaran ambang batas penduduk terhadap penyediaan



air di Kabupaten Bandung terdapat pada Gambar 2.47 dari peta tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bandung memiliki nilai ambang batas yang cukup rendah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung hampir mencapai batas maksimal penduduk untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

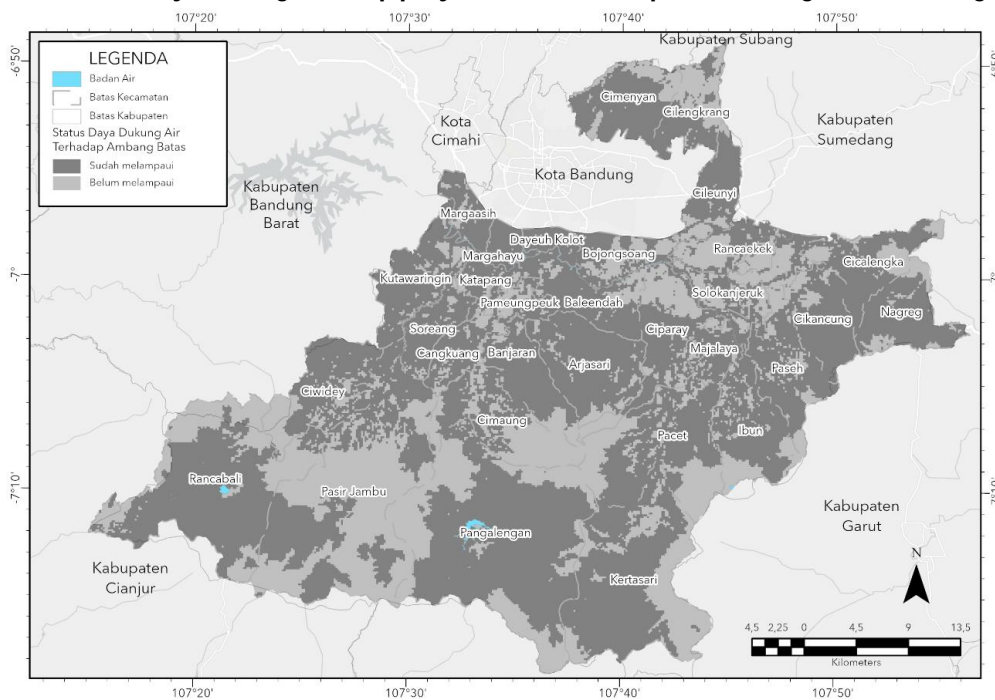
Gambar 2.47 Ambang batas penduduk untuk penyediaan air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Status daya dukung lingkungan hidup terhadap penyediaan air ditentukan dengan membandingkan nilai ambang batas terhadap jumlah penduduk yang ada. Apabila jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut lebih besar dari ambang batas, hal ini mengindikasikan bahwa ambang batasnya telah terlampaui sehingga terdapat beberapa penduduk yang tidak dapat dipenuhi kebutuhannya oleh wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Gambar 2.48 Status Daya Dukung terhadap penyediaan air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"



Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045



Secara umum, ambang batas penduduk terhadap penyediaan air di Kabupaten Bandung sudah hampir melampaui Hal ini terlihat dalam peta pada Gambar 2.48 secara keseluruhan, sudah terdapat 63,7% lahan yang sudah tidak dapat mendukung penyediaan air di Kabupaten Bandung. Secara detail, kuantifikasi nilai kebutuhan, ketersediaan, selisih, ambang batas, dan luasan yang mendukung penyediaan air berada pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air di Kabupaten Bandung

Kecamatan	Kebutuhan Total (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Luas yang Masih Mendukung (m ²)	Luas yang Masih Mendukung (%)
Pameungpeuk	109215131.1	18332716.84	-90882414.3	5774926.937	0.33
Cangkuang	110645827.3	24556781.82	-86089045.4	5845188.727	0.34
Cileunyi	241123221.4	30707045.04	-210416176	5961015.837	0.34
Cicalengka	212558020.7	44759166.96	-167798853	11429036.4	0.66
Ibun	169820723.9	60345663.56	-109475060	15504456.19	0.89
Baleendah	294155089.4	38386895.07	-255768194	7283645.842	0.42
Bojongsoang	148075539	29982477.81	-118093061	11668541.14	0.67
Solokanjeruk	113699998.1	31202350.57	-82497647.5	13082219.7	0.75
Majalaya	164439847.1	24452685.43	-139987161	6080948.676	0.35
Margahayu	144214337.4	9821619.995	-134392717	47146.49124	0.00
Cikancung	218660401	40667434.4	-177992966	5302059.816	0.30
Cimendan	280965253.1	44900487.83	-236064765	10811912.03	0.62
Soreang	189619629.9	29723637.07	-159895992	3794813.363	0.22
Pacet	297109195.7	115187201.2	-181921994	39121528.44	2.25
Margaasih	163420522.2	17732686.51	-145687835	2718831.815	0.16
Katapang	108909614.6	13964855.91	-94944758.7	3135032.788	0.18
Cimaung	156495446.3	71469962.44	-85025483.9	33063174.5	1.90
Kertasari	494487285.7	144091540.1	-350395745	43119300.4	2.48
Nagreg	207551731.4	52626177.53	-154925553	8119015.55	0.47
Arjasari	314123125.9	60160420.21	-253962705	6386944.281	0.37
Ciwidey	185086629.5	52850455.04	-132236174	15631267.73	0.90
Rancaekek	182033116.2	50915828.26	-131117288	25029292.65	1.44
Pangalengan	889935095.7	230610383.8	-659324711	69350992.23	3.98
Rancabali	538153706.8	197677303.4	-340476403	54411663.43	3.13
Paseh	211846990.5	55681431.85	-156165558	12077245.93	0.69
Kutawaringin	198358084.6	44012301.63	-154345783	6694513.242	0.38
Dayeuh Kolot	146583870.9	10294448.01	-136289422	612910.7133	0.04
Banjaran	211975696.5	39475576.36	-172500120	6504556.618	0.37
Cilengkrang	119047297.4	35357936.56	-83689360.8	15480042.03	0.89
Pasir Jambu	477595352	220016461.9	-257578890	114167460.2	6.56
Ciparay	211893971.4	58319456.36	-153574515	22320782.59	1.28
TOTAL	7511799753	1898283389	-5613516352	580530466.3	33.35

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penjelasan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum, yang dibagi secara spesifik ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

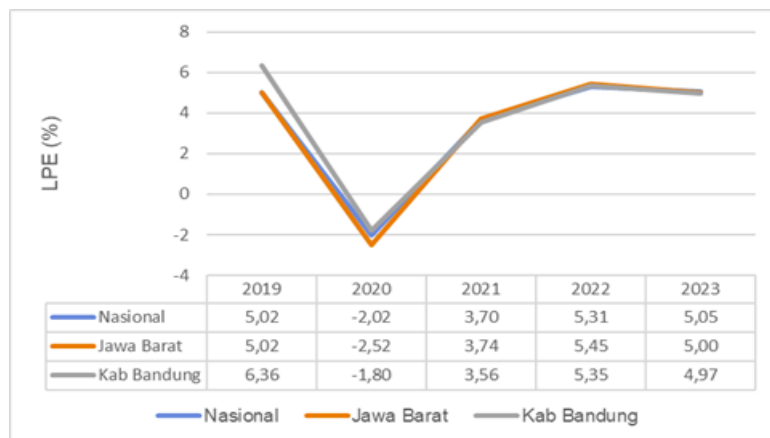
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. Secara sederhana, indikator ini menggambarkan besarnya pertumbuhan PDRB ADHK. LPE Kabupaten Bandung sempat mengalami pertumbuhan negatif yang cukup tinggi pada tahun 2020 akibat disrupsi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Namun, terjadi pemulihan atau terlepas dari status resesi mulai tahun 2021.



Besarnya pertumbuhan LPE Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada **Gambar 2.49**.

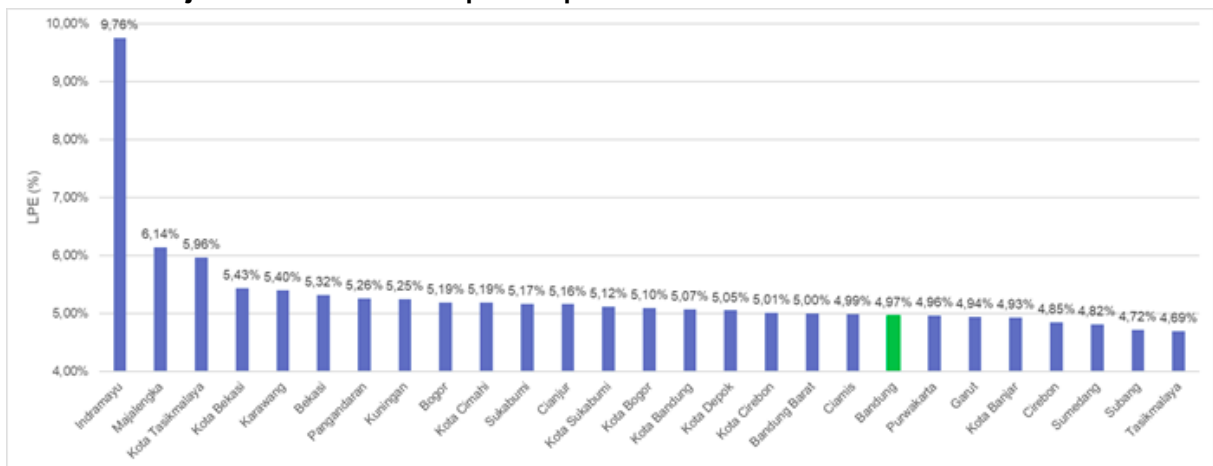
LPE kabupaten/kota secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2022. Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 3,56% pada tahun 2021 menjadi 5,35% pada tahun 2022. Di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, LPE Kabupaten Bandung masuk dalam delapan besar LPE tertinggi dari 28 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Akan tetapi, pada tahun 2023 LPE kabupaten Bandung mengalami penurunan menjadi sebesar 4,94%. Selain itu, posisi kabupaten Bandung bergeser dari ranking delapan menjadi dua puluh dalam hal besarnya LPE di antara kabupaten/kota Jawa Barat. Secara lebih rinci, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 2.50**. Adapun perbandingan LPE di kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dan Nasional sepanjang tahun 2011-2022 dapat dilihat pada **Gambar 2.51**.

Gambar 2.49 Grafik Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

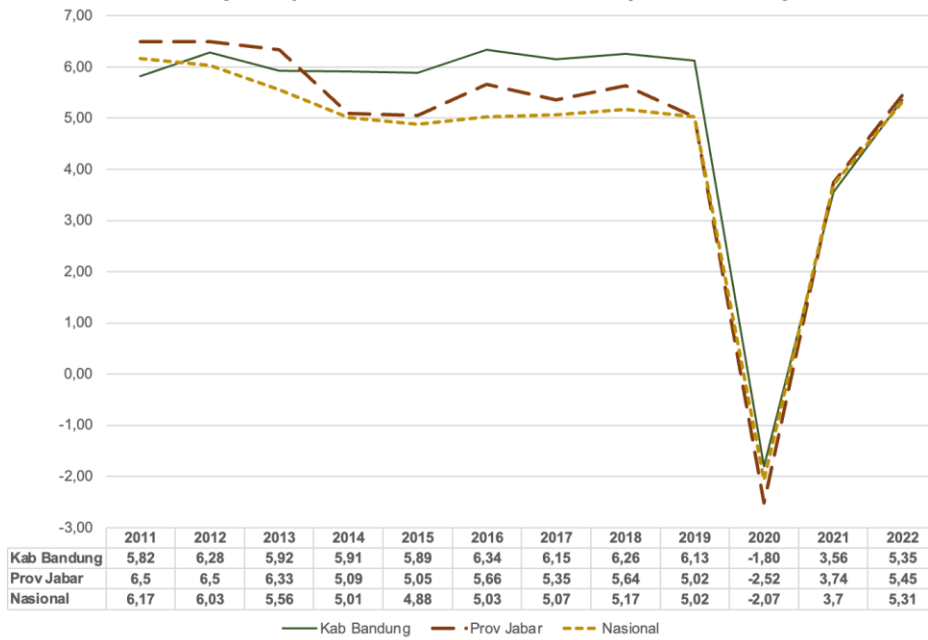
Gambar 2.50 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Gambar 2.51 Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung, Provinsi dan Nasional

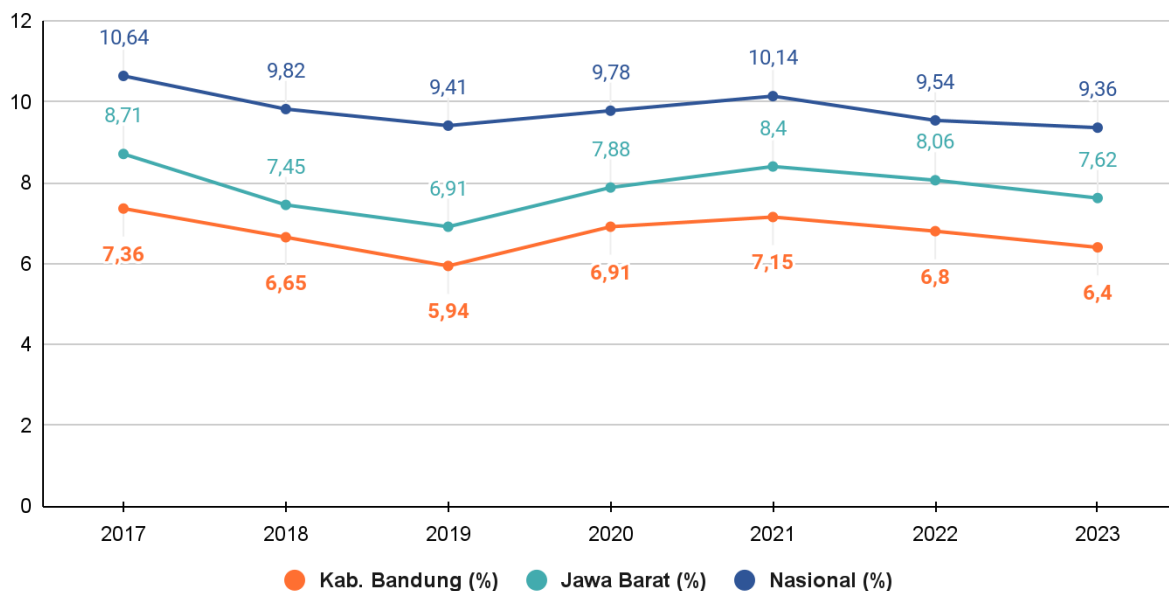


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

2.2.1.2 Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin menggambarkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yakni batas pendapatan yang dianggap minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung tahun 2023 adalah sebesar 6,4%. Angka ini lebih rendah 0,4% jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 (6,8%). Jika meninjau kurun waktu 7 tahun terakhir, tren persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan akibat pandemi COVID-19. Tren penurunan persentase penduduk miskin pasca pandemi (tahun 2021-2023) disebabkan adanya perbaikan perekonomian, sehingga lebih banyak sektor ekonomi yang kembali bangkit dan menyerap tenaga kerja secara masif.

Gambar 2.52 Persentase Penduduk Miskin (P0)

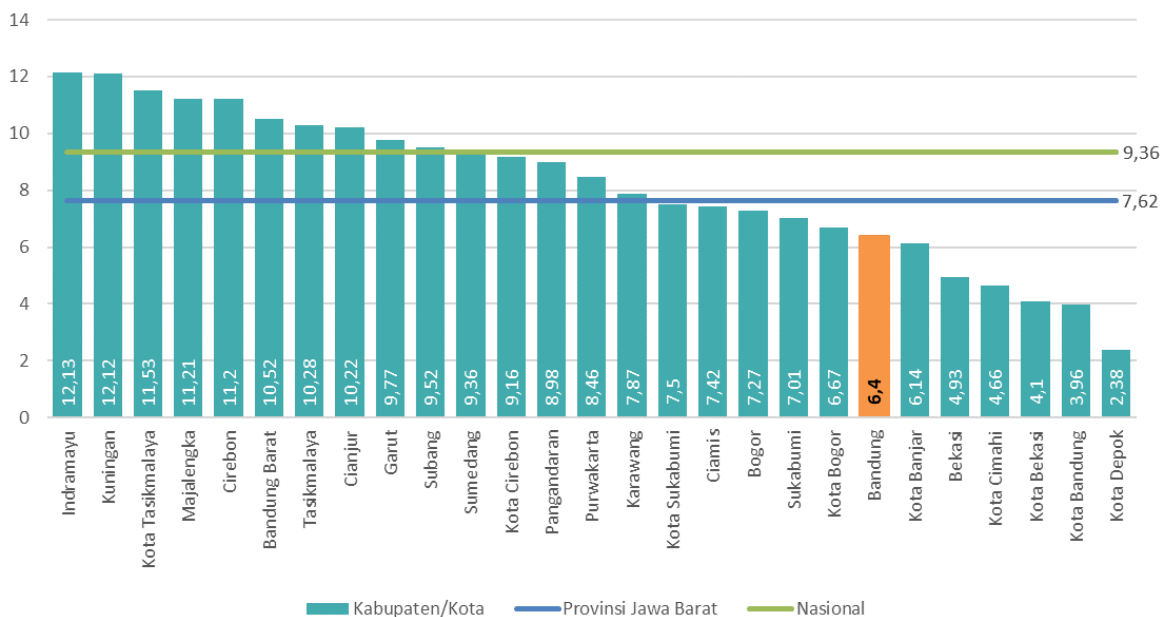


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Selain itu, analisis relevansi dapat menggambarkan kesesuaian perkembangan kondisi suatu pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi dan nasional. Gambar di atas menunjukkan analisis relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung terhadap capaian Nasional dan Provinsi pada tahun 2017-2023. Dapat dilihat bahwa perkembangan fluktuasi tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung dari tahun 2017-2023 memiliki pola yang sama dengan perkembangan kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung memiliki relevansi dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dari gambar di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung masih berada pada angka 7,36%, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada angka 8,71% dan Nasional berada pada angka 10,64%. Pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung menjadi 6,4%, Provinsi Jawa Barat pada angka 7,62% dan Nasional 9,36%. Dengan demikian, dalam 7 tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung selalu berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.53 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika meninjau posisi relatif capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung terhadap kabupaten/kota lain di Jawa Barat, dapat dilihat bahwa Kabupaten Bandung berada di peringkat ketujuh kabupaten/kota di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin terendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung meskipun lebih besar daripada Kota Bandung dan Kota Cimahi yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,96% dan 4,66%, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota perbatasan lainnya seperti Kabupaten Sumedang (9,36%), Kabupaten Garut (9,77%), dan Kabupaten Bandung Barat (10,52%).

2.2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini mengukur kesenjangan pendapatan di suatu negara atau daerah. Data untuk Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Nasional menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kesenjangan pendapatan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada kondisi pasca COVID-19, dimana pada kabupaten Bandung terjadi penurunan indeks gini setiap tahunnya. Berbeda dengan provinsi Jawa Barat yang mengalami peningkatan ketimpangan setiap tahunnya pasca COVID-19. Adapun kondisi di nasional serupa seperti Kabupaten Bandung hingga tahun 2022, dimana terjadi kenaikan indeks gini pada tahun 2023.

Penurunan indeks gini memang mengindikasikan terjadinya penurunan pada kesenjangan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, biasanya pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan, sehingga kenaikan indikator ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hanya saja, pada titik tertentu



koefisien gini akan mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat diwujudkan, dimana kesejahteraan secara menyeluruh meningkat bersamaan dengan pemerataan pendapatan. Besarnya indeks gini di kabupaten Bandung dan provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat dalam **Tabel 2.58**.

Tabel 2.58 Indeks Gini Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional Indonesia
2019	0,355	0,398	0,380
2020	0,414	0,403	0,385
2021	0,386	0,406	0,384
2022	0,370	0,412	0,381
2023	0,348	0,425	0,388

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini terjadi, karena indikator tersebut mengukur seberapa besar proporsi penduduk yang menganggur di antara seluruh penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja. Terdapat kesamaan dengan indikator sebelumnya, dimana tingkat pengangguran terbuka juga meningkat saat terjadi pandemi COVID-19. Akan tetapi, keadaan di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat serupa dalam hal ini, dimana terus terjadi penurunan pasca pandemi COVID-19. Data mengenai indikator ini di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam **Tabel 2.59**. Selama lima tahun terakhir ini, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung selalu lebih rendah daripada provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Barat selalu lebih tinggi daripada nasional. Hanya saja, posisi Kabupaten Bandung atas indikator ini bergeser dari yang tadinya berada di urutan ke-4 terendah dari 28 kota/kabupaten provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 menjadi urutan ke-7 terendah pada tahun 2023. Secara lebih rinci, pemaparan PDRB per kapita pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dapat dilihat di **Gambar 2.54**.

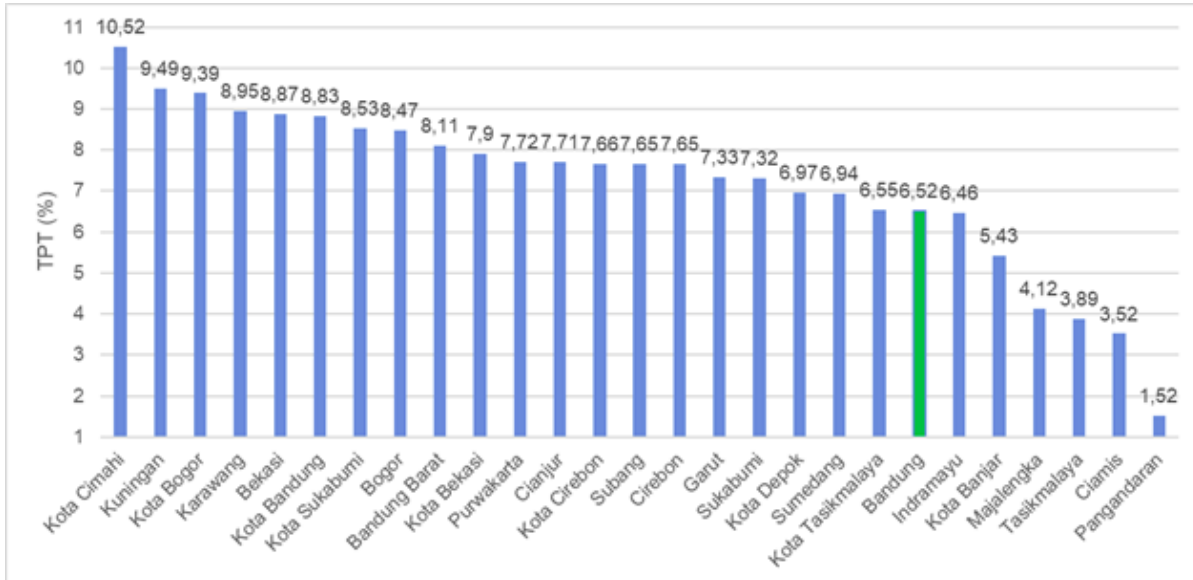
Tabel 2.59 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional Indonesia
2019	5,51%	8,04%	5,23%
2020	8,58%	10,46%	7,07%
2021	8,32%	9,82%	6,49%
2022	6,98%	8,31%	5,86%
2023	6,52%	7,44%	5,32%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)



Gambar 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

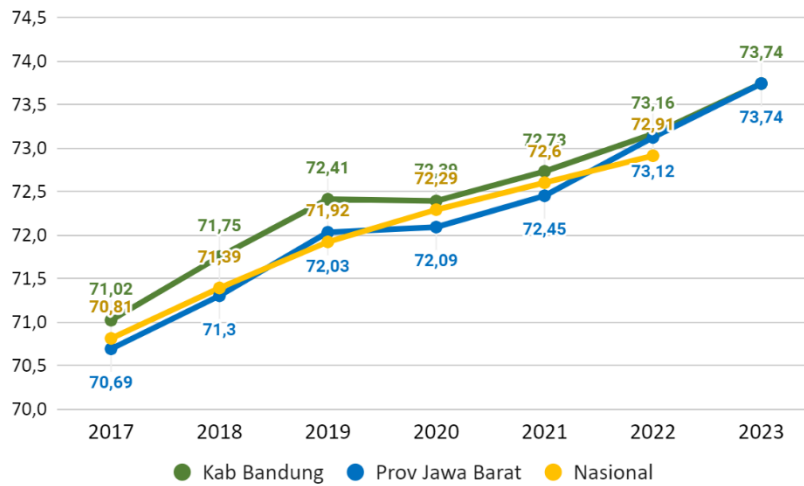
2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan manusia yang diukur dengan IPM di Kabupaten Bandung mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,02 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan sebesar 0,58 poin dari tahun 2022 menjadi 73,74. Hal ini tentunya didukung oleh peningkatan dari sisi pendidikan, kesehatan dan pengeluaran masyarakat. Capaian IPM tahun 2023 memiliki persentase capaian yang tinggi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 73,48, yaitu 99,94%. Kemudian, jika dibandingkan secara historis dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19, dapat diketahui bahwa IPM di Kabupaten Bandung berhasil tumbuh secara positif dari tahun 2019. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tetapi hingga tahun 2023, IPM terus tumbuh positif yang menunjukkan bahwa kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Bandung semakin baik. Dalam rangka terus meningkatkan IPM di Kabupaten Bandung, pemerintah perlu merumuskan strategi peningkatan capaian komponen pendukung IPM terutama yang berkaitan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, peningkatan angka harapan hidup, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Jika disandingkan dengan nasional dan provinsi, pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Bandung dengan nilai 73,74 sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat, dan lebih tinggi dari capaian nasional, dengan nilai 73,55. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bandung berhasil mencapai kondisi yang lebih baik dan tentunya berkontribusi pada capaian pembangunan nasional dan provinsi. Capaian IPM pada tahun 2023 juga menempatkan Kabupaten Bandung termasuk dalam 10 kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Jawa Barat. Sandingan IPM Kabupaten Bandung dengan nasional dan provinsi disajikan pada **Gambar 2.48** sedangkan sandingan IPM kabupaten/kota di Jawa Barat disajikan pada Error! Reference source not found.



Gambar 2.48 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2023



Tabel 2.60 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota 2023

No	Wilayah Jawa Barat	IPM Tahun 2023
1	Kota Bandung	83,04
2	Kota Bekasi	83,03
3	Kota Depok	82,38
4	Kota Cimahi	79,46
5	Kota Bogor	77,85
6	Kota Cirebon	76,46
7	Kota Sukabumi	76,32
8	Bekasi	75,76
9	Kota Tasikmalaya	74,47
10	Bandung	73,74
11	Sumedang	73,18
12	Kota Banjar	73,08
13	Karawang	72,35
14	Purwakarta	72,09
15	Ciamis	72,05
16	Bogor	71,78
17	Cirebon	70,95
18	Kuningan	70,72
19	Subang	70,70
20	Bandung Barat	69,61
21	Pangandaran	69,38
22	Indramayu	69,25
23	Majalengka	69,13
24	Sukabumi	68,49
25	Garut	68,11
26	Tasikmalaya	67,76
27	Cianjur	66,55
Provinsi Jawa Barat		73,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Perkembangan komponen IPM Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi penyusunannya dalam kurun tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 2.61



Tabel 2.61 Capaian Komponen IPM Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023

Dimensi/Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	73,40	73,53	73,72	74,01	74,27
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,68	12,69	12,7	12,71	12,73
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,79	8,96	9,07	9,08	9,10
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	10502	10201	10307	10588	11018
Indeks Pembangunan Manusia	72,41	72,39	72,73	73,16	73,74

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya pembangunan daerah tidak lepas dari keterlibatan elemen pemerintah dan masyarakat, selain itu peran perempuan berperan besar terhadap pembangunan. Tolok ukur dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung digambarkan dengan Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 2010 *United Nations Development Program* (UNDP) memperkenalkan *Gender Inequality Index* (GII) sebagai ukuran baru ketimpangan gender. GII menggambarkan potensi pencapaian pembangunan manusia yang hilang sebagai dampak dari ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi (UNDP, 2016). GII menyempurnakan kelemahan ukuran ketimpangan gender sebelumnya seperti *Gender Empowerment Measure* (GEM) dan *Gender Development Index* (GDI) (BPS, 2019).

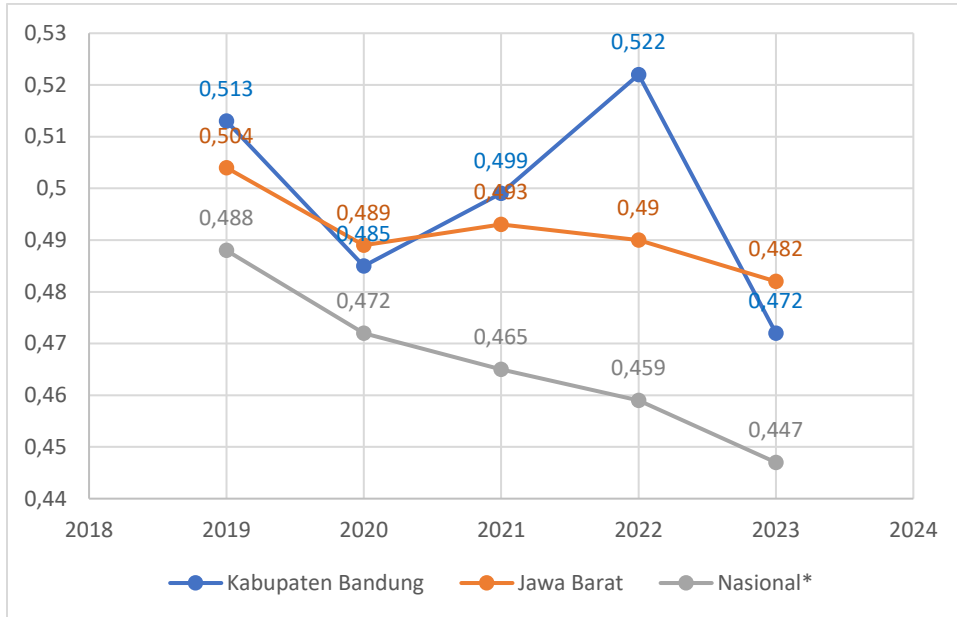
Tabel 2.62 Capaian Komponen-komponen Pembentuk Indeks Ketimpangan Gender Kab Bandung 2022-2023

No	Komponen Pembentuk	Tahun	
		2022	2023
1	MTF	2022	2023
		0.21	0.10
2	MHPK20	2022	2023
		0.32	0.33
3	Keterwakilan di Legislatif (%) (Laki-laki)	2022	2023
		83.64	83.64
4	Keterwakilan di Legislatif (%) (Perempuan)	2022	2023
		16.36	16.36
5	Pendidikan Minimal SMA (%) (Laki-laki)	2022	2023
		38.14	40.20
6	Pendidikan Minimal SMA (%) (Perempuan)	2022	2023
		35.94	36.54
7	TPAK (%) (Laki-laki)	2022	2023
		81.11	84.44
8	TPAK (%) (Perempuan)	2022	2023
		45.76	49.19
9	IKG	2022	2023
		0.52	0.47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024



Gambar 2.55 Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bandung



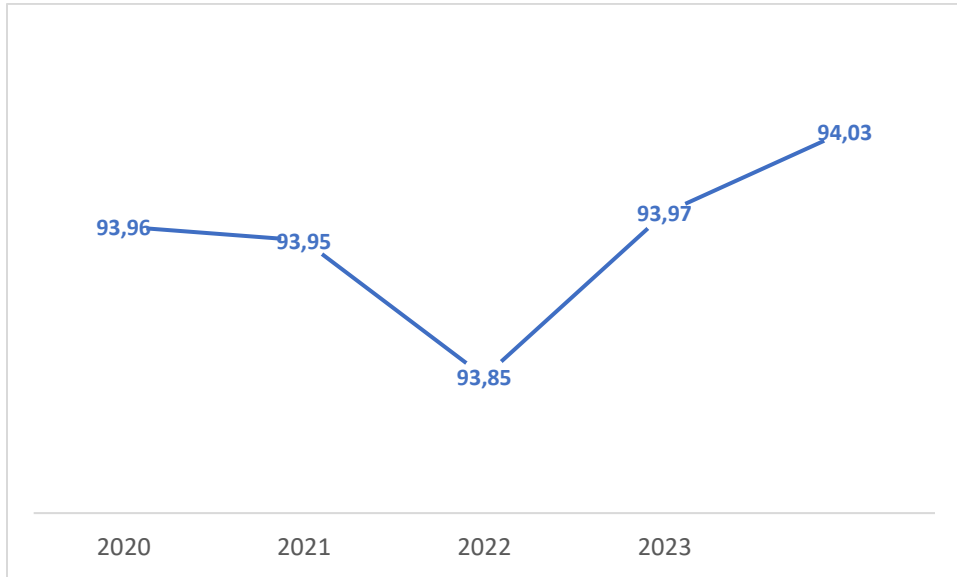
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) idealnya berlawanan. IPM, IPG, dan IDG yang tinggi seharusnya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya.

Selain itu, Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 2.48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung

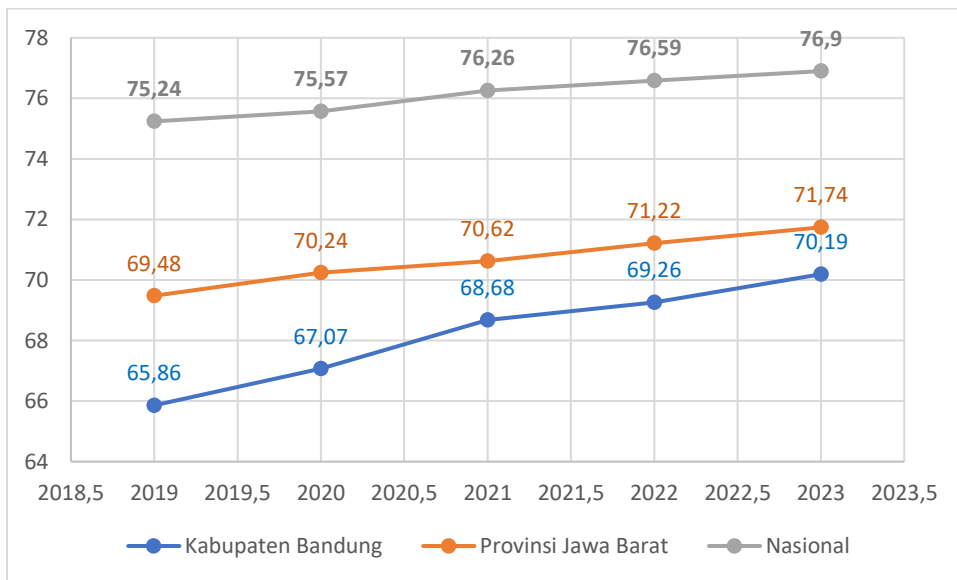


Sumber Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2023 menunjukkan capaian yang membaik yang menandakan bahwa ketimpangan Pembangunan antara laki-laki dan Perempuan semakin kecil atau semakin setara.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komponen pembentuk IDG adalah keterlibatan Perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan Perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender memiliki angka maksimal atau Angka sempurna 100 poin. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.56 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Data capaian IDG Kabupaten Bandung dari tahun 2018 – 2023 menunjukkan trend yang meningkat yang artinya pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Namun demikian capaian IDG Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata capaian IDG Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Oleh sebab itu pengarusutamaan gender atau Pembangunan yang berperspektif gender masih harus digalakkan. Pengarusutamaan gender akan berdampak maksimal dalam kesetaraan apabila



dilaksanakan oleh seluruh kalangan Masyarakat, baik yang tergabung dalam Lembaga pemerintah, swasta, organisasi keagamaan dan lainnya hingga unit terkecil yaitu keluarga (Yuslin, 2021)

2.2.2.2 Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung terus meningkat dikarenakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir (bayi yang baru lahir) meningkat dari tahun 2019, yaitu 73,40 tahun dan terus meningkat hingga 74,27 di tahun 2023. Peningkatan AHH Kabupaten Bandung didukung oleh berbagai strategi dari Pemerintah Kabupaten Bandung di antaranya, gencarnya propaganda perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa capaian AHH tahun 2023 juga telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 74,35 atau realisasi capaian sebesar 100,21%.

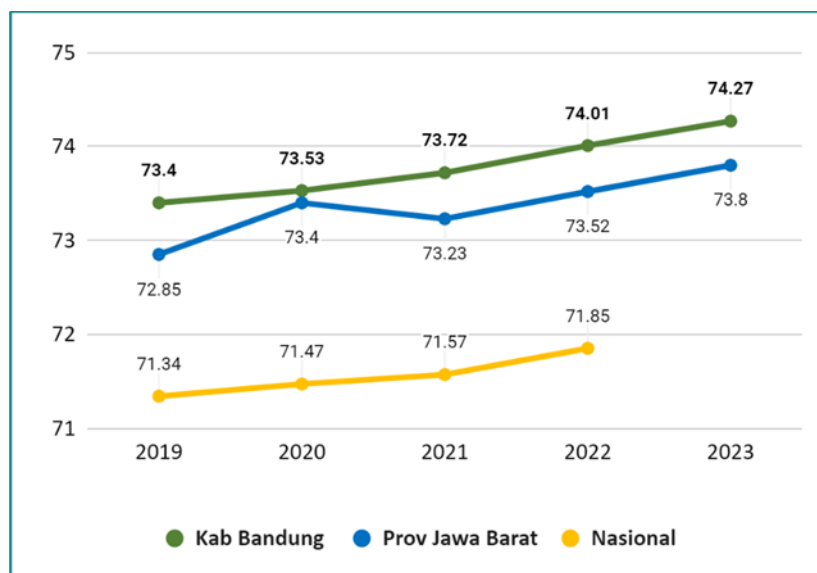
Tabel 2.63 Angka Harapan Hidup 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	73,40	73,53	73,72	74,01	74,27

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2023; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Jika disandingkan dengan nasional dan provinsi, capaian AHH Kabupaten Bandung periode tahun 2019 hingga 2023 selalu berada di atas capaian nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir (bayi yang baru lahir) di Kabupaten Bandung selama periode 2019 hingga 2023 lebih baik dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dalam lingkup wilayah Jawa Barat, capaian AHH Kabupaten Bandung tahun 2023 menempati urutan ke-8 (delapan) kabupaten/kota dengan AHH tertinggi dan berada di atas capaian provinsi. Sandingan capaian AHH Kabupaten Bandung dengan nasional dan provinsi disajikan pada **Gambar 2.57**, sedangkan sandingan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat disajikan pada **Tabel 2.64**

Gambar 2.57 Perbandingan Angka Harapan Hidup dengan Provinsi dan Nasional 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023; Diolah Bepperida Kabupaten Bandung, 2024

Tabel 2.64 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota 2023

No	Wilayah Jawa Barat	AHH Tahun 2023
1	Kota Bekasi	75,79
2	Kota Depok	75,23
3	Kota Bandung	75,04
4	Kota Cimahi	74,8



No	Wilayah Jawa Barat	AHH Tahun 2023
5	Kota Bogor	74,45
6	Bekasi	74,3
7	Kuningan	74,29
8	Bandung	74,27
9	Sumedang	73,19
10	Kota Sukabumi	73,11
11	Subang	73,24
12	Bandung Barat	73,1
13	Kota Cirebon	73,08
14	Kota Tasikmalaya	72,92
15	Karawang	72,9
16	Cirebon	72,76
17	Ciamis	72,57
18	Indramayu	72,46
19	Pangandaran	72,17
20	Garut	72,07
21	Bogor	71,92
22	Sukabumi	71,83
23	Kota Banjar	71,8
24	Purwakarta	71,74
25	Majalengka	71,05
26	Cianjur	70,79
27	Tasikmalaya	70,19
Provinsi Jawa Barat		73.80

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Setiap sektor ekonomi di suatu wilayah tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang sama, sehingga perencanaan pembangunan ekonomi pada umumnya memanfaatkan sektor-sektor yang dapat tumbuh lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perlu diputuskan dengan terlebih dahulu melihat perubahan yang terjadi pada struktur ekonomi. Hal ini dapat dianalisis dengan dua model, yaitu: *location quotient (LQ)* dan *shift share*.

Nilai indeks diatas satu ($LQ > 1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis atau berpotensi melakukan ekspor ke daerah lain. Sebaliknya, apabila nilainya kurang dari satu ($LQ < 1$), maka menunjukkan bahwa sektor tersebut tergolong sebagai non-basis, sehingga tidak berpotensi untuk dilakukan ekspor ke daerah lain.

Informasi mengenai indeks LQ pada tujuh belas lapangan usaha di kabupaten Bandung dari tahun 2010-2022 dapat dilihat melalui **Tabel 2.65**. Adapun informasi kode sektor lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.65 Indeks LQ Kabupaten Bandung 2010-2022

KODE SEKTOR	INDEKS LQ													Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A	0,9680	0,9812	1,0020	0,9939	0,9599	0,9778	0,9586	0,9887	0,9770	0,9619	0,9343	0,9354	0,8867	0,8956
B	0,9782	1,0376	1,0733	1,0429	1,0008	1,0302	1,1270	1,1334	1,2416	1,2405	1,2894	1,2996	1,2691	1,1418
C	1,1443	1,1515	1,1686	1,1599	1,1678	1,1738	1,1793	1,1750	1,1788	1,2216	1,2266	1,2213	1,2247	1,1905
D	0,2328	0,2598	0,2733	0,2746	0,2563	0,2805	0,2823	0,3236	0,3162	0,3189	0,3250	0,2980	0,2769	0,2878
E	0,4216	0,4540	0,4738	0,4711	0,4538	0,4412	0,4311	0,4245	0,4290	0,4280	0,4225	0,4169	0,4229	0,4400
F	0,8211	0,7858	0,7539	0,7607	0,7814	0,7817	0,7953	0,8142	0,8136	0,7884	0,8437	0,8029	0,8166	0,8013
G	0,8698	0,8796	0,8503	0,8762	0,8892	0,8953	0,9022	0,9047	0,8951	0,8265	0,8581	0,8902	0,8946	0,8843
H	0,8166	0,7940	0,7987	0,8033	0,8179	0,7968	0,7765	0,7745	0,7620	0,7415	0,7361	0,7229	0,7189	0,7780
I	0,9476	0,9610	1,0035	1,0143	0,9940	0,9772	0,9458	0,9216	0,9078	0,8965	0,9131	0,9162	0,8664	0,9485
J	0,6216	0,5609	0,5553	0,5756	0,5714	0,5672	0,5638	0,5652	0,5645	0,5642	0,5161	0,5278	0,5275	0,5632
K	0,2919	0,3012	0,3027	0,2964	0,2929	0,2912	0,2867	0,2857	0,2854	0,2840	0,2946	0,2893	0,2855	0,2929
L	1,0783	1,0405	1,0425	1,0160	1,0207	1,0344	1,0486	1,0486	1,0509	1,0398	1,0086	1,0186	1,0329	1,0427
M,N	1,2322	1,1441	1,1387	1,1350	1,1058	1,1029	1,1020	1,0921	1,0846	1,0677	1,1128	1,1229	1,0733	1,1224
O	0,9613	1,0167	1,0172	1,0732	1,0975	1,0895	1,0817	1,0355	1,0323	1,0030	1,0009	0,9962	1,0171	1,0381
P	1,3208	1,2756	1,2529	1,2378	1,1696	1,1401	1,1275	1,1111	1,1106	1,1088	1,0754	1,1308	1,1216	1,1739
Q	1,0544	1,0591	1,0686	1,1346	1,0464	1,0059	1,0249	1,0474	1,0438	1,0282	1,0417	1,0055	1,0538	1,0529
R,S,T,U	1,1822	1,1198	1,1340	1,0954	1,0566	0,9881	0,9830	0,9650	0,9558	0,9357	0,9536	0,9591	0,9432	1,0261

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023 (Data diolah)

Temuan diatas menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang konsisten menjadi sektor basis sepanjang tahun 2010-2022, yaitu: (1) industri pengolahan; (2) real estate; (3) jasa perusahaan; (4) jasa pendidikan; serta (5) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kelima sektor ini juga diproyeksikan akan terjadi kenaikan persentase kontribusi terhadap PDRB Bandung. Dengan demikian, Pemkab Bandung perlu memastikan keberlangsungan perekonomian dari lima sektor lapangan usaha ini, bahkan meningkatkan ekspor ke kota dan kabupaten lain di Jawa Barat maupun yang berada di luar Jawa Barat. Adapun dua sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebenarnya tergolong sektor basis atau hanya menjadi non basis di tahun 2010 saja. Akan tetapi, kedua sektor ini diproyeksikan akan mengalami penurunan kontribusinya terhadap PDRB.

Konsep LQ maupun konsep sektoral lainnya memiliki berbagai kelemahan, khususnya konsep ini hanya mengukur perbedaan produktivitas antar sektor yang dapat mengganggu gambaran kesimpulan objek analisis. Dengan demikian, kecenderungan nilai indeks menjadi bias mendekati satu jika daerah yang diamati adalah bagian yang menonjol dari daerah preferensi, dan lain sebagainya. Konsep *shift share* memperbaiki konsep LQ dan konsep-konsep konsentrasi sektoral lainnya, karena memasukkan unsur tingkat pertumbuhan yang dihitung dalam deret waktu (tahun).

Komponen *proportional share/shift* mengukur besarnya *shift* regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Nilai positif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat, sedangkan di daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot akan bernilai negatif.

Adapun komponen *differential share/shift* mengukur besarnya *shift* regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat provinsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasi intern. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *differential shift* bernilai positif, sebaliknya daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasional nilainya akan menjadi negatif.

Informasi mengenai nilai *proportional share* dan *differential share* pada tujuh belas lapangan usaha di kabupaten Bandung sepanjang tahun 2010-2022 dapat dilihat melalui **Tabel 2.66**.

Tabel 2.66 Proportional dan Differential Share Kabupaten Bandung 2010-2022

KODE SEKTOR	PROPORTIONAL SHARE	DIFFERENTIAL SHARE
A	-2.225,40	-269,90
B	-1.512,70	437,99
C	-1.484,86	4.780,80
D	-43,66	17,33



KODE SEKTOR	PROPORTIONAL SHARE	DIFFERENTIAL SHARE
E	5,06	1,46
F	682,11	196,70
G	-669,80	760,28
H	438,15	-274,04
I	251,45	-104,42
J	2.026,60	-376,96
K	50,62	11,02
L	328,87	-3,36
M,N	79,47	-41,95
O	-805,41	134,26
P	1.040,41	-377,63
Q	228,80	30,70
R,S,T,U	574,79	-379,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023 (Data diolah)

Temuan *proportional share* diatas menunjukkan bahwa terdapat enam sektor lapangan usaha merupakan sektor yang tumbuh lebih lambat daripada proporsi pertumbuhan provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; serta (6) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Di antara seluruh sektor tersebut, industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bandung, karena tergolong sebagai sektor basis. Intervensi yang perlu dilakukan berupa upaya untuk membuat sektor tersebut mengalami peningkatan pada pertumbuhan terhadap proporsi pertumbuhan provinsi Jawa Barat. Lebih-lebih, alangkah baiknya jika dapat membuat industri pengolahan berubah dari tumbuh lebih lambat menjadi lebih cepat dari pada proporsi pertumbuhan di tingkat Provinsi.

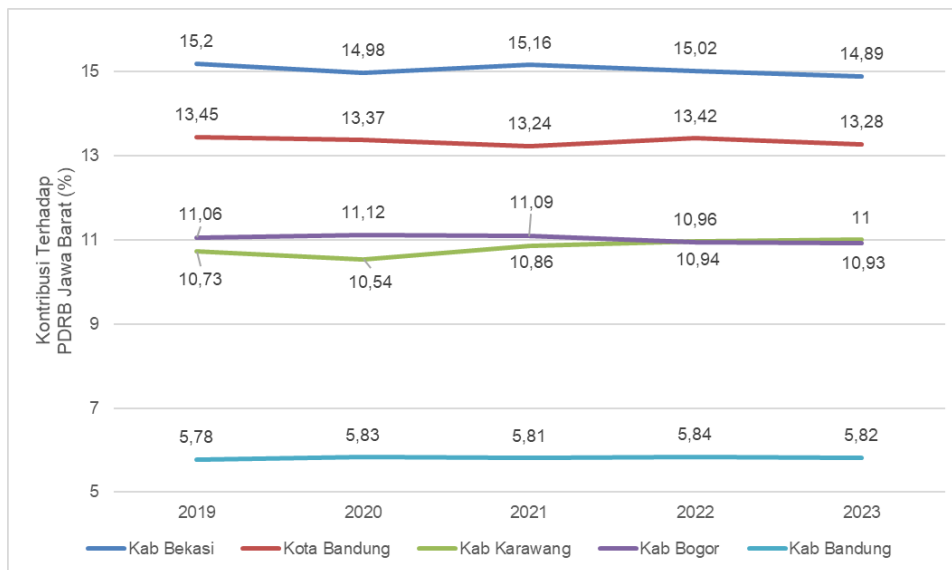
Hasil *differential share* diatas menunjukkan bahwa terdapat sembilan sektor perekonomian yang tumbuh lebih lambat berdasarkan faktor lokasional, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) real estate; (6) jasa perusahaan; (7) jasa pendidikan; serta (8) jasa lainnya. Adapun beberapa sektor diantara sektor-sektor tersebut yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah yang tergolong sebagai sektor basis, yaitu: real estate; jasa perusahaan; dan jasa pendidikan. Intervensi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung membuat sektor tersebut mengalami peningkatan pada pertumbuhan berdasarkan faktor lokasional atau malahan berubah statusnya dari lebih lambat menjadi lebih cepat pertumbuhannya.

Upaya untuk mengintervensi pertumbuhan beberapa sektor, baik berdasarkan proporsi provinsi, maupun terhadap faktor lokasional tidak akan pernah terlepas dari *trade-off* terhadap pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya yang tidak mengalami intervensi. Jika *trade-off* dari mengintervensi sektor-sektor basis yang diperlukan ini ternyata menyebabkan sektor atau sektor-sektor basis lainnya mengalami perubahan status menjadi tumbuh lebih lambat berdasarkan proporsi provinsi atau/dan faktor lokasional, maka perlu ada intervensi tambahan. Hal tersebut diperlukan agar *trade-off* tersebut bisa ditekan atau dilimpahkan kepada sektor-sektor non basis.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penopang bagi perekonomian di Jawa Barat. Hal tersebut terbukti dari data yang menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, daerah ini konsisten berada di urutan kelima berdasarkan kontribusi PDRB dengan pendekatan ADHB terhadap provinsi Jawa Barat. **Gambar 2.58** menunjukkan pergerakan kontribusi PDRB lima kota/kabupaten terhadap PDRB Jawa Barat selama lima tahun terakhir ini. Di sisi lain, dari lima sektor basis menurut perhitungan *LQ*, industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor yang masuk kedalam lima terbesar kontributor PDRB bagi Kabupaten Bandung. Bahkan, sektor ini merupakan juara pertama sumbangsuhnya terhadap PDRB. Oleh karena itu, untuk menjaga kontribusi PDRB kabupaten Bandung terhadap Jawa Barat, pemerintah perlu menaruh perhatian yang sangat banyak terhadap industri pengolahan.



Gambar 2.58 Lima Kota/Kabupaten dengan Kontribusi PDRB Terbesar Terhadap Provinsi Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indikator ini memiliki keterbatasan, karena ada berbagai hal yang tidak diperhitungkan di dalamnya. Akan tetapi, salah satu indikator ini tetap dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian di daerah tersebut. Terdapat perbedaan besarnya PDRB secara nominal atau harga berlaku dengan riil atau harga konstan. Perubahan PDRB dengan menggunakan harga berlaku merepresentasikan berubahnya nominal dari total pengeluaran atau total penerimaan. Adapun besarnya perubahan pada pendekatan dengan menggunakan harga konstan mengukur terjadinya peningkatan atau penurunan pada nilai dari barang jadi dan jasa akhir. Persentase perubahan dari PDRB Riil dari tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan besarnya laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, baik PDRB ADHB, maupun ADHK, cenderung menunjukkan trend pertumbuhan positif namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 6,45% dan 3,69% per tahun. Informasi mendetail mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung lima tahun terakhir disajikan dalam **Tabel 2.67** berikut.

Tabel 2.67 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PDRB ADHB	PDRB ADHK
2019	123.985,75	82.547,44	9,74	6,36
2020	123.604,31	81.059,06	-0,31	-1,80
2021	130.474,43	83.947,15	5,56	3,56
2022	143.002,07	88.437,96	9,60	5,35
2023	153.950,74	92.830,17	7,66	4,97
RATA-RATA			6,45	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, baik dengan pendekatan atas dasar harga berlaku (ADHB), maupun atas dasar harga konstan (ADHK), cenderung menunjukkan trend pertumbuhan positif. Hanya saja, terjadi penurunan pada tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19. Secara lebih rinci, PDRB pada tahun 2023, struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung didominasi oleh tiga sektor yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Industri pengolahan berkontribusi lebih dari separuh perekonomian (52,53%) termasuk pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dua sektor terbesar lainnya adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi



mobil dan sepeda motor (12,94%), dan sektor yang berkaitan dengan agrikultur atau pertanian, kehutanan dan perikanan (6,98%).

Setelah itu, besarnya PDRB pada tahun 2023 di Kabupaten Bandung berdasarkan lapangan usaha beserta dengan nama sektor-sektor lapangan usaha dengan kode sektornya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Nama-Nama dan Kode Sektor PDRB Lapangan Usaha

Kode	Sektor Lapangan Usaha
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estate
M,N	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	Jasa Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Tabel 2.69 Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

Kode Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Distribusi (dalam %)	
			PDRB ADHB	PDRB ADHK
A	10.845.709,34	5.761.300,62	7,04	6,21
B	2.832.859,57	1.686.797,44	1,84	1,82
C	80.869.403,40	48.020.592,74	52,53	51,73
D	135.504,44	94.483,14	0,09	0,10
E	54.368,59	33.990,67	0,04	0,04
F	9.638.717,29	6.167.414,13	6,26	6,64
G	19.925.048,60	12.143.649,55	12,94	13,08
H	6.501.618,42	3.408.167,57	4,22	3,67
I	3.831.293,18	2.310.563,52	2,49	2,49
J	2.892.354,10	3.111.477,33	1,88	3,35
K	1.065.301,67	652.151,55	0,69	0,70
L	1.997.705,16	1.432.923,49	1,3	1,54
M,N	694.101,36	447.928,43	0,45	0,48
O	2.613.775,17	1.497.262,73	1,7	1,61
P	5.256.573,66	3.101.789,70	3,41	3,34
Q	1.430.872,41	890.130,69	0,93	0,96
R,S,T,U	3.365.535,10	2.069.543,60	2,19	2,23
TOTAL	153.950.741,45	92.830.166,88	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Besarnya persentase kontribusi setiap sektor lapangan usaha terhadap PDRB secara keseluruhan selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada **Tabel 2.70**. Adapun rata-rata pertumbuhan kontribusi setiap sektor lapangan usaha terhadap PDRB tiap tahunnya dapat dilihat pada **Tabel 2.71**.



Tabel 2.70 Persentase Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Kode	2019		2020		2021		2022		2023	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
A	6,75	7,70	6,88	7,79	6,73	6,98	6,31	7,04	6,21	6,98
B	2,06	2,00	2,11	1,75	2,07	2,26	1,91	1,84	1,82	2,26
C	52,50	53,60	51,72	53,05	51,73	53,67	52,64	52,53	51,73	53,67
D	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09
E	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	6,69	6,16	6,91	6,29	6,75	6,06	6,48	6,26	6,64	6,06
G	12,91	12,30	12,66	12,35	13,06	12,66	12,97	12,94	13,08	12,66
H	3,53	3,60	3,45	3,60	3,26	3,67	3,41	4,22	3,67	3,67
I	2,46	2,45	2,43	2,44	2,35	2,37	2,34	2,49	2,49	2,37
J	2,42	1,54	3,04	1,89	3,22	1,86	3,23	1,88	3,35	1,86
K	0,70	0,66	0,75	0,70	0,75	0,67	0,70	0,69	0,70	0,67
L	1,35	1,18	1,37	1,19	1,49	1,25	1,49	1,3	1,54	1,25
M,N	0,49	0,45	0,43	0,40	0,45	0,43	0,46	0,45	0,48	0,43
O	1,93	2,09	1,84	2,01	1,73	1,71	1,64	1,7	1,61	1,71
P	3,14	3,13	3,33	3,43	3,37	3,34	3,26	3,41	3,34	3,34
Q	0,86	0,85	0,84	0,85	0,84	0,84	0,89	0,93	0,96	0,84
R,S,T,U	2,07	2,11	2,10	2,13	2,05	2,09	2,11	2,19	2,23	2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Tabel 2.71 Rata-Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Kode	2019		2020		2021		2022		2023		Rata-Rata	
	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
A	2,45	5,22	0,13	3,16	1,26	0,28	-1,13	3,35	3,21	8,69	1,18	4,14
B	-1,63	-1,45	0,43	-9,69	1,44	16,50	-2,79	28,03	0,06	-12,28	-0,50	4,22
C	9,05	11,21	-3,23	-0,24	3,60	5,89	7,20	10,54	3,15	5,37	3,95	6,55
D	0,89	3,38	-5,13	-7,84	2,19	2,29	-2,16	-1,02	5,00	6,47	0,16	0,66
E	4,06	7,89	10,24	10,81	7,99	9,15	3,95	4,92	-0,80	0,22	5,09	6,60
F	4,11	10,21	1,42	-1,69	1,14	5,39	1,13	5,84	7,61	11,14	3,08	6,18
G	0,49	7,21	-3,69	-4,89	6,86	8,32	4,63	9,55	5,86	10,02	2,83	6,04
H	3,42	4,47	-4,14	0,67	-2,13	0,51	10,37	17,09	12,85	24,00	4,07	9,35
I	7,22	9,71	-3,12	-0,48	0,14	3,05	5,11	8,91	11,58	13,04	4,19	6,84
J	10,61	10,71	23,61	22,24	9,55	8,90	5,91	4,61	8,79	8,87	11,69	11,07
K	2,91	5,03	5,72	5,46	3,61	5,64	-2,10	5,91	6,01	10,55	3,23	6,52
L	9,73	14,76	-0,37	0,57	12,67	11,80	5,71	9,06	8,47	11,43	7,24	9,53
M,N	8,78	12,20	-14,27	-12,46	9,34	10,98	7,64	12,38	9,52	13,57	4,20	7,33
O	3,19	8,19	-6,40	-6,09	-2,64	-1,16	0,17	-0,05	2,94	6,76	-0,55	1,53
P	6,35	8,87	4,27	9,32	4,99	7,00	1,86	5,44	7,51	9,92	5,00	8,11
Q	9,18	14,40	-3,41	-1,41	3,64	3,79	10,79	11,31	13,30	18,53	6,70	9,32
R,S,T,U	6,19	11,24	0,00	0,54	1,21	1,14	8,15	12,09	10,93	12,62	5,30	7,52

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat sektor-sektor yang selama lima tahun terakhir ini mengalami rata-rata pertumbuhan yang negatif secara nilai riilnya, sekalipun nilai nominalnya mengalami peningkatan. Kedua sektor tersebut adalah pertambangan dan penggalian (-0,50%) serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0,55%). Adapun tiga sektor yang mengalami rata-rata pertumbuhan positif tertinggi baik secara ADHK, maupun ADHB adalah informasi dan komunikasi (11,69% dan 11,07%), *real estate* (7,24% dan 9,53%), serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (6,70% dan 9,32%).



2.3.1.3 PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB atau perekonomian di suatu daerah sangatlah bergantung dari jumlah penduduknya. Walaupun demikian, bukan berarti suatu daerah yang memiliki PDRB lebih tinggi mencerminkan produktivitas yang lebih tinggi. Indikator PDRB Per Kapita merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan yang *apple-to-apple* dalam melihat produktivitas perekonomian suatu daerah sekaligus bagaimana kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat. Sama halnya dengan PDRB, indikator ini juga menggunakan dua pendekatan berupa ADHK dan ADHB. Berdasarkan **Tabel 2.72**, dapat diketahui bahwa nilai PDRB per kapita di Kabupaten Bandung mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung tetap mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2020, baik dengan pendekatan ADHK, maupun ADHB. Hal ini terjadi, karena sekalipun pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bandung negatif, jumlah penduduknya turun dengan persentase yang lebih besar. Hal ini tidak berlaku di provinsi Jawa Barat, maupun di tingkat nasional. Adapun besarnya PDRB Per Kapita pada tahun 2023 untuk seluruh kota/kabupaten belum juga dirilis hingga saat ini, karena terkendala oleh data jumlah penduduk pada tahun tersebut, dimana kemungkinan besar baru dirilis pada tahun 2025.

Data pada tabel juga menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung pada tahun 2023 masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat bahwa secara umum banyak kabupaten yang memiliki PDRB per kapita ADHK yang di bawah provinsi, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi dan termasuk Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi seiring pula dengan jumlah penduduk kabupaten yang semakin tinggi. Secara lebih rinci, pemaparan PDRB per kapita pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dapat dilihat di **Gambar 2.59**.

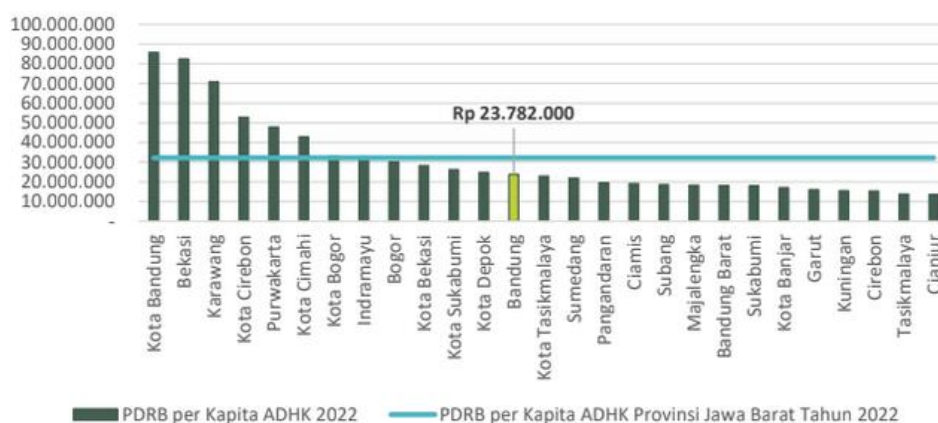
Gambaran ekonomi Kabupaten Bandung secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik, relatif terhadap Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Bandung pada tahun 2022 sebesar 23,78 juta rupiah. Angka ini berada pada peringkat ke-13 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Angka tersebut juga berada di bawah nilai rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Artinya, kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung perkapita secara keseluruhan masih relatif rendah.

Tabel 2.72 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			ADHB	ADHK
2019	32.841,48	21.865,26	8,05%	4,72%
2020	34.108,70	22.369,11	3,86%	2,30%
2021	35.589,55	22.898,47	4,34%	2,37%
2022	38.455,27	23.782,21	8,05%	3,86%
2023	41.372,25	24.946,90	7,59%	4,90%
RATA-RATA			6,45	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Gambar 2.59 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023



2.3.1.4 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran Per Kapita didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan selama sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Adapun perhitungannya sudah menyesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, besarnya pengeluaran perkapita kabupaten Bandung selalu berada dibawah provinsi Jawa Barat dan nasional. Keberadaan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan daya beli yang berdampak pada pengeluaran perkapita yang menurun. Provinsi Jawa Barat mengalami guncangan pada laju pertumbuhan pengeluaran perkapita yang lebih tinggi dari kabupaten Bandung dan nasional saat terjadi pandemi COVID-19. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan negatif dengan selisih yang sangat jauh dibandingkan kabupaten Bandung maupun nasional. Besarnya indikator kesejahteraan ini di kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dan nasional selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat dalam **Tabel 2.73**.

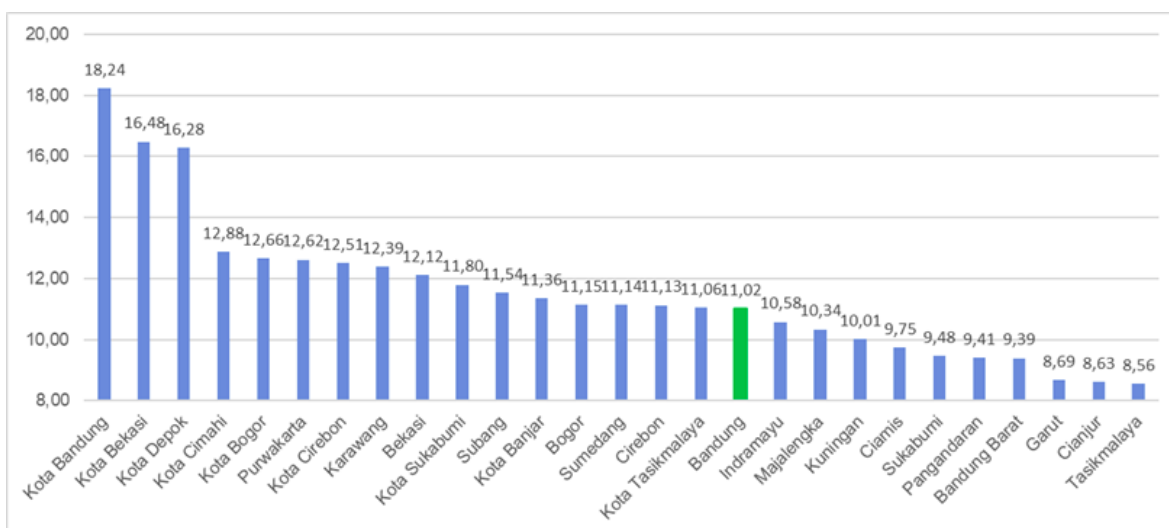
Kabupaten Bandung memiliki pengeluaran per kapita yang relatif lebih rendah daripada dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, daerah ini berada di urutan ke-14 berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita. Posisi ini bergeser menjadi urutan ke-17 pada tahun 2023. Di sisi lain, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 ini lebih tinggi daripada provinsi Jawa Barat maupun nasional. Secara lebih rinci, pemaparan pengeluaran per kapita pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dapat dilihat di **Gambar 2.60**.

Tabel 2.73 Pengeluaran Per kapita dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Tahun 2019-2023

Tahun	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)			Laju Pertumbuhan (%)		
	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional/Indonesia	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Nasional/Indonesia
2019	10.502	11.512	11.299	2,93	6,69	2,17
2020	10.201	10.845	11.013	-2,87	-5,79	-2,53
2021	10.307	10.934	11.156	1,04	0,82	1,30
2022	10.588	11.277	11.479	2,73	3,14	2,90
2023	11.018	11.695	11.899	4,06	3,71	3,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data diolah)

Gambar 2.60 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024 (Data diolah)

2.3.1.5 UMKM, Koperasi, Kewirausahaan, dan Ekonomi Kreatif

Wirausaha memiliki peran penting, baik dalam skala perekonomian daerah atau nasional, maupun dalam skala kecil, menengah, hingga besar. Hal ini terjadi, karena mereka berperan dalam pembentukan



lapangan usaha yang berimplikasi terhadap produktivitas dalam perekonomian. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat indikator yang mengukur hal ini adalah rasio kewirausahaan, dimana rumus perhitungannya berupa rasio jumlah pengusaha terhadap angkatan kerja. **Adapun pengusaha yang dimaksud bisa pemula atau mapan, asalkan memiliki nomor induk berusaha (NIB).** Data yang tersedia untuk kabupaten Bandung hanya menunjukkan rasio kewirausahaan pada tahun 2019-2021, dimana terjadi trend kenaikan, bahkan saat terjadi pandemi COVID-19. Akan tetapi, angkanya masih dibawah 1%. Data mengenai rasio kewirausahaan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2.84** di tingkat nasional, rata-rata rasio kewirausahaan tiap tahunnya sudah berada di atas 3% (3,10% pada tahun 2019 dan 3,47% pada tahun 2020). Itu berarti, pemerintah kabupaten Bandung perlu memikirkan upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk yang mau terjun untuk menjadi wirausaha.

Tabel 2.74 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Bandung

Tahun	Total Pelaku Usaha (NIB)	Angkatan Kerja	Rasio
			Kewirausahaan
2019	14.974	1.786.162	0,84%
2020	15.755	1.717.376	0,92%
2021	17.755	1.824.927	0,97%
2022	36.739	1.808.799	2,03%
2023	38.614	1.878.757	2,06%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi UKM, 2024 (diolah)

Kehadiran ekonomi kreatif (ekraf) terjadi ketika sebuah proses produksi menghasilkan nilai tambah dari aspek budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itulah sebabnya, selain dari ide-ide kreatif, untuk mengembangkan ekonomi tersebut diperlukan topangan yang berasal dari sumber daya, industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur teknologi, dan kelembagaan. Kelembagaan yang terdiri dari pemerintah, bisnis, intelektual, dan komunitas perlu terus bersinergi demi keberhasilan ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh belas sub sektor ekonomi kreatif, yaitu: (1) aplikasi; (2) arsitektur; (3) desain komunikasi visual; (4) desain produk; (5) desain interior; (6) fotografi; (7) musik; (8) kriya; (9) kuliner; (10) fesyen; (11) penerbitan; (12) film, animasi, dan video; (13) periklanan; (14) permainan interaktif; (15) seni pertunjukan; (16) seni rupa; serta (17) TV dan radio.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan ekraf terhadap perekonomian nasional adalah proporsi PDB/PDRB dari sektor ekraf terhadap PDB/PDRB secara keseluruhan. Akan tetapi, karena keterbatasan data dan lain sebagainya, dapat dibuat indikator proxy berupa rasio pelaku ekraf terhadap total pelaku usaha. Adapun pelaku usaha yang dimaksud disini adalah penduduk yang tercatat berusaha baik yang dilakukan secara sendiri, maupun dibantu oleh buruh. Informasi mengenai hal ini untuk kabupaten Bandung selama tiga tahun terakhir ini dapat dilihat pada **Tabel 2.75**.

Tabel 2.75 Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Tahun	Total Pelaku Ekraf	Total Pelaku Usaha	Rasio Pelaku Ekraf
			Terhadap Total Pelaku Usaha
2021	5.554	533.080	1,04%
2022	11.913	543.742	2,19%
2023	13.128	554.616	2,37%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Keberlangsungan ekonomi kreatif di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung, karena data terbaru (2020) menunjukkan bahwa sepersepuluh pelaku ekraf berada di daerah ini (11,18%). Adapun kota/kabupaten yang mampu mengalahinya adalah kota Bandung (17,59%). Kuliner menjadi salah satu sub sektor ekraf yang perlu diberikan perhatian khusus, karena kontributor pelaku usaha pada sub sektor ini menjadi berada di posisi ketiga terbesar. Kondisi di Jawa Barat sendiri



menunjukkan bahwa kuliner menempati posisi tertinggi kedua (13,94%) setelah musik (31,36%). Sekitar separuh dari UMKM selama lima tahun terakhir ini berada dalam kategori kuliner. Jumlahnya jauh lebih besar daripada agrobisnis, fesyen, kerajinan, dan lainnya. Informasi mengenai jumlah usaha kuliner, total keseluruhan UMKM, dan proporsi usaha kuliner dalam UMKM dapat dilihat pada **Tabel 2.76**.

Tabel 2.76 Informasi Mengenai UMKM Kuliner

Tahun	Jumlah UMKM Kuliner	Jumlah UMKM Keseluruhan	Proporsi Usaha Kuliner
			Terhadap UMKM Keseluruhan
2019	7.438	14.974	49,67%
2020	7.912	15.790	50,11%
2021	9.457	17.755	53,26%
2022	22.505	36.739	61,26%
2023	22.404	38.614	58,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Keberadaan koperasi berperan penting dalam mengembangkan ekonomi rakyat sesuai dengan cita-cita para pendahulu bangsa. Di tengah himpitan ideologi kapitalisme, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan meminimalisir terjadinya pihak-pihak yang terancam dipinggirkan. Salah satu indikator yang memperlihatkan kontribusi koperasi bagi perekonomian daerah adalah volume usaha koperasi terhadap PDRB. Data lima tahun terakhir dalam **Tabel 2.77** menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun cenderung terjadi penurunan volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung, sekalipun ada peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini terjadi, karena koperasi yang naik kelas berpindah status kepemilikannya dari kota/kabupaten menjadi provinsi. Di dalam tabel tersebut, dilampirkan juga besarnya volume usaha yang mencerminkan total nilai penjualan yang akhirnya menjadi total penerimaan barang dan jasa pada setiap tahunnya.

Tabel 2.77 Informasi Mengenai Volume Usaha Koperasi

Tahun	Volume Usaha Koperasi (dalam Rp)	Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
2019	987.679.225.390	0,80%
2020	587.165.000.000	0,48%
2021	463.868.026.953	0,36%
2022	493.760.982.195	0,35%
2023	632.557.505.163	0,41%

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

PDRB dapat diukur dengan menggunakan tiga pendekatan, dimana salah satunya adalah metode pengeluaran. Salah satu komponen penting di dalamnya yang menjadi perhatian bagi keberlangsungan ekonomi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perubahan inventori merupakan indikator lainnya dalam komponen investasi yang nilainya bisa positif atau negatif dengan besaran yang relatif kecil sehingga tidak perlu dianalisis. Itu berarti, persentase kontribusi komponen tersebut terhadap PDRB menggambarkan performa dari investasi di suatu daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan PMTB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 4,81% dan 1,85% per tahun. **Tabel 2.78** menunjukkan besarnya indikator ini selama lima tahun terakhir ini.

Tabel 2.78 Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	PMTB ADHB (Milyar Rupiah)	PMTB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PMTB ADHB	PMTB ADHK
2019	25.122,73	16.892,18	6,32	3,48
2020	23.516,69	15.796,48	-6,39	-6,49
2021	25.161,50	16.220,13	6,99	2,68
2022	27.035,80	16.703,05	7,45	2,98
2023	29.650,71	17.804,04	9,67	6,59
RATA-RATA			4,81	1,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024



Data diatas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan yang sangat besar terhadap investasi. Di sisi lain, komponen ini selama lima tahun terakhir ini berkontribusi terhadap seperlima perekonomian baik dilihat dalam nilai rillnya (18,89%-20,46%), maupun secara nominal (18,91%-20,26%). Adapun laju pertumbuhan PMTB cenderung lebih lambat daripada komponen-komponen lainnya secara keseluruhan, baik dilihat secara nilai rillnya, maupun nominalnya.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di mana sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan.

2.3.2.1 Pendidikan

Dimensi pengetahuan pada IPM digambarkan oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 tahun ke atas. Dari sisi pendidikan, anak-anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,73 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung pada tahun 2023 adalah sebesar 9,10 tahun yang berarti bahwa rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bandung setara dengan kelas 9 SMP atau lulus SMP.

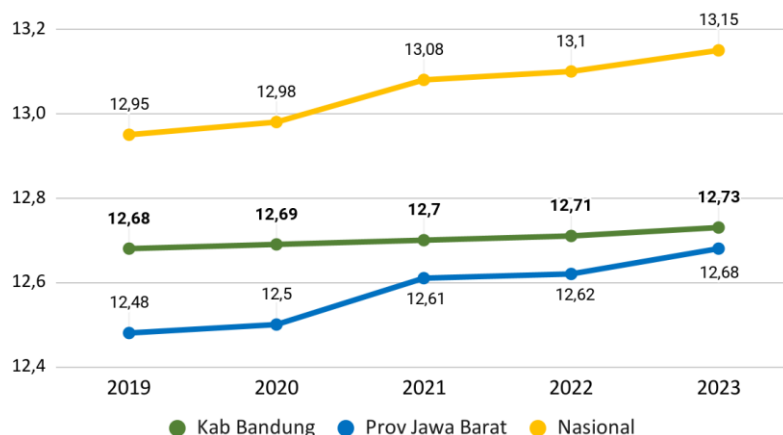
Tabel 2.79 RLS dan HLS 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)					
Capaian	8,79	8,96	9,07	9,08	9,10
Harapan Lama Sekolah (HLS)					
Capaian	12,68	12,69	12,70	12,71	12,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Dalam lingkup nasional dan provinsi yang ditunjukkan pada Gambar 2.42, diketahui bahwa capaian RLS baik nasional, provinsi maupun Kabupaten Bandung terus mengalami kenaikan periode tahun 2019 hingga tahun 2022, dimana capaian RLS Kabupaten Bandung dengan capaian 9,08 lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 8,69 maupun capaian provinsi sebesar 8,78. Kemudian jika ditinjau dari lingkup regional Jawa Barat pada **Tabel 2.80** dapat dilihat bahwa RLS Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kabupaten/kota dengan RLS tertinggi di Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa upaya Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas pendidikan semakin membaik dan tentunya berkontribusi bagi pencapaian tujuan provinsi maupun nasional terkait peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Gambar 2.61 Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah dengan Provinsi dan Nasional 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2024; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, 2024



Tabel 2.80 Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota 2023

No	Wilayah Jawa Barat	HLS Tahun 2023
1	Ciamis	14,29
2	Kota Bandung	14,24
3	Kota Bekasi	14,12
4	Kota Depok	13,96
5	Kota Cimahi	13,84
6	Kota Sukabumi	13,6
7	Kota Tasikmalaya	13,49
8	Kota Bogor	13,45
9	Kota Banjar	13,27
10	Bekasi	13,17
11	Kota Cirebon	13,16
12	Sumedang	13,01
13	Bandung	12,73
14	Bogor	12,64
15	Tasikmalaya	12,63
16	Cirebon	12,41
17	Sukabumi	12,38
18	Pangandaran	12,3
19	Indramayu	12,29
20	Majalengka	12,26
21	Kuningan	12,26
22	Karawang	12,2
23	Purwakarta	12,18
24	Garut	12,16
25	Cianjur	12,03
26	Subang	11,91
27	Bandung Barat	11,91
Provinsi Jawa Barat		12,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

2.3.2.2 Karakteristik Pendidikan Penduduk yang Bekerja

Tingkat Pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa angkatan kerja didominasi oleh lulusan SD dengan jumlah sekitar sepertiganya (32,41%-35,93%), apabila kategori SMA umum dan kejuruan dipisah. Apabila kategori SMA disatukan, maka tiga tahun terakhir ini lulusan SMA mendominasi. Walaupun demikian, jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi selalu dibawah 10%. Jika lulusan SD dan SMP disatukan, maka jumlahnya selalu lebih dari separuhnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu perhatian khusus bagi para angkatan kerja di Kabupaten Bandung untuk mendapatkan kesadaran dan kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, perlu ditelusuri dibalik penyebab angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, karena mayoritas pekerja tidak memerlukan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari SMP untuk pekerjaan yang mereka kerjakan. Distribusi angkatan kerja menurut pendidikan disajikan pada **Tabel 2.81**.

Tabel 2.81 Distribusi Angkatan Bekerja Menurut Pendidikan 2019-2023

No	Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	<=SD	35,93%	33,68%	32,41%	31,98%	33,44%
2	SMP	24,32%	26,38%	25,54%	25,55%	23,71%
3	SMA Umum	20,99%	20,84%	21,18%	21,43%	34,49%
4	SMA Kejuruan	10,64%	10,42%	11,94%	12,15%	
5	Diploma I/II/III	1,79%	1,99%	1,95%	1,80%	8,36%
6	Universitas	6,33%	6,69%	6,98%	7,10%	

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)



2.3.2.3 Literasi/Numerasi

Literasi merupakan aktivitas yang penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor yang menunjang kegiatan literasi di antaranya buku atau bahan pustaka yang bisa diakses secara mudah oleh warga negara. Terkait dengan capaian kegiatan literasi terdapat pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi Masyarakat. Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) adalah komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpus. Pada tahun 2022 IPLM Kabupaten Bandung tercatat 82,09 dan masuk kategori Tinggi. Jika dibandingkan dengan IPLM Jawa Barat sebesar 70,73 dan masuk kategori “sedang”, maka IPLM Kabupaten Bandung berada posisi yang lebih baik dibanding rata-rata provinsi.

Di era digital seperti saat ini dan mengingat kondisi geografis Kabupaten Bandung, pengembangan literasi melalui Perpustakaan di Kabupaten Bandung tentunya menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu perlu dilakukan strategi lainnya untuk dapat meningkatkan Gerakan literasi di Masyarakat. Berbagai strategi dilakukan Kabupaten Bandung dalam Upaya peningkatan literasi Masyarakat diantaranya yaitu berjejaring dengan Bunda Literasi yang ada di setiap Kecamatan dan Desa, pemilihan Duta Baca, sosialisasi gemar membaca di Pondok Pesantren dan Madrasah serta peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan. Selain itu sinergi dengan komunitas, Taman Baca Masyarakat (TBM), Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan sekolah juga terus dilakukan.

Tabel 2.82 Capaian dan Proyeksi IPLM Kabupaten Bandung sampai tahun 2045

Indikator	Capaian			Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
IPLM Kabupaten Bandung	49	82,09	53,70	53,80	53,90	54,40	54,90	55,40	55,90

Sumber: Hasil Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Bandung, 2024

2.3.2.4 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Produktivitas pekerja akan tercipta apabila mereka mendapatkan berbagai kepastian jika mereka bekerja. Upah yang mereka peroleh memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hal ini. Akan tetapi, kepemilikan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi indikator yang menopang hal ini. Kabupaten Bandung berhasil meningkatkannya dari 2019 (15,16%) menuju 2023 (26,55%). Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa tidak setiap tahun cakupannya meningkat atau pernah menurun. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung perlu terus berupaya agar dalam beberapa tahun mendatang terjadi peningkatan yang signifikan, demi terjaminnya para pekerja di daerah ini. Informasi mengenai cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83 Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung

(dalam satuan %)				
2019	2020	2021	2022	2023
15,16	8,72	10,95	23,85	26,55

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

2.3.2.5 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bandung



memiliki kecenderungan menurun selama tahun 2020-2022. Komposisi penduduk kabupaten Bandung pada tahun 2-22 didominasi oleh penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang mencapai 68,82 persen sehingga tingkat ketergantungan penduduk kabupaten Bandung berada pada angka 45,31%. Artinya, sebanyak 100 orang berusia kerja memiliki tanggungan sebanyak 45-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Penurunan tersebut menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung usia produktif untuk menompang biaya penduduk yang memiliki usia tidak produktif.

Tabel 2.84 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung 2020-2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	958.954	928.526	958.613
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	175.705	180.299	200.870
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) + (2)	1.134.659	1.108.825	1.159.483
4	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	2.489.131	2.444.598	2.559.177
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	45,58	45,36	45,31

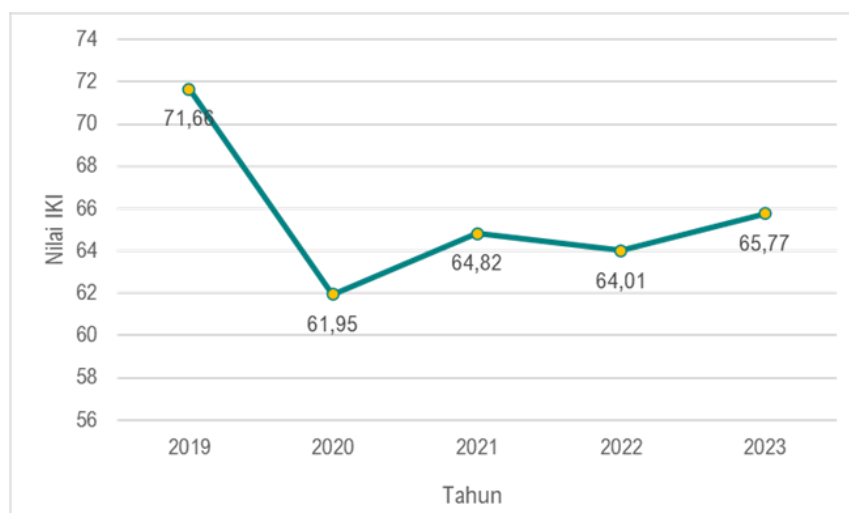
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2023

2.3.3 DAYA SAING FASILITAS /INFRASTRUKTUR WILAYAH

2.3.3.1 Kualitas Infrastruktur

Kualitas infrastruktur berpengaruh pada standar kehidupan masyarakat, kesehatan, karena infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya. Dalam memberikan pelayanan akses, kualitas infrastruktur menjadi salah satu penilai atau penentu dalam mengukur hasil pembangunan. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai kualitas infrastruktur yang baik. Salah satunya yaitu masing-masing dari kinerja komposit infrastruktur tidak sepenuhnya meningkat dan berdampak pada pencapaian Indeks Kualitas Infrastruktur. Khusus untuk tahun 2022, penurunan IKI salah satu penyebabnya adalah turunnya persentase akses aman terhadap air bersih di kawasan permukiman, persentase saluran drainase perkotaan dan lingkungan dalam kondisi baik, persentase saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik, oleh karena itu perlunya kebijakan yang tepat sehingga dapat berpengaruh meningkatkan ketiga variabel pendukung IKI tersebut. Adapun untuk meningkatkan IKI, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Panjang jalan kabupaten mantap, meningkatkan jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik, menjaga dan meningkatkan kualitas jaringan drainase, mengurangi luas Kawasan kumuh, meningkatkan akses aman air bersih, akses aman terhadap sanitasi, dan level pelayanan dari jaringan jalan. Secara rincinya dapat ditinjau pada Gambar 2.62 berikut.

Gambar 2.62 Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bandung tahun 2019-2023





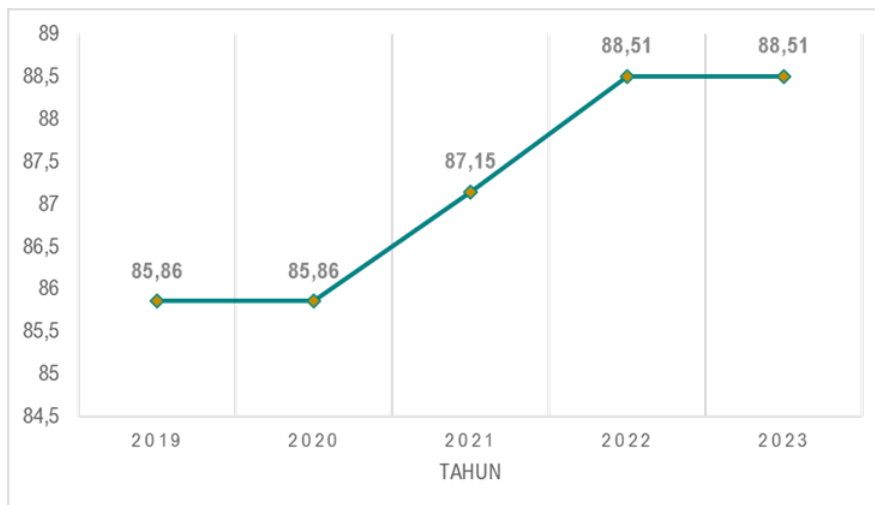
Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

2.3.3.2 Kemantapan Jalan Kabupaten Bandung

Menurut UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap (jembatan, terowongan, ponton, lintas atas/*flyover*, *elevated road*, lintas bawah/*underpass*, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan) dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Bandung terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 620/KEP.521-DPUTR/2023 Tanggal 19 Juni 2023, panjang jaringan jalan kabupaten adalah 1.428,36 km dan untuk panjang jalan desa adalah 863,37 km.

Kemantapan jalan merupakan salah satu indikator infrastruktur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan keterampilan infrastruktur di suatu daerah. Infrastruktur jalan yang baik akan mempengaruhi konektivitas dan keberhasilan ekonomi daerah, serta mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Permen PU Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan, serta mengikuti suatu standar tertentu.

Gambar 2.63 Jalan Mantap Infrastruktur Kabupaten Bandung tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2024

Tingkat kemantapan jalan wilayah Kabupaten Bandung dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan kenaikan dari tahun 2019 sebesar 85,86 persen menjadi 87,15 persen pada tahun 2021 dan kenaikan terus terjadi hingga tahun 2022-2023 menjadi 88,51 persen. Hal ini, menunjukkan bahwa proporsi jalan mantap tahun 2020-2022 telah tercapai sesuai target.

2.3.3.3 Level of Service (LOS)

Indikator LOS atau indikator tingkat pelayanan ruas jalan merupakan sebuah representasi kinerja dari masing-masing ruas jaringan jalan yang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan, kecepatan penggunaan kendaraan, kepadatan ruas jalan oleh kendaraan, dan hambatan yang terjadi pada ruas jalan. Nilai LOS dapat menunjukkan kondisi aksesibilitas jalan di Kabupaten Bandung. Terdapat enam indikator nilai LOS yaitu, A, B, C, D, E dan F, dengan A sebagai yang terbaik dan F sebagai yang terburuk.

Tahun 2019, Kabupaten Bandung masih memiliki kategori tingkat pelayanan ruas jalan pada indikator D yang berarti termasuk ke dalam penilaian arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda serta volume mendekati kapasitas jalan di Kabupaten Bandung. Perkembangan kenaikan tingkat pelayanan jalan di Kabupaten Bandung dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, peningkatan tersebut dikarenakan kapasitas jalan Kabupaten Bandung ditingkatkan serta



terdapat penguraian arus lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2020-2023 *Level of Service* Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kategori B dengan nilai Los 0,35 yang artinya bahwa Kabupaten Bandung memiliki arus yang stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.

Tabel 2.85 Level of Service (LOS) Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Level of Service (LOS)
2019	D
2020	B
2021	B
2022	B
2023	B

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2024

2.4.3.4 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman adalah prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman. Penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman harus memenuhi standar minimum tertentu yang harus dipenuhi dan harus memperhatikan aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sekitar). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi urusan pemerintahan wajib. Oleh karena itu infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan Data Dinas PUTR Kabupaten Bandung, pada tahun 2019 luasan permukiman di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 24.204.863 m². **Perhitungan kebutuhan ideal luas hunian** berdasarkan SNI 03-1733-2004, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang) adalah 36m² atau 9m² per jiwa.

Tabel 2.86 Luasan Selisih Aktual Ideal Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2019 dan 2023

No	Kecamatan	Luas aktual permukiman sampai 2019 (m ²)	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Bandung tahun 2023	Kebutuhan Ideal Luas Permukiman 2023 (m ²)	Selisih Aktual-ideal tahun 2023 (m ²)
1	Arjasari	836.121	37.861	1.362.996	-526.875
2	Baleendah	1.480.651	87.058	3.134.088	-1.653.437
3	Banjaran	552.921	46.939	1.689.804	-1.136.883
4	Bojongsoang	3.090.057	35.588	1.281.168	1.808.889
5	Cangkuang	559.943	28.015	1.008.540	-448.597
6	Cicalengka	900.489	41.588	1.497.168	-596.679
7	Cikancung	518.053	32.856	1.182.816	-664.763
8	Cilengkrang	208.254	17.916	644.976	-436.722
9	Cileunyi	2.461.312	57.089	2.055.204	406.108
10	Cimaung	244.076	32.583	1.172.988	-928.912
11	Cimencyan	4.034.491	37.249	1.340.964	2.693.527
12	Ciparay	374.943	60.185	2.166.660	-1.791.717
13	Ciwidey	69.288	32.118	1.156.248	-1.086.960
14	Dayeuhkolot	121.708	35.168	1.266.048	-1.144.340
15	Ibun	121.213	30.713	1.105.668	-984.455
16	Katapang	1.061.424	43.949	1.582.164	-520.740
17	Kertasari	0	25.506	918.216	-918.216
18	Kutawaringin	171.528	36.144	1.301.184	-1.129.656
19	Majalaya	34.480	55.173	1.986.228	-1.951.748
20	Margaasih	977.631	48.583	1.748.988	-771.357



No	Kecamatan	Luas aktual permukiman sampai 2019 (m2)	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Bandung tahun 2023	Kebutuhan Ideal Luas Permukiman 2023 (m2)	Selisih Aktual-ideal tahun 2023 (m2)
21	Margahayu	1.453.385	38.741	1.394.676	58.709
22	Nagreg	348.938	19.807	713.052	-364.114
23	Pacet	131.995	41.189	1.482.804	-1.350.809
24	Pameungpeuk	97.416	30.574	1.100.664	-1.003.248
25	Pangalengan	20.502	57.417	2.067.012	-2.046.510
26	Paseh	755.497	45.965	1.654.740	-899.243
27	Pasirjambu	120.466	33.512	1.206.432	-1.085.966
28	Rancabali	0	19.176	690.336	-690.336
29	Rancaekek	1.441.728	61.475	2.213.100	-771.372
30	Solokan Jeruk	176.490	30.984	1.115.424	-938.934
31	Soreang	1.839.864	40.425	1.455.300	384.564
		24.204.863	1.241.546	44.695.656	-20.490.793

Sumber: Luas Aktual Permukiman Berdasarkan Dinas PUTR Kabupaten Bandung, 2019
Data Agregat Kependudukan 2023 Disdukcapil Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2023, masih terdapat gap luasan permukiman di Kabupaten Bandung. Luas ideal permukiman berdasarkan jumlah KK eksisting pada 2023 yaitu 44.695.656 m2 sementara itu masih ada selisih 20.490.793 m2 dari jumlah luasan permukiman yang ada pada tahun 2019.

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PDRB dapat diukur dengan menggunakan tiga pendekatan, dimana salah satunya adalah metode pengeluaran. Salah satu komponen penting di dalamnya yang menjadi perhatian bagi keberlangsungan ekonomi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perubahan inventori merupakan indikator lainnya dalam komponen investasi yang nilainya bisa positif atau negatif dengan besaran yang relatif kecil sehingga tidak perlu dianalisis. Itu berarti, persentase kontribusi komponen tersebut terhadap PDRB menggambarkan performa dari investasi di suatu daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan PMTB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 4,81% dan 1,85% per tahun. Tabel berikut di bawah ini menunjukkan besarnya indikator ini selama lima tahun terakhir ini.

Tabel 2.87 Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	PMTB ADHB (Milyar Rupiah)	PMTB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PMTB ADHB	PMTB ADHK
2019	25.122,73	16.892,18	6,32	3,48
2020	23.516,69	15.796,48	-6,39	-6,49
2021	25.161,50	16.220,13	6,99	2,68
2022	27.035,80	16.703,05	7,45	2,98
2023	29.650,71	17.804,04	9,67	6,59
RATA-RATA			4,81	1,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan yang sangat besar terhadap investasi. Di sisi lain, komponen ini selama lima tahun terakhir ini berkontribusi terhadap seperlima perekonomian baik dilihat dalam nilai riilnya (18,89%-20,46%), maupun secara nominal (18,91%-20,26%). Adapun laju pertumbuhan PMTB cenderung lebih lambat daripada komponen-komponen lainnya secara keseluruhan, baik dilihat secara nilai riilnya, maupun nominalnya.



2.3.4.2 Penanaman Modal

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) memuat realisasi investasi penanaman modal baik yang direalisasikan dalam negeri, maupun asing. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) mencatat bahwa di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 gabungan realisasi penanaman modal yang berada di 31 kecamatan sekitar Rp 30,35 Triliun. Data ini berasal dari 602 pelaku usaha di Kabupaten Bandung yang taat untuk melaporkan kegiatan usahanya sehingga tercatat dalam LKPM. Penanaman modal tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 150.408 orang, dimana lebih dari dua pertiganya (67,68%) atau sebanyak 101.719 orang berasal dari skala mikro. Selain itu, skala mikro juga mendominasi jumlah proyek hampir seluruhnya (94,65%) atau sebesar 39.486 proyek, dimana jumlah keseluruhan proyek termasuk skala menengah dan besar jumlahnya 41.716 proyek. Informasi mengenai realisasi penanaman modal beserta dengan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada **Tabel 2.88**.

Tabel 2.88 Realisasi Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Data LKPM dan OSS		Data LKPM	
	Realisasi (dalam Rp)	Laju Pertumbuhan (dalam %)	Realisasi	Laju Pertumbuhan
			(dalam Rp)	(dalam %)
2019	23.337.742.992.779	12,69	5,259,534,592,471	67.77
2020	26.300.207.834.856	10,27	3,946,607,555,667	-24.96
2021	28.999.969.698.490	1,62	2,392,936,798,516	-39.37
2022	29.470.459.885.912	3,00	5,741,296,084,768	139.93
2023	30.354.574.210.736	12,69	8,112,485,494,165	41.30

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Adapun Proyeksi Investasi LKPM Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.89 Proyeksi Pertumbuhan LKPM (Pesimis-Optimis)

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan LKPM (Pesimis-Optimis)	Keterangan
2025	5.324.008.021.681 - 11.054.672.564.969	Laju Investasi LKPM Rata-rata Per Tahunnya dari tahun 2025-2045 sekitar 7-10%
2030	8.933.448.967.268 - 14.664.657.892.931	
2035	12.542.281.241.374 - 18.275.251.892.374	
2040	16.150.147.593.793 - 21.886.811.813.506	
2045	19.756.692.472.226 - 25.499.693.208.622	

Sumber: Tim penyusun tahun 2024 (Diolah)

Berdasarkan Tabel diatas maka proyeksi laju pertumbuhan investasi dari sumber LKPM pada tahun 2045 mencapai angka 19,7 triliun untuk asumsi pesimis dan untuk optimis mencapai 25,9 triliun. adapun baselinenya pada tahun 2025 untuk asumsi pesimis mencapai nilai 5,32 Triliun dan asumsi optimis mencapai 11,05 Triliun. Pada tahun 2023 Laju Investasi LKPM masih didominasi oleh Industri pengolahan, Transportasi dan perdagangan dan real estate adapun sektor terkecil adalah jasa pendidikan.

Empat sektor yang terdiri dari: (1) perdagangan dan reparasi; (2) industri makanan; (3) industri tekstil; serta (4) jasa lainnya konsisten menjadi juara lima besar, jika dilihat dari berbagai aspek, yaitu: realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah proyek. Adapun ketiga kecamatan yang juga konsisten juara lima besar dalam ketiga aspek tersebut adalah Bojongsoang, Cileunyi, dan Baleendah. Informasi mengenai realisasi investasi terbesar berdasarkan sektor dapat dilihat pada **Tabel 2.90** dan berdasarkan kecamatan pada **Tabel 2.91** Informasi mengenai lima sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar dapat dilihat pada **Tabel 2.92** dan berdasarkan kecamatan pada **Tabel 2.93** Informasi mengenai lima sektor dengan jumlah proyek terbesar dapat dilihat pada **Tabel 2.94** dan berdasarkan kecamatan pada **Tabel 2.95** sebagai berikut:

Tabel 2.90 Realisasi Lima Sektor dengan Investasi Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023



No	Sektor	Nilai Investasi	Rasio Terhadap Nilai Investasi Kab Bandung
1	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	8.961.206.700.852	29,52%
2	Jasa lainnya	4.519.579.264.579	14,88%
3	Industri makanan	4.512.444.410.885	14,86%
4	Industri tekstil	4.452.795.362.891	14,66%
5	Perdagangan dan reparasi	2.397.148.034.218	7,89%

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Tabel 2.91 Realisasi Lima Kecamatan dengan Investasi Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023

No	Lokasi	Nilai Investasi	Rasio Terhadap Nilai Investasi Kab Bandung
1	Bojongsoang	7.269.566.878.095	23,95%
2	Cicalengka	3.931.715.721.754	12,95%
3	Soreang	2.594.998.542.189	8,55%
4	Cileunyi	2.271.804.600.619	7,48%
5	Baleendah	2.106.169.488.650	6,94%

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Tabel 2.92 Realisasi Lima Sektor dengan Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023

No	Sektor	Penyerapan Tenaga Kerja	Rasio Terhadap Tenaga Kerja Kab Bandung
1	Perdagangan dan reparasi	40.003	26,59%
2	Industri makanan	35.263	23,44%
3	Industri tekstil	30.696	20,40%
4	Jasa lainnya	21.656	14,39%
5	Industri lainnya	2.962	1,96%

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Tabel 2.93 Realisasi Lima Kecamatan dengan Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023

No	Lokasi	Penyerapan Tenaga Kerja	Rasio Terhadap Tenaga Kerja Kab Bandung
1	Majalaya	13.675	9,09%
2	Dayeuhkolot	9.912	6,59%
3	Baleendah	9.835	6,53%
4	Cileunyi	8.955	5,95%
5	Katapang	8.664	5,76%

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Tabel 2.94 Realisasi Lima Sektor dengan Jumlah Proyek Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023

No	Sektor	Jumlah Proyek	Rasio Terhadap Jumlah Proyek Kab Bandung
1	Perdagangan dan reparasi	17.757	42,56%



No	Sektor	Jumlah Proyek	Rasio Terhadap Jumlah Proyek Kab Bandung
2	Industri makanan	14.473	34,69%
3	Jasa lainnya	4.039	9,68%
4	Industri tekstil	1.440	3,45%
5	Tanaman Pangan dan Perkebunan	744	1,78%

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Tabel 2.95 Realisasi Lima Kecamatan dengan Jumlah Proyek Terbesar Berdasarkan LKPM dan OSS Tahun 2023

No	Lokasi	Jumlah Proyek	Rasio Terhadap Jumlah Proyek Kab Bandung
1	Cileunyi	2.909	6,97%
2	Ciparay	2.841	6,81%
3	Baleendah	2.766	6,63%
4	Bojongsoang	2.043	4,89%
5	Rancaekek	1.892	4,53%

Sumber: DPMTSP Tahun 2024, (diolah)

Penanaman modal dalam negeri berdasarkan jumlah investasi didominasi oleh Kecamatan Bojongsoang dengan jumlah lebih dari seperempatnya (27,17%) atau sekitar Rp 7,24 Triliun. Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, yang paling besar penanaman modalnya jatuh pada sektor tersier, yaitu: perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan dominasi sekitar sepertiganya (33,45%) atau sebesar Rp 8,92 Triliun. Berdasarkan jumlah proyeknya, kecamatan Cileunyi menjadi juaranya dengan jumlah 2.895 proyek (6,98%). Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, yang paling besar jumlah proyeknya jatuh pada sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi dengan dominasi mendekati separuhnya (42,67%) atau sebesar 17.679 proyek.

Adapun untuk penanaman modal asing berdasarkan jumlah investasi didominasi oleh Kecamatan Cileunyi dengan jumlah mendekati setengahnya (46,07%) atau sekitar Rp 1,71 Triliun. Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, yang paling besar penanaman modalnya jatuh pada sektor tersier, yaitu: transportasi, gudang, dan komunikasi dengan dominasi mendekati setengahnya (45,40%) atau sebesar Rp 1,68 Triliun. Berdasarkan jumlah proyeknya, kecamatan Dayeuhkolot menjadi juaranya dengan jumlah 34 proyek (11,68%). Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, yang paling besar jumlah proyeknya jatuh pada sektor sekunder, yaitu: industri tekstil dengan dominasi mendekati sepertiganya (30,92%) atau sebesar 90 proyek.

2.3.4.3 Proses Perizinan

Proses perizinan merupakan salah satu indikator penentu daya saing daerah, khususnya dalam urusan investasi. Kabupaten Bandung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) telah menyediakan prosedur perizinan yang terintegrasi dalam satu pelayanan dengan tujuan untuk memudahkan calon investor dalam mengurus proses perizinan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi insentif dan stimulus bagi calon investor untuk menjalankan kegiatan di Kabupaten Bandung. Lingkup perizinan yang ditangani oleh DPMPSTP antara lain, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan izin penyelenggaraan reklame. Berikut merupakan informasi detail mengenai perkembangan perizinan di Kabupaten Bandung tahun 2018-2022.

Tabel 2.96 Data Perkembangan Jenis Izin dan Jumlah Izin Yang Terbit di Kabupaten Bandung 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Jenis Izin	89	44 Online 12 Offline	70 Online 6 Offline	394 Online 5 Offline	340



2	Jumlah izin yang terbit	7.429	3.684 Online 1.336 Offline	2.966 Online 1.243 Offline	3.708 Online 1.032 Offline	5.532
---	-------------------------	-------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2022

Kemudahan perizinan ditunjukkan dari jumlah jenis izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2022 sebanyak 340 dengan peningkatan jumlah izin yang terbit sebesar 16,70% sebanyak 5.532 izin. Dampak kemudahan perizinan terlihat juga dari peningkatan realisasi investasi. Semakin membaiknya urusan perizinan di Kabupaten Bandung juga dapat dilihat dari capaian nilai realisasi investasi yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2022. Karena investasi merupakan salah faktor penting dalam mendorong daya saing perekonomian wilayah.

2.3.4.4 Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dan retribusi

Proyeksi pendapatan pajak daerah dan retribusi merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Ini tidak hanya membantu dalam mencapai stabilitas fiskal, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Beberapa alasan pentingnya perhitungan proyeksi pajak daerah dan retribusi adalah: Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik, Pengelolaan Risiko Keuangan, Kebijakan Fiskal yang Efektif, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Ekonomi dan Pengoptimalan Sumber Daya Daerah. Adapun Proyeksi pendapatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.97 Proyeksi pendapatan berdasarkan Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

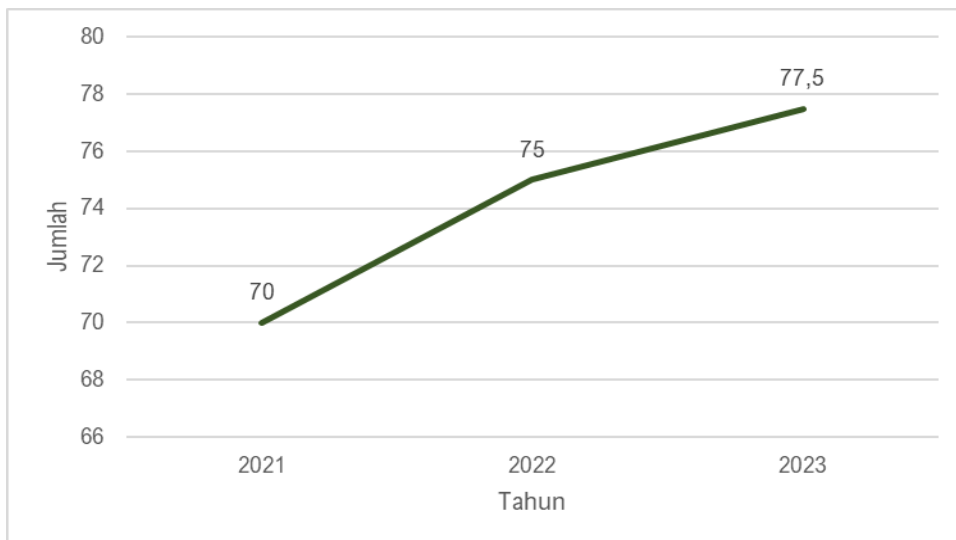
	2025 - 2029		2030 - 2034		2035 - 2039		2040-2045	
	pesimis	optimis	pesimis	optimis	pesimis	optimis	pesimis	optimis
Pendapatan Pajak Daerah	813,691,736,000	1,501,739,271,500	1,076,416,862,400	2,481,183,377,400	1,372,115,793,600	3,746,209,720,000	1,777,186,306,300	5,878,747,800,000
Retribusi	64,798,249,435	124,607,117,301	94,886,548,858	170,567,173,250	126,266,920,938	215,237,004,393	164,910,677,693	267,853,496,897
Total Pad	878,489,985,435	1,626,346,388,801	1,171,303,411,258	2,651,750,550,650	1,498,382,714,538	3,961,446,724,393	1,942,096,983,993	6,146,601,296,897

Catatan: Pendapatan Pajak daerah dihitung berdasarkan proyeksi rasio pajak dikalikan dengan proyeksi PDRB ADHB

Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan bahwa baik dalam skenario pesimis maupun optimis, terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak daerah dan retribusi dari tahun 2025 hingga 2045. Kenaikan ini mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan basis pendapatan mereka melalui pengelolaan yang efektif dan kebijakan yang mendukung. Dalam skenario optimis, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi, mencerminkan kemungkinan adanya inovasi, kebijakan pro-bisnis, dan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan layanan publik yang meningkatkan pendapatan daerah.

2.3.4.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2023 dinilai berdasarkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk menentukan indikator yang berpengaruh terhadap perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum menggunakan pendekatan Tupoksi Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan *Cascading* atau Lembar Kerja Lembaga. Dalam hal ini Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, pada tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 diantaranya, Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya, Menyelenggarakan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Meningkatkan Perlindungan Masyarakat. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun capaian indeks ketentraman dan ketertiban umum semakin meningkat, hal ini dapat terlihat pada Gambar berikut:



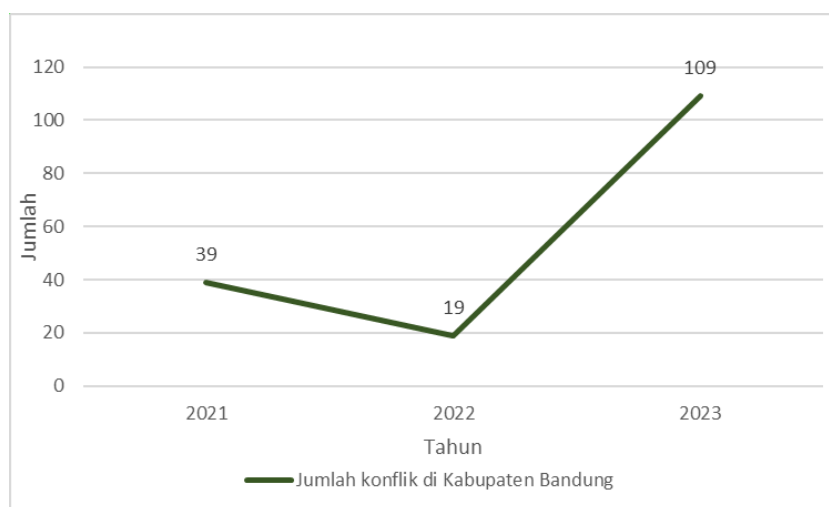
Gambar 2.64 Capaian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2024(diolah)

Berdasarkan capaian indeks ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 sebesar 70 dengan predikat nyaman, capaian ini meningkat pada tahun 2023 sebesar 77,5 predikat nyaman, dengan capaian tersebut, maka Kabupaten Bandung berhasil dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya.

2.3.4.6 Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antara umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah. Aspek kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung digambarkan dengan jumlah potensi konflik antar umat beragama dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari grafik berikut:



Gambar 2.65 Jumlah Potensi Konflik Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bandung

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, potensi konflik dari tahun 2021 yaitu 39, di tahun 2022 nilai tersebut mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 jumlah konflik antar umat beragama di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan menjadi 109, salah satu konflik yang terjadi adalah permasalahan ijin pendirian gereja/ rumah ibadah. Hal ini merupakan salah satu isu yang muncul dalam upaya implementasi budaya toleransi di Kabupaten Bandung.



2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

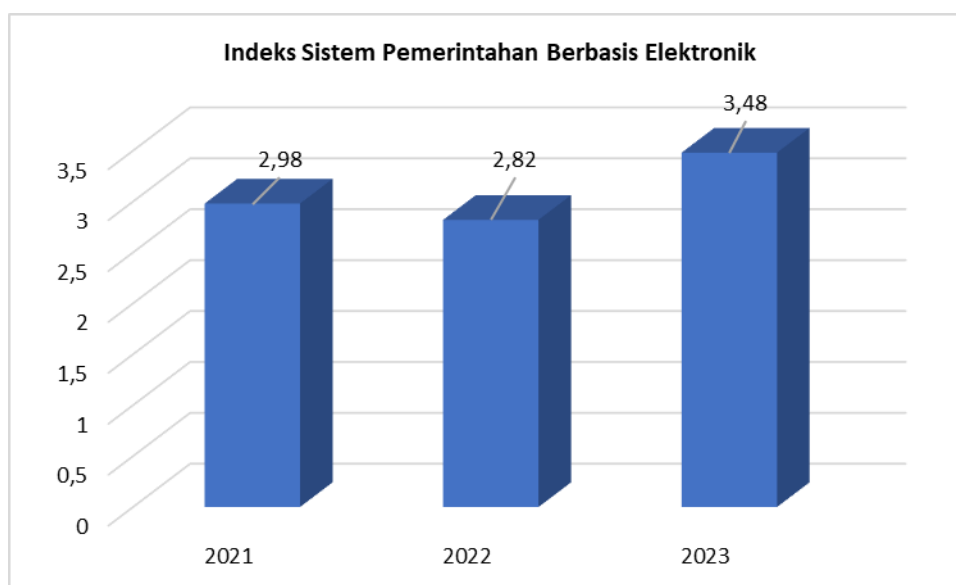
Pelayanan umum merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini mencakup berbagai bidang, dan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Beberapa contoh pelayanan umum melibatkan. Pelayanan umum memiliki peran kunci dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kualitas pelayanan umum sering diukur berdasarkan aksesibilitas, ketersediaan, dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sering diterapkan untuk memastikan pelayanan umum yang berkualitas. Pelayanan umum yang tersedia di Kabupaten Bandung tidak hanya dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial tapi juga termasuk birokrasi dan lainnya.

2.4.1 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2021-2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2021- 2023 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi daerah. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bandung dapat ditinjau pada gambar berikut:

Gambar 2.66 Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bandung tahun 2021-2023



Sumber: Hasil Olahan Bapperida, 2024

Berdasarkan gambar grafik diatas, capaian indeks SPBE Kabupaten Bandung mengalami penurunan, pada tahun 2021 realisasi Indeks SPBE yaitu 2,98 Poin dan tahun 2022 yaitu 2,83 poin. Penurunan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,16 Poin, namun pada tahun 2023 capaian tersebut meningkat menjadi 3,48 Poin.



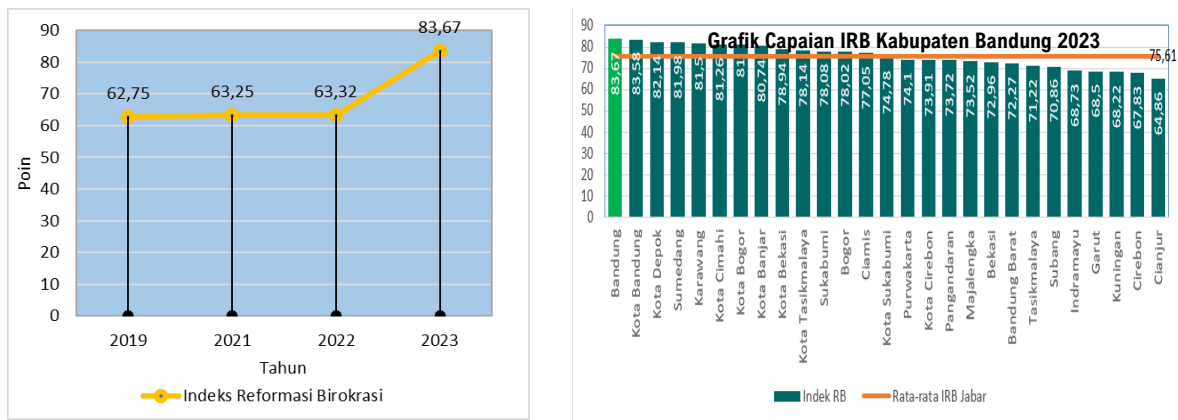
Apabila dikategorikan berdasarkan kebijakan terkait, nilai SPBE Kabupaten Bandung masuk dalam kategori baik. Namun yang perlu menjadi perhatian terdapat beberapa muatan unsur SPBE yang mengalami penurunan dan peningkatan seperti, domain kebijakan SPBE, domain tata kelola dan domain manajemen SPBE. Ketiga domain tersebut merupakan salah satu indikator komposit dalam menunjang peningkatan SPBE Kabupaten Bandung.

2.4.2 REFORMASI BIROKRASI (RB)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Sama halnya dengan Kabupaten Bandung Indeks RB merupakan salah satu kinerja yang ditempatkan pada tujuan pemerintah daerah atau sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rencana pembangunan, dalam rentang waktu 4 (empat) tahun, kecuali 2020 dikarenakan adanya wabah *COVID-19* menjadikan penilaian terhadap Indeks RB tidak maksimal. Capaian indeks birokrasi Kabupaten Bandung dapat dilihat pada berikut ini.

Gambar 2.67 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung tahun 2019-2023



Sumber: Laporan Transformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah Bapperida, 2024

Mendasar pada grafik diatas, capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bandung dari tahun 2019 relatif mengalami peningkatan. Hal ini bisa terindikasi dari capaian Indeks RB di tahun 2019 sebesar 62,75 Poin, pada tahun 2020 nilai RB Kabupaten Bandung tidak tersedia, hal ini terindikasi dari adanya wabah *Covid-19* yang terjadi pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2021 angka penilaian IRB Kabupaten Bandung tersedia kembali dengan pencapaian sebesar 63,25 poin, tahun 2022 sebesar 63,32 poin dan pada tahun pencapaian tertinggi dicapai IRB oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu 83,67 poin dengan predikat memuaskan. Dalam lingkup provinsi Jawa Barat, capaian IRB Kabupaten Bandung merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

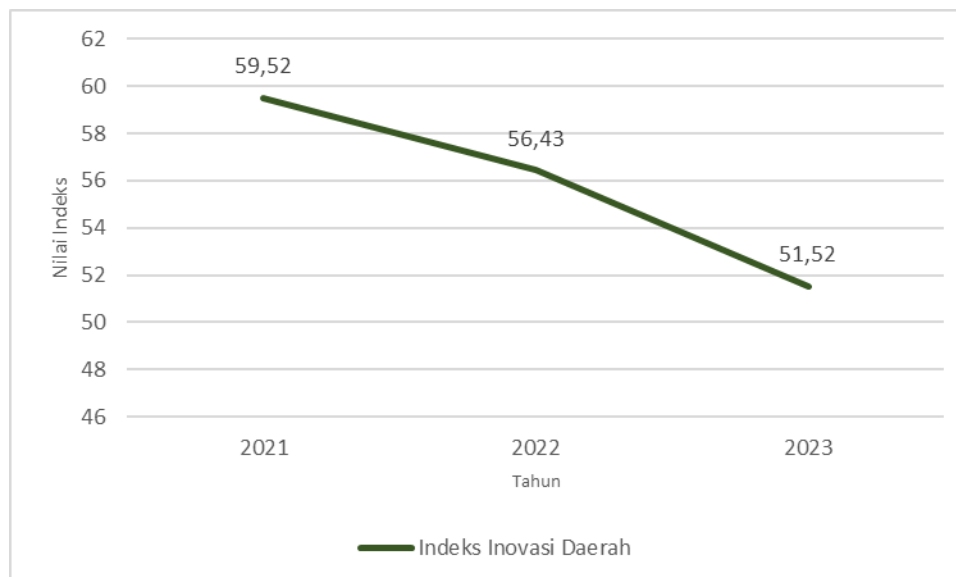
2.4.3 Inovasi Daerah

indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Inovasi daerah di Kabupaten Bandung menyelenggarakan segala bentuk inovasi daerah baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Melalui penyelenggaraan tersebut, dalam penyelenggaraan tersebut Kabupaten Bandung mempunyai predikat Inovatif. Hal ini dapat dilihat secara detail pada grafik berikut.

Gambar 2.68 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung 2023



Sumber: Kementerian dalam Negeri, 2024 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, dalam rentang waktu3 (tiga) tahun Indeks Inovasi Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada nilai indeks Inovasi di tahun 2021 dengan nilai 59,52, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 56,43 dan di tahun 2023 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 51,52. Namun untuk predikat, pada rentang waktu 3 (tiga) tahun Kabupaten Bandung mendapatkan predikat Inovatif dan hal tersebut perlu di dorong dalam upaya perkembangan inovasi daerah, sehingga Kabupaten Bandung perlu mendapatkan predikat sangat inovatif.

2.4.4 Penerapan Sistem Merit

Penerapan sistem dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung di tetapkan pada kategori III (Baik)dengan nilai 318,5 dan indeks 0,77. Hal ini berlanjut di tahun 2022, dimana hasil penilaian menunjukkan adanya peningkatan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung di tetapkan pada kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 338 dengan nilai indek 0,82. Pada tahun 2022, Pemerintahan Kabupaten Bandung perlu melakukan penyempurnaan terhadap aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, penggajian, penghargaan, disiplin dan sistem informasi.

2.5 EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2045

Selama dua dekade terakhir, pembangunan di Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh tantangan sosial dan ekonomi baik dari domestik maupun eksternal pada tingkat Provinsi Jawa Barat, tingkat nasional ataupun global. Sebagai contoh, krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021 memberikan pengaruh terjadinya kontraksi laju pertumbuhan ekonomi juga di Kabupaten Bandung pada Tahun 2020, yang diiringi oleh krisis sosial (kemiskinan, ketenagakerjaan, pembangunan sumber daya manusia). Menurut dokumen RPJPD 2005–2025 Kabupaten Bandung, Pembangunan diarahkan untuk mencapai target “repeh, rapih, dan kertaraharja” dalam arti terwujudnya modal sosial dan kohesi sosial di tengah masyarakat dalam menata pembangunan wilayah dan lingkungan yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing. Penahapan pembangunan dalam RPJPD 2005 – 2025 dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung.

Salah satu kata kunci dalam pembangunan di Kabupaten Bandung yaitu komitmen dan kolaborasi (berbagi peran dan sumber daya). Orkestrasi setiap elemen kelompok masyarakat yaitu, (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi/lembaga penelitian, institusi pembiayaan, media massa, lembaga swadaya



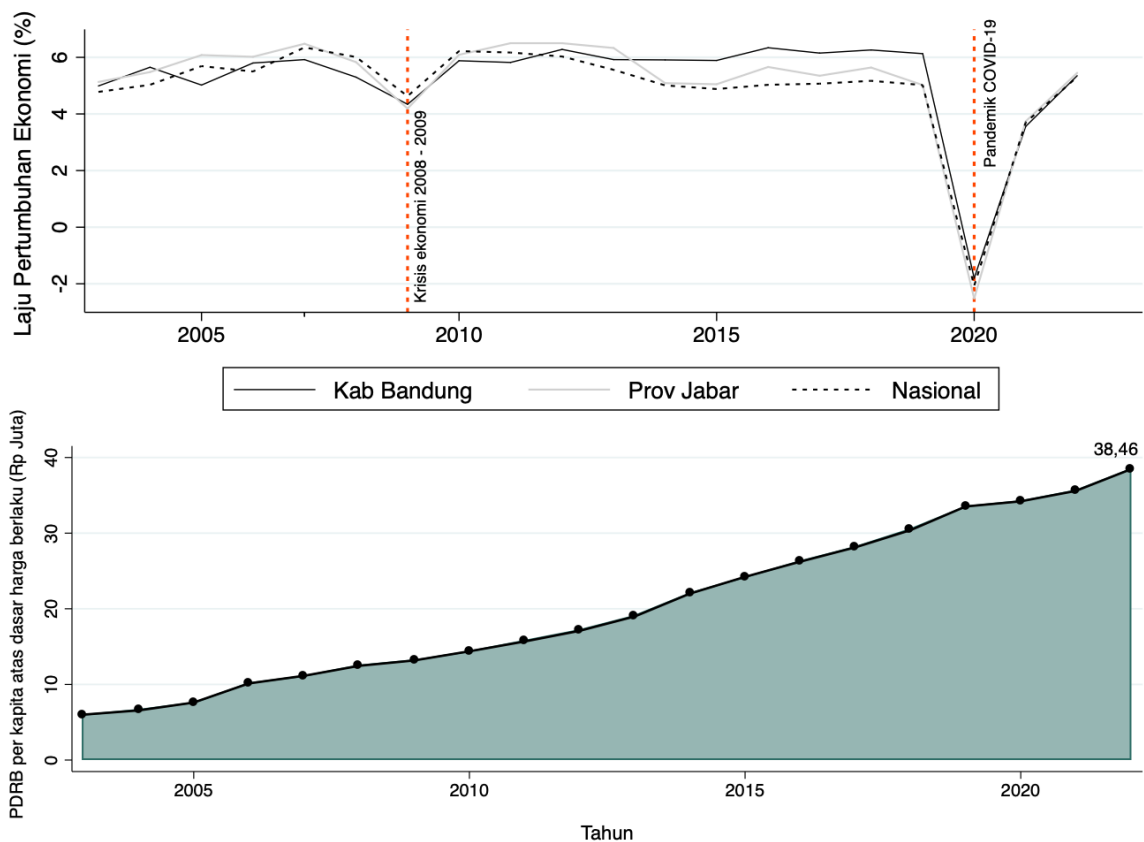
masyarakat, filantropi) dalam perwujudan hubungan timbal balik untuk mendorong terbentuknya partisipasi aktif dari mereka terhadap pembangunan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang meliputi berbagai aspek sosial, ekologi, ekonomi, pangan, infrastruktur wilayah, tata kelola, pembiayaan pembangunan, ketahanan ketentraman dan keamanan. Berikut dapat disampaikan refleksi pembangunan Kabupaten Bandung selama 20 tahun terakhir.

2.5.1 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Bandung Relatif Stabil

Gambar 2.59 menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Bandung selama dua dekade terakhir relatif stabil berkisar antara 5% dan 6%. Namun, gejala krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 2008 dan 2009 memberikan juga imbas negatif bagi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung turun menjadi 4,34% pada tahun 2009. Penurunan LPE ini seiring dengan perkembangan perekonomian tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, yakni masing-masing 4,63% dan 4,19%. Selain itu, krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 di dunia pada Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Bandung berkontraksi menjadi 1,80% di Tahun 2020; sama halnya dengan perekonomian di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung sangat sensitif terhadap guncangan baik dari tingkat nasional dan provinsi, maupun krisis global. Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, Kabupaten Bandung juga mengalami *rebound in economic growth* dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,35% (y-on-y) pada tahun 2022, setelah tahun sebelumnya mencapai 3,56%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan dampak positif dari implementasi kebijakan *pro-growth* dan *pro-poor* di Kabupaten Bandung dan dari sinergi kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan dokumen BPS (2003 - 2022), rata-rata elastisitas ekonomi Kabupaten Bandung setelah pandemi COVID-19 (tahun 2021 dan 2022) sebesar 0,985 terhadap ekonomi nasional dan 0,967 terhadap Provinsi Jawa Barat. Nilai elastisitas satu berarti ekonomi satu wilayah relatif sama dengan ekonomi wilayah referensinya. Jika dilihat pada grafik Gambar 2.1 pada periode setelah krisis ekonomi Asia dan pandemi COVID-19, LPE Kabupaten Bandung di atas LPE nasional dan Provinsi Jawa Barat masing-masing dengan elastisitas 1,129 and 1,069.

Gambar 2.69 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2003 – 2022



Sumber: BPS (2003 – 2022, diolah)



PDRB per kapita per tahun menunjukkan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari aktivitas seluruh sektor perekonomian per satu orang penduduk. Dalam hal ini, dalam dua dekade terakhir PDRB per kapita Kabupaten Bandung mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata sekitar 10,494% per tahun, walaupun pada tahun 2009 dan 2020 mengalami perlambatan karena guncangan dunia (lihat Gambar 2.69). BPS (2023) juga melaporkan pada tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Bandung mencapai 38,46 juta rupiah.

Data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung berasal dari industri pengolahan (52,53%), diikuti oleh sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan motor (12,94%), dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (7,04%). Bila dibandingkan dengan tahun 2005, terdapat pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dan sektor konstruksi mengalami kenaikan hingga menjadi lebih dari tiga kali lipatnya. Meskipun demikian, tidak terjadi perubahan pada kontributor tiga terbesar perekonomian Kabupaten Bandung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 2.70 Perbandingan Kontribusi 4 Sektor Perekonomian Utama Kabupaten Bandung

Kontribusi Sektor Utama terhadap Perekonomian Kabupaten Bandung tahun 2005-2023			
Sektor Ekonomi Tahun 2005		Sektor Ekonomi Tahun 2023	
● Industri pengolahan	53,15	Industri pengolahan	52,53
● Perdagangan besar dan eceran	14,11	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	12,94
● Pertanian	9,41	Pertanian, kehutanan dan perikanan	7,04
● Bangunan	2,05	Konstruksi	6,26

Sumber: BPS Kabupaten Bandung (2005, 2024)

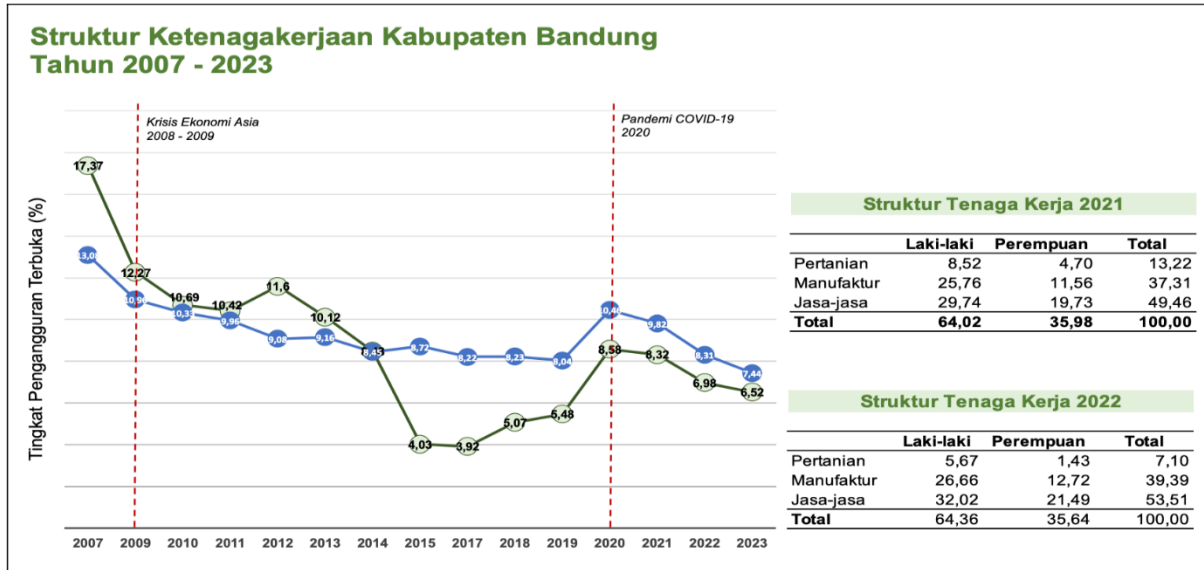
2.5.2 Struktur Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung semakin menurun. 17,37% pada tahun 2007 menjadi 6,52% pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya peningkatan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Kabupaten Bandung. Walaupun demikian, Gambar 2.61 menerangkan bahwa guncangan global, seperti pandemi COVID-19, memberikan dampak negatif pada perekonomian di Kabupaten Bandung yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan TPT di tahun 2020 (8,58%). Sensitivitas ekonomi Kabupaten Bandung sangat tinggi, sehingga perlu diwaspadai untuk kesiapan Kabupaten Bandung dalam mengantisipasi ketidakpastian kondisi sosial dan ekonomi di masa depan. Sejak tahun 2014, TPT Kabupaten Bandung lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2022, 61,04% dari jumlah penduduk pengangguran terbuka memiliki pendidikan SMA sederajat.

Pada tahun 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 1.808.799 orang (63,64% dari total penduduk kelompok usia tersebut) atau naik dibandingkan angkatan kerja tahun 2020 sebanyak 1.717.376 orang (62,20%). Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia dalam menjalankan aktivitas ekonomi, mengalami peningkatan dari 62,20% (tahun 2020) menjadi 63,64% (tahun 2022).



Gambar 2.71 Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung



Sumber: BPS (2023).

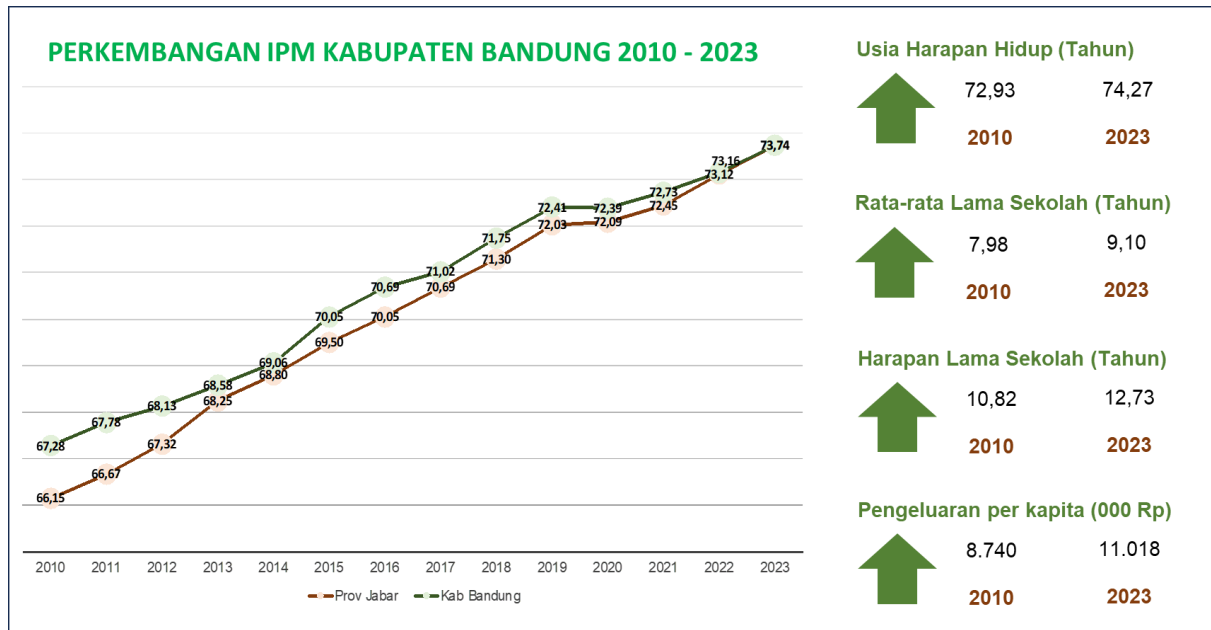
Gambar 2.71 juga memperlihatkan adanya perubahan struktur tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Pada Tahun 2022, 53,51% angkatan kerja bekerja di sektor jasa, diikuti oleh 39,39% bekerja di sektor manufaktur. Sektor pertanian mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dari 13,22% di tahun 2021 menjadi 7,10% di tahun 2022. Penurunan tersebut beralih ke sektor manufaktur dan jasa. Lebih lanjut, 64,36% dari jumlah penduduk yang bekerja berjenis kelamin laki-laki.

2.5.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Membaik

Sumber daya manusia yang unggul merupakan target yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 tercantum visi pembangunan dalam arti “Repeh” dan “Kertaraharja”. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang direfleksikan oleh Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung memiliki tren positif satu dekade terakhir. Artinya, pembangunan SDM membaik. Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa IPM Kabupaten Bandung tahun 2022 naik 5,88 poin bila dibandingkan dengan IPM tahun 2010, dari 67,28 menjadi 73,16. Tren positif ini juga dialami oleh perkembangan IPM Provinsi Jawa Barat. Dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, IPM Kabupaten Bandung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat (lihat Gambar 2.72). Perbaikan kualitas sumber daya manusia ini tak luput dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada periode yang lalu, melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat dari berbagai sektor ekonomi.



Gambar 2.72 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung, 2010 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Bandung (2024).

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dilihat dari beberapa indikator utama pembentuk IPM di Kabupaten Bandung (lihat Gambar 2.72), yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. **Status kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung terus membaik.** Indikator kesehatan dapat menunjukkan sejauh mana upaya-upaya kesehatan yang telah dilakukan membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 72,93 tahun (2010) menjadi 74,01 tahun (2022). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kabupaten Bandung mengalami penurunan cukup signifikan dari 31,1% pada tahun 2021 menjadi 25% pada tahun 2022.

Pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Bandung terus mengalami kemajuan. Indeks pendidikan, yang dibentuk oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), mengalami peningkatan. RLS naik 1,1 tahun, dari 7,98 tahun menjadi 9,08 tahun dalam satu dekade terakhir. Peningkatan juga terjadi pada indikator HLS menjadi 12,70 tahun (2022) dari 10,82 tahun (2010). BPS (2023) melaporkan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kemampuan membaca dan menulis sebesar 99,39%.

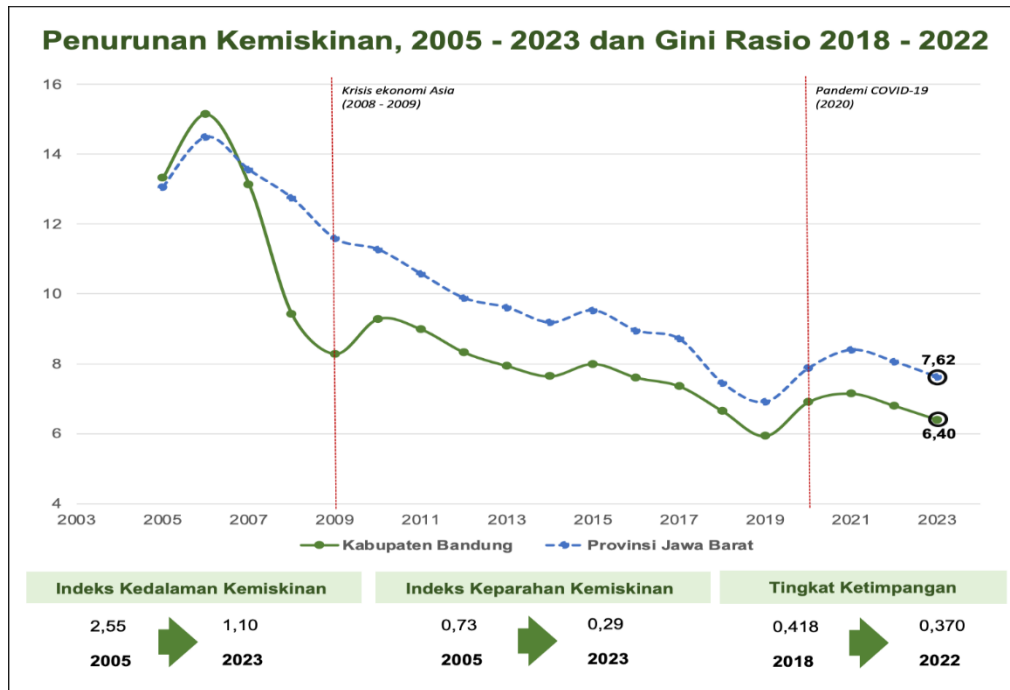
Standar layak hidup masyarakat Kabupaten Bandung juga mengalami perbaikan. Hal ini dapat diukur melalui indikator pengeluaran per kapita, telah mengalami peningkatan dari Rp8,74 juta (2010) menjadi Rp11,02 juta (2022). Nilai tersebut menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh semua anggota rumah tangga selama sebulan.

2.5.4 Kemiskinan Dan Ketimpangan Menurun

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Bandung membaik. Tiga indikator yang mengindikasikan adanya progres positif tersebut, adalah angka kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Tren angka kemiskinan Kabupaten Bandung menurun dari tahun 2005–2023 dan lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023) menurun dari 13,33 persen di tahun 2005 menjadi 6,40 persen di tahun 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bandung juga mengalami penurunan dari 2,55 di tahun 2005 menjadi 1,10 di tahun 2023. Tren menurun juga terjadi pada indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode dua dekade terakhir (lihat Gambar 2.73).



Gambar 2.73 Kemiskinan dan Gini Rasio Kabupaten Bandung



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2023).

Lebih lanjut, **rasio ketimpangan (Gini Ratio)** menurun lima tahun terakhir di tengah pandemi COVID-19. Rasio ini menggambarkan tingkat pengeluaran penduduk Kabupaten Bandung. Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan Kabupaten Bandung mencapai 0,370 atau menurun 0,048 poin bila dibandingkan dengan Gini Rasio pada tahun 2018 yang sebesar 0,418.

2.5.5 Ketahanan Pangan Semakin Menguat

Kebutuhan Pangan Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk Ketahanan pangan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah tersebut memproduksi pangan untuk memenuhi konsumsi penduduknya. Dengan asumsi kebutuhan per kapita per tahun penduduk thn 2025 sebesar 94,47 kg/ kapita / tahun yang diprediksi menurun secara gradual menjadi 84 kg/kapita/ tahun, maka diproyeksikan kebutuhan pangan untuk penduduk Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.98 Proyeksi Kebutuhan Pangan (Beras) Per Kapita Per Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pangan
2023	3.718.660	346.341,76
2024		351.301,81
2025	3.783.213	357.400,13
2030	3.920.452	360.103,32
2035	4.034.604	360.027,89
2040	4.117.096	356.612,56
2045	4.164.490	349.817,16

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Kebutuhan pangan ini terancam dengan adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan produksi pangan semakin menurun. Berdasarkan proyeksi luasan LSD lahan pertanian, pada Tahun 2045 mencapai luasan yang telah ditetapkan yakni sebesar 16.915,90 Ha (Tabel 2.98 Proyeksi Kebutuhan Pangan (Beras) Per Kapita Per Tahun, dengan asumsi peningkatan produktivitas secara bertahap, maka diperoleh proyeksi produksi pangan (beras) sebagai berikut :



Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Produksi Pangan (Beras)

RINCIAN	TAHUN			
	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Padi Sawah				
Luas Baku Sawah	24.291,69	20.732,25	17.172,82	16.915,90
IP	2,57	2,65	2,78	2,80
Provititas	63,95	63,96	65,90	67,25
Produksi (GKP)	399.238	351.399	314.609	318.526
Padi Ladang				
Luas Lahan	1.151,00	1.093,45	1.038,78	986,84
IP	1,00	1,00	1,00	1,00
Provititas	39,18	39,40	39,60	39,80
Produksi (GKP)	4.510	4.308	4.114	3.928
JUMLAH GKP	403.747,19	355.707,45	318.722,99	322.454,01
JUMLAH BERAS	250.235,81	220.461,58	197.539,23	199.851,65

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Jika disandingkan antara produksi dan kebutuhan pangan, maka dapat terlihat bahwa dimasa mendatang akan terjadi kekurangan produksi pangan sebagai berikut :

Tabel 2.100 GAP Antara Proyeksi Beras dan Kebutuhan Pangan (Beras)

Rincian	Produksi	Kebutuhan	Gap
2021	412.711,88	346.341,76	66.370,12
2023	395.709,34	351.301,81	44.407,53
2025	349.671,35	357.400,13	-7.728,78
2030	250.235,81	360.103,32	-109.867,50
2035	220.461,58	360.027,89	-139.566,31
2040	197.539,23	356.612,56	-159.073,33
2045	199.851,65	349.817,16	-149.965,51

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Namun, ketahanan pangan tidak hanya diukur berdasarkan ketersediaan pangan saja karena ada aspek yang lain yakni aspek keterjangkauan (distriusi dan akses), serta aspek kemanfaatan (konsumsi). Untuk itu, indikator ketahanan pangan yang mengakomodir ketiga aspek tersebut adalah Indeks Ketahanan Pangan.

Selain itu, **Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bandung selalu meningkat dari tahun ke tahun**. Data menunjukkan tren kenaikan untuk indeks ini dari 77,05 (2019) menjadi 82,48 (2023). Terjadi peningkatan sebesar 5,43 poin selama 5 tahun terakhir. Adapun indeks ketahanan pangan ini terdiri dari 3 indeks penyusun yaitu indeks ketersediaan pangan, indeks keterjangkauan pangan dan indeks pemanfaatan pangan dimana selama 5 tahun secara umum 3 indeks ini menunjukkan peningkatan. Adapun secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:



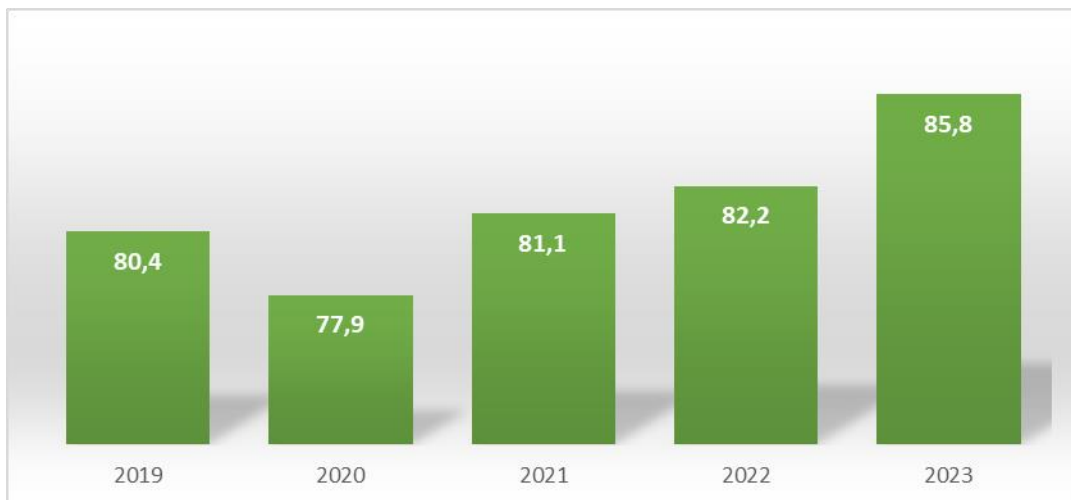
Gambar 2.74 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bandung 2019-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2024 (diolah)

Selain mengukur ketahanan pangan perlu diperhatikan juga mengenai kenakeragaman dan keseimbangan konsumsi pangan sehingga dipergunakan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengukurnya. Selama 5 Tahun terakhir skor PPH di Kabupaten Bandung cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 skor PPH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan yang cukup positif. Adapun secara detail digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.75 Skor PPH di Kabupaten Bandung 2019-2023



Sumber: Dinas Kehanan Pangan dan Perikanan. 2024 (diolah)

Kabupaten Bandung pada tahun 2023 pola konsumsinya didominasi oleh beberapa komoditas terutama oleh padi-padian (25,80 gram/kapita dan 1.140,7 Kkal/kapita), pangan hewani (19,30 gram/kapita dan 224,3 Kkal/kapita), dan kacang-kacangan (6,20 gram/kapita dan 72,9 Kkal/kapita). Berbagai komoditas lainnya meliputi sayur dan buah (3,4 gram/kapita dan 104,2 Kkal/kapita), minyak dan lemak (0,10 gram/kapita dan 287,5 Kkal/kapita), umbi-umbian (0,80 gram/kapita dan 57,7 Kkal/kapita), buah/biji berminyak (0,20 gram/kapita dan 5,8 Kkal/kapita), gula (0,10 gram/kapita dan 49,8 Kkal/kapita), lain-lain (1,20 gram/kapita dan 58,7 Kkal/kapita). Harapan untuk mencapai skor PPH 100 pada Tahun 2045, berikut target skor pph konsumsi sd tahun 2045.



Tabel 2.101 Proyeksi Skor PPH Konsumsi Kabupaten Bandung sampai tahun 2045

No	Tahun	Skor
1	2023	85,6
2	2024	86,4
3	2025	87,3
4	2026	88,1
5	2027	89
6	2028	89,8
7	2029	90,7
8	2030	91,5
9	2031	92,4
10	2032	93,2
11	2033	94,1
12	2034	94,9
13	2035	95,8
14	2036	96,6
15	2037	97,5
16	2038	98,3
17	2039	99,2
18	2040	100

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 PROYEKSI DEMOGRAFI (PENDUDUK)

Analisis proyeksi penduduk adalah proses untuk memprediksi perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu berdasarkan tren demografis masa lalu. Proyeksi penduduk umumnya dilakukan untuk memberikan perkiraan tentang jumlah penduduk di masa mendatang, membantu perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, dan alokasi sumber daya. Pada analisis proyeksi jumlah penduduk, akan meninjau jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

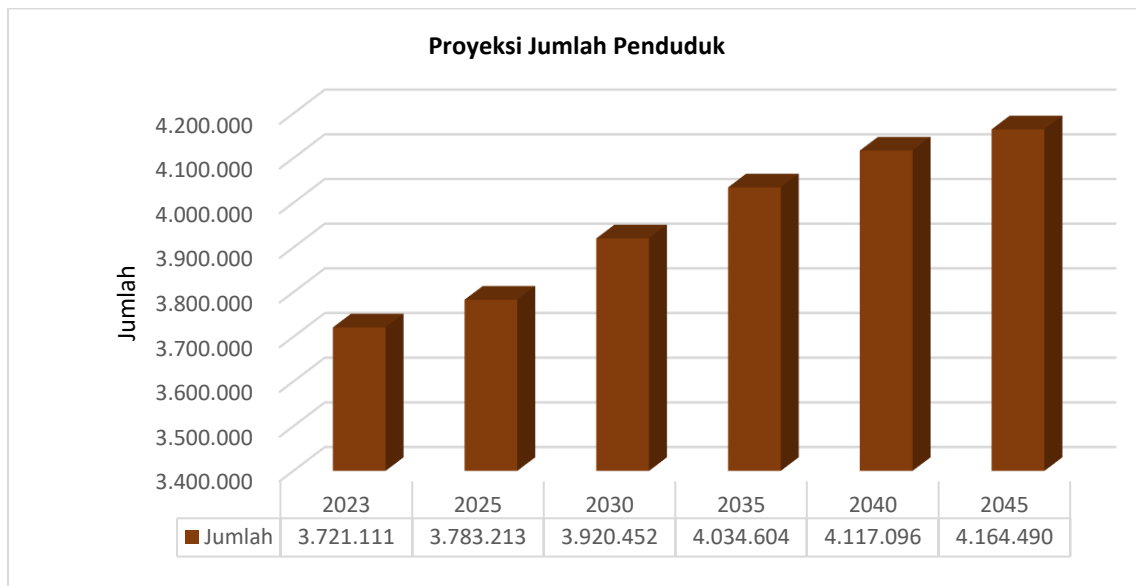
2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk merupakan estimasi atau perhitungan yang dilakukan untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu di masa depan. Proyeksi ini didasarkan pada data demografis historis, tren pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk. Proyeksi jumlah penduduk biasanya mencakup beberapa parameter, termasuk: Kelahiran, Kematian, Migrasi dan Struktur Usia. Proyeksi jumlah penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan memahami perkiraan jumlah penduduk di masa depan, dalam hal ini Kabupaten Bandung dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.721.111 jiwa. Hasil proyeksi penduduk yang akan meningkat dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. Pada tahun 2030 jumlah penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan akan mencapai 3.920.452 jiwa dan di tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan akan mencapai 4.164.490 jiwa. Selain mencerminkan gambaran penduduk di masa mendatang proyeksi penduduk akan berperan penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.



Gambar 2.76 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Jawa Barat, tahun 2023

2.6.1.2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka tersebut dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Informasi terkait laju pertumbuhan penduduk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana populasi suatu daerah berkembang seiring waktu. Terdapat tiga jenis LPP yang dapat diidentifikasi berdasarkan kecepatan perubahan populasi yaitu:

1. LPP Positif ($LPP > 0$), terjadi ketika jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian, sehingga populasi bertambah dari waktu ke waktu;
2. LPP Nol ($LPP = 0$), terjadi ketika jumlah kelahiran dan kematian seimbang, sehingga populasi tetap stabil tanpa pertumbuhan;
3. LPP Negatif ($LPP < 0$), terjadi ketika jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran, sehingga populasi mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Dalam penyusunan proyeksi penduduk Kabupaten Bandung, untuk periode proyeksi yang semakin panjang akan menurunkan akurasi hasil proyeksi. Maka dari itu, perhitungan proyeksi laju pertumbuhan penduduk hingga tahun 2035 berupa data tahunan, sedangkan untuk tahun 2040 dan 2045 berupa data lima tahunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung untuk tahun 2022 adalah 1,49 persen per tahun. Pada tabel dibawah terdapat hasil proyeksi laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data BPS. Pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan akan mencapai 0,8 persen per tahun dan di tahun 2045 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan akan mencapai 0,23 persen per tahun. Berdasarkan hasil proyeksi, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung hingga tahun 2045 merupakan LPP Positif karena masih di atas nol sehingga diperkirakan populasi masih akan terus bertambah dari waktu ke waktu walaupun dengan laju yang menurun dari tahun ke tahun.



Gambar 2.77 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2025-2045



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tahun 2023

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk analisis berdasarkan sudut pandang gender. Informasi ini perlu disampaikan mengingat pembangunan seringkali memberikan manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki (AIPD,2014)

Ditinjau berdasarkan hasil proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung di tahun 2045 akan semakin berimbang. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya penurunan gap yang terjadi antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bandung. Proyeksi penurunan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat ditinjau pada tabel berikut:



Tabel 2.102 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung (Jiwa)														
	2025			2030			2035			2040			2045		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
0-4	148.564	142.667	291.231	144.672	138.884	283.556	140.936	135.221	276.157	136.365	130.769	267.134	131.420	125.972	257.392
5-9	158.537	150.596	309.133	146.585	141.037	287.622	142.938	137.433	280.371	139.221	133.794	273.015	134.698	129.378	264.076
10-14	156.327	150.142	306.469	157.274	149.468	306.742	145.641	140.140	285.781	142.046	136.596	278.642	138.304	132.951	271.255
15-19	171.558	161.598	333.156	154.988	148.955	303.943	156.130	148.430	304.560	144.594	139.184	283.778	141.002	135.652	276.654
20-24	163.427	153.631	317.058	168.187	157.887	326.074	152.200	145.766	297.966	153.430	145.373	298.803	142.079	136.306	278.385
25-29	153.152	146.826	299.978	158.586	148.093	306.679	163.588	152.707	316.295	148.132	141.066	289.198	149.351	140.701	290.052
30-34	148.977	143.251	292.228	148.919	142.725	291.644	154.623	144.400	299.023	159.580	149.038	308.618	144.468	137.633	282.101
35-39	140.524	133.642	274.166	145.817	140.497	286.314	146.144	140.311	286.455	151.813	142.012	293.825	156.644	146.555	303.199
40-44	140.719	135.462	276.181	137.213	131.125	268.338	142.647	138.107	280.754	143.010	137.964	280.974	148.544	139.621	288.165
45-49	135.315	133.388	268.703	136.884	132.926	269.810	133.708	128.875	262.583	139.039	135.795	274.834	139.390	135.656	275.046
50-54	117.128	116.115	233.243	131.175	130.913	262.088	132.924	130.681	263.605	129.926	126.782	256.708	135.139	133.620	268.759
55-59	95.681	93.904	189.585	111.725	113.006	224.731	125.385	127.639	253.024	127.197	127.543	254.740	124.427	123.813	248.240
60-64	75.699	75.831	151.530	88.921	90.151	179.072	104.157	108.798	212.955	117.106	123.082	240.188	118.941	123.115	242.056
65-69	53.984	53.747	107.731	67.676	71.089	138.765	79.864	84.909	164.773	93.863	102.791	196.654	105.750	116.478	222.228
70-74	36.225	37.755	73.980	45.058	47.795	92.853	56.902	63.762	120.664	67.520	76.595	144.115	79.671	93.077	172.748
75 +	27.293	31.548	58.841	41.683	50.538	92.221	57.025	72.613	129.638	74.765	101.105	175.870	92.969	131.165	224.134
Jumlah	1.923.110	1.860.103	3.783.213	1.985.363	1.935.089	3.920.452	2.034.812	1.999.792	4.034.604	2.067.607	2.049.489	4.117.096	2.082.797	2.081.693	4.164.490

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024, (diolah)



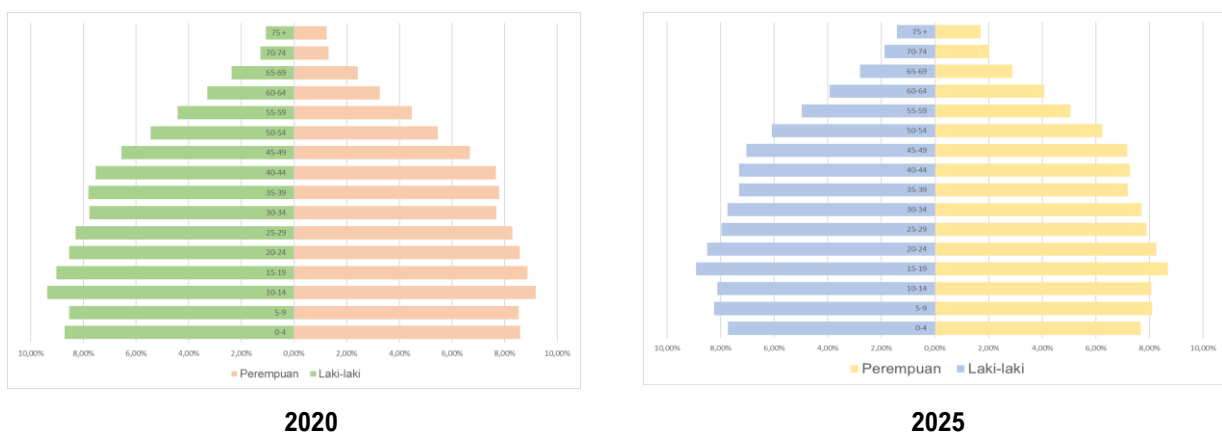
Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jika mengacu pada tabel diatas nantinya akan semakin berimbang. Diperkirakan di tahun 2045 jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.110.595 Jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan diperkirakan berjumlah 2.162.174 Jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari sisi gender dan ini akan berimplikasi terhadap penyediaan layanan dengan bertemakan kesetaraan gender, serta untuk menunjang pelayanan terhadap disabilitas di Kabupaten Bandung.

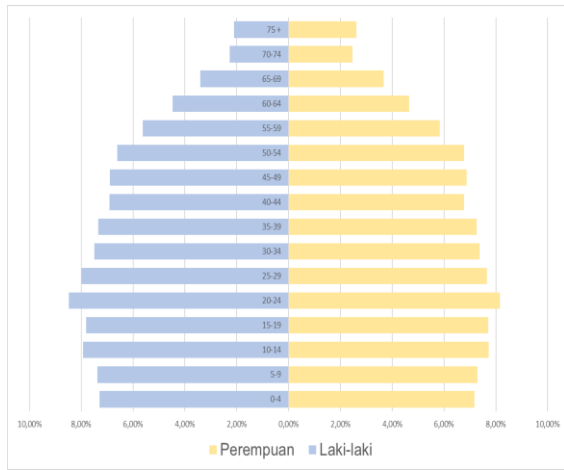
Selain dari jenis kelamin, rasio jenis kelamin juga memberikan gambaran terhadap perkembangan penduduk di Kabupaten Bandung. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Pada dasarnya, data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Pada prinsipnya, menelaah pada proyeksi Rasio kependudukan Kabupaten Bandung dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berdasarkan gambar di bawah ini diketahui bahwa proyeksi rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bandung setiap tahunnya akan mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari proyeksi per 5 (lima) tahun. Pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diproyeksikan sebesar 103,39% dan menurun di tahun 2030 menjadi 102,60%, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya nilai dari rasio antara Laki-laki dan perempuan akan semakin berimbang dan baik. Pada 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu 2045 diproyeksikan rasio jenis kelamin akan menurun yaitu 97,61%.

2.6.1.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

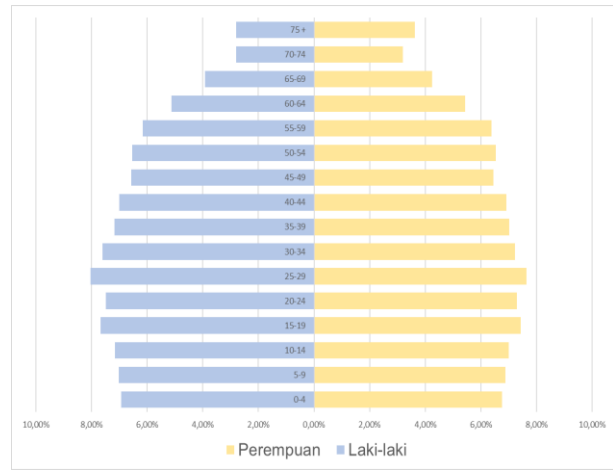
Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi komposisi penduduk di masa mendatang dengan memperhitungkan perubahan dalam distribusi usia penduduk. Proyeksi ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang bagaimana struktur usia penduduk akan berubah seiring waktu. Proyeksi penduduk menurut kelompok umur juga dapat memberikan gambaran bahwa perubahan pada perkembangan penduduk berdasarkan kelompok umur. Jika mengacu pada tahun proyeksi penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Bandung, pada tahun 2045 akan mengalami pergeseran kelompok umur yang akan mendominasi persebaran penduduk yaitu usia lanjut. Hal ini dapat ditinjau dari Gambar 2.78 berikut.

Gambar 2.78 Struktur Penduduk Kabupaten Bandung

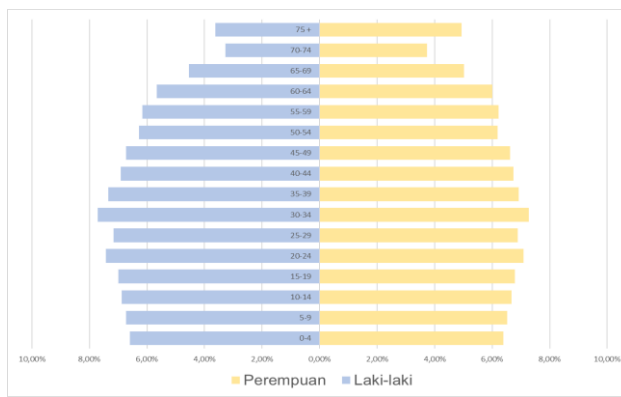




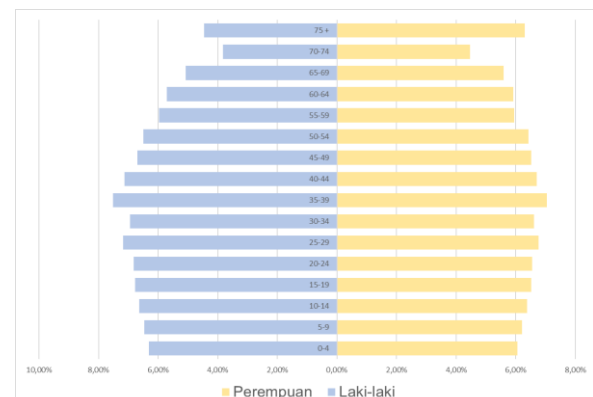
2030



2035



2040



2045

Sumber : Hasil olahan data BPS dan Analisis Bapperida, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2045, diperkirakan akan adanya pergeseran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Hal ini terlihat dari grafik gambar tahun 2045, dimana konsentrasi utama penduduk kelompok umur lebih didominasi oleh usia lanjut, dan akan memberikan dampak terhadap bonus demografi.

2.6.2 PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tersedianya sarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan tertata dengan baik, merupakan syarat untuk dapat terwujudnya kualitas penduduk dan kualitas lingkungan yang baik. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok keluarga di antara kebutuhan pakaian, makanan, dan kesehatan. Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Aspek kependudukan merupakan dasar bagi penyusunan rencana dan pengembangan perumahan. Selain itu juga aspek perekonomian suatu wilayah pun berpengaruh pada permintaan akan perumahan (*housing demand*). Semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu wilayah maka permintaan akan perumahan akan cepat meningkat.

Untuk analisis kebutuhan perumahan ini akan dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga, dan karena data yang tersedia adalah jumlah penduduk, maka diasumsikan 1 kepala keluarga terdiri dari 4 orang. Luas aktual perumahan di Kabupaten Bandung sampai data terbaru tahun 2019 sebesar 24.204.863 m². Sehingga berikut merupakan hasil perhitungan *supply-demand* kebutuhan perumahan. Selain itu mengacu pada hasil proyeksi



jumlah penduduk sampai dengan tahun 2045, kebutuhan perumahan di Kabupaten Bandung pada tahun 2045 berjumlah 1.041.123 unit. Lebih rincinya dapat ditinjau pada Tabel 2.103 berikut:

Tabel 2.103 Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Kabupaten Bandung)

Uraian	Kondisi tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	3.718.660	3.783.213	3.920.452	4.034.604	4.117.456	4.164.490
Proyeksi Kebutuhan Rumah	929.665	945.803	980.113	1.008.651	1.029.364	1.041.123

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan ideal perumahan Kabupaten Bandung di tahun 2023 sebanyak 743.732 Unit, seiring dengan penambahan penduduk yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten bahwa, dengan jumlah penduduk tahun 2045 sebesar 4.164.490 jiwa, diperlukan setidaknya 832.898 unit rumah.

Tabel 2.104 Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Kabupaten Bandung)

No	Kecamatan	Luas aktual permukiman sampai 2019 (m ²)	Penduduk 2045	Jumlah KK	Kebutuhan Luas Permukiman ideal 2045	Selisih luas hunian aktual-ideal tahun 2045 (m ²)
1	Arjasari	836.121	121.939	30.485	1.097.448	-261.327
2	Baleendah	1.480.651	305.722	76.431	2.751.499	-1.270.848
3	Banjaran	552.921	152.538	38.135	1.372.846	-819.925
4	Bojongsoang	3.090.057	128.739	32.185	1.158.655	1.931.402
5	Cangkuang	559.943	93.160	23.290	838.443	-278.500
6	Cicalengka	900.489	140.115	35.029	1.261.037	-360.548
7	Cikancung	518.053	112.056	28.014	1.008.505	-490.452
8	Cilengkrang	208.254	65.223	16.306	587.010	-378.756
9	Cileunyi	2.461.312	215.287	53.822	1.937.585	523.727
10	Cimaung	244.076	99.714	24.928	897.423	-653.347
11	Cimendan	4.034.491	131.059	32.765	1.179.535	2.854.956
12	Ciparay	374.943	198.735	49.684	1.788.614	-1.413.671
13	Ciwidey	69.288	98.982	24.746	890.839	-821.551
14	Dayeuhkolot	121.708	120.412	30.103	1.083.706	-961.998
15	Ibun	121.213	100.297	25.074	902.675	-781.462
16	Katapang	1.061.424	151.588	37.897	1.364.296	-302.872
17	Kertasari	0	81.173	20.293	730.557	-730.557
18	Kutawaringin	171.528	118.087	29.522	1.062.786	-891.258
19	Majalaya	34.480	182.212	45.553	1.639.906	-1.605.426
20	Margaasih	977.631	170.149	42.537	1.531.344	-553.713
21	Margahayu	1.453.385	136.612	34.153	1.229.511	223.874
22	Nagreg	348.938	67.760	16.940	609.836	-260.898
23	Pacet	131.995	132.362	33.091	1.191.260	-1.059.265
24	Pameungpeuk	97.416	98.339	24.585	885.052	-787.636
25	Pangalengan	20.502	176.510	44.127	1.588.589	-1.568.087
26	Paseh	755.497	156.762	39.190	1.410.855	-655.358
27	Pasirjambu	120.466	104.927	26.232	944.344	-823.878
28	Rancabali	0	58.079	14.520	522.708	-522.708
29	Rancaekek	1.441.728	212.618	53.154	1.913.560	-471.832
30	Solokan Jeruk	176.490	99.507	24.877	895.567	-719.077
31	Soreang	1.839.864	133.824	33.456	1.204.417	635.447
	Jumlah	24.204.864	4.164.490	1.041.123	37.480.410	-13.275.546



Untuk analisis kebutuhan perumahan dan permukiman dihitung berdasarkan proyeksi penduduk sampai tahun 2045 dengan kebutuhan tambahan luas permukiman 6.838.588 m² atau 189.961 unit hunian. Berikut merupakan ringkasan hasil perhitungan kebutuhan permukiman.

Tabel 2.105 Ringkasan Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Permukiman Kabupaten Bandung

Asumsi luas kebutuhan ruang per KK (m ²) berdasarkan SNI 03-1733-2004, minimal luas lantai hunian	36 m ²
Jumlah penduduk tahun 2023	3.718.660 jiwa
Jumlah penduduk tahun 2045	4.164.490 jiwa
Luas aktual permukiman sampai tahun data terbaru 2019	24.204.864 m ²
Kebutuhan ideal luas permukiman tahun 2045	37.480.410 m ²
Proyeksi kebutuhan tambahan luas permukiman sampai tahun 2045	13.275.546 m²

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum adalah sebuah perkiraan atau prediksi tentang jumlah air minum yang dibutuhkan oleh suatu populasi atau wilayah pada masa mendatang. Proyeksi ini sangat penting dalam perencanaan infrastruktur air minum, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen air.

Proyeksi kebutuhan air minum melibatkan beberapa faktor, termasuk pertumbuhan penduduk, perkiraan konsumsi air per kapita, tren demografis, perubahan iklim, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi permintaan akan air minum. Metode yang digunakan dalam membuat proyeksi ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitasnya, tetapi umumnya melibatkan analisis data historis, tren konsumsi air, dan asumsi-asumsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air minum di masa mendatang. Dari hasil proyeksi jumlah penduduk yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dalam rentang waktu 2023-2045, untuk kebutuhan air minum dengan 100% pelayanan di tahun 2045 dihadapkan pada beberapa skenario. Terdapat 2 (dua) tipe pelayanan kebutuhan air yaitu Sambungan Rumah (SR) dan Keran Umum (KU). Lebih rincinya dapat ditinjau pada **Tabel 2.106** Berikut

Tabel 2.106 Proyeksi Kebutuhan Air tahun 2025-2045

No	Uraian	Satuan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
A	Kependudukan							
1	Jumlah Penduduk	jiwa	3,718,660	3.783.213	3.920.452	4.034.604	4.117.456	4.164.490
2	Tingkat Pelayanan Total Kab Bandung Pembagian Pelayanan	jiwa	84,54%	86,86%	90,72%	94,59%	97,68%	100%
3	a. Perumda Tirta Raharja	jiwa	12,76%	13,98%	19,02%	24,06%	29,10%	31,11%
4	b. Non Perumda (SPAM Pedesaan)	jiwa	19,86%	22,65%	24,48%	26,32%	28,16%	28,89%
5	c. Swadaya Masyarakat. Swasta dll Penduduk Terlayani Total	jiwa	51,92%	52,04%	47,22%	44,21%	41,20%	40,00%
	Penduduk Terlayani Total	jiwa	3,143,755	3.286.099	3.556.634	3.816.332	4.021.931	4.164.490
	a. Penduduk Terlayani Perumda	jiwa	474,501	528.893	745.670	970.726	1.198.180	1.295.573
	b. Penduduk Terlayani Non Perumda (SPAM Pedesaan)	jiwa	738,526	856.898	959.727	1.061.908	1.159.476	1.203.121
	c. Penduduk Terlayani Swadaya Masyarakat. Swasta dll	jiwa	1,930,728	1.968.784	1.851.237	1.783.698	1.696.392	1.665.796
	d. Penduduk Kota Cimahi dan Kab Bandung Barat Terlayani	jiwa	133810	133.810	133.810	133.810	133.810	133.810
	Jumlah Penduduk Per SR	jiwa	5	5	5	5	5	5
B	Kebutuhan Domestik Jumlah SR (Total)		628,751	657.220	711.327	763.266	804.386	832.898
1	a. SPAM Perumda Tirta Raharja	unit	94900	105.779	149.134	194.145	239.636	259.115
2	b. SPAM Pedesaan	unit	147705	171.380	191.945	212.382	231.895	240.624
3	c. Swadaya Masyarakat. Swasta dll	unit	386146	393.757	370.247	356.740	339.278	333.159
4	d. Kota Cimahi dan Kab Bandung Barat	unit	26762	26.762	26.762	26.762	26.762	26.762
	Pemakaian per orang	l/org/hari	119	123,65	131,4	139,15	146,9	150
5	Kebutuhan Air SR	m ³ /hari	374106,86	406.326,12	467.341,71	531.042,59	590.821,67	624.673,50
6	Jumlah HU/TAHU	unit	5749	4.971	3.638	2.183	955	0

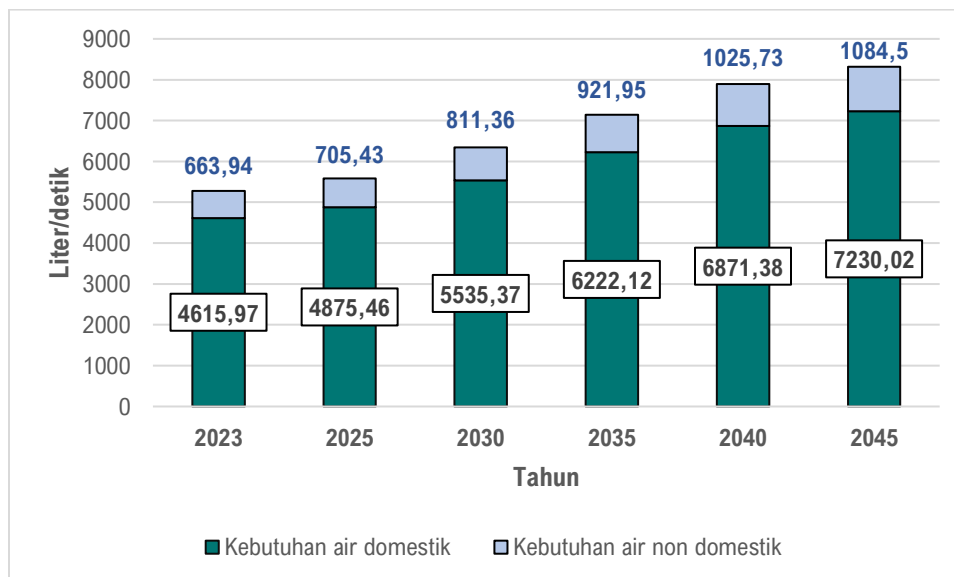


No	Uraian	Satuan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
7	Pemakaian per orang	l/org/hari	30	30	30	30	30	30
	Kebutuhan Air HU/ TAHU	m3/hari	17247.1	14.913,4	10.914,5	6.548,2	2.865,7	0.0
	Kebutuhan Domestik	l/detik	4529.56	4.875,46	5.535,37	6.222,12	6.871,38	7.230,02
C	Kebutuhan non domestik							
	15% dari kebutuhan Domestik	%	15	15	15	15	15	15
	Kebutuhan non domestik	m3/hari	56116.03	60.948,92	70.101,26	79.656,39	88.623,25	93.701,03
	Total Kebutuhan non domestik	l/dt	649.49	705,43	811,36	921,95	1.025,73	1.084,50
D	Kebutuhan Air Total	l/dt	5179.05	5.580,88	6.346,73	7.144,06	7.897,11	8.314,52
E	Kehilangan air							
	% Kehilangan air	l/dt	26.84%	26,12%	24,32%	22,52%	20,72%	20,00%
	Jumlah kehilangan air		1390.06	1.457,73	1.543,52	1.608,84	1.636,28	1.662,90
F	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	l/dt	6569.11	7.038,61	7.890,26	8.752,91	9.533,40	9.977,42
G	Kebutuhan air maksimum							
	Faktor koefisien	l/dt	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Kebutuhan air		7882.93	8.446,33	9.468,31	10.503,49	11.440,08	11.972,91
H	Kebutuhan Jam Puncak							
	Faktor koefisien Kebutuhan Air	l/dt	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	Kebutuhan air		11495.94	12.317,57	13.807,95	15.317,59	16.683,44	17.460,49

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2023

Berdasarkan tabel diatas, mengacu pada jumlah penduduk tahun 2023 (proyeksi) dengan total 3.721.111 jiwa. Maka, kebutuhan air rata-rata untuk jumlah penduduk tersebut yaitu 6.697,04 liter/detik. Skenario ini menggunakan pelayanan dengan kebutuhan domestik 15%. Dengan pelayanan air minum di Kabupaten Bandung pada tahun 2045 yaitu 100% maka, pada tahun 2045 kebutuhan air rata-rata yang dibutuhkan di Kabupaten Bandung yaitu 9.977,42 liter/detik.

Gambar 2.79 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Bandung 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024

Kebutuhan air di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2045 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2045 kebutuhan air domestik penduduk mencapai 7.230,02 l/detik sedangkan kebutuhan untuk non domestik mencapai 1.084,5 l/detik. Sementara itu, berdasarkan dokumen RISPAM Kabupaten Bandung tahun 2022-2042, tingkat kehilangan air pada tahun 2021 mencapai 27,2% dan ditargetkan mengalami penurunan pada tahun 2042 menjadi 20%. Pada tahun 2022, kapasitas terpasang Perumda Air Minum Tirta Raharja Kab. Bandung adalah 1.043 L/dt, sedangkan kapasitas produksi yang telah dimanfaatkan adalah 833,05 L/dt. selain itu kebutuhan air mengakomodir pelayanan sebagai lingkup batasannya seperti yang tersaji pada tabel berikut.



Tabel 2.107 Wilayah Pelayanan Air di Kabupaten Bandung

Wilayah Pelayanan	Kecamatan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Wilayah Pelayanan 1	Ciwidey	88.360	89.920	93.182	95.895	97.856	98.982
	Rancabali	51.846	52.761	54.675	56.267	57.418	58.079
	Pasirjambu	93.667	95.321	98.778	101.655	103.733	104.927
	Cangkuang	79.665	84.631	87.701	90.255	92.100	93.160
	Katapang	130.417	137.710	142.705	146.861	149.863	151.588
	Soreang	116.651	121.572	125.982	129.650	132.301	133.824
	Kutawaringin	102.455	107.276	111.167	114.404	116.743	118.087
	Margaasih	148.544	154.571	160.179	164.843	168.213	170.149
	Margahayu	121.608	124.105	128.607	132.352	135.058	136.612
Jumlah		933.213	967.867	1.002.976	1.032.182	1.053.285	1.065.408
Wilayah Pelayanan 2	Cimaung	86.075	90.584	93.870	96.604	98.579	99.714
	Pangalengan	154.286	160.350	166.166	171.005	174.501	176.510
	Kertasari	71.255	73.741	76.416	78.641	80.249	81.173
	Baleendah	263.724	277.732	287.807	296.187	302.243	305.722
	Arjasari	105.593	110.775	114.793	118.136	120.551	121.939
	Banjaran	132.184	138.573	143.600	147.781	150.802	152.538
	Pameungpeuk	84.557	89.336	92.576	95.272	97.220	98.339
	Dayeuhkolot	107.186	109.388	113.356	116.656	119.041	120.412
	Bojongsong	112.671	116.953	121.195	124.724	127.274	128.739
Jumlah		1.117.531	1.167.432	1.209.779	1.245.006	1.270.460	1.285.086
Wilayah Pelayanan 3	Pacet	115.066	120.244	124.606	128.234	130.856	132.362
	Ibun	87.020	91.115	94.420	97.169	99.156	100.297
	Paseh	136.202	142.409	147.575	151.872	154.978	156.762
	Cikancung	96.710	101.797	105.490	108.561	110.781	112.056
	Cicalengka	122.162	127.287	131.905	135.745	138.521	140.115
	Nagreg	58.408	61.556	63.789	65.646	66.988	67.760
	Rancaekek	185.499	193.152	200.158	205.986	210.198	212.618
	Majalaya	160.617	165.530	171.534	176.529	180.138	182.212
	Solokanjeruk	86.786	90.397	93.676	96.404	98.375	99.507
	Ciparay	172.589	180.540	187.089	192.537	196.473	198.735
	Cileunyi	186.543	195.577	202.671	208.573	212.837	215.287
	Cilengkrang	56.018	59.252	61.401	63.189	64.481	65.223
	Cimendan	114.567	119.060	123.379	126.972	129.568	131.059
Jumlah		1.578.187	1.647.916	1.707.693	1.757.417	1.793.350	1.813.993

sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Bandung 2022-2042

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten untuk tahun 2045, dengan jumlah penduduk 4.164.490 jiwa, kebutuhan air ideal berdasarkan wilayah pelayanan yaitu 1.840.723 Liter/detik. Dengan hasil ini proyeksi kebutuhan air minum memiliki peran yang penting dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas air minum yang aman dan memadai bagi semua orang untuk perencanaan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.

2.6.2.3 Proyeksi Persampahan

Proyeksi persampahan adalah perkiraan atau prediksi tentang jumlah sampah yang akan dihasilkan oleh suatu populasi atau wilayah pada masa mendatang. Proyeksi ini penting untuk perencanaan pengelolaan sampah, termasuk desain dan pengembangan infrastruktur pengolahan sampah, pengelolaan sumber daya, kebijakan pengurangan sampah, dan pendekatan lainnya untuk mengelola masalah sampah. Proyeksi persampahan melibatkan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh suatu populasi, seperti pertumbuhan populasi, pola konsumsi, perilaku daur ulang, kebijakan pengelolaan sampah, dan teknologi pengolahan sampah yang tersedia. Metode yang digunakan dalam membuat proyeksi ini dapat bervariasi tergantung pada sumber data yang tersedia dan kompleksitas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan.

Analisis proyeksi timbulan sampah ini menggunakan ketentuan daerah berupa Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai bahan pertimbangan menentukan sampah yang ditimbulkan oleh masing-masing orang, dengan produksi dari masing-masing orang sebesar



0.35 kg/hari. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa, timbulan sampah Kabupaten Bandung pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.302 ton/hari dan di tahun 2045 timbulan tersebut berjumlah 1.458 ton/hari, dengan hasil proyeksi tersebut perlunya Kabupaten mempersiapkan fasilitas penunjang yang dapat mengakomodir timbulan sampah hingga tahun 2045. selain itu, penyiapan kebijakan dan strategi akan memberikan kemudahan dalam menunjang ketersediaan infrastruktur persampahan.

Tabel 2.108 Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah Perhari				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.721.111	3.783.213	3.920.452	4.034.604	4.117.456	4.164.490
Proyeksi Timbulan sampah (ton) per hari	1.302	1.324	1.372	1.412	1.441	1.458

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024

Tabel 2.109 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Sampah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Lingkup Prasarana	Jiwa	Sarana	Status	Kebutuhan Prasarana Sampah					
				2022	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk				3.718.660	3.783.213	3.920.452	4.034.604	4.117.456	4.164.490
Rumah	5	Tong sampah	Pribadi	743.732	756.643	784.090	806.921	823.491	832.898
RW	2.500	Gerobak sampah Bak sampah kecil	TPS	1.487	1.513	1.568	1.614	1.647	1.666
Kelurahan	30.000	Gerobak sampah Bak sampah besar	TPS	124	126	131	134	137	139
Kecamatan	120.000	Mobil sampah Bak sampah besar	TPS/TPA lokal	31	32	33	34	34	35
Kota	480.000	Bak sampah akhir	TPA	8	8	8	8	9	9

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan ketenagalistrikan adalah proses perencanaan untuk menentukan jumlah daya listrik yang diperlukan dalam suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini melibatkan analisis pertumbuhan beban listrik dan perhitungan kapasitas yang dibutuhkan untuk memastikan pasokan listrik memenuhi kebutuhan masyarakat. Proyeksi kebutuhan ketenagalistrikan sangat penting untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat dan ekonomi. Proses ini memungkinkan perencanaan pembangunan infrastruktur energi yang tepat dan berkelanjutan. Sebelum pada proyeksi perlu diketahui bahwa terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan dalam rangka perwujudan RTRW kabupaten Bandung tahun 2024-2044 antara lain:



Tabel 2.110 Ringkasan Pembaharuan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

No	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Penjelasan
1	Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> a. PLTA <ul style="list-style-type: none"> - PLTA Plengan (eksisting) - PLTA Lamajan (eksisting) - PLTA Cikalong (eksisting) - PLTA Bengkok (eksisting) b. PLTS <ul style="list-style-type: none"> - PLTS Mandalawangi - PLTS Sugihmukti - PLTS Sukaluyu c. PLTP <ul style="list-style-type: none"> - PLTP Kamojang (sudah terealisasi) - PLTP Cibuni (sudah terealisasi) - PLTP Wayang Windu (sudah terealisasi) - PLTP Patuha (sudah terealisasi) - PLTP Masigit – Guntur dan Darajat dan Papandayan lintas kabupaten (sudah terealisasi) d. PLTMH <ul style="list-style-type: none"> - PLTMH Cileunca (sudah terealisasi) e. PLTSa <ul style="list-style-type: none"> - PLTSa TPPAS Legok Nangka (belum terealisasi)
2	Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi SUTUT, SUTET, SUTT, SUTTAS, kabel laut dan/atau saluran transmisi lainnya. Untuk jaringan transmisi tenaga listrik yang melintasi Kabupaten Bandung sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - SUTET 500 kV Bandung Selatan - Mandiracan - SUTET 500 kV Bandung Selatan – New Ujungberung - SUTET 500 kV Saguling Bandung Selatan - SUTET 500 kV Tasikmalaya – Depok - SUTT 150 kV Bandung Selatan – Kiaracandong - SUTT 150 kV Bandung Selatan – Panasia - SUTT 150 kV Cigereleng – Bandung Selatan - SUTT 150 kV Cigereleng – Cianjur - SUTT 150 kV Cigereleng – Lagadar - SUTT 150 kV Cikasungka – Kamojang - SUTT 150 kV Cikasungka – Rancaekek - SUTT 150 kV Cikasungka – Rancakasumba - SUTT 150 kV Dago Pakar – Bandung Utara - SUTT 150 kV Kamojang – Darajat - SUTT 150 kV Kiaracandong – Ujungberung - SUTT 150 kV Patuha – Lagadar - SUTT 150 kV Rancaekek – Ujungberung - SUTT 150 kV Ujungberung – Dago Pakar - SUTT 150 kV Wayang Windu – Bandung Selatan - SUTT 150 kV Wayang Windu – Kamojang - SUTT 70 kV Cigereleng – Cikalong - SUTT 70 kV Cigereleng – Majalaya - SUTT 70 kV Cikalong – Lamajan - SUTT 70 kV Lamajan – Santosa - SUTT 70 kV Santosa - Sumadra - SUTT 70 kV Santosa – Wayang Windu



No	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> - SUTT 70 kV Ujungberung – Bandung Timur - SUTT 70 kV Ujungberung – Sumedang b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi SUTM, SUTR, SKTM, dan/atau saluran distribusi lainnya. Untuk jaringan transmisi tenaga listrik yang melintasi Kabupaten Bandung sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - SUTM 30 kV Plengan - Lamajan c. Gardu induk <ul style="list-style-type: none"> - GITET 500 kV Bandung Selatan - GI 150 kV Bandung Selatan - GI 150 kV Cikasungka - GI 150 kV Kamojang - GI 150 kV Kamojang Swasta - GI 150 kV Pansia - GI 150 kV Rancakasumba - GI 150 kV Ujungberung - GI 150 kV Wayang Windu - GI 70 kV Cikalong - GI 70 kV Lamajan - GI 70 kV Majalaya - GI 70 kV Santosa

Sumber: Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044

Selain itu, untuk perkiraan akan besarnya listrik yang dibutuhkan dapat diketahui dengan melakukan proyeksi akan kebutuhan listrik, dari hasil proyeksi yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembangunan dalam prasarana listrik untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk akan listrik dimasa mendatang. Besarnya kebutuhan energi ketenagalistrikan pada dasarnya adalah berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan. Dalam hal ini kebutuhan listrik dalam standar perencanaan prasarana listrik yang digunakan untuk melakukan proyeksi di Kabupaten Bandung hingga tahun 2045 menggunakan kebutuhan listrik domestik. Untuk uraian hasil proyeksi dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 2.111 Proyeksi Ketenagalistrikan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.721.111	3.783.213	3.920.452	4.034.604	4.117.456	4.164.490
Jumlah Rumah	744.222	756.643	784.090	806.921	823.491	832.898
Kebutuhan Listrik (KVA)	334.899,99	340.489,17	352.840,68	363.114,36	370.571,04	374.804,10

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2023

Berdasarkan pada hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2045 yaitu sebesar 4.164.490 Jiwa, maka dengan proyeksi kebutuhan ketenagalistrikan sesuai dengan inmendagri di Kabupaten Bandung tahun 2045, yaitu 374.804,10 KVA.

Tabel 2.112 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

No	Uraian	Daya Listrik (Watt/KK)	Kebutuhan Listrik (watt)					
			2023	2025	2030	2035	2040	2045
	Proyeksi Penduduk	Jiwa	3.718.660	3.783.213	3.920.452	4.034.604	4.117.456	4.164.490
	Asumsi Jumlah KK (SNI 03-1733-2004)	1 KK = 5 orang	743.732	756.643	784.090	806.921	823.491	832.898



No	Uraian	Daya Listrik (Watt/KK)	Kebutuhan Listrik (watt)					
			2023	2025	2030	2035	2040	2045
Kebutuhan Domestik								
I	a. Rumah Besar (10%)	2200	163.621.040	166.461.372	172.499.888	177.522.576	181.168.064	183.237.560
	b. Rumah Sedang (30%)	1300	290.055.480	295.090.614	305.795.256	314.699.112	321.161.568	324.830.220
	c. Rumah Kecil (60%)	900	401.615.280	408.587.004	423.408.816	435.737.232	444.685.248	449.764.920
	d. Jumlah Kebutuhan Domestik (100%)		855.291.800	870.138.990	901.703.960	927.958.920	947.014.880	957.832.700
Kebutuhan Non Domestik								
II	a. Fasilitas Sosial Ekonomi (20%)		171.058.360	174.027.798	180.340.792	185.591.784	189.402.976	191.566.540
	b. Penerangan Jalan (10%)		85.529.180	87.013.899	90.170.396	92.795.892	94.701.488	95.783.270
	c. Jumlah Kebutuhan Non Domestik		256.587.540	261.041.697	270.511.188	278.387.676	284.104.464	287.349.810
	Total Jumlah Kebutuhan		1.111.879.340	1.131.180.687	1.172.215.148	1.206.346.596	1.231.119.344	1.245.182.510

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024

Berdasarkan proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Bandung pada tahun 2045 mencapai 1.245.182.510 watt.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Bandung dari tahun 2019-2023 menggunakan metode *forecast* eksponen, proyeksi fasilitas puskesmas menggunakan standar WHO yaitu rasio 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk, sedangkan untuk proyeksi rumah sakit memiliki standar rasio tempat tidur dengan penduduk yaitu 1 : 1000 jiwa sesuai dengan standar WHO. Berikut merupakan hasil proyeksi fasilitas kesehatan di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2045.

Tabel 2.113 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bandung

Fasilitas	Kondisi Eksisting	Tahun Proyeksi					Gap
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	
Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan menteri (PSC, PMI)	2	2	3	5	6	8	6
Balai	0	0	0	-	-	-	0
Laboratorium Kesehatan	9	9	11	13	15	17	8
Apotek	575	675	925	1450	1925	2450	1875
RS	15	16	23	30	36	43	28
Klinik	204	223	265	308	350	393	189
Puskesmas	62	62	72	82	92	102	40
Tempat Praktik Mandiri Dokter	710	1281	2068	2854	3640	4462	3.752

Sumber: Hasil Analisis Dinas Kesehatan, 2024

Pada tahun 2045 masih diperlukan penambahan beberapa fasilitas kesehatan dengan rincian 40 unit puskesmas, 189 unit klinik kesehatan, 28 unit RS, 1.875 unit apotek, 8 unit laboratorium kesehatan, 3.752 tempat praktik mandiri dokter, serta 6 unit fasilitas kesehatan lainnya. Skema dalam pemenuhan fasilitas kesehatan yaitu Pemenuhan Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter akan diberikan kekeluasaan pada swasta sedangkan untuk pengembangan puskesmas sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk SDM kesehatan dilakukan perhitungan dengan berpedoman pada Peraturan menteri Kesehatan no 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit, serta mengacu pada



Undang- Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kebutuhan SDM tersebut dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.114 Kebutuhan SDM Kesehatan

FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH SDM KESEHATAN					
	KONDISI EKSISTING	TAHUN PROYEKSI				
		2023	2025	2030	2035	2040
Tempat Praktik Mandiri Dokter	710	1281	2068	2854	3640	4462
Puskesmas	2510	2760	3160	3560	4360	5760
Klinik	1020	1338	1590	1845	2001	2358
RSUD	2151	2401	2851	3051	3251	3451
Apotek	575	675	1175	1675	2175	2675
Laboratorium Kesehatan	7	15	20	25	30	35
Balai	0	0	0	0	0	0
Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan menteri (PSC 119)	4	4	4	4	4	4

Sumber: Hasil Analisis Dinas Kesehatan, 2024



Tabel 2.115 Kebutuhan Dokter Spesialis di Kabupaten Bandung sampai tahun 2045

NO	Jenis Spesialis	JUMLAH							TOTAL th 2023	KEBUTUHAN				
		RS OTO ISKANDAR DINATA	RS MAJALAYA	RS CICALENG KA	RS CIMAUNG	RS KERTASARI	RS ARJASARI	RS TEGALUAR		2025	2030	2035	2040	2045
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	6	4	3	1	1	1	1	17	20	40	50	50	52
2	Dokter Spesialis Anak	3	3	2	1	1		1	11	21	41	51	51	53
3	Dokter Spesialis Anak (Kardiologi)	1	-	-	-	-	-	-	1	11	31	27	27	27
4	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	4	3	2	1	1	1	1	13	23	43	53	53	55
5	Dokter Spesialis Bedah	2	4	2	1	1			10	20	40	50	50	50
6	Dokter Spesialis Bedah Anak	1	-	-	-	-	-	-	1	11	31	41	41	43
7	Dokter Spesialis Mata	2	2	2	-	-	-	-	6	16	36	46	46	48
8	Dokter Spesialis THT	2	2	1	-	-	-	-	5	15	35	45	45	47
9	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2	2		-	-	-	-	4	14	34	40	40	42
10	Dokter Spesialis Saraf	2	2	1	-	-	-	-	5	15	35	40	40	42
11	Dokter Spesialis Jantung dan Pemb Darah	2	3	1	-	-	-	-	6	16	36	40	40	42
12	Dokter Spesialis Paru	1	1	-	-	-	-	-	2	12	32	35	35	35
13	Dokter Spesialis Urologi	1	1		-	-	-	-	2	12	32	35	35	37
14	Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi	1	1	1	-	-	-	-	3	13	33	37	37	39
15	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	1	1	-	-	-	-	3	13	33	37	37	39
16	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis	2	1	1	-	-	-	-	4	14	34	36	36	38
17	Dokter Spesialis Gizi Klinik	4	-	-	-	-	-	-	4	14	34	37	37	39
18	Dokter Spesialis Patologi Klinik	3	1	1	1	1	1	1	9	19	39	42	42	44
19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	-	-	-	-	-	2	12	32	42	42	44
20	Dokter Spesialis Radiologi	2	2	2	1	1	1	1	10	20	40	42	42	44
21	Dokter Gigi Spesialis Radiologi Ked. Gigi	1	-	-	-	-	-	-	1	11	31	35	35	37
22	Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	1	-	-	-	-	-	-	1	11	31	35	35	35
23	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	-	-	-	-	-	-	1	11	31	35	35	35
24	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	1	-	-	-	-	-	2	12	32	35	35	35
25	Dokter Sub Spesialis Anestesi & Reanimasi Konsulen Intensif Care	-	1	-	-	-	-	-	1	11	31	35	35	35
26	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam Konsulen Ginjal dan Hipertensi	-	1	-	-	-	-	-	1	11	31	35	35	35
27	Dokter Spesialis Anestesi & Reanimasi	3	1		1	1	1	1	8	18	38	42	42	42
28	Dokter Gigi Spesialis Kedok.Gigi Anak	-	-	1	-	-	-	-	1	11	31	34	34	35
	JUMLAH	50	38	21	7	7	5	6	134	407	967	1112	1112	1149



Berdasarkan standar WHO, proporsi kebutuhan dokter spesialis per 1000 penduduk yaitu 0,28. Pada tahun 2045, dibutuhkan penambahan jumlah dokter spesialis sebanyak 1.015 orang. Kebutuhan dokter spesialis terbanyak yaitu Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada tahun 2045 sejumlah 55 orang. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit menetapkan 4 jenis spesialis dasar yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Anak, Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan 4 jenis spesialis penunjang yaitu spesialis Radiologi dan Spesialis Patologi Klinik wajib ada di semua kelas Rumah Sakit.

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan adalah perkiraan atau prediksi tentang jumlah dan jenis fasilitas pendidikan yang akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu populasi atau wilayah pada masa mendatang. Proyeksi ini penting untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan, termasuk sekolah, gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan melibatkan analisis berbagai faktor, seperti pertumbuhan populasi, angka kelahiran, migrasi, kebijakan pendidikan, dan perubahan demografis lainnya. Metode yang digunakan dalam membuat proyeksi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kompleksitas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Selain itu penggunaan SNI sebagai penentu standar dari fasilitas pendidikan akan menjadi faktor yang mempengaruhi hasil perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dengan hasil proyeksi sebagai berikut:

Tabel 2.116 Kebutuhan Ruang Kelas Kabupaten Bandung

Fasilitas	Kondisi eksisting	Tahun Proyeksi					Gap 2023-2045
		2023	2025	2030	2035	2040	
Penduduk usia sekolah	796.480	721.613	702.596	684.263	661.906	637.767	
PAUD	5.037	12.170	11.849	11.540	11.163	10.756	5.719
SD	10.392	12.548	12.218	11.899	11.510	11.090	698
SMP	4.823	5.866	5.712	5.563	5.381	5.185	362

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pendidikan, 2024

Terjadi penurunan jumlah penduduk usia sekolah dari tahun 2023-2045 dari 796.480 jiwa menjadi 637.767 jiwa, akan tetapi kebutuhan fasilitas ruang kelas untuk pendidikan dasar PAUD, SD, dan SMP masih memiliki gap, pada tahun 2023 saja, keterpenuhan ruang kelas terhadap permintaan jumlah usia anak sekolah untuk SD baru mencapai 80,11%, sementara untuk SMP mencapai 81,02%. Sedangkan pada tahun 2045, diperlukan penambahan 5.729 ruang kelas untuk PAUD, 698 ruang kelas untuk SD, serta 362 ruang kelas untuk SMP pada tahun 2045.

Tabel 2.117 Proyeksi Kebutuhan SDM Pendidikan

Fasilitas Pendidikan	Jumlah SDM Pendidikan						Gap
	Kondisin Eksisting	Tahun Proyeksi					
		2023	2025	2030	2035	2040	
PAUD	4676	4922	5169	5415	5661	5908	1.232
SD	13934	13857	13781	13704	13628	13551	-
SMP	6737	7117	7498	7878	8258	8639	1.902

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pendidikan, 2024



Pada tahun 2045, masih diperlukan penambahan jumlah guru atau SDM pendidikan untuk PAUD sebanyak 1.232 orang, dan SMP sebanyak 1.902 orang. Sementara untuk SDM jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2023 sebanyak 13.934 orang telah melampaui kebutuhan yang ada sampai dengan tahun 2045. Kebutuhan tenaga pendidik untuk SD mengalami penurunan hingga tahun 2045 hal ini disebabkan adanya tren penurunan usia sekolah pada jenjang SD.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

2.7.1 PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH RTRW

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur kedinamis, sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha berlokasi disitu dan masyarakat datang memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota tersebut. Walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antar usaha-usaha tersebut (tarigan, 2005). Namun dalam implementasinya, pusat pertumbuhan yang dikembangkan harus bisa mengimbangi dampak kemungkinan adanya pengurasan sumber daya oleh pusat pertumbuhan yang dapat menyebabkan ketimpangan semakin lebar.

2.7.1.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi

Tinjauan kebijakan kewilayahan mendasar dari pada Perda Provinsi Jawa Barat No 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042. RTRW Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai salah satu dokumen perencanaan yang akan dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, meliputi pusat-pusat permukiman, wilayah pengembangan, kebijakan penataan ruang dan tinjauan Kawasan Strategis Provinsi.

A. Pusat-Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman di Provinsi Jawa Barat terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sistem pusat permukiman menunjukkan kemampuan sebuah kota untuk melayani wilayah-wilayah yang sudah ditentukan berdasarkan orde yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana dalam melayani kebutuhan aktivitas dalam ruang wilayah. Dalam penerapan sistem pusat permukiman memiliki peranan dan fungsi, antara lain:

- 1) PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
- 2) PKW, yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
- 3) PKL, yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.

Pada sistem pusat permukiman Kabupaten Bandung termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Selain itu Kabupaten juga termasuk ke dalam fungsi PKL dengan lokasi meliputi Ciwidey dan Pengalengan.

B. Wilayah Pengembangan (WP)

Pada arah pengembangan wilayah, Kabupaten Bandung termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) KK Cekungan Bandung bersama dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Mendasar pada Perda RTRW Provinsi Jawa Barat no 9 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 WP KK Cekungan Bandung memuat tema pengembangan



sebagai mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung diarahkan dengan fokus pengembangan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif dan non ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan **alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan**. Arah pengembangan Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL;
- b. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan;
- c. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan; dan
- d. Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal.

Sektor unggulan pada WP KK Cekungan Bandung, yaitu Pertanian hortikultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kab./ Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya.

C. Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Kebijakan penataan ruang Kabupaten dimaksudkan sebagai upaya yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Untuk lingkup kebijakan Provinsi Jawa Barat memuat 2 (dua) unsur yaitu kebijakan penataan ruang dan strategi penataan ruang. Lebih jelasnya akan diuraikan pada penjelasan di bawah ini:

1. Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi, meliputi:

Dalam mendukung penerapan keruangan di Provinsi Jawa Barat dimuat berdasarkan beberapa kebijakan. Kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat merupakan arahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang termuat dalam 8 (delapan) kebijakan, antara lain:

- pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
- pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, meliputi PKN, PKW, dan PKL;
- penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
- perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung;
- pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional;
- pengelolaan Wilayah Pesisir, laut, dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan



- pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan.

2. Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun dalam pengaplikasiannya tidak semua kebijakan dan strategi ruang yang ada di RTRW Provinsi Jawa Barat diampu oleh Kabupaten Bandung, adapun strategi penataan ruang yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung, dari 8 (delapan) strategi penataan ruang Provinsi JBarat, hanya terdapat 7 (tujuh) strategi yang memiliki irisan dengan Kabupaten Bandung, meliputi:

Tabel 2.118 Strategi dan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat

No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
1	Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan; • meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan • meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2	Strategi untuk kebijakan pematapan peran perkotaan di Daerah Provinsi meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan; • meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya; • meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; • menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan • pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3	Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung



No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
	<p>pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi meliputi:</p>	<p>Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integerasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif; • mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan; • mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat; • mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan; • mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan; • meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian; • mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi; • meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana, serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan k. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
4	<p>Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi; • membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung; • meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis



No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
		<p>kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial; • mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam; • mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung; h. mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis; • meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan; j. meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS; • mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan • mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5	<p>Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya; • mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional; • melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah; • merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah; • memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat; • meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan



No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
5	<p>Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer; • menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah; • mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan • mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
6	<p>Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan • mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan • strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042

D. Kawasan Strategis Provinsi

Dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042. Kawasan strategis di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:



1) Kawasan Strategis Nasional (KSN),

KSN merupakan Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; dan

2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

KSP merupakan Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.

Mendasar pada Perda RTRW Provinsi Jawa Barat, bahwa Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kawasan strategis Provinsi Jawa Barat, KSP tersebut meliputi:

- 1) Kabupaten Bandung termasuk ke dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung; dan
- 2) Kabupaten Bandung termasuk ke dalam KSP Bandung Utara yang melingkupi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang.

KSP Bandung Utara memiliki sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan tujuan KSP yaitu, untuk mengendalikan ruang di KBU sehingga terjamin pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat 14 (empat belas) arah pengembangan KSP Bandung Utara sebagai berikut:

- perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga *makro climate*, serta mencegah dan/atau mengurangi risiko bencana;
- penataan dan pengembangan Kawasan Budi Daya secara terkendali sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- perwujudan Struktur Ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- pencegahan peningkatan kekritisian fungsi hidrorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis;
- pemulihan dan penanggulangan pada lahan dengan kondisi fungsi hidrorologis kritis dan sangat kritis;
- penerapan prinsip meminimalisasi air larian dengan melakukan rekayasa teknis dan rekayasa vegetasi untuk mengurangi air larian, dan meningkatkan fungsi resapan lahan;
- penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan gedung;
- pembangunan gedung secara vertikal dan membatasi penambahan bangunan gedung yang bersifat horizontal;
- pada kawasan dengan ketinggian 1.000 mdpl (seribu meter di atas permukaan laut) atau lebih, pendirian bangunan vertikal paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- peletakan bangunan hanya pada kelerengan kurang dari 30% (tiga puluh persen), serta menerapkan struktur bangunan tahan gempa;



- pada lokasi dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen), sekitar mata air, sempadan sungai, perbatasan zona lindung dan zona budi daya, digunakan untuk area penghijauan dan reboisasi, ruang terbuka hijau (RTH) atau RTHA; dan
- penetapan KDB, KDH, dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengacu pada KDB paling tinggi, KDH paling rendah, KLB paling tinggi per pola ruang per zona, berdasarkan pertimbangan tingkat resapan air per zona, kepadatan wilayah, dan ketinggian wilayah dari atas permukaan laut.

2.7.1.2 Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Kabupaten

Pada kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif Kabupaten Bandung memuat hal-hal yang bersifat strategis yang terkandung dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024-2044. Hal yang akan menjadi pertimbangan dalam RTRW yaitu pusat-pusat permukiman, Wilayah Pengembangan (WP) dan Kawasan Strategis Kabupaten. Terkait dengan penjelasan setiap aspek akan diuraikan pada sub bab berikut.

A. Pusat-Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman merupakan susunan kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten dan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten.

Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Bandung terdiri atas:

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

PKN merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 meliputi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Rencana PKN di Kabupaten Bandung adalah Soreang-Kutawaringin-Katapang-Margahayu-Margaasih, Cileunyi-Rancaekek, Cicalengka, Majalaya-Ciparay, Baleendah-Daeyeuhkolot-Bojongsoang, dan Banjaran.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL ini dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya dan dipicu oleh kondisi eksisting dimana wilayah tersebut memiliki beberapa megaproyek yang di masa mendatang akan menjadi bangkitan baru. Rencana PKL di Kabupaten Bandung adalah Ciwidey dan Pangalengan.

3) Pusat-pusat lain, yaitu:

Pusat-pusat lainnya yang diarahkan sebagai bagian dari pusat permukiman, antara lain:

a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Rencana PPK di Kabupaten Bandung adalah Cimencyan dan Cangkuang.

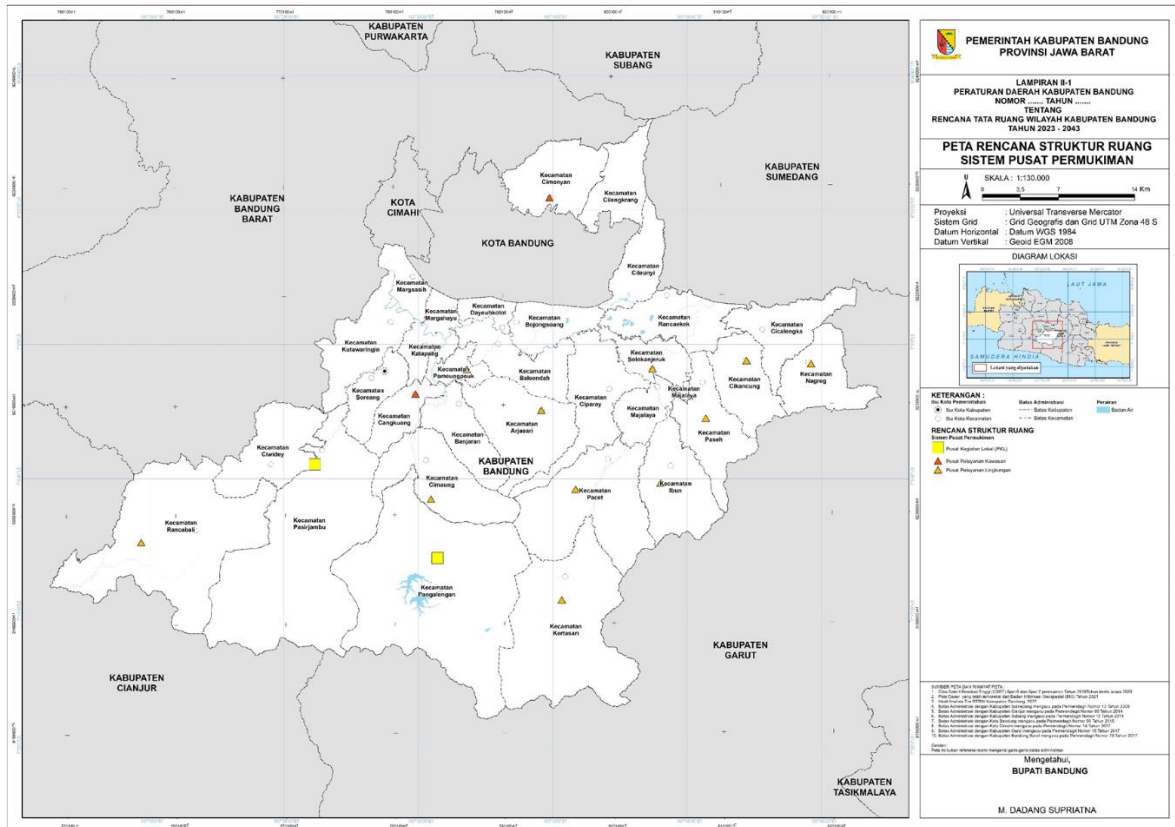
b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Rencana PPL di Kabupaten Bandung adalah Arjasari, Cikancung, Cimaung, Ibum, Kertasari, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Rancabali, dan Solokanjeruk.



Pola persebaran sistem permukiman di Kabupaten Bandung berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2024-2044 dapat ditinjau berdasarkan pada Gambar 2.80 berikut:

Gambar 2.80 Peta Sebaran Permukiman Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044

B. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bandung

Kebijakan penataan ruang Kabupaten dimaksudkan sebagai upaya yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bandung merupakan arahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang termuat dalam 6 (enam) kebijakan, antara lain:

- 1) Kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan pada pusat-pusat permukiman secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung kedudukan dan peran Daerah sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti di kawasan Metropolitan.
- 2) Kebijakan pemantapan dan pengembangan kualitas prasarana transportasi perkotaan dan regional yang terpadu dan berkelanjutan dengan transportasi lokal sesuai fungsi pusat kegiatan;
- 3) Kebijakan pemantapan dan pengembangan sistem sarana prasarana wilayah yang terpadu;
- 4) Kebijakan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tanpa mengesampingkan pelestarian kawasan lindung;
- 5) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi melalui alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan; dan
- 6) Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan strategis, KBU, KBS, dan kawasan resapan air.



C. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi penataan ruang kabupaten Bandung dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.119 Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung

No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
1	Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan pada pusat-pusat permukiman secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung kedudukan dan peran Daerah sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti di kawasan Metropolitan	<ul style="list-style-type: none"> menetapkan pusat-pusat permukiman sesuai hierarki dan fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL; dan mengembangkan pusat kegiatan sesuai fokus pengembangan kawasan perkotaan yang terkendali, mendukung pengembangan PKN dan Metropolitan yang terintegrasi dengan kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
2	Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pemantapan dan pengembangan kualitas prasarana transportasi perkotaan dan regional yang terpadu dan berkelanjutan dengan transportasi lokal sesuai fungsi pusat kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum massal perkotaan sebagai angkutan pembantu melayani seluruh sistem pusat permukiman yang nyaman dan terjangkau; mengembangkan sistem sarana dan prasarana sistem angkutan massal skala regional untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan mengatasi kemacetan di kawasan perbatasan, melalui pengembangan kerja sama antar pemangku kepentingan di sektor transportasi; mengembangkan kawasan berorientasi transit atau pengembangan pada simpul transit dengan mengutamakan pengembangan konektivitas simpul transportasi antar moda; dan meningkatkan kapasitas pelayanan lalu-lintas pada jalan umum.
3	Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pemantapan dan pengembangan sistem sarana prasarana wilayah yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu dengan pendekatan DAS dan kepentingan publik yang berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur air baku, irigasi dan pengendalian banjir, pengendalian air permukaan dan pembatasan pemanfaatan air bawah tanah dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem pelayanan jaringan air minum secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; mengembangkan energi alternatif dan cakupan pelayanan jaringan listrik dan energi;



No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan jaringan telekomunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi bagi seluruh wilayah; • mengembangkan sistem, teknologi, dan cakupan pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, daur ulang, pengangkutan, dan pengolahan, serta optimalisasi TPA eksisting dan pengembangan kelembagaan; • meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengolahan air limbah rumah tangga dan limbah cair berupa individual dan komunal, sistem pembuangan dan pengolahan air limbah, termasuk IPAL industri, dan sistem pengelolaan limbah B3, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan; • menata dan mengembangkan sistem drainase, tanggul dan kolam retensi untuk mengendalikan genangan dan banjir, serta pemeliharaan saluran dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan secara terpadu; dan • mengembangkan sistem mitigasi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, penanggulangan
4	Strategi untuk melaksanakan Kebijakan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tanpa mengesampingkan pelestarian kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi dan peningkatan kualitas kawasan lindung; • mengendalikan secara ketat kegiatan budi daya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung; • mengendalikan secara khusus pengembangan di kawasan budi daya, khususnya KBU, KBS, dan Kawasan Resapan Air; • mengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya; • mengembangkan kawasan permukiman yang terpadu di pusat-pusat kegiatan dengan mempertimbangkan kriteria layak huni baik di perkotaan maupun perdesaan; • mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada pusat permukiman di

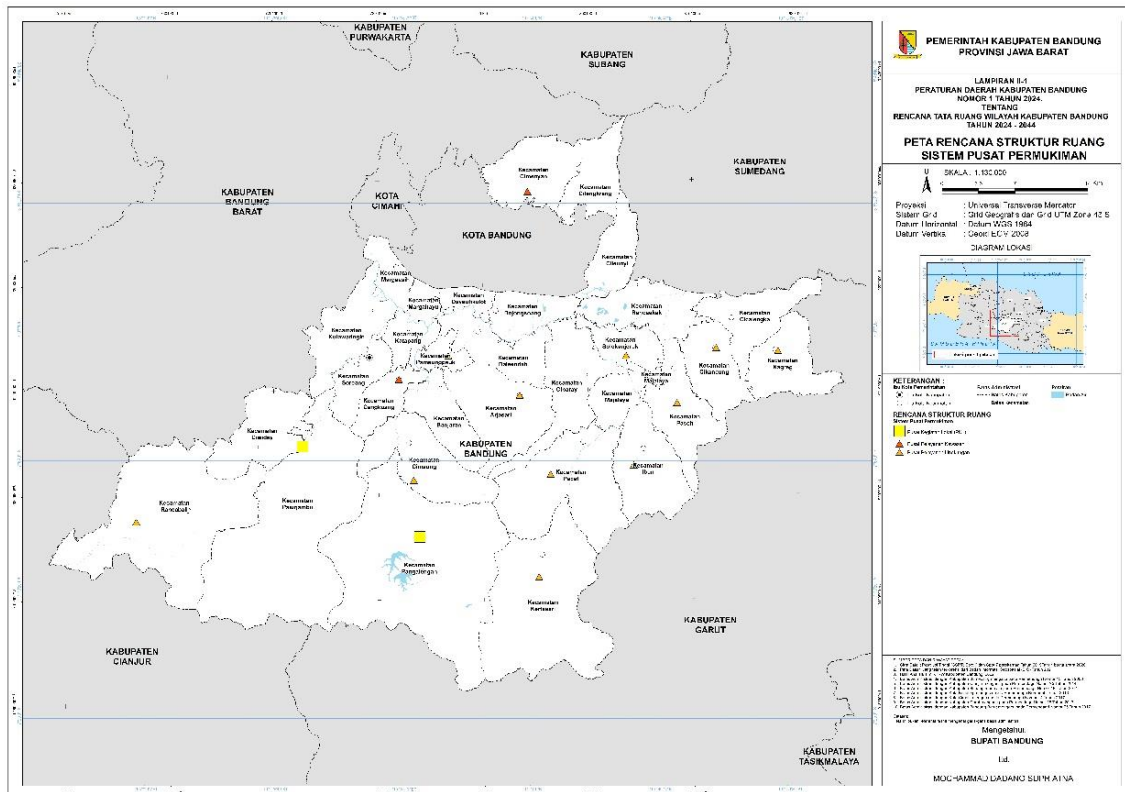


No	Strategi Penataan Ruang	Penjelasan
		<p>kawasan perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan membatasi kegiatan industri tertentu; • menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat.
5	<p>Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi melalui alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan lahan pengembangan kawasan strategis kabupaten bagi kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi melalui pengembangan kawasan terpadu; dan • menata dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung pada kawasan strategis provinsi dari sudut pandang kepentingan daya dukung lingkungan.
6	<p>Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan strategis, KBU, KBS, dan kawasan resapan air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum; • menetapkan ketentuan penilaian khusus pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya di kawasan lindung; • menerapkan penilaian perwujudan rencana tata ruang Daerah; • menetapkan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk mendukung perwujudan RTRW; • menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran atas KKPR yang diberikan; dan • menjalankan penyelesaian sengketa penataan ruang dan konflik pemanfaatan ruang yang berkeadilan.

Sumber: Perda No 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044



Gambar 2.81 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044

D. Kawasan Strategis Kabupaten Bandung

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis dinilai dapat memberikan dorongan terhadap ekonomi maupun lingkungan yang memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pengembangan kawasan-kawasan pendorong.

Rencana penetapan kawasan strategis Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 2 (dua) sudut kepentingan, antara lain:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi tersebar di Kecamatan Margaasih, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Katapang, Kecamatan Soreang sebagian Kecamatan Bojong Soang, Sebagian Kecamatan Solokan Jeruk, Sebagian Kecamatan Rancaekek dan Sebagian kecamatan Cileunyi.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup tersebar di Kecamatan Rancabali, sebagian Kecamatan Ciwidey, Sebagian Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Pangalengan sebagian Kecamatan Ciamung Kecamatan Banjaran Kecamatan Arjasari, sebagian Kecil Kecamatan Ciparay sebagian Kecamatan Pacet sebagian Kecamatan Ibum dan Kecamatan Kertasari.

Dalam program perwujudan rencana strategis Kabupaten Bandung, memuat 3 (tiga) program perwujudan rencana kawasan strategis, masing-masing termuat dalam beberapa perwujudan dapat ditinjau padat tabel berikut:



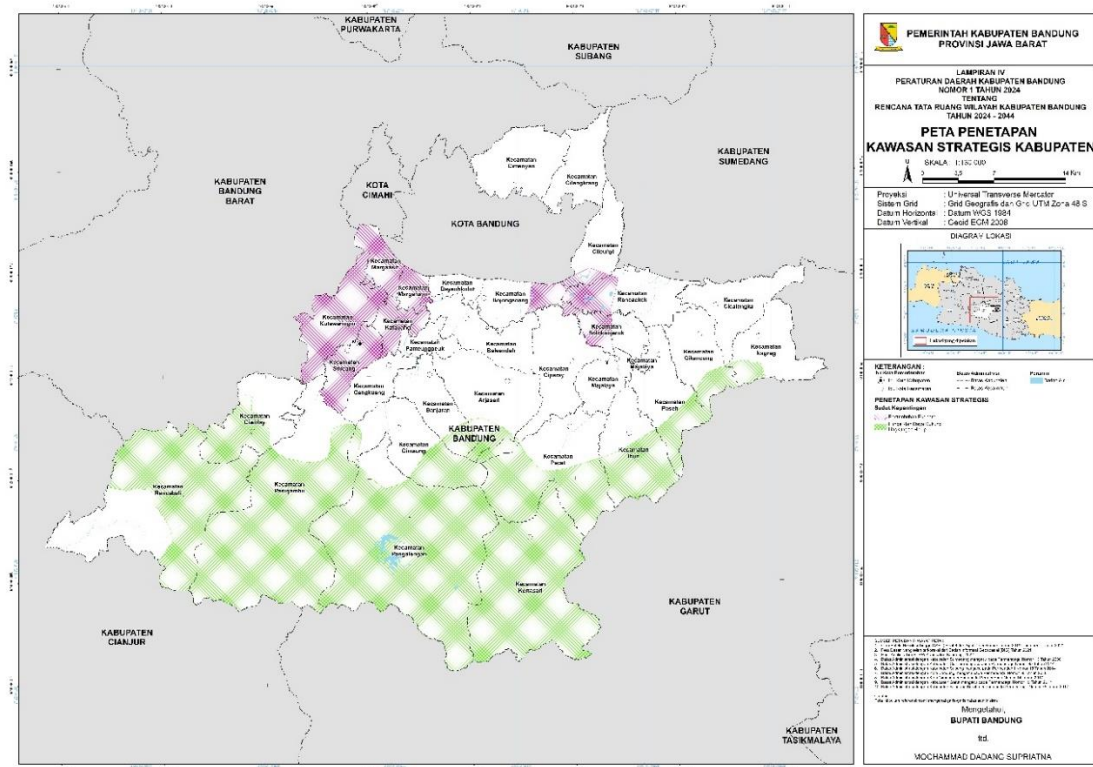
Tabel 2.120 Program Perwujudan Rencana Strategis Kabupaten Bandung

Program	Penjelasan
Perwujudan KSK Kawasan Terpadu Permukiman (KTP) Tegalluar	Dalam upaya mendorong perwujudan KSK, memuat beberapa program perwujudan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR; Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi terpadu; Penataan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan; Pengembangan Kawasan Pertanian yang berkelanjutan; Belanja Modal Tanah untuk Pembebasan Lahan Polder; dan Pelestarian sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan yang adaptif terhadap bencana.
Perwujudan KSK Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu	Dalam upaya mendorong perwujudan KSK, memuat beberapa program perwujudan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi terpadu; Pengembangan Kawasan Bisnis Terpadu; Perencanaan inklusif yang menyediakan fasilitas perdagangan, pelayanan, dan jasa bagi masyarakat; Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten.
Perwujudan KSK Kawasan Bandung Selatan	Dalam upaya mendorong perwujudan KSK, memuat beberapa program perwujudan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan peraturan kepala daerah tentang norma, standar, pedoman, dan kriteria pengendalian pemanfaatan ruang; Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan resapan air, dan lahan kritis; Rehabilitasi jaringan sumber daya air; dan Pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan.

Sumber: Perda No 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044

Pola persebaran Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dapat ditinjau dari Gambar 2.82 berikut:

Gambar 2.82 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung



Sumber: Perda No 1 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044



2.7.2 ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN RPJPN 2025-2045

2.7.2.1 Arah Kebijakan RPJPN

Arah kebijakan RPJPN sebagai upaya perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk menciptakan terwujudnya Indonesia maju sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi. Kelima sasaran visi tersebut yaitu:

1. Pendapatan perkapita setara dengan negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumberdaya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Gambar 2.83 Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena *market strength-nya* (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

- 1) Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.



- 2) Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
- 3) Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada *pengembangan multi-infrastruktur dan maritime backbone dan global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic dan production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;
- 4) Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastruktur backbone dan feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar; dan
- 5) Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Arah kebijakan Transformasi pulau Jawa meliputi:

A. Transformasi Sosial

Arah kebijakan transformasi sosial meliputi:

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan kusta, dan percepatan penurunan stunting pada wilayah dengan beban tinggi;
- Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal;
- Pendekatan layanan kesehatan lansia;
- Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi di Wilayah Jawa;
- Perbaikan kualitas lingkungan sehat di pemukiman kumuh kota;
- Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
- Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya; pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas;
- Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi;
- Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;



- Pengembangan hub pendidikan tinggi global (*global higher education hub*): peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat- pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yogyakarta;
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI;
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja;
- Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar;
- Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

B. Transformasi Ekonomi

Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor "Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi" melalui kebijakan:

- Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya;
- Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi- Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri *consumer goods* dan *general manufacture*), dan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik - Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan);
- Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi dan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika;
- Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata argo dan bentang alam. Konsep Hub kebudayaan dan industri kreatif (*Cultural Hub and Creative Industry (CCI)*) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *meeting, incentives, conferences, and exhibition (MICE)* di wilayah-wilayah perkotaan;
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (*integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism seperti **Megapolitan Jakarta-Bandung**, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang;



- Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk- Cisanggarung, Jratunseluna, Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih;
- Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antarwilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan;
- Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue enerav pada perairan-perairan tersebut;
- Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital;
- Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital;
- Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan Internet of Things (IoT), pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*;
- Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya;
- Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada **megapolitan Jakarta-Bandung**, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat- pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

C. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata Kelola diarahkan melalui kebijakan:

- Optimasi regulasi, termasuk proses pra- regulasi yang memadai di daerah;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;



- Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
- Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supremasi Hukum

Arah kebijakan Penataan Keuangan Daerah Wilayah Jawa difokuskan pada:

- Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya meliputi:

- Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa;
- Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas;
- Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui *hub* kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah Jawa;
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

- Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, **Provinsi Jawa Barat**, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.
- Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan;
- Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien; Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;



- Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi *clean energy* untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan;
- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif; Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi;
- Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi *clean* global;
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
- Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
- Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan;
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
- Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:

- Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
- Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni;
- Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai;
- Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun;
- Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan;
- Penerapan kebijakan *Zero Delta Q*;
- Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir;
- Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan;
- Penerapan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS) berbasis teknologi digital.

Kerangka Implementasi Transformasi

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana meliputi:

- Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
- Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
- Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- Pemanfaatan ALKII di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
- Peningkatan konektivitas Sumatra-Jawa- Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali



(Gilimanuk- Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatra (Merak-Bakauheni) untuk menurunkan biaya logistik

- Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk *aerocity* serta pengembangan bandara kargo; dan
- Pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.
- Pembangunan kereta antarkota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta - Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta - Bandung, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda;
- Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang;
- Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global pasca pemindahan ibu kota negara;
- Penurunan ketimpangan antara desa- kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antarwilayah;
- Percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan *Access to market* dan *Access to information* pada kawasan- kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar;
- Pengembangan sistem *smart grid* ketenagalistrikan berbasis energi baru ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

- Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;
- Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal;
- Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan;
- Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;
- Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
- Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; serta Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.



2.7.2.2 Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2025 – 2045 adalah Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdayasaing dan Berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu :

1. Pendapatan per kapita meningkat;
2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun;
3. Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Dalam konteks pengembangan wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bandung memegang peranan yang relatif penting dan masuk dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2022-2042, program-program utama untuk Kabupaten Bandung dan Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun dan penyediaan PSU).
2. Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah.
3. Pengembangan jalan eksisting (pelebaran/peningkatan kelas ruas jalan).
4. Sistem pengendali banjir kawasan.
5. Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota)
6. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel (BRT dan LRT).

Arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bandung termasuk dalam WP Cekungan Bandung yang diarahkan untuk :

1. Pengembangan WP Cekungan Bandung diarahkan untuk mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki, kerentanan terhadap risiko bencana alam. gangguan hulu DAS, menghindari alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian sawah produktif. WP ini meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera; membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; meningkatkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya; serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan.
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; meningkatkan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik; mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.
4. Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan; mengendalikan pengembangan kegiatan kawasan perkotaan: mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal; meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan; serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.



5. Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.
6. Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi, industri non polutif dan pariwisata; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

2.7.2.3 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung

Penentuan arahan kebijakan 20 tahun ke depan dengan memperhatikan arah kebijakan kewilayahan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta regulasi dan kondisi terkini Kabupaten Bandung bahwa pusat-pusat pertumbuhan didorong melalui pengembangan kawasan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Penataan dan pembangunan sistem konektivitas, aksesibilitas serta jaminan sarana/prasarana mobilitas yang memadai terpadu dan terintegrasi regional serta nasional dengan pelayanan standar global meliputi sistem keandalan jalan/jembatan, angkutan massal, hub, logistik yang efisien dan efektif serta berkelanjutan;
2. Penataan dan pembangunan kawasan hunian/tempat tinggal yang layak dan inklusif mendukung pusat-pusat pertumbuhan;
3. Pengelolaan Kawasan-kawasan berbasis manajemen das mikro yang menjamin terselenggaranya keseimbangan pesatnya pertumbuhan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pengembangan wilayah Kabupaten Bandung didorong melalui pengembangan kawasan-kawasan yang secara operasional bersifat tematik diantaranya :

- a. Kawasan perkotaan dan perdesaan, dimana hampir 96% desa/kelurahan di Kabupaten Bandung masuk kepada kategori perkotaan, sehingga pelayanannya harus menyesuaikan;
- b. Kawasan Potensi Ekonomi, seperti kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan/klaster industri (besar, menengah dan kecil) dimana pada tahun 2021 terdapat 221.212 pekerja sektor pertanian, 624.265 pekerja sektor manufaktur dan 827.542 pekerja sektor jasa;
- c. Kawasan Strategis yaitu kawasan yang tertuang pada RTRW dan kawasan lindung; dan
- d. Kawasan Tertinggal dan Terluar terdiri dari kawasan kantong kemiskinan, kawasan kumuh dan kawasan terdepan/perbatasan.

Pengembangan **wilayah Kabupaten Bandung didorong** melalui pengembangan kawasan yang diarahkan dengan basis :

- Potensi nilai kultural, inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan menjadi pendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Kunci Keberhasilannya adalah pemetaan sumber daya manusia (infrastruktur sosial), sumber daya alam dan kekuatan regulasi.
- Kawasan Inklusif yang Mendukung Pusat Pertumbuhan. Pusat pertumbuhan yang dikembangkan harus mampu mengimbangi dampak kemungkinan adanya pengurusan sumber daya oleh pusat pertumbuhan yang dapat menyebabkan ketimpangan semakin lebar.
- keberlangsungan dan keberlanjutan “kehidupan” dimana daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bandung telah terlampaui, maka perlu perubahan kebiasaan penyelenggaraan



pemerintahan melalui implementasi turunan regulasi yang harus bersifat operasional dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Arah kebijakan kewilayahan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 dapat ditinjau pada ulasan sebagai berikut :

- Pembangunan dan pemeliharaan sistem penyediaan air baku serta air bersih/air minum perkotaan, perdesaan dan mandiri yang berkualitas berkelanjutan melalui pembangunan waduk, danau, dan reservoir, terutama Waduk Tegalluar, serta perlindungan mata air;
- Pembangunan sistem jaringan air limbah terpadu perkotaan/perdesaan terutama melalui pembangunan IPAL Regional Lagadar dengan pengelolaan yang terintegrasi dengan sistem SPAM terutama SPAM Regional Bandung Raya;
- Pengembangan desa dan kelurahan *zero waste* melalui pemberdayaan masyarakat menuju Desa dan kelurahan Mandiri Sampah yang terintegrasi dengan TPST Regional Legok Nangka;
- Penyediaan rumah/ tempat tinggal dan sarana/prasarana umum layak huni beserta hak atas lahan untuk semua dan inklusif terintegrasi kawasan, terutama melalui Kawasan Strategis Kawasan Terpadu Permukiman (KTP) Tegalluar;
- Pembangunan sistem pengendalian air limbah industri terpadu dan pengendalian IPAL industri yang telah ada, terutama pembangunan IPAL Industri Majalaya;
- Pengendalian kerusakan alam melalui pengurangan gas emisi rumah kaca dengan pemanfaatan teknologi dan kaidah kearifan lokal, terutama di Kawasan Strategis Bandung Selatan;
- Mempertahankan cakupan areal irigasi melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengendalian serta optimalisasi aset irigasi termasuk pembangunan embung-embung desa;
- Sosialisasi dan implementasi standar manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai tingkat mikro pada tingkat pengampu kampung/rukun warga;
- Pengembangan kawasan-kawasan melalui penataan dan pembangunan sistem konektivitas, aksesibilitas serta jaminan sarana/prasarana mobilitas yang memadai terpadu dan terintegrasi regional serta nasional dengan pelayanan standar global meliputi sistem keandalan jalan/jembatan, angkutan massal, hub/terminal/halte, sistem logistik yang efisien dan efektif serta berkelanjutan serta sarana dan prasarana pendukungnya, terutama pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, pembangunan PSN *double track* Jawa Selatan ruas Bandung-Cicalengka, reaktivasi rel kereta api Bandung-Ciwidey dan Bandung-Majalaya, LRT Bandung Raya (Bojongsong-Dayeuhkolot), dan BRT Bandung Raya.



Gambar 2.84 Pengembangan Kawasan Inklusif yang Mendukung Pusat Pertumbuhan



Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2024



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

3.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Rendahnya daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Bandung, berdasarkan kajian DDTLH Kabupaten Bandung tahun 2023, terdapatnya beberapa kecamatan yang memiliki keterbatasan atau belum melalui ketersediaan untuk pangan di bawah 20%, beberapa kecamatan meliputi Kecamatan arjasari 10,88%, Kecamatan Baleendah 18,92%, Kecamatan Banjaran 16,05%, Kecamatan Cikancung 14,66%, Kecamatan Cileunyi 19,26%, Kecamatan Dayeuhkolot 4,84%, Kecamatan Kutawaringin Timur 14,34%, Kecamatan Margahayu 0,45%, Kecamatan Nagreg 12,58% dan Kecamatan Soreang 15,25%. Selain itu, **Rendahnya daya dukung penyediaan air**, berdasarkan kajian DDTLH Kabupaten Bandung tahun 2023 di Kabupaten Bandung terdapat 63,7% lahan yang sudah tidak dapat mendukung penyediaan air di Kabupaten Bandung secara keseluruhan.

Berkurangnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung di tahun 2020 yaitu 3.623.790 Jiwa yang sebelumnya (2019) 3.775.279 Jiwa. Hal ini diakibatkan dari adanya Covid-19 yang menyebabkan adanya migrasi penduduk dari dan ke Kabupaten Bandung juga dapat memengaruhi jumlah penduduk secara keseluruhan. Jika banyak penduduk yang pindah keluar dari wilayah tersebut atau lebih sedikit penduduk yang pindah masuk, hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk.

3.1.2 ASPEK DAYA SAING EKONOMI DAN INVESTASI

Tantangan global, krisis ekonomi nasional, dan risiko bencana masih menjadi kendala pembangunan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu berdampak bukan hanya terhadap aspek kesehatan, melainkan juga aspek ekonomi akibat adanya pembatasan mobilitas untuk menurunkan laju penularan. Pelajaran penting dari peristiwa tersebut adalah negara harus selalu siap menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baik dari luar negeri, maupun dalam negeri yang menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi berantakan. Hal tersebut berlaku juga untuk berlaku penanganan bencana, meliputi: cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan garda terdepan atas penanggulangan bencana-bencana tersebut.

Kabupaten Bandung menduduki peringkat ke 6-12 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat berdasarkan indeks risiko bencana terendah sepanjang tahun 2015-2023. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian besarnya nilai indeks pada daerah perkotaan cenderung lebih rendah, sehingga besarnya nilai rata-rata indeks di seluruh kota/kabupaten lebih rendah dari pada nilai indeksnya untuk daerah ini. Besarnya indeks risiko kabupaten ini pada tahun 2015-2023 (174,00-132,00) lebih tinggi dari pada rata-ratanya di Jawa Barat (168,15-123,16). Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memerhatikan hal ini mengingat aspek geografis dari daerah ini yang cenderung rawan terhadap bencana.



Tingkat produktivitas tenaga kerja dan SDM masih tertinggal di tengah persaingan global juga menjadi masalah bagi kabupaten Bandung. PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas secara keseluruhan, dimana upah yang diperoleh tenaga kerja menjadi salah satu komponen didalamnya. Indikator ini juga mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu daerah, karena menggambarkan seberapa besar uang yang dapat dikeluarkan oleh masyarakat atau seberapa kuat daya belinya. Besarnya indikator ini yang diukur dengan harga konstan untuk kabupaten Bandung pada tahun 2017-2022 sebesar 19,97-23,78 juta rupiah. Perolehan ini lebih kecil daripada provinsi Jawa Barat sebesar 27,97-32,18 juta rupiah. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dengan perluasan lapangan kerja, berbagai hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan upah minimum regional (UMR) secara berimbang, dan lain sebagainya.

Adapun indeks daya saing daerah yang menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat bersaing dengan daerah lainnya setidaknya menjadi gambaran sejauhmana daerah tersebut berkontribusi terhadap kemampuan suatu negara bersaing dalam kancah internasional. Pada tahun 2022, nilai indeks ini untuk kabupaten Bandung sebesar 3,33. Perolehan ini lebih tinggi daripada ditingkat nasional (3,26), namun lebih rendah daripada di tingkat provinsi Jawa Barat (3,64). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks ini adalah dengan memerhatikan seluruh pilar penilaian. Pilar-pilar dari indeks ini terdiri dari dua belas pilar, yaitu: (i) institusi, (ii) infrastruktur, (iii) adopsi teknologi informasi dan komunikasi, (iv) kestabilan ekonomi makro, (v) kesehatan, (vi) keterampilan, (vii) pasar produk, (viii) pasar tenaga kerja, (ix) sistem keuangan, (x) ukuran pasar, (xi) dinamisme bisnis, serta (xii) kapabilitas inovasi. Terdapat empat pilar yang perolehan untuk Kabupaten Bandung berada di bawah nasional maupun provinsi, yaitu: pilar (iii), (vi), (viii), dan (ix). Seluruh pilar ini perlu diperhatikan supaya besarnya indeks ini dapat mengalami peningkatan yang lebih tinggi.

Internet, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)*, dan berbagai macam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai hasil dari kemajuan zaman tidak pernah terlepas dari **dampak negatif yang dihasilkan**. Berita *hoax*, ujaran kebencian, berbagai macam penipuan yang melibatkan kerugian finansial, akses terhadap pornografi, serta pergaulan bebas merupakan dampak yang dihasilkan olehnya. Pemerintah memang sudah berupaya untuk menangkal hal-hal tersebut. Akan tetapi, perlu ada kesadaran dari masyarakat. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan memajukan sistem pendidikan yang secara tidak langsung mengedukasi masyarakat mengenai berbagai macam jenis penipuan keuangan yang semakin menjamur akan menurunkan probabilitas mereka dan orang-orang disekitarnya menjadi korban penipuan. Adapun macam-macam penipuan tersebut, meliputi: (i) *phising*, (ii) *impersonation*, (iii) *vishing*, (iv) *smishing*, (v) *carding*, dan lain sebagainya. Sekalipun hanya terdapat segelintir orang yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka bukan hanya mampu menjaga dirinya dari dampak-dampak negatif tersebut, melainkan juga mengajak orang-orang disekitarnya untuk terhindar dari hal tersebut. Selain itu, keberadaan pendidikan moral menjadi penting, karena mencegah masyarakat untuk menjadi pelaku dari penipuan.

Keterbukaan informasi menyebabkan anak-anak yang berusia belum dewasa menjadi sebuah ancaman dan tantangan, karena mereka mendapatkan informasi yang bukan ditujukan untuk usia mereka, dimana hal tersebut dapat disikapi dengan salah atau berujung fatal. Selain itu, kehadiran *AI* memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai hal dan menyelesaikan persoalan. Walaupun demikian, paradoksnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan kognitif, karena terjadi penyalahgunaan, dimana alat yang seharusnya dipakai untuk membantu malahan membuat pemakainya menjadi malas untuk berpikir sederhana maupun secara kritis.

Upaya untuk penguatan ketahanan keluarga terhadap ekonomi dan pangan masih mengalami berbagai tantangan dan kendala. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah indikator-indikator yang menggambarkan hal ini. Kabupaten Bandung memiliki IKP sebesar 74,37-80,33 pada tahun 2018-2022. Nilai tersebut tergolong sangat baik atau dinilai sebagai kabupaten dengan ketahanan yang sangat memadai. Hal ini disebabkan, karena indeks dikelompokan dari 1-6, dimana



1 menggambarkan kota/kabupaten dengan ketahanan pangan yang paling rawan dan 6 berarti menunjukkan ketahanan pangan yang paling baik. Suatu kabupaten tergolong ke dalam kelompok ke-6, apabila nilai IKP lebih besar dari 75,68. Selain itu, daerah ini berada di kisaran peringkat ke-179 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi peringkat ke-126 pada tahun 2022 berdasarkan nilai IKP tertinggi dari 416 kabupaten yang berada di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, besaran IKP perlu terus ditingkatkan, supaya ketahanan pangan semakin terjamin dan mampu membantu daerah-daerah lainnya yang masih tergolong rawan. Selain itu, data menunjukkan bahwa kabupaten Bandung relatif mengalami peningkatan indeks ini lebih tinggi dari kabupaten lain-lainnya. Itulah sebabnya, potensi ini tidak boleh disia-siakan oleh Kabupaten Bandung.

Tantangan dan kendala yang dihadapi untuk menguatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan IKP dapat tercapai dengan memperhatikan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketiga aspek tersebut mengacu kepada sembilan poin *expert judgement*. Adapun poin-poin yang terdapat di dalamnya, dimana seluruhnya perlu ditingkatkan, yaitu: (i) rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari, (ii) persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan, (iii) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, (iv) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, (v) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (vi) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, (vii) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, (viii) prevalensi balita stunting, dan (ix) angka harapan hidup pada saat lahir.

Kabupaten Bandung perlu berupaya untuk menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Data pada tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa *PoU* untuk daerah ini (3,77%-8,30%) lebih tinggi daripada Jawa Barat (3,70%-6,75%), namun lebih rendah daripada di tingkat Nasional (7,63%-10,21%). Temuan ini menjadi sebuah paradoks, dimana daerah yang dinilai memiliki ketahanan pangan yang memadai atau jauh dari kondisi rawan ternyata secara bersamaan menyisakan beberapa penduduk dengan konsumsi pangan yang tidak mencukupi. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah **rendahnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan**. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan, dimana mula-mula sebesar 9,51% pada tahun 2010 menjadi 6,31% pada tahun 2022. Adapun rata-rata pertumbuhan produktivitas atau PDRB Riil dari sektor ini sepanjang tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,64%. Angka tersebut tergolong sangat rendah, karena dari tujuh belas sektor berdasarkan lapangan usaha, hanya dua sektor yang rata-rata tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari sektor tersebut, yaitu: administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (1,58%), serta pertambangan dan penggalian (0,64%). Meskipun tidak tergolong sebagai sebagai sektor basis, sektor ini harus dijaga pertumbuhannya, karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan bagi Kabupaten Bandung.

Daerah ini tetap memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menurunkan angka *PoU* dengan penurunan yang relatif lebih drastis dari daerah lainnya. Hal ini tergambar di dalam pemeringkatan *PoU* yang terendah di antara kota/kabupaten dalam provinsi Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa daerah ini berada di peringkat ke-22 pada tahun 2022 berubah menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2023. Penurunan peringkat diperkirakan terjadi karena pandemi COVID-19, dimana yang mulanya kabupaten ini berada pada peringkat ke-12 pada tahun 2019 menjadi peringkat ke-23 pada tahun 2020. Itu berarti, pada tahun 2020, kabupaten Bandung tergolong sebagai salah satu dari lima kota/kabupaten di Jawa Barat dengan *PoU* tertinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya ancaman serupa dengan pandemi yang datang secara tiba-tiba.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang masih lebar perlu menjadi perhatian di tengah hadirnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bandung. Salah satu indikator yang mengukur hal ini tepatnya adalah koefisien gini atau kesenjangan pendapatan. Data menunjukkan bahwa koefisien gini pada lima tahun terakhir ini (2018-2022) sebesar 0,355-0,418. Meskipun data menunjukkan bahwa kesenjangan relatif pada



beberapa tahun lebih tinggi di Jawa Barat (0,402-0,417), hal ini perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi dan setiap kemajuan yang di alami Kabupaten Bandung benar-benar berkeadilan.

Isu mengenai perubahan iklim dan kerusakan lingkungan bagi daerah ini juga perlu menjadi perhatian. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut, meliputi: kenaikan suhu global, terjadinya perubahan pola cuaca, ancaman bagi kesehatan manusia, terganggunya pertanian dan keamanan pangan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Seluruh dampak tersebut telah dirasakan oleh kabupaten Bandung setidaknya dalam dua puluh tahun terakhir ini. Rencana implementasi pajak karbon di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan berbagai macam emisi, khususnya yang berkaitan erat dengan gas rumah kaca. Keberadaan pajak karbon yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi membuat perusahaan mengubah teknik dalam proses produksi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah beralih kepada alat-alat produksi yang lebih ramah lingkungan atau menghasilkan intensitas emisi yang lebih kecil. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan di seluruh Indonesia mampu memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk di Kabupaten Bandung. Kondisi kualitas lingkungan yang semakin baik akan membuat *net zero emission* yang dirancang pada tahun 2060 dapat tercapai.

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Bandung adalah mengenai pengolahan sampah. Masyarakat harus mendapatkan lebih banyak sosialisasi dan edukasi untuk tidak membakar sampah dan melakukan pemilahan sampah yang dikelompokkan menjadi sampah B3, organik, dan anorganik. Pemerintah perlu menegakkan aturan mengenai larangan pembakaran sampah yang berdampak serius terhadap polusi udara, dimana hal tersebut telah diatur lebih lanjut di dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengolahan sampah.

Keterbatasan sarana dan literasi digital menjadi penghambat bagi kemajuan dalam berbagai bidang di Kabupaten Bandung, termasuk **rendahnya daya saing para pelaku usaha mikro dan industri kecil**. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya **kontribusi pelaku usaha skala ini serta koperasi terhadap penghasilan masyarakat dan ekonomi daerah**. Peningkatan sarana digital dapat tercapai dengan keterlibatan masyarakat dan anggaran yang optimal. Kemajuan dalam memahami literasi digital untuk kemajuan para pelaku usaha tercapai ketika empat pilar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Seluruh pilar tersebut, yaitu: etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi usaha mikro, industri kecil, dan operasi adalah inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi dinas-dinas yang terkait dan lembaga pendidikan maupun penelitian.

Kerjasama dengan kota atau kabupaten di luar dan dalam provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung sangatlah diperlukan, karena **terdapat keterkaitan aktivitas ekonomi antar wilayah/desa/kecamatan**. Hal tersebut juga perlu untuk terus dilakukan mengingat **sinergitas dan integrasi berbagai sektor ekonomi belum optimal**. Analisis *Location Quotient (LQ)* sepanjang tahun 2010-2022 menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang konsisten menjadi sektor basis, yaitu: (1) industri pengolahan; (2) real estate; (3) jasa perusahaan; (4) jasa pendidikan; serta (5) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kelima sektor ini juga diproyeksikan akan terjadi kenaikan persentase kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Dengan demikian, Pemkab Bandung perlu memastikan keberlangsungan perekonomian dari lima sektor lapangan usaha ini sekaligus meningkatkan ekspor ke kota dan kabupaten lain di Jawa Barat maupun yang berada di luar Jawa Barat.

Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam **bidang pariwisata**. Akan tetapi, bidang ini belum **dikembangkan potensinya, serta masih kurangnya pengelolaan destinasi wisata**. Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2017-2019 dan 2021-2022 sekitar 4-6.6 juta jiwa. Adapun tahun 2020 jumlahnya hanya sekitar 2 juta jiwa, karena adanya pandemi COVID-19 yang pembatasan mobilitasnya hingga berupa larangan ke tempat wisata pada saat jumlah kasus penyebaran sedang meningkat secara drastis. Berbagai upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata adalah memperbaiki akses jalan ke tempat wisata, pengadaan transportasi umum ke tempat wisata untuk meningkatkan volume wisatawan sekaligus menurunkan kemacetan ke tempat wisata, dan memberantas



adanya pungutan liar (pungli) di tempat wisata. Keberhasilan dari upaya yang dilakukan akan menyebabkan sektor pariwisata semakin maju. Kemajuan pada bidang ini tidak dapat dianggap remeh, karena sektor ini menyerap tenaga kerja relatif lebih banyak daripada sektor lainnya, sehingga mampu menekan tingkat pengangguran.

Lima objek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak yang kontribusinya hampir separuh dari total wisatawan keseluruhan di Kabupaten Bandung (46,60%) pada tahun 2019 dapat menjadi percontohan bagi objek-objek wisata lainnya. Adapun objek-objek wisata yang dimaksud beserta dengan kontribusinya terhadap jumlah wisatawan keseluruhan, yaitu: Kawah Putih di Rancabali (18,20%), Gunung Puntang di Cimaung (10,21%), Glamping di Rancabali (7,12%), Walini di Rancabali (6,46%), dan kawasan Gedung Budaya Sabilulungan di Soreang (4,61%). Adapun lima kecamatan dengan persentase jumlah wisatawan terbanyak yang kontribusinya hampir tiga per empat dari total wisatawan di daerah ini (73,05%) pada tahun 2019, yaitu: Rancabali (40,32%), Cimaung (11,14%), Soreang (8,00%), Cimenyan (7,22%), dan Rancaekek (6,36%).

Industri pengolahan di Kabupaten Bandung masih belum cukup berkembang, padahal berkontribusi terhadap separuh perekonomian daerah sepanjang tahun 2016-2023 (51,92%-53,67%). Hal ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan nilainya yang lebih kecil dari pada mayoritas sektor lapangan usaha yang ada. Padahal, industri ini tergolong sebagai sektor basis yang paling menguntungkan jika diekspor ke daerah lainnya, tercermin dari nilai indeks *LQ* untuk sektor ini. Setelah itu, lebih dari sepertiga tenaga kerja di daerah ini bekerja di industri pengolahan. Di sisi lain, dalam dua puluh tahun mendatang (2025-2045), sektor ini justru ditargetkan mengalami penurunan, karena emisi yang dihasilkan sektor ini relatif tinggi. Itu sebabnya, selain menaruh perhatian kepada peningkatan permintaan (sisi konsumen) pada produk-produk yang dihasilkan serta dalam sisi penawaran (kinerja produsen), Pemerintah perlu mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk menekan intensitas emisi yang dihasilkan. Hal tersebut dapat diupayakan dengan memberikan dukungan dan intensif supaya teknologi produksi yang ramah lingkungan dapat digunakan dan semakin massal. Dengan demikian, jumlah industri pengolahan tidak perlu ditekan menjadi terlalu rendah, sehingga menciptakan masalah baru berupa meningkatnya jumlah pengangguran.

Kinerja investasi di Kabupaten Bandung belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan jumlah penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) tidak maksimal. Selain itu, penyerapan tenaga kerja untuk penduduk kabupaten Bandung menjadi tidak maksimal. Data menunjukkan bahwa antara jumlah investasi dan proyek tidak berkorelasi secara kuat dengan penyerapan tenaga kerjanya. Di sisi lain, proses perizinan melalui DPMPSTP sudah mengalami kemajuan, dilihat dari peningkatan pada jumlah jenis izin dan yang terbit terus meningkat lebih dari lima tahun terakhir ini. Akan tetapi, performa investasi dapat ditingkatkan dengan menaruh perhatian pada infrastruktur pada investasi, baik secara fisik, maupun non fisik. Lalu, Pemerintah perlu mendorong kompetensi SDM para tenaga kerja, sehingga investasi penduduk daerah ini mampu bersaing dengan penduduk di daerah lainnya. Dengan demikian, kemajuan investasi lebih dirasakan oleh penduduk Kabupaten Bandung. Setelah itu, pertumbuhan investasi dapat ditingkatkan dengan adanya perencanaan yang lebih matang dan menyeluruh, meliputi sektor-sektor yang terlibat serta pemilihan lokasinya.

3.1.3 ASPEK DAYA SAING SDM

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bandung saat ini jika ditinjau dari tingkat rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 yaitu 9,10 atau setara lulusan SMP dan angka prevalensi *stunting* pada balita yaitu masih sebesar 25 persen (SSGI, tahun 2022). Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih di bawah target yang diharapkan yakni 12 tahun. Begitu juga dengan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung yang cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan pada tahun 2021-2022, namun masih perlu diupayakan untuk terus diturunkan. Hal ini masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung agar terwujud keberhasilan pembangunan daerah.



Kondisi kabupaten Bandung saat ini menunjukkan bahwa **kualitas sumber daya manusia belum memadai**. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Di sisi lain, nilai pada masing-masing indikator tersebut untuk kabupaten Bandung jauh lebih baik daripada keseluruhan kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat. Besarnya IPM untuk daerah ini pada tahun 2010-2023 (67,28-73,74) lebih besar dari pada Jawa Barat (66,15-73,74). Selain itu, RLS untuk daerah ini pada tahun 2010-2023 (7,98-9,10) lebih besar daripada Jawa Barat (7,40-8,83). Lebih-lebih, HLS untuk daerah ini pada tahun 2010-2023 (10,82-12,71) lebih besar daripada Jawa Barat (10,69-12,62). Akan tetapi, peningkatan nilai pada masing-masing indikator tersebut dari tahun ke tahun perlu dijaga untuk menunjang kemajuan bagi Kabupaten Bandung. Adapun pendidikan moral yang masih kurang juga perlu menjadi perhatian. Masalah ini dapat diatasi jika sistem pendidikan dan kurikulum mendukung hal tersebut.

3.1.4 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tingkat kemiskinan berhasil menurun, tetapi indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) masih fluktuatif cenderung meningkat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung menunjukkan tren penurunan dalam tujuh tahun terakhir (2017-2023), walaupun pada tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan sempat meningkat sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Namun dengan upaya pemulihan ekonomi, serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung, tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Akan tetapi di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) masih fluktuatif setiap tahunnya namun cenderung meningkat dalam tren enam tahun terakhir (2018-2023). Beberapa faktor penyebab hal ini bisa terjadi diantaranya karena inflasi dan kenaikan biaya hidup, ketidaksetaraan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi.

Akses layanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih belum inklusif. Akses masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan dan akses kesehatan belum sepenuhnya inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti terkait keterbatasan akses geografis dan kewilayahan, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Jika ditinjau dari bidang pendidikan, selama periode tahun 2018-2022, jumlah peserta didik SD/ sederajat pada periode tahun tersebut cenderung fluktuatif dan jumlah peserta didik SMP/ sederajat pada periode tahun tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tahun 2018 terdapat 191.225 siswa dan pada akhir tahun 2022 berjumlah 177.555 siswa. Jika ditinjau dari bidang kesehatan, layanan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat diindikasikan dengan belum idealnya rasio jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk. Jumlah Puskesmas tahun 2022 adalah sebanyak 62 buah (terdiri dari 57 puskesmas tanpa perawatan dan 5 puskesmas dengan perawatan (DTP)). Dengan jumlah penduduk 3.718.660 jiwa maka proporsi Puskesmas terhadap penduduk masih sebesar 1 : 59.978 jiwa atau 1,67 per 100.000 penduduk. Hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 1 : 30.000.

Pemberdayaan gender yang masih rendah. Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung untuk tahun 2018-2022 fluktuatif, namun cenderung menurun dan jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional nilai tersebut masih lebih rendah. Nilai indeks yang masih rendah tersebut menunjukkan bahwa walaupun perkembangan IPM Kabupaten Bandung cenderung merata pada tahun 2018-2022, namun hal tersebut belum tentu meningkatkan keberdayaan masyarakat, terutama tingkat keberdayaan perempuan.

Kondisi lingkungan yang belum mendukung kesejahteraan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada peran yang signifikan dari kondisi lingkungan. Persoalan lingkungan yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung yakni masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, dimana pada tahun 2023 baru mencakup 66,67% dan masih berada di bawah persentase Provinsi Jawa Barat (74,88%). Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pun nilainya belum optimal dan masih bisa ditingkatkan, dimana pada tahun 2023 masih sebesar 95,73%.



3.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik yang belum optimal dan prosedural birokrasi yang panjang, penerapan pelayanan publik yang belum optimal dengan Ketersediaan informasi tentang layanan publik yang disediakan, prosedur yang diperlukan, serta hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengakses dan memperoleh layanan tersebut, Kemampuan pemerintahan untuk merespon dan menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan solusi yang tepat waktu terhadap masalah yang dihadapi masih terbatas.

Belum Optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang optimal masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, komputer dan perangkat *mobile*, terbatasnya jumlah dan jenis aplikasi yang telah diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan belum optimalnya ketersediaan informasi publik, pembukaan data, dan mekanisme pelaporan atau pengaduan yang terintegrasi. Namun dengan meningkatnya tata kelola SPBE yang cukup signifikan diharapkan mampu meningkatkan Manajemen, kebijakan internal, perencanaan teknologi dan aspek informasi dapat memberikan stimulan dalam peningkatan SPBE di Kabupaten Bandung

Pengambilan Kebijakan dan program pembangunan belum sepenuhnya hasil kelitbangan, dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, minimnya analisis yang mendalam, kurangnya partisipasi *stakeholder* yang memadai, kurangnya data atau informasi yang akurat, serta adanya kendala dalam implementasi kebijakan. Diharapkan kelitbangan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3.2 ISU STRATEGIS SESUAI KONTEKS

3.2.1 ISU GLOBAL

Perubahan iklim, Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan saat ini suhu bumi sekitar 1,1°C lebih panas dibandingkan masa pra-industri (sekitar tahun 1800). Para ilmuwan menyatakan bahwa suhu pemanasan global tidak boleh melebihi 2°C. Jika kenaikan suhu bumi melebihi batas tersebut, diperkirakan akan terjadi perubahan iklim yang sangat dahsyat, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem di seluruh permukaan bumi. Berdasarkan Perjanjian Paris tahun 2015, 2°C ditetapkan sebagai batas atas suhu pemanasan global dan mengupayakan membatasi kenaikan hingga 1,5°C. Batas kenaikan suhu 1,5°C menjadi target atau tujuan yang ingin dicapai karena dapat mengurangi risiko dampak buruk perubahan iklim. Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi, perkembangan konflik di Kawasan Laut Cina Selatan menunjukkan dinamika menarik antara pihak yang bersengketa maupun pihak yang memiliki kepentingan tertentu di kawasan tersebut. Karena posisi strategis Laut China Selatan, maka banyak negara berkepentingan terhadap kawasan Laut China Selatan, termasuk Amerika Serikat, China dan Indonesia. Strategi *rebalancing policy* Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan perubahan nama komando menjadi US-INDOPACOM, China dengan klaim *nine dash-line* dan *Belt Road Initiative* (BRI) serta kepentingan ZEE Laut Natuna Utara Indonesia memunculkan ketegangan dan konflik di Kawasan Laut China Selatan. Dalam jangka panjang hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global.



Demografi global, menurut data *World Population prospect (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 Miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 Miliar jiwa pada tahun 2050. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat.

Disrupsi ekonomi, Presiden menjelaskan, ekonomi digital global tumbuh 2 kali lipat dari kurun 2000-2016 dan tumbuh 2,5 kali lipat dibandingkan pendapatan (PDB) dunia. Artinya, lanjut Presiden, peluang di sini besar, dengan asumsi diperkirakan di 2025 ekonomi digital akan mencapai USD23 triliun. Di Indonesia, perkembangan bisnis cukup baik dimana jika dilihat bahwa persaingan harga yang sangat kompetitif menunjukkan tingginya daya saing di Indonesia, sehingga banyak investor-investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Meskipun perkembangan bisnis di Indonesia cukup baik, namun seperti yang kita tahu disaat ini kita sedang berada di era 4.0, dimana semuanya berbasis teknologi dan internet. Hal ini membuat bisnis di Indonesia sempat terguncang karena kurangnya kesiapan terhadap arus globalisasi tersebut, meskipun jika dilihat dari perekonomian Indonesia secara fundamental tergolong masih aman. Namun perlu menjadi perhatian adanya disrupsi ekonomi dapat berimplikasi terhadap perekonomian nasional sampai dengan level daerah.

Perdagangan internasional, Kebijakan perdagangan internasional memiliki manfaat serta dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Salah satu contoh manfaat perdagangan internasional adalah meningkatkan GDP atau *Gross Domestic Product* suatu negara. Dengan adanya berbagai komoditas ekspor di Kabupaten Bandung tentunya, berbagai hal yang terjadi dalam perdagangan internasional akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk perekonomian Kabupaten Bandung, khususnya untuk sisi ekspor.

Urbanisasi dunia, Menurut data *World Population Prospects (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Bank Dunia (2019) memublikasikan hasil studi berjudul *Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban Potential* yang mengupas persoalan urbanisasi di Indonesia beserta sejumlah rekomendasi kebijakan. Tujuannya agar Indonesia mampu memaksimalkan potensi urbanisasi guna membuka kunci pendorong pertumbuhan Nasional yang lebih tinggi di masa depan, bercermin pada keberhasilan strategi penataan urbanisasi di Negara-Negara berkembang di Asia (China, Thailand, dan Vietnam).

3.2.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Fungsi DKI Jakarta sebagai Ibu Negara sekaligus penyangga ekonomi Indonesia, dengan hilangnya sekitar 90 persen dari total keseluruhan belanja pemerintahan pusat di DKI Jakarta, serta adanya keterkaitan DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat seperti ekonomi akan memiliki dampak menurunnya PDRB sebesar 0,06%, serta upah nyata sektor pertanian turun sebesar 0,49%, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat.

Bonus demografi Indonesia, pada rentang tahun 2025-2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan puncak peningkatan usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun di



tahun 2045. proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia kedepannya. Selain itu Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Saat ini pemerintah Indonesia tengah memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan dalam skala nasional maupun global. Salah satu upayanya dengan mengantisipasi perubahan iklim melalui penandatanganan *Paris Agreement* sebagai bentuk keterlibatan dalam komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim. Adanya ekonomi hijau atau *green economy* sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka panjang untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19*, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada ekonomi hijau, Indonesia memiliki fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan, dengan ditopang oleh 6 (enam) sumber energi terbarukan yaitu gelombang laut, panas bumi, bioenergi, air, angin dan panas matahari. Sementara itu, ekonomi biru dilandasi oleh potensi laut negara kepulauan Indonesia, sehingga perlu pelestarian sumber daya laut yang akan berdampak pada cadangan sumber pangan yang berkelanjutan.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Keterbatasan terhadap akses angkutan umum perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Selain itu, permasalahan terkait keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air menyebabkan keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti. Selain itu baru sebagian kecil rumah tangga mendapat akses terhadap pengelolaan sanitasi aman, pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari kakus, (*blackwater*), non kakus (*greywater*), ataupun lumpur tinja.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah, Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan

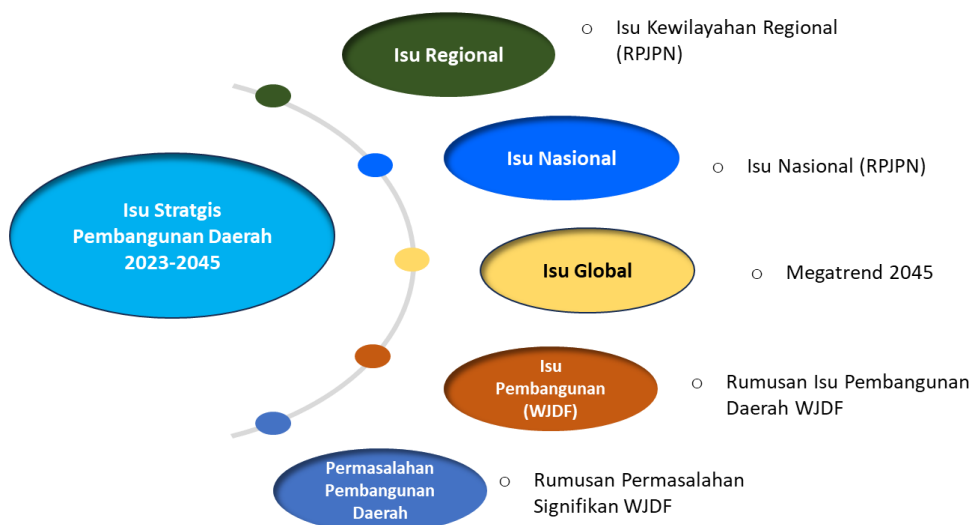


kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Selain itu tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Jawa semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat dan ruang untuk mengekspresikan aspirasi dan ide masyarakat perlu terus dibuka.

3.2.3 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT

Perumusan Isu strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 ditinjau dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan Isu Global (*Megatrend 2045*), Isu Kewilayahan Regional (RPJPN), Isu Nasional (RPJPN), Isu Pembangunan (*WJDF/World Jabar Development Forum*) dan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat dapat ditinjau pada **Gambar 3.1** dan meliputi beberapa isu:

Gambar 3.1 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah tahun 2025-2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat 2024, (diolah)

1. *Green dan blue economy* serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk



dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

5. Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.



3.2.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karna dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lainnya yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis Kabupaten Bandung untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berasal dari permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini dan berbagai isu yang terjadi di Kabupaten Bandung, serta sumber isu yang muncul dari berbagai kajian perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah tahun 2023-2043 dan Kajian Lingkungan Hidup RPJPD 2025-2045. Selain itu, sumber lain perumusan isu strategis juga berasal dari lingkungan eksternal seperti, masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain. Selain itu, tinjauan terhadap isu secara vertikal dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap Isu Global, Isu Nasional dan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis dalam pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung mencakup beberapa aspek kritis yang perlu diantisipasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang. Pengendalian pembangunan harus dioptimalkan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan, menghindari alih fungsi lahan pertanian produktif, dan mengurangi risiko bencana alam serta gangguan hulu DAS. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu difokuskan pada layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, sistem perlindungan sosial terintegrasi, dan pendidikan vokasi yang selaras antar wilayah. Adapun pengembangan kawasan pusat pertumbuhan perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik berbasis elektronik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular harus diarahkan pada pengembangan kawasan pinggiran PKN dengan menjaga fungsi lindung kawasan, pembangunan hunian vertikal, dan peningkatan kondisi lingkungan.

Gambar 3.2 Tahapan Penentuan Isu Strategis Kabupaten Bandung



Sumber : Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024



1. SDM yang berakhlak dan berkualitas

SDM yang berakhlak dan berkualitas merujuk pada Sumber Daya Manusia yang tidak hanya memiliki kualifikasi dan keahlian yang memadai, tetapi juga memiliki integritas moral, etika kerja yang tinggi, serta komitmen untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya SDM yang berakhlak dan berkualitas akan menjadi aset berharga bagi setiap organisasi atau komunitas (Kabupaten Bandung), karena mereka tidak hanya membawa kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang kuat yang dapat membantu membangun lingkungan kerja dan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif

Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif mengacu pada sistem pengelolaan pemerintahan yang mampu mengubah paradigma, proses, dan praktik pemerintahan secara menyeluruh untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih inklusif bagi masyarakat. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan sosial yang inklusif. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

3. Riset dan inovasi yang berkualitas

Riset dan inovasi yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menciptakan kemajuan dan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang teknologi, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, Riset dan inovasi yang berkualitas memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi tantangan global yang kompleks. Oleh karena itu, investasi yang tepat dalam riset dan inovasi sangat penting untuk memastikan terciptanya solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

4. Infrastruktur dasar yang inklusif

Infrastruktur dasar yang inklusif mencakup berbagai aspek infrastruktur yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Selain itu, Infrastruktur dasar yang inklusif merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, infrastruktur ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata.

5. Pengembangan Kewilayahan Berkelanjutan

Pengembangan kewilayahan berkelanjutan merujuk pada upaya untuk mengembangkan wilayah secara holistik dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini melibatkan integrasi kebijakan dan praktik yang mendukung pertumbuhan yang seimbang, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan kewilayahan berkelanjutan dapat membantu menciptakan wilayah yang lebih seimbang, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung, keberlanjutan iklim, berdaya saing, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup bagi semua lapisan masyarakat.

6. Perekonomian yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan

Perekonomian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan adalah konsep yang menggambarkan sebuah sistem ekonomi yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, menciptakan peluang bagi partisipasi aktif dari berbagai sektor, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, sebuah wilayah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan alam untuk generasi yang akan datang.



7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara inklusif

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan, perkotaan, serta kelompok rentan seperti kaum miskin, anak-anak, lanjut usia, difabel, dan minoritas.



BAB 4

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Selanjutnya, **Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan**. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh diberbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas nasional yang meliputi supremasi hukum, keamanan nasional, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi untuk situasi dalam negeri yang kondusif, serta diplomasi tangguh untuk memperkuat peran di kancah internasional. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sementara keamanan nasional yang kuat melindungi negara dan menciptakan lingkungan aman. Demokrasi substansial menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, sedangkan stabilitas ekonomi, yang meliputi fiskal, moneter, dan sektor keuangan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor keuangan yang kuat mendukung akses masyarakat dan usaha kecil menengah terhadap layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apabila keempat aspek ini stabil, maka negara akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Fondasi yang kuat perlu dilengkapi dengan diplomasi yang tangguh agar Indonesia mampu bersaing di dunia internasional yang sangat kompetitif. Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang strategis meliputi diplomasi ekonomi, kedaulatan, kepemimpinan, perlindungan, dan publik. Diplomasi ini dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dengan modalitas diplomasi dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan

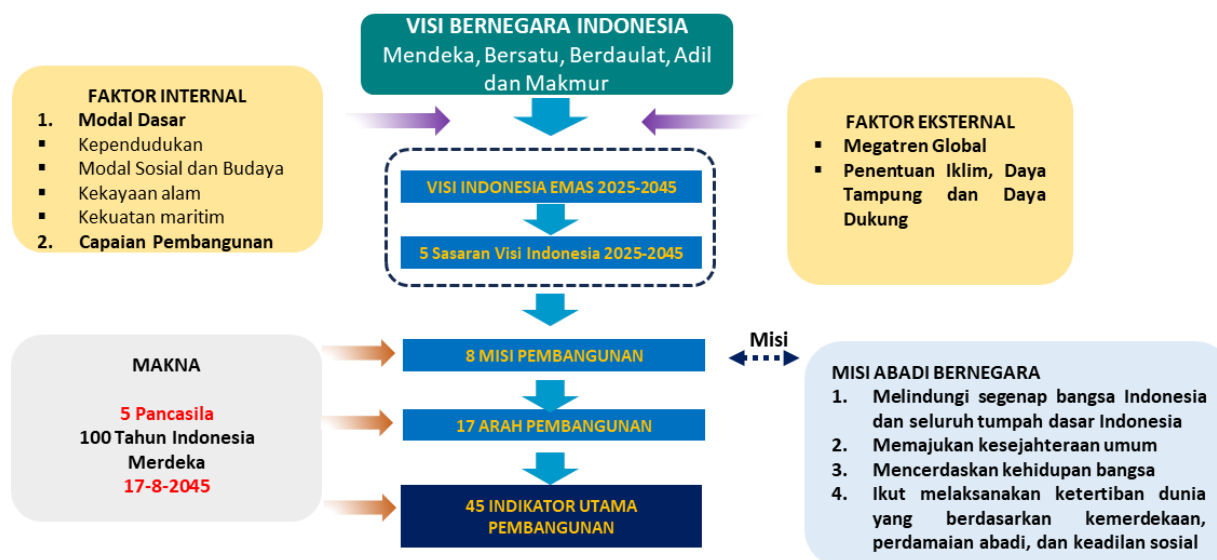


Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2 (dua) misi (agenda) yang tercakup dalam kelompok kedua, yaitu landasan transformasi andal.

Selanjutnya dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2 (dua) misi (agenda) yang tercakup dalam kelompok kedua, yaitu landasan transformasi. Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung dengan sarana-prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan. Lebih jelasnya dapat ditinjau pada **Gambar 4.1** berikut.

Gambar 4.1 Kerangka Pikir RPJPN Strategi (17 Agustus 1945) Berlandaskan Pancasila



Sumber: RPJPN 2025-2045, 2024 (diolah)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Kekuatan geopolitik: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif, serta menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Kekuatan militer: Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar.



Kekuatan geoekonomi: Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Kekuatan peradaban maritim: Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, yang meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan dan dunia internasional.

Gambar 4.2 Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RUU Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045

Berdaulat

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Ketahanan: Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.

Kesatuan: Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain; karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.



Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Maju

Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik dari segi ekonomi, sosial politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.

Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.2 Visi Jawa Barat 2045

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan keberlanjutan dari Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025: “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Visi Tahun 2005-2025 berorientasi maju pada lingkup Indonesia, sedangkan Visi Tahun 2025-2045 akan berorientasi pada tingkat dunia.



Gambar 4.3 Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, 2024 (diolah)

I Termaju

Termaju merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran sebagai pusat *cutting-edge industry*, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penumpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern.

Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah, serta infrastruktur yang berkualitas dan modern.

II Berdaya Saing Dunia

Berdaya Saing Dunia merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerja sama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi dan mengelola teknologi lebih efisien, efektif, dan inovatif, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

III Berkelanjutan

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan **berkelanjutan**, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara, dan sampah), menerapkan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekosistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif, ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Hijau dan Biru yang tinggi, serta menurunnya emisi gas rumah kaca.

Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas kehidupan yang tinggi.

Pada tahun 2045, Provinsi Jawa Barat memiliki visi untuk menjadi daerah yang TERMAJU, BERDAYA SAING DUNIA DAN BERKELANJUTAN. Visi ini merupakan gambaran konkret yang dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang visioner dan inovatif, memiliki tekad dan kerja keras, serta kolaborasi antara akademisi, swasta, masyarakat dan pemerintah.

Adapun sasaran visi Jawa Barat, yaitu:

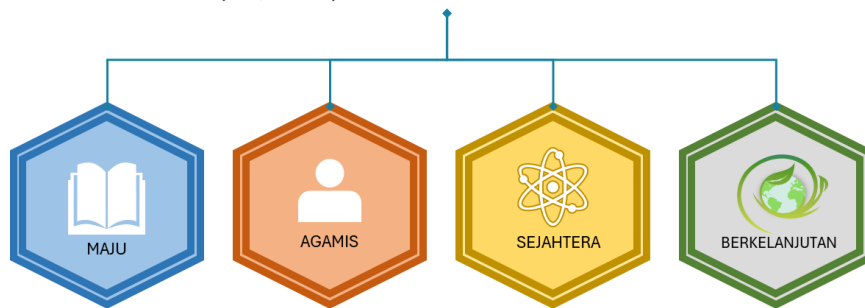
1. Pendapatan per kapita;
2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun;
3. Kepemimpinan daerah di dunia internasional;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

4.1.3 Visi Kabupaten Bandung

Visi pemerintah Kabupaten Bandung merupakan pandangan jangka panjang yang diinginkan oleh pemerintah untuk mencapai kondisi atau keadaan tertentu dimasa depan (2045). Hal ini mencakup aspirasi, tujuan besar dan arah strategis yang diinginkan pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengarahkan arah pembangunan. Dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan, visi ini juga mencerminkan harapan untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan masyarakat dan arah kebijakan yang merupakan terjemahan dari nasional dan provinsi. Hasil perumusan Visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.4 Visi Kabupaten Bandung tahun 2045
KABUPATEN BANDUNG
MAJU, AGAMIS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN



Sumber: Hasil Perumusan Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Pada tahun 2045, Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi Kabupaten yang maju dan berkelas, serta mampu bersaing dengan kab/kota lain di Jawa Barat maupun di Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten Bandung kedepannya diharapkan dapat menjadi contoh dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, pelayanan publik yang efisien dan inovatif, serta kualitas hidup masyarakat yang tinggi.

Visi ini mencerminkan tekad Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, serta ekonomi. Oleh karena itu, pada tahun 2045 Kabupaten Bandung mampu menjadi pembeda dan mampu memberikan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan menjadikan tempat tinggal yang diminati masyarakat Kabupaten Bandung khususnya, maupun Jawa Barat umumnya.

Visi Kabupaten Bandung dijabarkan ke dalam muatan-muatan sebagai berikut:

MAJU

Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta Infrastruktur terintegrasi, tata Kelola pemerintahan yang inovatif dan masyarakat madani

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang mampu menempatkan dirinya sejajar dan sederajat dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki dan kemampuan daya saing sebagai kunci untuk mencapai kemajuan, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, merasakan manfaat pembangunan, dan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan sumber daya yang tersedia.

AGAMIS

Kabupaten Bandung yang beriman dan bertakwa, serta menekankan pada nilai dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan lingkungan yang mempromosikan spiritualitas, moralitas dan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam interaksi sosial dimasyarakat.



SEJAHTERA

Kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi wilayah yang dapat menyejahterakan masyarakat secara holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh masyarakatnya, serta mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati taraf hidup yang layak, merasa aman dan memiliki kesempatan yang adil dalam mengembangkan potensi di masyarakat. Kabupaten Bandung perlu meningkatkan kolaborasi dengan wilayah lain yang direspon dengan hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif

BERKELANJUTAN

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Bandung bertekad untuk membangun infrastruktur dan melakukan aktivitas pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Gambar 4.5 Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Kabupaten Bandung tahun 2045



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Pada tahun 2045, Kabupaten Bandung mempunyai visi yang jelas untuk menjadi daerah yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan. Pada prinsipnya visi ini tidak hanya sebagai cita-cita, namun akan diwujudkan dengan upaya partisipasi aktif dari berbagai stakeholder yang berada di Kabupaten Bandung mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan asosiasi lainnya. Ketercapaian visi Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan akan ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi, yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Per kapita;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
3. Peningkatan Kerja sama antar Daerah;



4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
5. Penurunan Emisi GRK menuju *net zero emission*.

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita (ADHK) (Juta/Kapita)	44,56-44,92	74,99-127,07
		-	-	-
		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)/(Persen)	52,66	51,72
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	5,61-6,2	0,09-0,57*
		Rasio Gini (Indeks)	0,339-0.346*	0.317-0,34*
		Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung terhadap Provinsi (%)	5,83	5,86
		**Pertumbuhan ekonomi (%)	4,93-5,43	5,04-6,24
3	Peningkatan Kerja sama antar Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,56	4,25
		Indeks Inovasi Daerah	62,42	93,61
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia	75,23	85,84
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	**Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	2,50*	6,54*
		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,73	68,67

Sumber: Hasil Perumusan Bapperida Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

*Perubahan nilai target

**penambahan indikator baru yang diturunkan dari provinsi



Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Sasaran Visi RPJPN Tahun 2045

RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KAB/KOTA 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan Perkapita meningkat	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita (ADHK) (Juta/Kapita)	44,56-44,92	74,99-127,07
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19**	186,06		-	-	-
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87-42,00**	46,43 - 47,60		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	52,66	51,72
Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85-6,46**	0,09 - 0,59**	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)	5,61-6,2	0,09-0,57*
	b. Rasio gini (Indeks)	0,383 - ,390**	0,357 - 0,380		Rasio Gini (Indeks)	0,339-0,346*	0,317-0,34*
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72**	10,77		Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung terhadap Provinsi (%)	5,83	5,86
	Pertumbuhan Ekonomi	4,96-5,37**	5,07-6,27**		**Pertumbuhan ekonomi (%)	4,93-5,43	5,04-6,24
Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)*	3,87	5,00	Peningkatan Kerja sama antar Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,56	4,25
					Indeks Inovasi Daerah	62,42	93,61
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72**	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia	75,23	85,84
Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	2,50*	6,54*
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06**	72,08**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,73	68,67

Sumber: Rancangan Akhir RPJP Provinsi Jawa Barat 2025-2045, 2024 (diolah) dan Hasil olahan Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

*Perubahan nilai target

**penambahan indikator baru yang diturunkan dari Provinsi Jawa Barat



4.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dalam rangka membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 (empat) tahap pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

4.2.1 Misi Indonesia Emas 2045

Perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, melalui Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, upaya tersebut diwujudkan dalam penjabaran misi Indonesia yang termuat dalam 8 (delapan) agenda pembangunan. Adapun kedelapan agenda pembangunan tersebut tersaji secara rinci pada uraian di bawah ini:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang disajikan pada **Gambar 4.6**.



Gambar 4.6 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045, 2024 (diolah)

4.2.2 Misi Provinsi Jawa Barat

Pada dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Jawa Barat yang Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan dilandasi oleh 8 (delapan) misi yaitu:

1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dilakukan untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang menggabungkan aspek moralitas dan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki karakter, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perluasan akses dan perbaikan pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

2 Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Upaya ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi yang lebih memberikan nilai tambah melalui Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3 Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, memperkuat ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan



pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.

4 Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Mewujudkan provinsi yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.

5 Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan ditujukan untuk membentuk masyarakat inklusif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender, Lingkungan Hidup Berkualitas, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

6 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah mencakup pengembangan jalan, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

7 Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup pengembangan perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan secara terpadu.

8 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pembangunan per tahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Keselarasan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan misi RPJP-Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana digambarkan pada **Gambar 4.7**.



Gambar 4.7 Penyeragaman Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPN Tahun 2045



Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Di samping itu, nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagaimana masyarakatnya dikenal lembut, periang, sopan, religius, dan menghormati orang tua juga patut menjadi landasan. Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat tampak sebagaimana dalam ungkapan silih asih, silih asah dan silih asuh. Artinya saling mengasahi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu), dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan).

Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan dapat diwujudkan. Dengan demikian, perwujudan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

4.2.3 Misi Pembangunan Kabupaten Bandung

Mendasar pada penjelasan Visi Kabupaten Bandung sebelumnya, perlunya rumusan umum yang akan menjadi panduan dan arah strategis yang berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan. Rumusan umum tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung untuk tahun 2045. Misi Kabupaten Bandung memiliki keselarasan dengan arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 maupun dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat. Karena itu, misi Kabupaten Bandung untuk mewujudkan Kabupaten yang **Maju, Agamis, Sejahtera** dan **Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas

Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan berkualitas memiliki makna penting dalam beberapa peranan pembangunan. Frasa ini mengandung beberapa makna penting:

Unggul: sumber daya yang “Unggul” merujuk pada individu yang memiliki keterampilan yang sangat baik dan tingkat kompetensi yang tinggi dalam bidangnya, memiliki kemampuan untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan, mencari peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, memiliki kemampuan



kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, sehingga tetap relevan dan efektif.

Berakhlak: sumber daya yang “Berakhlak” merujuk pada individu yang memiliki integritas, bersikap jujur, adil, dan menghormati hak dan martabat orang lain, serta tidak hanya memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi, tetapi juga mendasarkan tindakan dan perilakunya pada nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Bekualitas: Sumber daya yang “Bekualitas” merujuk pada individu yang inovatif dan kreatif, memiliki fokus pada pencapaian hasil dan mencapai tujuan, memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri.

Selain itu dalam perwujudan misi tersebut adanya peran masyarakat Kabupaten Bandung yang sejahtera ekonomi, sosial dan psikologis sangat berperan penting dengan turut memperhatikan kebutuhan dan hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnisitas, agama, atau latar belakang lainnya.

2

Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal

Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing merupakan upaya untuk membangun ekonomi yang mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal secara optimal, dan bersaing secara sehat di pasar nasional dan global. Transformasi ekonomi ini bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, dalam proses pembangunan ekonomi, serta transformasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang memiliki daya saing tinggi di berbagai tingkatan dengan memanfaatkan potensi keunggulan dan komparatif yang dimiliki daerah, seperti sumber daya alam, budaya lokal dan keunggulan kompetitif lainnya.

3

Transformasi tata kelola

Transformasi Tata Kelola pemerintahan yang transformatif bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mampu untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan cara yang membawa perubahan positif dan transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan teknologi, inovatif, inklusifitas dan responsif. Teknologi bermakna memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat proses administratif, memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas. Namun, juga penting untuk memastikan akses yang setara terhadap teknologi agar tidak meninggalkan sebagian masyarakat. Responsif bermakna pemerintah yang mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan, aspirasi, serta perubahan dalam masyarakat. Inovatif bermakna pemerintah yang mampu menerapkan gagasan-gagasan baru, teknologi, dan pendekatan yang kreatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inklusifitas bermakna pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya dapat merasakan manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah.



4

Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah

Mewujudkan kabupaten yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam membuka layanan informasi secara terbuka kepada publik baik dari kebijakan, maupun tata kelola pemerintahan, menjaga kondusifitas daerah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mampu mengendalikan ekonomi daerah, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dipercaya oleh masyarakat dengan kemampuan pengambilan kebijakan yang cerdas dan responsif.

5

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter merupakan upaya untuk membentuk masyarakat tidak hanya memiliki kesejahteraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat dan mencerminkan karakteristik masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Upaya Kabupaten Bandung dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu yang berintegritas, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama, serta memperkuat kekayaan budaya sebagai aset penting dalam pembangunan lokal. Selain itu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai budaya dan karakteristik positif, serta melibatkan pembentukan komunitas yang berbasis pada nilai-nilai tersebut melalui pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat keterampilan sosial dan kepemimpinan dalam masyarakat.

6

Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata

Mewujudkan pengembangan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata merupakan upaya Kabupaten Bandung dalam memastikan masyarakat memiliki akses yang setara ke layanan publik meliputi pendidikan, kesehatan dan transportasi. Termasuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai di pedesaan dan perkotaan melalui peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas publik bagi semua masyarakat. Selain itu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kecamatan di Kabupaten Bandung dengan memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, serta mengalokasikan sumber daya yang merata untuk mendukung pembangunan.

7

Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif

Meningkatkan infrastruktur yang inklusif merupakan upaya Kabupaten Bandung untuk dapat memastikan bahwa infrastruktur dasar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk daerah yang terpencil dan terpinggirkan. Hal ini mencakup pembangunan jembatan, jalan dan transportasi umum yang mudah diakses, serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang merata, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.



8

Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan merupakan upaya Kabupaten Bandung untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam yang ada, termasuk hutan, air, tanah dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan regulasi yang ketat terhadap eksploitasi yang tidak berkelanjutan, promosi praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, selain itu perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan berbasis tata ruang yang efisien, cermat dan berkesinambungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar pertahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Hal tersebut melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, permukiman dan perindustrian yang berfokus pada pembangunan yang rendah karbon dan berwawasan lingkungan.



BAB 5

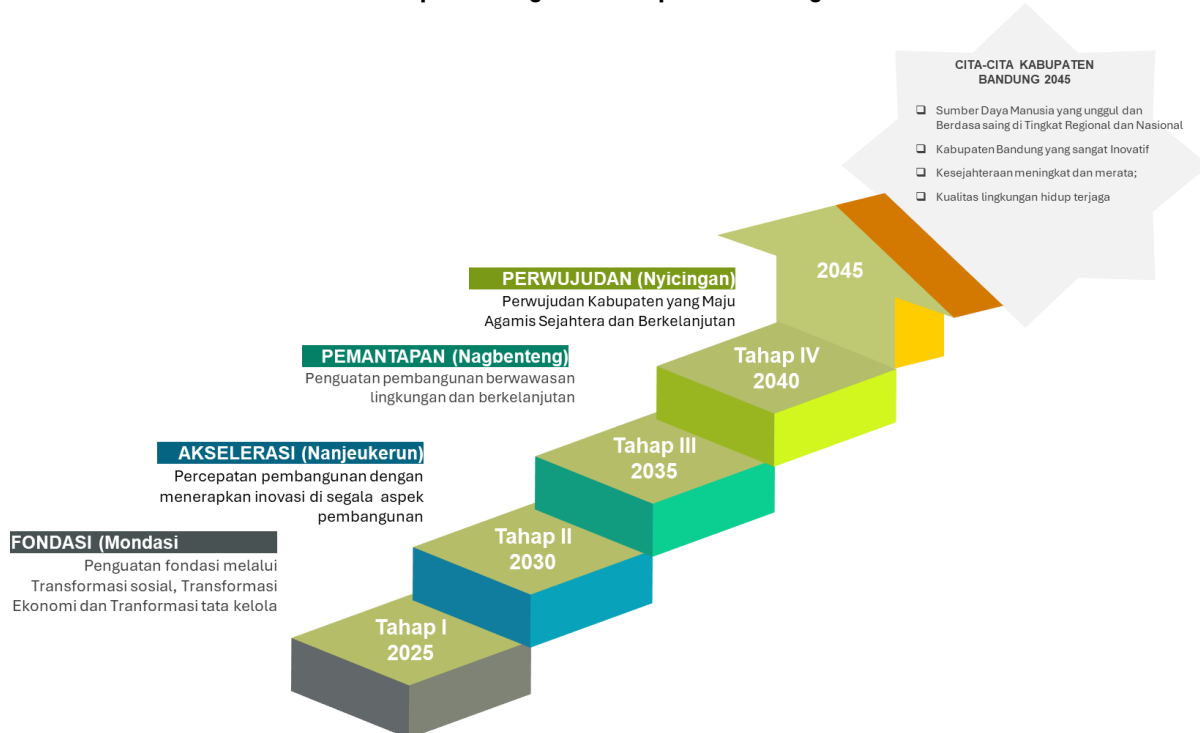
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk *diferensial* dari visi misi pembangunan dua puluh tahunan pembangunan di Kabupaten Bandung. Proses pelaksanaan arah kebijakan pembangunan 20 tahunan ini dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan prioritas, kemampuan pembiayaan, serta kondisi riil pembangunan di Kabupaten Bandung saat ini. Adapun pentahapan kebijakan pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bandung terbagi menjadi 4 tahap pembangunan. Tiap tahapan pembangunan Kabupaten Bandung ini mempunyai target dan tema sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga prosesnya seperti anak tangga dimana tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan jika, tahapan sebelumnya sudah dapat dilaksanakan. Adapun tema tiap tahapan jika mengambil filosofi masyarakat sunda dalam membangun rumah meliputi: tahapan 1 merupakan tahapan pembangunan pondasi (Dasar/Mondasi), tahapan 2 yaitu tahapan akselerasi pembangunan (Nanjeurkeun), tahap 3 yaitu tahapan pemantapan (Ngabenteng) dan akhirnya tahap 4 merupakan tahapan perwujudan (Nyicingan) Visi Misi pembangunan Kabupaten Bandung. Adapun pentahapan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1 Tahap Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024



Proses pentahapan pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJPD selama 20 (dua puluh) tahun adalah sebagai berikut:

TAHAP PERTAMA

FONDASI (MONDASI)

Tahap fondasi dalam pembangunan merupakan landasan arah bagi seluruh kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung dimasa mendatang, diharapkan dengan memperhatikan secara cermat dan fokus, pembangunan ini dapat lebih terarah, efektif dan berkelanjutan. Upaya penguatan fondasi dalam pembangunan meliputi:

1. Pemenuhan akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan;
2. Pembangunan perekonomian daerah yang inklusif;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif;
4. Peningkatan masyarakat yang kondusif, kelembagaan dan pemenuhan stabilitas ekonomi;
5. Pengembangan budaya lokal dan peningkatan masyarakat yang berkarakter;
6. Peningkatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Pemerataan infrastruktur dasar yang inklusif; dan
8. Peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan.

TAHAP KEDUA

AKSELERASI (NANJERKEUN)

Tahap akselerasi dalam pembangunan merupakan arahan pembangunan untuk mengkomodir sektor-sektor yang mendorong pembangunan melalui percepatan, pada tahap ini berbagai inovasi dan inisiatif, serta strategi pembangunan dirancangkan untuk diimplementasikan secara lebih intensif untuk memastikan percepatan hasil yang diinginkan. Upaya akselerasi dalam pembangunan Kabupaten Bandung dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi:

1. Peningkatan sumber daya masyarakat unggul dan berakhlak;
2. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Peningkatan fungsi tata kelola yang transparan dan berintegritas;
4. Peningkatan masyarakat yang kondusif, peningkatan kelembagaan dan peningkatan stabilitas ekonomi;
5. Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Penguatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Akselerasi infrastruktur dasar yang inklusif; dan
8. Penguatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan

TAHAP KETIGA

PEMANTAPAN (NGABENTENG)

Tahap pemantapan (ngabenteng) dalam pembangunan merupakan arahan pembangunan untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan hasil yang dicapai pada tahap sebelumnya, serta memastikan bahwa semua pencapaian dan kemajuan yang telah dibuat dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Upaya pemantapan dalam pembangunan Kabupaten Bandung dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi:

1. Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak;
2. Penguatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif;
4. Penguatan masyarakat yang kondusif, kelembagaan dan stabilitas ekonomi daerah;
5. Penguatan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Optimalisasi pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif; dan
8. Penguatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan.



TAHAP KEEMPAT

PERWUJUDAN (NYICINGAN)

Tahap perwujudan (nyicingan) dalam pembangunan merupakan tahapan paling krusial dikarenakan pada tahap ini strategi dan rencana yang telah dirancang menjadi kenyataan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Upaya pemantapan dalam pembangunan Kabupaten Bandung dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi:

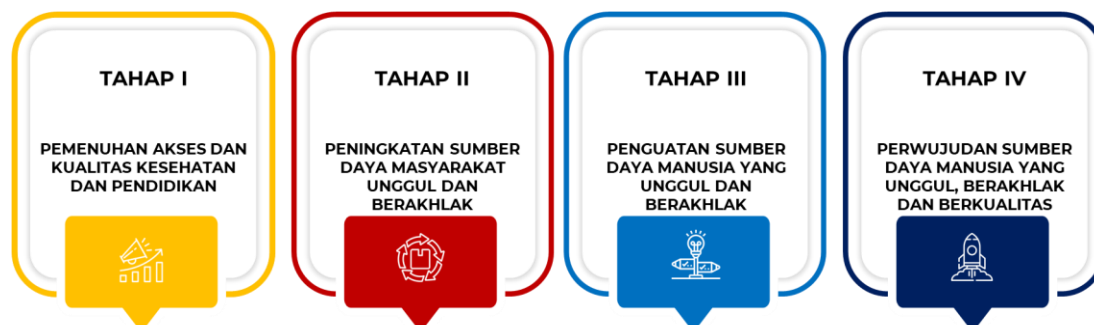
1. Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas;
2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif
4. Perwujudan kabupaten kondusif, lembaga yang bersih dan stabilitas ekonomi yang terjaga;
5. Perwujudan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Perwujudan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Perwujudan infrastruktur dasar yang inklusif; dan
8. Perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan

Mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung 20 (dua puluh) tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahapan, maka arahan umum kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan berkualitas

Untuk mewujudkan misi meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.2 Tahapan misi 1 meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ Tahap I : Pemenuhan akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan;

Pemenuhan akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan melalui : 1) Pemerataan wajib belajar 13 tahun; 2) peningkatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 3) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana; 4) Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak; 5) Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.6) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 7) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan; 8) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif; 9) Pengembangan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional; 10) Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan



sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 11) Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 12) Peningkatan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan; 13) Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 14) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 15) Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 16) Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja; 17) Pengembangan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu; dan 18) Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola).

❖ **Tahap 2 : Peningkatan sumber daya manusia unggul dan berakhlak**

Peningkatan sumberdaya manusia unggul dan berakhlak melalui: 1) Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun; 2) Peningkatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 3) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana; 4) Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak; 5) Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor; 6) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 7) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah terluar dan perbatasan; 8) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif; 9) Pengembangan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional; 10) Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 11) Perluasan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 12) Peningkatan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kompetensi tenaga medis serta tenaga kesehatan; 13) Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 14) Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 15) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 16) Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan tenaga kerja terampil; 17) Pengembangan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu; dan 18) Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola).

❖ **Tahap 3 : Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak**

Penguatan sumberdaya manusia yang unggul dan berakhlak melalui: 1) Pemantapan wajib belajar 13 tahun; 2) Penguatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana; 4) Pemerataan dan peningkatan wajib belajar pendidikan menengah inklusif



melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak; 5) Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.6) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 7) Pemerataan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan; 8) Penguatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif; 9) Peningkatan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional; 10) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan; 11) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; 12) Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan; 13) Pemanfaatan Teknologi untuk mendukung upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 14) Penguatan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 15) Peningkatan dan penguatan gizi ibu hamil dan anak balita. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 16) Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja terampil; 17) Penguatan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu; dan 18) Pengembangan sistem pangan daerah berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

❖ **Tahap 4: Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas**

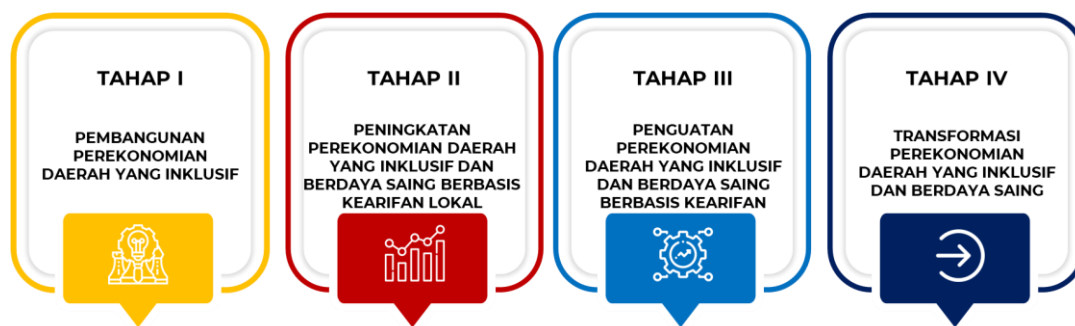
Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas melalui: 1) Perwujudan wajib belajar 13 tahun; 2) Penerapan Manajemen Talenta dan prestasi peserta didik; 3) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana; 4) Peningkatan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak; 5) Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor;6) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas; 7) Pemerataan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan; 8) Penguatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif; 9) Pemantapan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional; 10) Penguatan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 11) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 12) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan untuk mewujudkan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif; 13) Perwujudan Keluarga yang hidup bersih dan sehat; 14) Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dalam rangka perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit; 15) Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima; 16) Perwujudan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing global; 17) Perwujudan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan terpadu; dan 17) Kabupaten Bandung tahan pangan yang aman, beragam, bergizi dan harga terjangkau.

2. Misi 2: Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal

Untuk mewujudkan misi transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal diperlukan penahapan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Tahapan misi 2 transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal



Sumber: Hasil analisis bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ **Tahap 1 : Pembangunan Perekonomian daerah yang inklusif.**

Pembangunan perekonomian daerah yang inklusif melalui: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; 2) Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan Perikanan; 3) Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian; 4) Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan; 5) Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat; 6) Penataan Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam; 7) Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung; 8) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 9) Penataan dan restrukturisasi BUMD; 10) pengembangan, Pembangunan Industri kecil menengah dan Sentra Industri; 11) Peningkatan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategis; 12) Transisi Industri Kecil, Menengah Berbasis Ramah Lingkungan; 13) Hilirisasi Produk Pertanian; 14) Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal; 15) Pengembangan Sistem logistik produk strategis; 16) Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Industri Hijau; 17) Pemenuhan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam; 18) Pengembangan sentra industri strategis; 19) Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan; 20) Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif; dan 21) Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal; dan 22) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Halal serta Pariwisata Halal

❖ **Tahap 2 : Peningkatan Perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal.**

Peningkatan Perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal melalui: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; 2) Pengembangan kluster pertanian dan perikanan; 3) Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian; 4) Pengembangan industri berbasis sektor pertanian atau perikanan; 5) Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat; 6) Terintegrasinya Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan alam; 7) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung; 8) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha melalui modernisasi koperasi; 9) Peningkatan produktivitas BUMD; 10) Pengembangan, Pembangunan Industri kecil menengah dan Sentra Industri; 11) Pengembangan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategis; 12) "Transisi Industri kecil, menengah



Berbasis Ramah Lingkungan"; 13) Peningkatan hilirisasi produk strategis pertanian; 14) Peningkatan sistem industri yang berdaya saing; 15) Peningkatan Sistem logistik produk strategis; 16) Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Industri Hijau; 17) Pengembangan kawasan strategis pariwisata; 18) Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi; 19) Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital; 20) Optimalisasi penerapan riset dan inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal; dan 21) akselerasi investasi berbasis ekonomi hijau, ekonomi produktif lokal (pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta energi baru dan terbarukan); dan 22) Penerapan serta Penguatan Kebijakan dan Regulasi Halal

Tahap 3 : Penguatan Perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal

Penguatan Perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal, melalui: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; 2) Pengembangan kluster pertanian dan perikanan berketahanan iklim; 3) Pengembangan korporasi petani berbasis potensi lokal; 4) Pengembangan Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan; 5) Penguatan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat; 6) Terimplementasinya Sumber daya pariwisata berbasis budaya dan alam; 7) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung; 8) Peningkatan skema kerja sama regional pada UMKM; 9) Pengembangan bisnis BUMD; 10) Penguatan kualitas sektor industri yang berkelanjutan; 11) Penguatan Sarana Perdagangan dan Sistem logistik produk strategis menuju pasar global; 12) Pengembangan Industri Kecil, menengah berbasis Industri Hijau; 13) Peningkatan daya saing pertanian; 14) Penguatan kualitas sektor industri yang berkelanjutan; 15) Penguatan Sistem logistik produk strategis berorientasi pasar global; 16) Pengembangan industri kecil, menengah berbasis industri hijau; 17) Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan; 18) Pengembangan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi; 19) Pengembangan inovasi dan kewirausahaan; 20) Penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal; 21) Pemantapan integrasi ekonomi daerah dan konektivitas terhadap ekonomi nasional dan global.; dan 22) Penguatan Infrastruktur dan Keuangan Industri dan Pariwisata Halal

❖ Tahap 4 : Transformasi Perekonomian Daerah yang inklusif dan berdaya Saing

Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Perwujudan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim; 2) Perwujudan kluster pertanian dan perikanan berkelanjutan dan terintegrasi; 3) Pengembangan korporasi petani; 4) Perwujudan industri pertanian atau perikanan berkelanjutan; 5) Perwujudan Masyarakat Digital; 6) Perwujudan pariwisata yang kelas dunia (bertaraf Internasional); 7) Perwujudan Pusat riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung; 8) Terwujudnya UMKM yang mandiri dan maju; 9) Perluasan bisnis BUMD; 10) Pengembangan daya saing industri; 11) Perwujudan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategi berorientasi Pasar Global; 12) Perwujudan Industri Kecil, Menengah Berbasis Industri Hijau yang Berkelanjutan; 13) Pemantapan daya saing pertanian; 14) Pengembangan daya saing industri; 15) Perwujudan sistem logistik produk strategi berorientasi pasar global; 16) Perwujudan industri kecil, menengah berbasis industri hijau yang berkelanjutan; 17) Pengembangan pariwisata berkelanjutan; 18) Perwujudan sentra strategis industri; 19) Pengembangan ekonomi inklusif dan pengintegrasian rantai pasok pemasaran produk usaha; 20) Pemantapan riset dan inovasi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing; dan 21) Kabupaten Bandung sebagai wilayah



investasi hijau, ekonomi produktif lokal (pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta energi baru dan terbarukan).; dan 22) Penguatan Halal Brand and Awareness

3. Misi 3: Transformasi tata kelola

Untuk mewujudkan misi transformasi tata kelola diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.4 Tahapan misi 3 transformasi tata kelola



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ Tahap 1: **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif**

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif melalui: 1) Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan; 2) Optimalisasi tata kelola satu data; 3) Penguatan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi; 4) Penataan kelembagaan, regulasi dan penyederhanaan regulasi di daerah berdasarkan riset dan inovasi; 5) Penataan kelembagaan, regulasi dan penyederhanaan regulasi di daerah berdasarkan riset dan inovasi; 6) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; dan 7) Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif.

❖ Tahap 2: **Peningkatan fungsi kelembagaan yang transparan dan berintegritas**

Peningkatan fungsi kelembagaan yang transparan dan berintegritas melalui: 1) Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk penguatan aspek pemerintahan digital dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat; 2) Akselerasi tata kelola satu data; 3) Penguatan sinergi dan kolaborasi riset dan inovasi; 4) Peningkatan kualitas kelembagaan, regulasi, dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi; 5) Perluasan kerja sama antar daerah dan multipihak dalam pengelolaan wilayah; 6) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; 7) Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif.

❖ Tahap 3: **Penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif**

Penguatan Tata Kelola pemerintahan yang inovatif melalui: 1) Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik; 2) Pemantapan tata kelola satu data; 3) Pemantapan ekosistem riset dan inovasi; 4) Pemantapan kelembagaan, regulasi, dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi; 5) Penguatan kerja sama antar daerah dan multipihak dalam pengelolaan wilayah; 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi; dan 7) Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif.



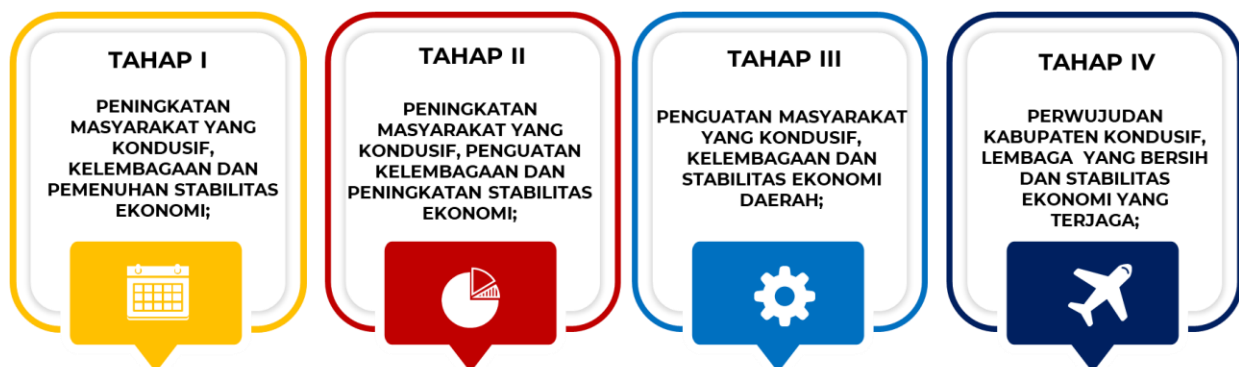
❖ Tahap 4: **Peningkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif**

Peningkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif melalui: 1) Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital yang berkualitas dan inklusif; 2) Perwujudan tata kelola satu data; 3) Pemantapan pembangunan berbasis Riset dan Inovasi; 4) Penerapan kelembagaan, regulasi, dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi; 5) Penguatan kerja sama antar daerah dan multipihak dalam pengelolaan wilayah; 6) Perwujudan ASN yang berkualitas yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045; dan 7) Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif.

4. Misi 4: Mewujudkan kabupaten yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah

Untuk mewujudkan misi Mewujudkan kabupaten yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.5 Tahapan misi 4 Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ Tahap 1 : **Peningkatan Masyarakat Yang Kondusif, Kelembagaan Dan Pemenuhan Stabilitas Ekonomi;**

Peningkatan kelembagaan yang bersih dan transparan melalui: 1) Peningkatan komitmen multipihak dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa; 2) Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi; 3) Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; 4) Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP; 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dan 6) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

❖ Tahap 2 : **Peningkatan Masyarakat Yang Kondusif, Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan Stabilitas Ekonomi;**

Penguatan kelembagaan yang bersih dan Transparan melalui: 1) Percepatan implementasi kebijakan yang tegas dan konkret dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Penguatan pendidikan politik yang inklusif; 3) Optimalisasi keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; 4) Penguatan pengendalian pembangunan daerah melalui akselerasi implementasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP; 5) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; dan 6) Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan



yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

❖ **Tahap 3 : Penguatan Masyarakat Yang Kondusif, Kelembagaan Dan Stabilitas Ekonomi Daerah;**

Penguatan Kelembagaan Kabupaten Bandung yang bersih, transparan dan akuntabel meliputi: 1) Penguatan kelembagaan dan pranata yang berdasarkan norma persatuan dan kesatuan bangsa; 2) Penguatan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa; 3) Pemantapan Penguatan Integritas Partai Politik; 4) Pemantapan pengendalian pembangunan daerah melalui implementasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP; 5) Pemantapan kehidupan demokrasi yang sehat; 6) Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

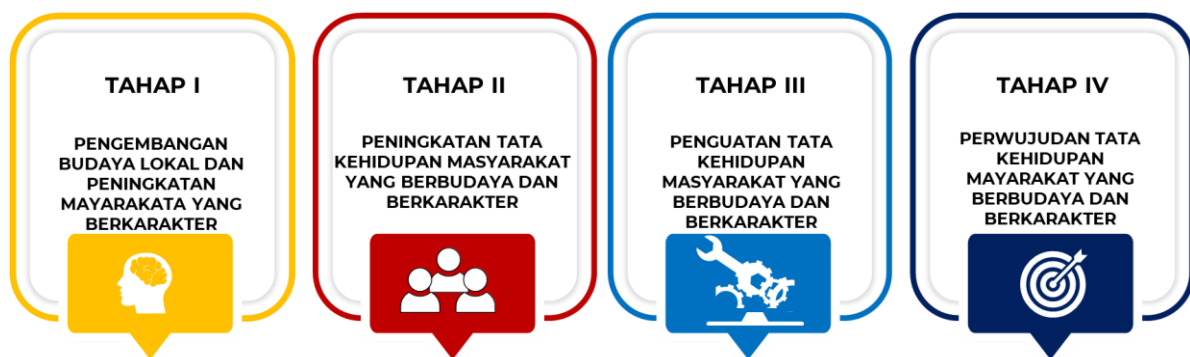
❖ **Tahap 4 : Perwujudan Kabupaten Kondusif, Lembaga yang Bersih dan Stabilitas Ekonomi Yang Terjaga;**

Perwujudan kabupaten yang bersih, transparan dan akuntabel meliputi: 1) Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, mantap dan dinamis; 2) Penguatan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa; 3) Terwujudnya keamanan dan ketertiban hukum dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan tujuan pembangunan Nasional; 4) Perwujudan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP; 5) Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat; dan 6) Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

5. Misi 5: Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter

Untuk mewujudkan Misi meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.6 Tahapan misi 5 meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ **Tahap 1 : Pengembangan budaya lokal dan peningkatan masyarakat yang berkarakter**

Pengembangan budaya lokal dan peningkatan masyarakat yang berkarakter meliputi: 1) Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga; 2) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; 3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia; dan Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.



❖ Tahap 2 : **Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter**

Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter meliputi: 1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2) Penguatan karakter dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat; 3) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; dan 4) Penguatan karakter dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat.

❖ Tahap 3 : **Penguatan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter**

Penguatan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter meliputi: 1) Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang; 2) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; 3) Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial; dan 4) Pelestarian kebudayaan lokal dan revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat

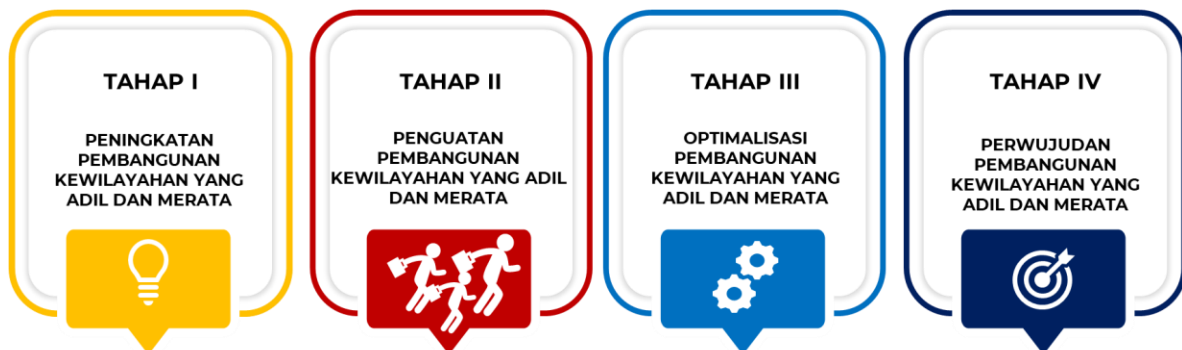
❖ Tahap 4 : **Perwujudan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter**

Perwujudan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter meliputi: 1) Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tenteram, dan mandiri; 2) Perwujudan kerukunan antar etnis, agama dan golongan; 3) Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial; dan 4) Pemajuan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi kebudayaan lokal

6. Misi 6: Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata

Untuk mewujudkan misi mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.7 Tahapan misi 6 mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ Tahap 1 : **Peningkatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata**

Peningkatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, melalui: 1) pengembangan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal); 2) pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung; 3) pengembangan kawasan transit/ TOD (*Transit Oriented Development*); 4) pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten; 5) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 6) pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal; 7) pengelolaan sumber daya



kawasan strategis pertanian yang terintegrasi; dan 8) pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kawasan strategis pertanian dan sentra produksi pangan untuk mendukung kemandirian pangan.

❖ **Tahap 2 : Penguatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata**

Penguatan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, melalui: 1) pengembangan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal); 2) pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung; 3) pembangunan dan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan dan/atau rel yang terintegrasi, untuk peningkatan konektivitas dan mobilitas orang maupun barang antar pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Bandung serta dari/ke wilayah di luar Kabupaten Bandung; 4) peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten; 5) peningkatan dan perluasan akses internet; 6) percepatan Pusat-Pusat Pertumbuhan berbasis kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal; 7) pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi ; dan 8) pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kawasan strategis pertanian dan sentral produksi pangan untuk mendukung kemandirian pangan.

❖ **Tahap 3 : Optimalisasi Pembangunan kewilayahan yang adil dan merata**

Optimalisasi Pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, melalui: 1) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal); 2) peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung; 3) pemantapan Pembangunan dan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan dan/atau rel yang terintegrasi, melalui Pengembangan tatanan transportasi yang cerdas (*Intelligence Transport System/ ITS*), untuk peningkatan konektivitas dan mobilitas orang maupun barang antar pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Bandung serta dari/ke wilayah di luar Kabupaten Bandung; 4) pemantapan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten; 5) perluasan jaringan *broadband* hingga menjangkau pelosok; 6) percepatan pusat-pusat pertumbuhan berbasis kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal; 7) pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi; dan 8) pengembangan kawasan strategis produksi pertanian dan sentra produksi pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

❖ **Tahap 4 : Perwujudan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata**

Perwujudan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata, melalui: 1) perwujudan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal); 2) pemerataan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung; 3) perwujudan sistem transportasi Kabupaten Bandung yang berkelanjutan (*sustainable transportation*); 4) perwujudan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten; 5) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 6) perwujudan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan,

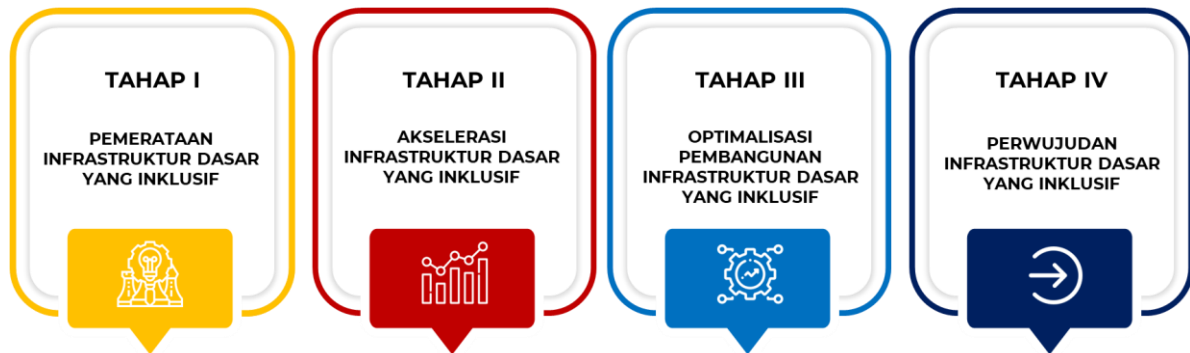


kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal; 7) perwujudan kawasan strategis pertanian; dan 8) Penguatan kemandirian pangan.

7. Misi 7: Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif

Untuk mewujudkan Misi Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.8 Tahapan misi 7 meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ Tahap 1 : **Pemerataan infrastruktur dasar yang inklusif**

Pemerataan infrastruktur dasar yang inklusif, melalui: 1) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 2) peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung; 3) pengembangan dan Penerapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal; 4) pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; 5) penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh; 6) pengembangan infrastruktur air baku dan air minum; 7) peningkatan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi; dan 8) pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan *circular economy*.

❖ Tahap 2 : **Akselerasi infrastruktur dasar yang inklusif**

Akselerasi infrastruktur dasar yang inklusif, melalui: 1) akselerasi dan perluasan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 2) akselerasi pembangunan dan pengelolaan jalan kendaraan tidak bermotor dan jalan kendaraan bermotor beserta bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan, untuk percepatan pencapaian jalan yang berkeselamatan; 3) penerapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal; 4) peningkatan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

Percepatan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh; 5) pengembangan infrastruktur air baku dan air minum; 7) pemantapan Pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi; dan 8) Akselerasi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan *circular economy*.

❖ Tahap 3 : **Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif**

Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, melalui: 1) pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 2) pemantapan pembangunan dan pengelolaan jalan kendaraan tidak bermotor dan jalan kendaraan bermotor beserta bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan, untuk percepatan pencapaian jalan yang berkeselamatan,



serta pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan melalui pengembangan tatanan transportasi cerdas (*Intelligence Transport System/ ITS*) ; 3) Integrasi seluruh angkutan umum ke dalam transportasi umum massal; 4) pemerataan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; 5) pemantapan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh; 6) pemantapan infrastruktur air baku dan akses air minum layak; 7) optimalisasi Pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi; dan 8) pemantapan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan *circular economy*.

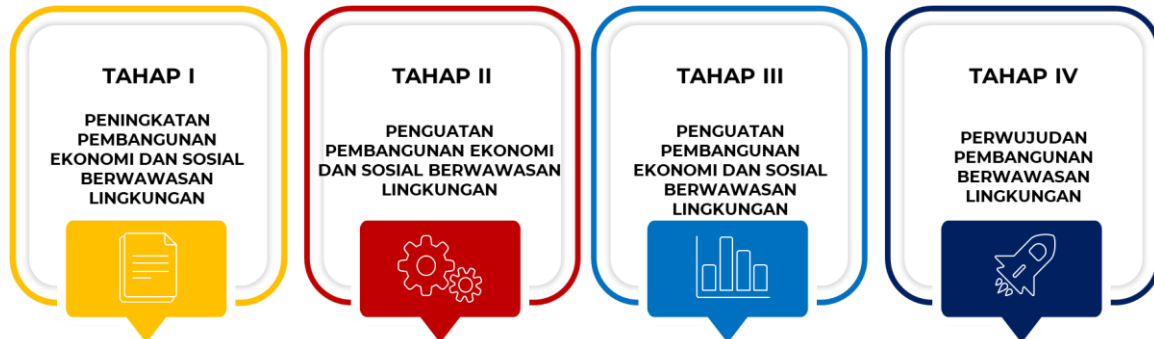
❖ Tahap 4 : **Perwujudan infrastruktur dasar yang inklusif**

Perwujudan infrastruktur dasar yang inklusif, melalui: 1) perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 2) perwujudan jalan di wilayah Kabupaten Bandung yang berkeselamatan, lancar, aman, nyaman menghubungkan antar pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung; 3) perwujudan seluruh angkutan umum ke dalam transportasi umum massal; 4) perwujudan akses sanitasi aman secara menyeluruh; 5) perwujudan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh; 6) pemerataan akses air minum yang aman dan infrastruktur air baku; 7) perwujudan Pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi; dan 7) perwujudan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan *circular economy*.

8. Misi 8: Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan penahapan sebagai berikut:

Gambar 5.9 Tahapan misi 8 meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

❖ Tahap 1 : **Peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan**

Peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan, melalui: 1) pengembangan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal; 2) pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi; 3) Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim; 4) sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah; 5) pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; 6) pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik; 7) pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif; 8) Pengembangan ketahanan bencana alam dan non alam; 9) Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal; 10) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &



rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; 11) percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; 12) perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 13) penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro.

❖ **Tahap 2 : Penguatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan**

Penguatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan, melalui: 1) percepatan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal; 2) percepatan pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi; 3) pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim; 4) sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah; 5) akselerasi pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; 6) percepatan pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik; 7) akselerasi pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif; 8) peningkatan ketahanan bencana alam dan non alam; 9) pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal; 10) percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; 11) keberlanjutan 0 % praktik buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; 12) Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung; dan 13) Peningkatan pengelolaan wilayah berbasis DAS mikro.

❖ **Tahap 3 : Penguatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan**

Penguatan pembangunan ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan, melalui: 1) percepatan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal; 2) pemantapan Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi; 3) pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim; 4) sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah; 5) perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; 6) pemantapan pengelolaan limbah non-domestik; 7) akselerasi pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif; 8) pemantapan ketahanan bencana alam dan non alam; 9) pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal; 10) pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; 11) keberlanjutan 0 % praktik buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; 12) Pemajuan karakter dan jati diri bangsa dalam pembangunan yang memperhatikan pengarusutamaan gender yang inklusif, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten; dan 13) Pemantapan pengelolaan berbasis DAS mikro.

❖ **Tahap 4 : Perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan**

Perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan, melalui: 1) perwujudan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan; 2) perwujudan Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi; 3) perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang yang berkelanjutan; 4) Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah; 5) Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; 6) Perwujudan pengelolaan limbah non-domestik sesuai standar baku mutu; 7) perwujudan pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif; 8) Pemerataan



ketahanan bencana alam dan non alam; 9) perwujudan RTH publik dan privat yang ideal; 10) perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; 11) keberlanjutan 0 % praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; 12) perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 13) perwujudan pembangunan berkelanjutan berbasis DAS mikro.

Selain itu untuk meninjau kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung secara terperinci termuat pada **Tabel 5.1** berikut:



Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Maju, Agamis Sejahtera dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas	Pemerataan wajib belajar 13 tahun	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun	Pemantapan wajib belajar 13 tahun	Perwujudan wajib belajar 13 tahun
		Peningkatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Peningkatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penerapan Manajemen Talenta dan prestasi peserta didik
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana
		Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak	Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak	Pemerataan dan peningkatan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak	Peningkatan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak
		Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.	Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.	Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.	Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
		Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan	Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan	Pemerataan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan	Pemerataan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif	Penguatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif	Penguatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Pengembangan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional	Pengembangan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional	Peningkatan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional	Pemantapan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional
		Peningkatan Budaya Literasi	Peningkatan Budaya Literasi masyarakat	Perkuatan budaya literasi masyarakat	Perwujudan budaya literasi masyarakat
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Penguatan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Perluasan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok marginal dan rentan
		Peningkatan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan.	Peningkatan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kompetensi tenaga medis serta tenaga kesehatan.	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan universal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan untuk mewujudkan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif.
		Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Pemanfaatan Teknologi untuk mendukung upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Perwujudan Keluarga yang hidup bersih dan sehat



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Penguatan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dalam rangka perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit.
		Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Peningkatan dan penguatan gizi ibu hamil dan anak balita. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima.
		Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja	Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan tenaga kerja terampil	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja terampil	Perwujudan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing global
		Pengembangan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu	Pengembangan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu	Penguatan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu	Perwujudan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu
		Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola)	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola)	Pengembangan sistem pangan daerah berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Kabupaten Bandung tahan pangan yang aman, beragam, bergizi dan harga terjangkau
	2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan.	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan.	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan.	Perwujudan pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.
		Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan Perikanan	Pengembangan kluster pertanian dan perikanan	Pengembangan kluster pertanian dan perikanan berketahanan iklim	Perwujudan kluster pertanian dan perikanan berkelanjutan dan terintegrasi
		Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan korporasi petani berbasis potensi lokal	Pengembangan korporasi petani
		Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan	Pengembangan Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan	Pengembangan Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan	Perwujudan industri pertanian atau perikanan berkelanjutan



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat	Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat	Penguatan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat	Perwujudan Masyarakat Digital
		Penataan Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam	Terintegrasinya Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam	Terimplementasinya Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam	Perwujudan pariwisata yang kelas dunia (bertaraf Internasional)
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung	Perwujudan Pusat riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha melalui modernisasi koperasi	Peningkatan skema kerja sama regional pada UMKM	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan maju
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pengembangan bisnis BUMD.	Perluasan bisnis BUMD.
		Hilirisasi Produk Pertanian	Peningkatan hilirisasi produk strategis pertanian	Peningkatan daya saing pertanian	Pemantapan daya saing pertanian
		Pengembangan, Pembangunan Industri kecil menengah dan Sentra Industri	Pengembangan, Pembangunan Industri kecil menengah dan Sentra Industri	Penguatan kualitas sektor industri yang berkelanjutan	Pengembangan daya saing industri
		Peningkatan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategid	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategis	Penguatan Sarana Perdagangan dan Sistem logistik produk strategis menuju pasar global	Perwujudan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategi berorientasi Pasar Global
		Transisi Industri Kecil, Menengah Berbasis Ramah Lingkungan	Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Ramah Lingkungan	Pengembangan Industri Kecil, menengah berbasis Industri Hijau	Perwujudan Industri Kecil, Menengah Berbasis Industri Hijau yang Berkelanjutan
		Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal	Peningkatan sistem industri yang berdaya saing	Penguatan kualitas sektor industri yang berkelanjutan	Pengembangan daya saing industri
		Pengembangan Sistem logistik produk strategis	Peningkatan Sistem logistik produk strategis	Penguatan Sistem logistik produk strategis berorientasi pasar global	Perwujudan sistem logistik produk strategi berorientasi pasar global



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Industri Hijau	Transisi Industri kecil, menengah Berbasis Industri Hijau	Pengembangan Industri Kecil, menengah berbasis Industri Hijau	Perwujudan Industri Kecil, Menengah Berbasis Industri Hijau yang Berkelanjutan
		Pemenuhan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Pengembangan kawasan strategis pariwisata	Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pengembangan pariwisata berkelanjutan
		Pengembangan sentra industri strategis	Pengembangan industri jasa bernilai tambah tinggi	Pengembangan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi	Perwujudan sentra strategis industri
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan	Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital	Pengembangan inovasi dan kewirausahaan	Pengembangan ekonomi inklusif dan pengintegrasian rantai pasok pemasaran produk usaha
		Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif	Optimalisasi penerapan riset dan inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	Penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	Pemantapan riset dan inovasi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing
		Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal	akselerasi investasi berbasis ekonomi hijau, ekonomi produktif lokal (pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta energi baru dan terbarukan)	Pemantapan integrasi ekonomi daerah dan konektivitas terhadap ekonomi nasional dan global	Kabupaten Bandung sebagai wilayah investasi hijau, ekonomi produktif lokal (pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta energi baru dan terbarukan)
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Halal serta Pariwisata Halal	Penerapan serta Penguatan Kebijakan dan Regulasi Halal	Penguatan Infrastruktur dan Keuangan Industri dan Pariwisata Halal	Penguatan Halal Brand and Awareness
	3. Transformasi tata kelola	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk penguatan aspek pemerintahan digital dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik.	Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital yang berkualitas dan inklusif.
		Optimalisasi tata kelola satu data	Akselerasi tata kelola satu data	Pemantapan tata kelola satu data	Perwujudan tata kelola satu data
		Penguatan Kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi	Penguatan sinergi dan kolaborasi riset dan inovasi	Pemantapan ekosistem riset dan inovasi	Pemantapan Pembangunan berbasis Riset dan Inovasi



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Penataan kelembagaan, regulasi dan penyederhanaan regulasi di daerah berdasarkan riset dan inovasi	Peningkatan kualitas kelembagaan, regulasi, dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi	Pemantapan kelembagaan, regulasi, dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi	Penerapan kelembagaan, regulasi, dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi
		Peningkatan kerja sama antar daerah dan multi pihak dalam pengelolaan wilayah	Perluasan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pengelolaan wilayah	Penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pengelolaan wilayah
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	Perwujudan ASN yang berkualitas yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045
		Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif	Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif	Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif	Pengembangan pembiayaan dan pendanaan pembangunan inovatif
	4. Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan komitmen multipihak dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa	Percepatan implementasi kebijakan yang tegas dan konkrit dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Penguatan kelembagaan dan pranata yang berakar norma persatuan dan kesatuan bangsa	Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, mantap dan dinamis
		Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	Penguatan pendidikan politik yang inklusif	Penguatan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa	Penguatan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa
		Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Optimalisasi keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pemantapan Penguatan Integritas Partai Politik	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Hukum dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Tujuan Pembangunan Nasional
		Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP	Penguatan pengendalian pembangunan daerah melalui Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP	Pemantapan pengendalian pembangunan daerah melalui Implementasi Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP	Perwujudan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Pemantapan kehidupan demokrasi yang sehat	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, dan Berkarakter	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang.	Pembangunan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri.
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila		Penguatan karakter dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Perwujudan kerukunan antar etnis, agama dan golongan	
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial.	Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial.	
Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat		Penguatan karakter dan jati diri bangsa, kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat	Pelestarian kebudayaan lokal dan revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Pemajuan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi kebudayaan lokal	
	6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata	Pengembangan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal)	Pengembangan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal)	Perwujudan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya kawasan pertumbuhan (Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal)



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung	Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung	Pemerataan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Kawasan Cekungan Bandung
		Pengembangan kawasan transit/ <i>TOD (Transit Oriented Development)</i>	Pembangunan dan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan dan/atau rel yang terintegrasi, untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas orang maupun barang antar pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Bandung serta dari/ke wilayah di luar Kabupaten Bandung	Pemantapan Pembangunan dan perluasan cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis jalan dan/atau rel yang terintegrasi, melalui Pengembangan tatanan transportasi yang cerdas (<i>Intelligent Transport System/ ITS</i>), untuk peningkatan konektivitas dan mobilitas orang maupun barang antar pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Bandung serta dari/ke wilayah di luar Kabupaten Bandung	Perwujudan sistem transportasi kabupaten bandung yang berkelanjutan (<i>sustainable transportation</i>)
		Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten	Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten	Perwujudan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten
		Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah	Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah	Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah	Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah
		Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan dan perluasan akses internet	Perluasan jaringan broadband hingga menjangkau pelosok	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
		Pengembangan Kewilayahan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal	Percepatan Pusat-Pusat Pertumbuhan berbasis Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal	Percepatan Pusat-Pusat Pertumbuhan berbasis Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal	Perwujudan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Pengelolaan sumberdaya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi	Pengelolaan sumberdaya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi	Pengelolaan sumberdaya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi	perwujudan kawasan strategis pertanian
		Pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kawasan strategis pertanian dan sentra produksi pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kawasan strategis pertanian dan sentra produksi pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Pengembangan kawasan strategis produksi pertanian dan sentra produksi pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi	Penguatan kemandirian pangan
	7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Akselerasi dan perluasan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten bandung	Akselerasi pembangunan dan pengelolaan jalan kendaraan tidak bermotor dan jalan kendaraan bermotor beserta bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan, untuk percepatan pencapaian jalan yang berkeselamatan	Pemantapan pembangunan dan pengelolaan jalan kendaraan tidak bermotor dan jalan kendaraan bermotor beserta bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan, untuk percepatan pencapaian jalan yang berkeselamatan, serta pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan melalui pengembangan tatanan transportasi cerdas (<i>Intelligent Transport System/ ITS</i>)	Perwujudan jalan di wilayah kabupaten bandung yang berkeselamatan, lancar, aman, nyaman menghubungkan antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten bandung
		Pengembangan dan Penerapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Penerapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Integrasi seluruh angkutan umum ke dalam transportasi umum massal	Perwujudan seluruh angkutan umum ke dalam transportasi umum massal
		Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	Peningkatan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	Pemerataan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat	perwujudan akses sanitasi aman secara menyeluruh
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh	Percepatan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh	Pemantapan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh	Perwujudan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum	Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum	Pemantapan infrastruktur air baku dan akses air minum layak	Pemerataan akses air minum yang aman dan infrastruktur air baku
		Peningkatan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi	Pemantapan Pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi	Optimalisasi Pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi	Perwujudan Pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi
		Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan <i>circular economy</i> .	Akselerasi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan <i>circular economy</i> .	Pemantapan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan <i>circular economy</i> .	Perwujudan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan <i>circular economy</i> .
		Percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Keberlanjutan 0 % praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Keberlanjutan 0 % praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Keberlanjutan 0 % praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
	8. Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Pengembangan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal	Percepatan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal	Percepatan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal	Perwujudan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi	Percepatan Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi	Pemantapan Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi	Perwujudan Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi
		Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang yang berkelanjutan
		Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik	Percepatan pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik	Pemantapan pengelolaan limbah non-domestik	Perwujudan pengelolaan limbah non-domestik sesuai standar baku mutu
		Pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif	Akselerasi pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif	Akselerasi pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif	perwujudan pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif



		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	TAHAP I (2025-2029) PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI PEMBANGUNAN	TAHAP III (2035-2039) PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN KABUPATEN BANDUNG
		Pengembangan ketahanan bencana alam dan non alam	Peningkatan ketahanan bencana alam dan non alam	Pemantapan ketahanan bencana alam dan non alam	Pemerataan ketahanan bencana alam dan non alam
		Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal	Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal	Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal	Perwujudan RTH publik dan privat yang ideal
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, serta pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung	Pemajuan karakter dan jati diri bangsa dalam pembangunan yang memperhatikan pengarusutamaan gender yang inklusif, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro	Peningkatan pengelolaan wilayah berbasis DAS mikro	Pemantapan pengelolaan berbasis DAS mikro	Perwujudan pembangunan berkelanjutan berbasis DAS mikro

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2024



5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 merupakan gambaran pembangunan untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian hasil yang diharapkan. Selain itu sasaran pokok akan memberikan gambaran terwujudnya Visi Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan. Sasaran pokok Kabupaten Bandung merupakan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, arah kebijakan transformasi, serta indikator utama pembangunan berupa indikator hasil penyelarasan.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada RPJPN dan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Barat, maka arah pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 adalah 1) Kesehatan Untuk Semua; 2) Pendidikan Berkualitas yang Merata; 3) Peningkatan Ketahanan sosial masyarakat; 4) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah; 5) Penerapan ekonomi hijau; 6) Transformasi digital; 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; 8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di setiap wilayah pengembangan; 9) Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif; 10) Peningkatan akuntabilitas, keamanan dan ketertiban umum; 11) Pengendalian stabilitas ekonomi daerah; 12) Peningkatan kerjasama regional dan nasional; 13) Pengendalian Stabilitas kerukunan umat beragama; 14) Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender; 15) Lingkungan Hidup Berkualitas; 16) Peningkatan ketahanan pangan daerah; dan 17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tabel 5.2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

RPJPD PROVINSI 2025-2045			RPJPD KAB BANDUNG 2025-2045		
Transformasi		Arah Pembangunan	Transformasi		Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	IE.1	Pelayanan kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	IE.1	Kesehatan untuk semua
	IE.2	Pendidikan berkualitas yang merata		IE.2	Pendidikan Berkualitas yang merata
	IE.3	Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		IE.3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	IE.4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah.	Transformasi Ekonomi	IE.4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah
	IE.5	Penerapan ekonomi hijau		IE.5	Penerapan ekonomi hijau
	IE.6	Transformasi digital		IE.6	Transformasi digital
	IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Transformasi Tata Kelola	IE.8	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Transformasi Tata Kelola	IE.8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	IE.9	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif		IE.9	IE.9 Tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE.10	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE.10	IE.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
	IE.11	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		IE.11	IE.11 Pengendalian Stabilitas Ekonomi Daerah
	IE.12	Peningkatan kerja sama regional maupun internasional		IE.12	IE.12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan



RPJPD PROVINSI 2025-2045			RPJPD KAB BANDUNG 2025-2045		
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE.13	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE.13	Pengendalian Stabilitas Kerukunan Umat Beragama
	IE.14	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		IE.14	Ketahanan Keluarga, Kualitas Pemuda, Dan Kesetaraan Gender
	IE.15	Lingkungan Hidup Berkualitas		IE.15	Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas
	IE.16	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		IE.16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
	IE.17	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		IE.17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Adapun penjelasan dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. **Kesehatan Untuk Semua** merupakan suatu upaya atau inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki mutu dan aksesibilitas layanan kesehatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Peningkatan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
2. **Pendidikan Berkualitas yang Merata** merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Bandung tanpa memandang latarbelakang sosial, ekonomi atau geografis memiliki akses yang sama pada pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut melalui arah kebijakan, antara lain: Pemerataan wajib belajar 13 tahun. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana. Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah terluar dan perbatasan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang inklusif. Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional.
3. **Perlindungan Sosial yang Adaptif** merupakan kemampuan masyarakat untuk menanggulangi dan pulih dari berbagai tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat, serta memastikan kesejahteraan sosial yang merata. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja. Pengembangan pusat kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan terpadu. Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan tenaga kerja non bersertifikasi. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan



ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan. 6. Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola).

4. **Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah** melalui transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal dengan mendorong pengembangan industri lokal, proses bisnis UMKM dan implementasi riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal. Transisi Industri kecil, menengah. Berbasis industri hijau. Pengembangan sentra industri strategis. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Penataan dan restrukturisasi BUMD. Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal.
5. **Penerapan Ekonomi Hijau** berupaya mengurangi risiko lingkungan hidup dan bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dengan melibatkan kebijakan dan praktik yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta perlindungan dan restorasi ekosistem. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui arah kebijakan Transisi Industri kecil, menengah berbasis Industri Hijau dan Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan *circular economy*.
6. **Transformasi Digital** berupaya menciptakan budaya digital dan memenuhi kebutuhan jaman dengan melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kegiatan, yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam peranan pemerintahan beroperasi. transformasi digital dapat membawa perubahan signifikan yang berdampak positif pada efisiensi, inovasi, dan kepuasan masyarakat, serta mengarahkan pemerintahan Kabupaten Bandung menuju kesuksesan di era digital. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui arah kebijakan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan, Optimalisasi Tata Kelola Satu Data; dan Penguatan Kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah.
7. **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** yaitu, mewujudkan keterkaitan industri kecil dan menengah dengan menyelaraskan tahapan produksi dan distribusi secara efektif dan respons pasar yang lebih cepat yang didukung dengan berfungsinya infrastruktur dan logistik yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian. Pengembangan Sistem logistik produk strategis. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan. Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat.
8. **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** di setiap wilayah pengembangan melalui perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan. Akses terhadap layanan sosial ekonomi dan pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diupayakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan perikanan. Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan. Hilirisasi produk pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui



Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan. Penataan sumber daya pariwisata berbasis budaya dan alam. Pemenuhan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam. Pengembangan sentra industri strategis. Mengintegrasikan perencanaan tata guna lahan dengan infrastruktur sarana-prasarana dan layanan transportasi, melalui pengembangan kawasan transit/ TOD (*Transit Oriented Development*). Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan kawasan transit/ TOD (*Transit Oriented Development*). Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten. Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal. Pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi.

9. **Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif** dengan mewujudkan tata kelola akuntabel, transparan dan efektif, serta responsif terhadap perubahan untuk menghadapi tantangan dimasa depan dengan menciptakan iklim inovasi yang berintegritas. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. Optimalisasi tata kelola satu data. Penguatan Kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah. Pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif.
10. **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial** melalui perwujudan keterbukaan informasi melalui implementasi sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat, menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman, bahaya dan gangguan baik yang bersifat fisik, digital maupun sosial. Dengan harmonisasi ketertiban umum. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Peningkatan komitmen multipihak dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP.
11. **Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan** yaitu, memperkuat kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan Provinsi, Swasta, Akademis dan Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bersama. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Upaya untuk memperkuat kolaborasi kerjasama yaitu, Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, Peningkatan komitmen multipihak dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa, Peningkatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah; dan Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian.
12. **Pengendalian stabilitas ekonomi daerah** merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam memastikan bahwa perekonomian daerah tetap stabil, berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai tantangan baik lokal maupun regional. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan



penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pengendalian Inflasi dan Peningkatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah.

13. **Pengendalian stabilitas kerukunan umat beragama** menciptakan lingkungan yang damai, toleran dan kondusif bagi masyarakat dengan menjaga hubungan harmonis antar pemeluk umat beragama, serta memastikan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut melalui Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
14. **Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender** mampu mempertahankan fungsi dan kestabilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan sosial, meningkatkan potensi dan kemampuan pemuda dari sisi individu yang produktif, inovatif, serta berkontribusi positif. Selanjutnya laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam semua bidang kehidupan di Kabupaten Bandung. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.
15. **Lingkungan Hidup Berkualitas** mewujudkan upaya yang berfokus pada perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam serta pengurangan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dengan pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengendalian polusi, serta adanya partisipasi masyarakat dan kemitraan. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Peningkatan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan *circular economy*. Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Pengembangan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal. Pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik. Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
16. **Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan** memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup, aman, dan berkelanjutan terhadap makanan dan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum.
17. **Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim** memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko, mempersiapkan masyarakat, dan mengelola dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perubahan iklim. Upaya untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut diantaranya yaitu: Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi. Pengembangan ketahanan bencana alam dan non alam. Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.



5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu arah kebijakan transformasi RPJPD Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang menyesuaikan dengan karakteristik dan gambaran pencapaian Visi Kabupaten Bandung di tahun 2045. Arah kebijakan Transformasi Kabupaten Bandung secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi Sosial	Kesehatan Untuk Semua	<p>Transformasi Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan wajib belajar 13 tahun; 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana; 3. Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 5. Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan; 6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif; dan 7. Pengembangan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	<p>Transformasi Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja; 2. Pengembangan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu; 3. Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan tenaga kerja Non bersertifikasi; 4. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 5. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; dan 6. Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola)
	Peningkatan Ketahanan sosial masyarakat	<p>Transformasi Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan; 2. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 4. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. <p>Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, dan Berkarakter</p>



Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.
Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah.	Transformasi Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan, sentra industri berbasis potensi lokal; 2. Transisi industri kecil, menengah berbasis industri hijau; 3. Pengembangan sentra industri strategis; 4. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 5. Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif; 6. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung; 7. Penataan dan restrukturisasi BUMD; dan 8. Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Transformasi Ekonomi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian; 2. Pengembangan Sistem logistik produk strategis; 3. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan; dan 4. Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan Perikanan; 2. Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan; 3. Hilirisasi Produk Pertanian; 4. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; 5. Penataan sumber daya pariwisata berbasis budaya dan Alam; 6. Pemenuhan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam; 7. Pengembangan sentra industri strategis; 8. Mengintegrasikan perencanaan tata guna lahan dengan infrastruktur sarana-prasarana dan layanan transportasi, melalui pengembangan kawasan transit/ TOD (<i>Transit Oriented Development</i>); 9. Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten Bandung; 10. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 11. Pengembangan kawasan transit/ TOD (<i>Transit Oriented Development</i>); 12. Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten; 13. Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah; 14. Pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan potensi ekonomi, kawasan strategis, dan kawasan terluar tertinggal; dan 15. Pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi.
Transformasi Tata Kelola	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;



Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan; 3. Optimalisasi Tata Kelola Satu Data; 4. Penguatan Kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah; dan 5. Pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif <p>Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah: Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP.</p>
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<p>Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 2. Peningkatan komitmen multipihak dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. 4. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, dan Peningkatan kapabilitas APIP.
	Pengendalian Stabilitas Ekonomi Daerah	<p>Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 2. Pengendalian Inflasi; dan 3. Peningkatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pengendalian Stabilitas kerukunan umat beragama	<p>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan</p>
	Lingkungan Hidup Berkualitas	<p>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi; 2. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan <i>circular economy</i>; 3. Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; 4. Percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; 5. Pengembangan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal; 6. Pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif; 7. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 8. Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik; 9. Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal; dan 10. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro



Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi
	Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga; 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia; 3. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; dan 4. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi; 2. Pengembangan ketahanan bencana alam dan non alam; 3. Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim; dan 4. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

Sumber: Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk memantau kinerja, mengidentifikasi keberhasilan, serta menentukan arah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kondisi lingkungan. IUP Kabupaten Bandung mengacu pada indikator utama pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD dan indikator yang termuat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat 2045 dengan masih mempertimbangkan penyesuaian terhadap Kabupaten/Kota. IUP dan target 2045 dapat mengakomodir keberhasilan pembangunan dan sasaran pokok yang akan dinilai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.4** berikut:



Tabel 5.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bandung dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD PROVINSI		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KAB BANDUNG	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	2040-2045 (Target 2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL		
IE1	Pelayanan kesehatan prima untuk semua			IE1 Kesehatan Untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,30	79,26
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151**	15	Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun (jumlah)	48	6
b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0**	5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,57	6,73
	Penanganan Tuberkulosis:			Penanganan Tuberkulosis:		
3	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	95**	95**	a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	91	98
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	88**	98**	b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	91	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52**	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,59	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata		
5	Hasil pembelajaran:			Hasil pembelajaran:		
a.	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			-	-	-
	i) Literasi Membaca	25,93-33,33**	71,81 – 73,81	Kemampuan Literasi jenjang SD	66,89	71,22
				Kemampuan Literasi jenjang SMP	66,83	71,22
	ii) Numerasi	7,41-14,81**	65,96-66,67**	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	50,02	63,68
				Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	46,48	63,87
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			-	-	-
	i) Literasi Membaca	45,30-47,30**	71,842-73,42		-	-
	ii) Numerasi	34,83-36,83**	63,01-65,01		-	-



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD PROVINSI		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KAB BANDUNG	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	2040-2045 (Target 2045)
b.	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52-9,53	9,64-14,50	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,3	11,5
c.	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,76	14,07
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 – 14,50	-	-	-
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19**	75,00	-	-	-
IE3 Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju				IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85-6,46	0,09 - 0,59**	Tingkat Kemiskinan (%)	5,61-6,2	0,09-0,57*
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	55,24-59,64	84,28-91,00
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas (%)	38,84-39,11	41,59-44,83
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI		
IE4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah			IE4 Inpek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	52,66	51,72
12	Pengembangan Pariwisata:			Pengembangan Pariwisata:		
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,15	5,36**	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,51	2,68
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	536,6	1.341,50	Jumlah kunjungan wisatawan (ribu orang)	7.747,849-8.416,524	10.443,040-13.392,029
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)**	1,84	2,06	Rasio pelaku Ekonomi Kreatif terhadap Total Pelaku Usaha (%)	2,44-2,46	2,11-2,63
14	Produktivitas UMKM, Koperasi			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:		
a.	ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14	Proporsi Jumlah Usaha kuliner terhadap jumlah total pelaku usaha (%)	54,18-58,91	55,01-68,53
b.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,65	9,96*
c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	12,5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,35-0,44	0,17-0,53
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42-6,99	5,16-6,14**	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,71-6,22*	3,71-4,61*



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD PROVINSI		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KAB BANDUNG	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	2040-2045 (Target 2045)
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,75-67,82	75,90-79,34
17	Tingkat Penguasaan Iptek:			Tingkat Penguasaan Iptek:		
a.	Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	Indeks Inovasi Daerah	62,42	93,61
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			IE5 Penerapan ekonomi hijau		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Indikator Proxy		
a.	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (pilar ekonomi)	48,59	64,25
b.	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40	67,91	-	-	-
IE6	Transformasi Digital			IE6 Transformasi Digital		
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,4	8	-	-	-
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global			IE7 Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global		
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5,00	-	-	-
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,72**	21,07**	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,33*	20,03*
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	44,8	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7-8	4,85-6,23
IE8	Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan			IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:		
-	-	-	-	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)	5,83	5,86
a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	52,40*	100
b.	Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51	Persentase Desa Mandiri (%)	34,44	57,04
c.	Kemantapan jalan(%)*	86,17	99	-	-	-
d.	Moda Share Angkutan Umum (%)*	13	45	-	-	-
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Peningkatan Pemerintah Yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif			IE9 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, Dan Inovatif		
24	Indeks Reformasi Hukum*	90,7	100	-	-	-
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,51	5
26	Indeks Pelayanan Publik	4,60	5,00	-	-	-
27	Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	-	-	-



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD PROVINSI		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KAB BANDUNG	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	2040-2045 (Target 2045)
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH MAKRO				SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA		
IE10	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas			IE10	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	
28	Indeks Kepatuhan Daerah*	84,08	94,08		-	-
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78 (2020)	69,16	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	86	100
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi		-	-
IE11	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah			IE11	Pengendalian Stabilitas Ekonomi Daerah	
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58**	4,6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,35-0,46	0,53-1,00
32	Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,8**	1,1 – 3,2	Tingkat Inflasi (%)	1,96-2,31	1,80-2,75
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:		
a.	Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8	Rasio sektor Jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB (%)	0,69-0,72	0,70-0,73
34	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03		-	-
IE12	Peningkatan Kerja sama Internasional dan Ketahanan Daerah			IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	
35	Efektivitas Kerja sama Internasional	90,91 (2023)	99,71		-	-
36	Indeks Ketahanan Nasional Jawa Barat	3,022	4,5		-	-
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		
IE13	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama			IE13	Pengendalian Stabilitas kerukunan umat beragama	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70-56,73**	65,99-66,28**	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,89-56,17	64,82-68,47
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	Jumlah potensi konflik kerukunan umat beragama	109	45
IE14	Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda dan Kesetaraan Gender			IE14	Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 – 70,95	75,81 – 76,05	Indeks Pembangunan Keluarga	64	70-80
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459-0,458**	0,230 - 0,215**	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,35	81,29
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,01	96,09
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas	
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741		-	-
42	Kualitas Lingkungan Hidup:			Kualitas Lingkungan Hidup:		



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD PROVINSI		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD KAB BANDUNG	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	2040-2045 (Target 2045)
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	64,06**	72,08**	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,73	68,67
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49**	85,00	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	23,02	94,52
				Persentase akses layak terhadap sanitasi	92,3	97,7
	Pengelolaan Sampah:			Pengelolaan Sampah:		
c.	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11**	90,00	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	87,16
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	48**	100	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	44,51	100
IE16	Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi			IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan:			-	-	-
a.	Ketahanan Energi			-	-	-
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.404	2.670	-	-	-
	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165	-	-	-
b.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,58	1,39	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5,43*	0,38*
				Indeks ketahanan pangan	83,46-86,72	86,35-90,39
c.	Ketahanan Air:			Ketahanan Air:		
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4,93	63,12	- Kapasitas Air Baku m3/detik)**	9,57	21,55
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	21,26*	100
IE17	Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim			IE17 Resensi terhadap Bencana Perubahan Iklim		
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	109,18**	92,98-79,08	Indeks Risiko Bencana (IRB)	132	100
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%):			Penurunan emisi GRK (%):		
a.	a. Kumulatif	2,66	31,65	a) Kumulatif (Ton CO2eq)	456.335,50*	5.284.072,69*
b.	b. Tahunan	9,27	70,08	b) Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	2,50*	6,54*

Keterangan

Sumber: Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, dan Indikator turunan Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)



Tabel 5.5 Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas	Pendidikan Berkualitas Merata yang	1. Pemerataan wajib belajar 13 tahun	Indeks Pendidikan	69.31-74.07	87.16-93.11	Terwujudnya Pendidikan Yang Berkualitas
		2. Peningkatan kurikulum wajib belajar 13 tahun berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Kemampuan Literasi jenjang SD	66,89	71,22	
		3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana	Kemampuan Literasi jenjang SMP	66,83	71,22	
		4. Pemerataan wajib belajar pendidikan menengah inklusif melalui kolaborasi antar pemerintah dan multipihak	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	50,02	63,68	
		5. Peningkatan pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi lintas sektor.	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	46,48	63,87	
		6. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,3	11,5	
		7. Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76	14,07	
		8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif				
		9. Pengembangan Kegiatan Belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional				
		10. Peningkatan Budaya Literasi				
Perindungan Sosial yang Adaktif	1. Pengembangan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu; 2. Penciptaan Lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan tenaga kerja Non bersertifikasi; 3. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; 4. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,71-6,22*	3,71-4,61*	Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat yang unggul, berdaya saing dan inovatif	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.75-67.82	75.90-79.34		
		Tingkat Kemiskinan (%)	5,61-6,2	0.09-0,57*		



Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		<p>memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan; dan</p> <p>5. Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan tata kelola)</p>	<p>Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)</p>	55,24-59,64	84,28-91,00	
			<p>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas (%)</p>	38,84-39,11	55,23-58,42	
	Kesehatan Untuk Semua	<p>1. Peningkatan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>2. Pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan;</p> <p>3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; dan</p> <p>5. "Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</p>	<p>Indeks Kesehatan</p>	84.29-85.89	90.29-92.29	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat
			<p>Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)</p>	75,30	79,26	
			<p>Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun (jumlah)</p>	48	6	
			<p>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)</p>	25,57	6,73	
			<p>Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)</p>	91	98	
			<p>Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)</p>	91	98	



Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,59	100	
2 Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal	Penerapan Ekonomi Hijau Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal; 2. Transisi Industri kecil, menengah berbasis Industri Hijau; 3. Pengembangan sentra industri strategis; 4. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 5. Penerapan riset dan inovasi untuk menciptakan perekonomian daerah yang inklusif; 6. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Bandung; 7. Penataan dan restrukturisasi BUMD; dan 8. Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal 	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	48,59	64,25	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan
			Indeks Daya Saing Daerah	3.37-3.42	3.52-3.55	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19.30	19.33	
			Proporsi Jumlah Usaha kuliner terhadap jumlah total pelaku usaha (%)	54,18-58,91	55,01-68,53	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,35-0,44	0,17-0,53	
			Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.75-7.40	6.39-6.76	
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan kluster pertanian dan Perikanan; 2. Pengembangan investasi Industri berbasis sektor pertanian atau perikanan; 3. Hilirisasi Produk Pertanian; 4. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui Optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; 5. Penataan Sumber daya Pariwisata berbasis budaya dan Alam; 6. Pemenuhan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam; dan 7. Pengembangan sentra industri strategis; 	Jumlah Kunjungan wisatawan (Ribu Orang)	7,747.849-8,416.524	10,443.040-13,392.029	Terwujudnya klaster ekonomi terintegrasi
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2.51	2.68	



Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
		8. Pengembangan, Pembangunan Industri kecil menengah dan Sentra Industri;	Rasio pelaku Ekonomi Kreatif terhadap Total Pelaku Usaha (%)	2,43-2,46	2,11-2,63	
		9. Peningkatan Sarana Perdagangan dan Sistem Logistik Produk Strategi Transisi Industri Kecil, Menengah Berbasis Ramah Lingkungan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,65	9.96	
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Halal serta Pariwisata Halal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	52.66	51.72	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Pengembangan dan penguatan kerja sama antar petani dan pelaku usaha pertanian; 2. Pengembangan Sistem logistik produk strategis 3. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan; dan 4. Peningkatan dan Pemerataan aksesibilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat.	Rasio PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11.90-13.24	11.79-12.59	Terwujudnya sistem logistik berkelanjutan
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7-8	4.85-6.23		
3 Transformasi tata kelola	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif	Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	83,78	89,34-91,60	Terwujudnya Pemerintahan yang adaptif, kolaboratif dan transformatif
		1. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan; dan 2. Optimalisasi Tata Kelola Satu Data	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,51	4,12 - 4,57	Terwujudnya Tata Kelola Big Data dan Transformasi Digital
		1. Penguatan Kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah; dan 2. Pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif.	Indeks Inovasi Daerah	62,42	93,61	Terwujudnya ekosistem riset dan inovasi Daerah



Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
4 Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat Peningkatan komitmen multipihak dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa; dan Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi 	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	86	100	Terwujudnya Lingkungan yang aman, tertib dan agamis
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP	SPIP Terintegrasi	3,188	4	Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Akuntabel
	Pengendalian Stabilitas Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pengembangan pembiayaan pembangunan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; Pengendalian Inflasi; dan Peningkatan kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah 	Tingkat Inflasi Rasio pajak daerah terhadap PDRB (dalam %) Rasio sektor Jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB (%)	1.96-2.31 0.35-0.46 0,69-0,72	1.80-2.75 0.53-1.00 0,70-0,73	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5 Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, dan Berkarakter	Stabilitas kerukunan umat beragama	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Jumlah potensi konflik kerukunan umat beragama	109	45	Terwujudnya kerukunan umat beragama
	Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Memenuhi akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	Indeks Pembangunan Keluarga	64	80	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender
		Memenuhi hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,35	81,29	



Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	
				Baseline 2025	Target 2045		
	Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; da Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat 	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,01	96,09		
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,89-56,17	57,57-58,44	Meningkatnya nilai-nilai budaya masyarakat	
6 Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> mengintegrasikan perencanaan tata guna lahan dengan infrastruktur sarana-prasarana dan layanan transportasi, melalui pengembangan kawasan transit/ TOD (<i>Transit Oriented Development</i>); Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten bandung; Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; Pengembangan kawasan transit/ TOD (<i>Transit Oriented Development</i>); dan Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan strategis kabupaten 	Indeks Pengembangan Wilayah	59,69	70,00	Terwujudnya Keterpaduan Rencana Ruang dan Rencana Pembangunan	
			<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kewilayahan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, Kawasan Strategis, dan Kawasan Terluar Tertinggal; dan Pengelolaan sumber daya kawasan strategis pertanian yang terintegrasi 	Persentase Desa Mandiri	34,44	57,04	Terwujudnya pembangunan Berbasis Desa
				Indeks Ketahanan Pangan	83,46-86,72	86,35-90,39	Terwujudnya ketahanan pangan berbasis potensi lokal
				Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	5,43	0,38	

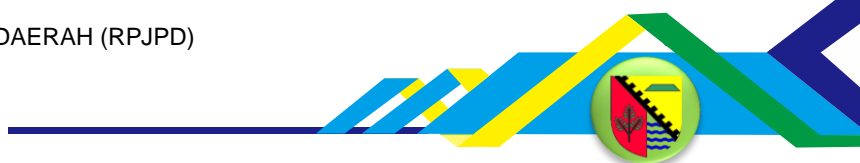


Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
7 Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah, untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat kegiatan di wilayah kabupaten Bandung;	Indeks Kualitas Infrastruktur	68,97	72,44	Terwujudnya layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas
		2. Pengembangan dan Penerapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal;				
		3. Peningkatan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi;				
		1. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, melalui pengembangan circular economy;	Persentase akses aman terhadap sanitasi	1,47	5,07	
	2. Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; dan Percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Persentase akses sanitasi layak	92,3	97,7		
	1. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; dan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	52,40	100		
2. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga melalui penyediaan hunian vertikal, dan penataan kawasan kumuh						
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum;	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	21,26	100		
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	9,57	21,55	
8	Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Pengembangan konservasi lahan berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal;	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,73	68,77	Terwujudnya lingkungan



Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
				Baseline 2025	Target 2045	
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		2. Pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif; 3. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik; 5. Pemenuhan RTH publik dan privat yang ideal; dan 6. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	87.16	berkualitas dan Berkelanjutan
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	44,51	100	
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi	Penurunan Emisi GRK (Ton Co2eq)	456.335,50	5.366.342,7	
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Pengembangan ketahanan bencana alam dan non alam 2. Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim; dan 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,64	
			Indeks Bencana Resiko	132	100	

Sumber: Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024



Tabel 5.6 Sasaran Pokok Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pendidikan Yang Berkualitas	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Indeks Pendidikan	69.31-74.07	87.16-93.11
			Kemampuan Literasi jenjang SD	66,89	71,22
			Kemampuan Literasi jenjang SMP	66,83	71,22
			Kemampuan Numerasi Jenjang SD	50,02	63,68
			Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	46,48	63,87
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,30	11,50
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76	14,07
2	Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat yang unggul, berdaya saing dan inovatif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.15-6.70	3.82-4.74
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.75-67.82	75.90-79.34
			Angka Kemiskinan	5,6-6,19	0.74-1,22
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	55,24-59,64	84,28-91,00
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas (%)	38,84-39,11	55,23-58,42
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat	Kesehatan Untuk Semua	Indeks Kesehatan	84.29-85.89	90.29-92.29
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,30	79,26
			Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun (jumlah)	48	6
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,57	6,73
			a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	91	98
			b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	91	98
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,59	100
4	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penerapan Ekonomi Hijau	<i>green economy index</i> "pilar ekonomi"	48,59	64,25
		Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3.37-3.42	3.52-3.55
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19.33	20,03
			Proporsi Jumlah Usaha kuliner terhadap jumlah total pelaku usaha (%)	54,18-58,91	55,01-68,53
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,35-0,44	0,17-0,53



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
5	Terwujudnya klaster ekonomi terintegrasi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.75-7.40	6.39-6.76
			Jumlah Kunjungan wisatawan (Ribuan Orang)	7,747.849-8,416.524	10,433.040-13,392.029
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,51	2,68
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	52.66	51.72
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,56	9,96
6	Terwujudnya sistem logistik berkelanjutan	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Rasio PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11.90-13.24	11.79-12.59
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7-8	4.85-6.23
7	Terwujudnya Pemerintahan yang adaptif, kolaboratif dan transformatif	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	67,09	89,32
8	Terwujudnya Tata Kelola Big Data dan Transformasi Digital	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,51	4,12 - 4,57
9	Terwujudnya ekosistem riset dan inovasi Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	62,42	93,61
10.	Terwujudnya Lingkungan yang aman, tertib dan agamis	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	86	100
11.	Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Akuntabel	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif	SPIP Terintegrasi	3,188	4
12	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Pengendalian Stabilitas Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	1.96-2.31	1.80-2.75
			Rasio pajak daerah terhadap PDRB	0.35-0.46	0.53-1.00
			Rasio sektor Jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB (%)	0,69-0,72	0,70-0,73
13.	Terwujudnya kerukunan umat beragama	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Jumlah potensi konflik kerukunan umat beragama	109	45
14.	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga	64	80
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,35	81,29
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,01	96,09
15.	Meningkatnya nilai-nilai budaya masyarakat	Ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55.89-56.17	64.82-68.47



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
16.	Terwujudnya Keterpaduan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di setiap wilayah pengembangan	Indeks Pengembangan Wilayah	59,69	70,00
17.	Terwujudnya pembangunan Berbasis Desa	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di setiap wilayah pengembangan	Persentase Desa Mandiri	34	57,04
18	Terwujudnya ketahanan pangan berbasis potensi lokal	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di setiap wilayah pengembangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,46-86,72	86,35-90,39
			Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	6,02	1,23
19.	Terwujudnya layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di setiap wilayah pengembangan	Indeks Kualitas Infrastruktur	68,97	72,44
			Persentase akses aman terhadap sanitasi	1,47	5,07
			Persentase akses sanitasi layak	92,3	97,7
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	59,41-61,67	100
			Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	21,26	100
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	9,57	21,55
20.	Terwujudnya lingkungan berkualitas dan Berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,73	68,77
			Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	87.16
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	44,51	100
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	"Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq)"	456.335,50*	5.284.072,69*
			Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,64
			Indeks Resiko Bencana	132	100

Sumber: Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2024



BAB 6 PENUTUP

6.1 PELAKSANAAN

Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 merupakan sebuah panduan strategis yang ditujukan untuk mengarahkan pembangunan dan pertumbuhan wilayah ini menuju visi yang membanggakan. Visi "Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan" menjadi pilar utama yang membimbing setiap langkah yang diambil dalam upaya mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Kabupaten Bandung dengan keragaman sumber daya alam, potensi ekonomi yang kuat, serta keragaman budaya yang kaya, memiliki kesempatan besar untuk berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia. Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kami percaya bahwa tujuan-tujuan yang telah diuraikan dalam dokumen ini dapat tercapai.

Penyusunan perencanaan jangka panjang ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara emas pada tahun 2045. Dengan keselarasan visi ini, Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjadi bagian integral dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa.

Adapun beberapa poin penting yang dijadikan landasan dalam dokumen ini antara lain:

Pengembangan Infrastruktur: Melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh dan terintegrasi, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Menggalakkan inovasi, mendukung kewirausahaan, dan memperkuat sektor ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi disparitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemeliharaan Lingkungan dan Kearifan Lokal: Memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, menjaga kekayaan alam dan budaya sebagai aset berharga yang harus dilestarikan untuk generasi masa depan.

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: Memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

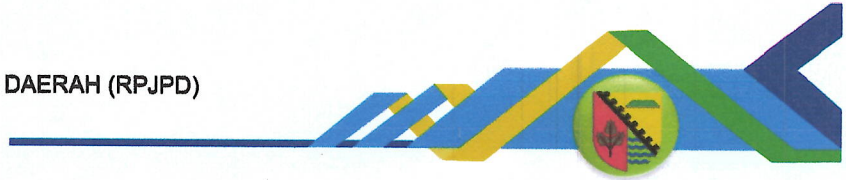
Dalam perjalanan menuju visi yang telah ditetapkan memerlukan komitmen yang kuat, kerjasama yang erat antara semua pihak, serta konsistensi dalam implementasi rencana-rencana yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk bersatu padu, berperan aktif, dan mengambil bagian dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan pada tahun 2045. Dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil merupakan bagian penting dari perjalanan yang panjang, mari kita bersama-sama mewujudkan impian bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Terima kasih atas kontribusi, dukungan, dan kerja sama dari semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang ini.

"Bersatu, Berinovasi, Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan"

6.2 PEMBIAYAAN

Untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan dapat diwujudkan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan efektif. Sumber pembiayaan tersebut bukan hanya bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, tetapi bersumber dari berbagai pembiayaan lainnya CSR yang melibatkan unsur swasta di dalamnya. Oleh karena itu dapat melakukan



pembiayaan pembangunan menurut apa yang telah direncanakan diperlukan peningkatan sumber-sumber dana dan menggunakannya secara lebih efisien.

Selain itu, untuk memberikan hasil optimal dalam pembiayaan pembangunan RPJPD, perlunya mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia di Kabupaten Bandung sebagai upaya pemberian dampak signifikan dalam implementasi pembangunan dimasa mendatang. Melalui optimalisasi potensi daerah dengan pendekatan dari bawah (*Bottom Up*) dapat menjadi pembeda dan memberikan peluang daerah (*Desa-Desa*) untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta elemen masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya yang berada di desa-desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Kabupaten Bandung yang “Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

6.3 PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RESIKO

Proses pelaksanaan manajemen risiko merupakan proses sistematis yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko untuk mengurangi atau mengelola dampak potensial dari risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi pemerintah daerah dengan tujuan bahwa, manajemen rasio data meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, serta dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Manajemen risiko memiliki manfaat dapat mengidentifikasi *Area of Improvement* untuk perbaikan pengendalian ke depannya.

Manajemen risiko digunakan untuk menunjang implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Bandung. Keberhasilan pembangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu aspek perencanaan, sehingga dengan adanya manajemen risiko dapat memberikan kendali atas keberlangsungan perencanaan yang baik dan efektif. Selain itu, pengendalian dapat berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025—2045.

Dalam melakukan manajemen risiko termuat dokumen sistem pengendalian intern mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah pada tingkat kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern juga mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dengan penyusunan tetap mengikuti 5 (lima) tahapan unsur SPIP yang terdiri atas, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.


BUPATI BANDUNG,
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

